

362.88

Sus

u e1



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KORBAN

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

AGNA SUSILA

PEMBIMBING;

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2001

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN KORBAN

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:
AGNA SUSILA

PEMBIMBING;
PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN KORBAN**

Disusun Oleh :

AGNA SUSILA
NIM. B. 102940051

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130 350 519

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat Karunia-Nya, tesis berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban*" ini dapat diselesaikan.

Substansi dari tulisan ini adalah membahas soal perhatian Hukum Pidana terhadap masalah perlindungan korban, dilihat dari aspek Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) khususnya kebijakan Pembuatan Undang-Undang (Legislatif), Pelaksanaan Undang-Undang (Aplikatif) maupun kebijakan yang seyogyanya/ sebaiknya dilakukan (prospektif), berdasarkan kegiatan teoritik maupun implementatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian Hukum Pidana untuk melindungi korban memang ada, tetapi tampaknya belum teraplikasi secara konkrit.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada Pembimbing kami Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH., yang dengan penuh kesabaran berkenan membimbing kami dalam menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.

Ungkapan yang sama kepada beliau juga kami haturkan dalam kapasitasnya selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi kami.

Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eko Budiharjo, MSc., selaku Rektor Universitas Dipenogoro yang telah memberikan rekomendasi perpanjangan waktu.
2. Bapak Prof. Dr. IS Soesanto, SH., yang telah memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnya kepada kami, terutama sumbangan berbagai literatur yang kami butuhkan untuk menyusun buku ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ronny Hannitijo Soemitro, SH., yang berkat mata kuliah serta buku beliau dapat membantu dalam pembuatan tesis ini.
4. Semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang telah membantu kami baik berupa moril maupun materiil.

Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

ABSTRAK

Tiga persoalan pokok Hukum Pidana yang telah mendapat perhatian pengamat/ ahli meliputi tiga hal, yaitu Perbuatan, Pertanggungjawaban pidana, dan Pidananya sendiri. Kajian terhadap tiga hal tersebut bahkan menjadi bahasan intensif dalam Kongres PBB yang membahas pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana. Sementara masalah korban tidak pidana yang sesungguhnya memiliki korelasi signifikan terhadap kejahatan maupun pelakunya, belum begitu banyak mendapat perhatian.

Tidak adil rasanya membicarakan substansi Hukum Pidana tanpa memperhatikan kedudukan korban khususnya di dalam menyusun kebijakan Pembuatan Undang-Undang yang pada umumnya menjadi pedoman utama dalam upaya penegakan supremasi hukum.

Tulisan ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui apakah di dalam merumuskan kebijakan awal Hukum Pidana, yaitu kebijakan legislatif, para pembuat Undang-Undang telah atau belum memperhatikan aspek perlindungan korban ini. Mengingat korban sebenarnya menjadi pihak yang paling menderita akibat tindak pidana yang terjadi. Terhadap persoalan ini penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Hukum Pidana sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi bentuk perlindungan dimaksud belum konkrit, tidak langsung serta kurang tegas.

Para penegak hukum pun dalam menjalankan tugasnya, juga sebagian telah melakukan upaya perlindungan korban ini, tetapi tindakan yang dilakukan itu pada umumnya dilakukan karena pertimbangan moral, bukan karena pertimbangan yuridis (walaupun ada sebagian kecil karena pelaksanaan Undang-Undang).

Oleh karena itu demi membangun upaya penegakkan hukum yang berorientasi pada aspek perlindungan korban di masa mendatang perlu ada kajian teoritik maupun praktis terhadap kebijakan Hukum Pidana diberbagai negara (kajian komparatif), di samping melakukan pengamatan terhadap aspirasi para korban tindak pidana itu sendiri (kajian empirik).

Banyak negara telah memperhatikan sungguh-sungguh masalah perlindungan korban ini, sementara berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat korban tindak pidana ternyata sangat mengharapkan tindakan nyata dalam rangka melindungi nasib mereka. Tindakan nyata tersebut pada intinya berupa pemberian ganti rugi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Pembatasan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Teori	12
E. Metode Penelitian	22
BAB II PENDAHULUAN	
A. Perkembangan Studi Viktimologi	36
1. Pengertian Viktimologi	36
2. Perkembangan Studi	38
3. Ruang Lingkup Pengembangan Studi	45
4. Hubungan Korban Dengan Pelaku	51
5. Kedudukan Korban di Tengah Masyarakat	60
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Korban	71
1. Kebijakan Umum Perlindungan Korban	71
2. Kebijakan Perlindungan Korban dengan Hukum Pidana ...	78
3. Gambaran Perlindungan Korban di Beberapa Negara	88

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Legislatif Hukum Pidana Yang Berorientasi Pada Aspek Perlindungan Korban	95
B. Pelaksanaan Perlindungan Korban Oleh Penegak Hukum	315
C. Kebijakan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Mendatang	324

BAB IV KESIMPULAN ,

A. Kristalisasi Hasil Penelitian	345
C. Saran-Saran	348
DAFTAR PUSTAKA	352

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	J u d u l	Halaman
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Undang-Undang Produk Tahun 1980	97
2	Undang-Undang Produk Tahun 1981	98
3	Undang-Undang Produk Tahun 1982	98
4	Undang-Undang Produk Tahun 1983	100
5	Undang-Undang Produk Tahun 1984	100
6	Undang-Undang Produk Tahun 1985	101
7	Undang-Undang Produk Tahun 1986	102
8	Undang-Undang Produk Tahun 1987	102
9	Undang-Undang Produk Tahun 1988	103
10	Undang-Undang Produk Tahun 1989	103
11	Undang-Undang Produk Tahun 1990	104
12	Undang-Undang Produk Tahun 1991	105
13	Undang-Undang Produk Tahun 1992	105
14	Undang-Undang Produk Tahun 1993	107
15	Undang-Undang Produk Tahun 1994	107
16	Undang-Undang Produk Tahun 1995	108
17	Undang-Undang Produk Tahun 1996	109
18	Undang-Undang Produk Tahun 1997	109
19	Undang-Undang Produk Tahun 1998	111
20	Undang-Undang Produk Tahun 1999	112
21	Jumlah Undang-Undang Yang Dibuat Tahun 1980-1999	116
22	Klasifikasi Undang-Undang Yang Memberikan Perlindungan Korban	306
23	Bentuk Perlindungan Langsung Dalam Undang-Undang Produk Tahun 1980-1999	307
24	Rekapitulasi Undang-Undang yang Memberikan Perlindungan Korban Langsung	308
25	Klasifikasi Undang-Undang Pidana/ Non Pidana	311

1	2	3
26	Klasifikasi Undang-Undang Yang Tidak Memuat Ketentuan Pidana Menurut Isi	312
27	Jumlah Perkara di Pengadilan Magelang dan Kota Mungkid Tahun 1988-2000	315
28	Angka Pelanggaran Terhadap Delik KUHP/ Non KUHP	317
29	Bentuk Tindak Pidana KUHP Yang Dilanggar	318
30	Bentuk Tindak Pidana di Luar KUHP Yang Dilanggar	319
31	Bentuk Upaya Penegak Hukum Dalam Membantu Korban	320
32	Persepsi Penegak Hukum Terhadap Fungsi Tugas	321
33	Pernah/ Tidaknya Penegak Hukum Membantu Korban	322
34	Bantuan Hukum Yang Dilakukan Untuk Melindungi Korban	322
35	Jawaban Korban Jika Diberi Ganti Rugi	333
36	Alasan Korban Yang Menolak Ganti Rugi	334
37	Pihak-Pihak Yang Bertanggungjawab Membayar Ganti Rugi Menurut Korban	339
38	Alasan Setuju Yang Membayar Ganti Rugi Adalah Pelaku	339
39	Prosedur Pembayaran Ganti Rugi Oleh Pelaku Menurut Korban	340
40	Persepsi Korban Terhadap Ganti Rugi Yang Diberikan Pelaku	340
41	Persepsi Korban Bukan Kejahatan Harta Benda Terhadap Ganti Rugi Yang Diberikan Pelaku	342

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BPIH	= Biaya Perjalanan Ibadah Haji
CICB	= The Criminal Injuries Compensation Board
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
H	= Hakim
HAM	= Hak Azasi, Manusia
ICOPA	= International Conference on Prison Abolition
ILO	= International Labour Organization
ISC	= International Society of Criminology
J	= Jaksa
KKN	= Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LLAJR	= Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
NPWP	= Nomor Pokok Wajib Pajak
OECD	= Organization for Economic Cooperation and Development
P	= Polisi
PBB	= Persatuan Bangsa-Bangsa
UNICRI	= United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
SARA	= Suku Agama dan Ras
SIM	= Surat Izin Mengemudi
SPPT	= Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
STNK	= Surat Tanda Nomor Kendaraan
TPB	= Tindak Pidana Berat
TPR	= Tindak Pidana Ringan
UUTPE	= Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
VORPS	= Victim - Offender Reconciliation Programs

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia hidup pada hakikatnya selalu memiliki kepentingan, dan kepentingan itu akan terus meningkat sebanding dengan usia manusia itu sendiri¹.

Pada waktu lahir manusia hanya butuh air susu ibu, tetapi setelah dewasa, tidak bisa dihitung lagi berapa banyak kebutuhan yang diinginkan, baik yang berupa pangan, sandang maupun papan dan lain-lain. Yang jelas manusia akan terus berkepentingan dengan aneka bentuk kebutuhan sepanjang hidupnya. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa harus berhubungan dengan orang lain yang bisa disebut sebagai suatu “kelompok penghidupan”, baik hal itu berlangsung dengan sendirinya, seperti dalam komunitas keluarga, atau hubungan tersebut memang sengaja dilakukan seperti adanya tuntutan bekerja pada orang lain untuk mempertahankan hidup itu sendiri.²

Persoalannya adalah apabila terjadi apa yang disebut konflik kepentingan, yaitu bilamana dalam memenuhi kebutuhan itu merugikan orang lain. Maka akan terjadi sengketa yang tidak terelakkan, bahkan bisa

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, 1991), halaman : 1

² Nasroen, *Asal Mula Negara*, (Jakarta, 1986), halaman 32-33.0

mengakibatkan timbulnya korban di antara kedua belah pihak. Gambaran klasik di atas ternyata masih tetap relevan dengan kondisi sekarang. Bahkan jika melihat banyak kasus nasional yang terjadi di akhir abad 20, menunjukkan bahwa kebiadaban manusia atas manusia tampak tidak menurun, kendati isue internasional tentang hak asasi manusia tetap bergulir.

Sebagai contoh mutakhir adalah kasus bernuansa SARA yang terjadi di Maluku Utara. Diberitakan bahwa akibat pertikaian antar pertikaian antar dua kelompok agama, tercatat 1655 manusia tewas, 1219 luka berat, 2315 lari ke hutan, 45 gereja dan 51 masjid rusak. Sementara itu 97.342 orang mengungsi di berbagai tempat.³

Contoh di atas tentu saja baru mencerminkan satu dari sekian banyak peristiwa. Padahal di samping itu masih banyak kasus lain yang terjadi sebelumnya, seperti kasus 13-15 Mei 1998 berupa kerusuhan di Jakarta yang menandai awal runtuhnya rezim Orde Baru⁴, kasus Aceh, Irian, Banyuwangi, Situbondo dan lain-lain.

Sementara itu perlu diketengahkan pula tinjauan kasus-kasus tindak pidana konvensional yang hampir selalu terjadi setiap saat dan setiap wilayah/daerah.

³ Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 27 Januari 2000, halaman 1

⁴ Tim Relawan untuk Kemanusiaan, *Sujud di Hadapan Korban*, (Jakarta, 1988), halaman 17

Hal ini juga memperkuat indikasi bahwa angka-angka kriminal yang biasanya tercatat di lembaga-lembaga peradilan itu pada hakikatnya juga bermula dari lahirnya sebuah kepentingan yang berakibat pada timbulnya korban baik berupa jiwa maupun harta benda.⁵

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kekerasan maupun kejahatan senantiasa terus diusahakan, seiring dengan berkembangnya kuantitas maupun kualitas dari kejahatan tersebut. Kebijakan hukum (pidana) yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tentang bagaimana cara terbaik untuk menekan tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Mengenai bentuk-bentuk kejahatan baru ini bahkan selalu mendapat perhatian serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan Internasional ini secara periodik menyelenggarakan konggres yang disebut *United Conggres in the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*.

Di dalam konggresnya yang kesembilan pada tanggal 29 April – 8 Mei 1995 di Kairo banyak dibahas bentuk kejahatan modern seperti kejahatan ekonomi transnasional dan berbagai bentuk kejahatan

⁵ Di Kota kecil Magelang, sampai dengan akhir tahun 1999 frekuensi kejahatan menunjukkan sebagai berikut :

- Pencurian : 78
- Penganiayaan : 19
- Penggelapan : 10
- Penipuan : 16
- Penghinaan : 1
- Perkosaan : 3
- Pembakaran : 3
- Melarikan perempuan : 2
- Narkoba : 5

Sumber : Kepolisian Resort Kota Magelang, Januari 2000

terorganisir yang terjadi inter-antar negara. Namun demikian kebijakan yang direkomendasi melalui konggres tersebut pada umumnya masih terfokus pada upaya serius tentang bagaimana cara menanggulangi terjadinya kejahatan dimaksud, di samping mencari upaya efektif bagaimana memperlakukan pelakunya dengan adil. Hal ini bisa dilihat ketika konggres membahas tindakan untuk mencegah kejahatan terorganisir dan kejahatan lingkungan hidup yang di dalam draft antara lain disebutkan sebagai berikut :

2. "Calls on member state to promote futher cooperation between their national crime prevention and criminal justice sector in order to undertake international action against transnasional and organized crime, such us illicit drug trafficking, laundering of the proceeds of crime, for theft, crime against the cultural patrimony, and terrorism, and to improve the exchange of information, in particular at the regional level.
3.dst
7. Recommends that member states should establish units specialized in the investigation of economic or financial crime in order to make the prevention and monitoring of such crime more effective.
8. Urges member states to cooperate in identifying, spesific measure against corruption, bribery and the abuse of power"⁶

Pembahasan soal kejahatan yang bersifat transnasional bahkan masih tetap mendapat perhatian serius, khususnya meliputi penanggulangan kejahatan :

⁶ Ninth United Nation Conggres on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Draft Resolution no. A/Conf.169/L.10, Kairo 1995, halaman 6

“International instruments addressing trafficking in women and children, combating the illicit manufacturing afford trafficking in firearm, and illegal trafficking in and transporting of migrants”⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan memang telah mendapat perhatian secara sungguh-sungguh baik secara nasional, regional maupun internasional, tetapi titik berat kajian yang dilakukan masih terletak pada aspek penanggulangan atau pencegahan terhadap *perbuatan* atau bentuk *kejahatan* saja.

Perkembangan lebih lanjut yang terjadi akhir-akhir ini adalah melangkah pada pembicaraan tentang persoalan *sanksi pidana*. Di sini mulai dipersoalkan tentang seberapa jauh efektifitas dari pemberian sanksi pidana kepada pelakunya. Jika dilihat kembali judul konggres yang mengedepankan persoalan “Treatment of Offender”, ini menunjukkan bahwa kenyataannya perhatian Internasionalpun pada hakikatnya dipengaruhi adanya perkembangan kajian terhadap masalah sanksi pidana ini di samping tentu saja terhadap *pelaku*.

⁷ Periksa Agenda No. 4 jo Draft Nomor A/Conf.187/6, International Cooperation in Combating Transnational Crime, dalam Tenth United Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders (Vienna, 2000) halaman 2. Konggres juga masih memberikan perhatian khusus terhadap Penanggulangan Korupsi (Agenda No A. jo Draft No. A/Conf.187/9 dalam topik International Cooperation in Combating Transnational Crime; New Challenges in Twenty – first Century, Background Paper for Wokrsshop on Combating Corruption). Kemudian juga perhatian terhadap penanggulangan kejahatan yang terkait dengan penggunaan komputer (Agenda No. 5 jo Draft No. A?Conf.187/10, dalam Topik Crime Related to Computer Networks)

Berdasarkan hasil kajian persoalan pidana ini, maka pemikiran yang menonjol adalah tentang setuju-tidaknya terhadap pemberian sanksi pidana itu sendiri. Alf Ross yang tetap memandang perlunya sanksi pidana mengatakan bahwa konsep pembedaan itu bertolak pada dua tujuan yaitu:⁸

1. Untuk mengenakan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom its imposed), dan
2. Pidana itu merupakan satu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed)

Oleh sebab itu Roslan Saleh juga berpendapat masih perlunya pidana dan hukum pidana, antara lain dengan alasan bahwa pidana dan hukum pidana itu tidak semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat⁹

Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun pembahasan tentang perlu tidaknya penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana itu mengalami kemajuan pesat dewasa ini, tetapi ide dasar penanggulangan kejahatan dengan pemberian sanksi pidana pada hakikatnya merupakan cara yang paling tua. Immanuel Kant ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa pidana itu merupakan suatu tuntutan kesusilaan.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), halaman 21-22

⁹ *Ibid*, halaman 20

Ia melihat sebagai “kategorische imperatief” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan. Hegel juga mengatakan “punishment is the negation of that negation”. Aliran absolut sangat mengilhami pemikiran ini.

Adapun bagi golongan yang tidak setuju dengan pidana, mereka ada yang berpendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dipidana. Mereka berpendapat bahwa pidana merupakan “peninggalan kebiadaban masa lalu yang seharusnya dihindari¹⁰. Oleh sebab itu menurut Olof Kilberg, kejahatan merupakan perwujudan ketidaknormalan, sehingga perlu tindakan perawatan. Oleh sebab itu golongan anti pidana ini sering dikenal dengan kelompok gerakan abolisionis, mengingat gagasannya yang cenderung reaktif terhadap penjatuhan sanksi pidana. Gerakan abolisiolis ini bahkan pernah menyelenggarakan pertemuan yang disebut ICOPA (International Conference on Prison Abolition) pada tahun 1983 di Toronto Canada, guna menunjukkan bahwa gerakan ini serius dalam memperjuangkan keinginannya untuk menghapus pidana. Beberapa tokoh gerakan disebutkan antara lain Filippo Gramatika, Thomas Mathiesen, Niles Christie, Herman Bianchi, Nils Hulsman, dan lain-lain.¹¹⁾

¹⁰ *Ibid*, halaman 19

¹¹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang, 1990), halaman 18.

Di samping perhatian hukum Pidana ini diarahkan pada perbuatan dan pidananya sendiri seperti yang telah diuraikan, masih ada satu hal lagi yang dalam berbagai kesempatan juga banyak dibahas, yaitu tentang hal yang bertalian dengan pelaku tindak pidana itu sendiri. dampak besar dari kajian terhadap pelaku ini banyak sudah, khususnya persoalan yang bertalian dengan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan, menurut Idema membahas mengenai kesalahan (seseorang) justru merupakan “jantungnya” hukum pidana¹²

Oleh sebab itu sangat tepat bila almarhum Roeslan Saleh berpendapat bahwa meskipun mengenai kesalahan telah dikemukakan dalam setiap pengkajian hukum pidana sebagai hal mendasar, tetapi masih perlu dikaji, dan masih saja terlihat hal-hal baru. Hal-hal baru itulah yang perlu dikemukakan kepada mereka yang melanjutkan studi hukum pidananya.¹³

Dari apa yang penulis kemukakan secara singkat di atas dapat dikemukakan hipotesis awal bahwa :

- a. Setiap konflik antar manusia bisa mengakibatkan timbulnya korban baik yang berupa harta maupun jiwa.
- b. Oleh sebab itu hukum pidana ada, yaitu untuk menanggulangnya dengan melakukan kajian mendalam terhadap 3 (tiga) persoalan, yaitu perbuatan, pidana dan pelaku.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, 1992), halaman 86

¹³ Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, (Jakarta, 1994), halaman 5
Sebagai contoh misalnya soal pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability) yang merupakan hal baru dalam konsep KUHP, periksa, Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, (Semarang, 1990), halaman 67.

Di sini penulis melihat, tiga persoalan pokok tadi telah banyak memberikan pengaruh besar bagi perkembangan hukum pidana, khususnya ditinjau dari aspek kebijakan kriminal. Sementara itu persoalan korban yang di dalam konteks hipotesa di atas juga sangat berperan, ternyata masih kurang mendapat perhatian yang sepadan dengan tiga persoalan di atas. Padahal sangat dirasakan bahwa di dalam suatu tindak pidana, banyak pihak mengakui bahwa korbanlah sebenarnya yang paling mengalami penderitaan dan kerugian. Malahan menurut Iswanto, korban dipandang sebagai persoalan pokok yang seharusnya juga mendapat perhatian yang berimbang di samping perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Bila hal ini dilakukan maka masalah kejahatan dapat dijelaskan lebih baik sesuai kenyataan yang sebenarnya.¹⁴

Walaupun masalah korban setelah tahun tujuh puluhan mulai banyak dibicarakan, ada baiknya untuk dikaji secara khusus, apakah pembahasan menyeluruh tentang korban ini telah memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dari aspek kebijakan. Inilah yang mendorong penulis membuat karya tulis ini.

¹⁴ Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka berat sebagai syarat Pidana Bersyarat pada tindak pidana Lalu Lintas Jalan*, (Yogyakarta, 1995) hal 6.
Periksa juga Iswanto, *Korban Tindak Tanruk Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana, Seyogyanya Diadposi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, (Purwokerto, 2000) halaman 1

B. PERMASALAHAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemikiran di muka, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut menyangkut tiga pertanyaan pokok yaitu :

1. Apakah kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan telah memperhatikan masalah perlindungan korban ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan korban oleh penegak hukum?
3. Bagaimanakah kebijakan perlindungan korban di dalam hukum pidana mendatang ?

Sebagaimana sudah disinggung penelitian ini akan dilaksanakan di Magelang dan sekitarnya hanya terhadap :

1. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang membuat ancaman pidana dan buat tahun 1980 ke atas.

Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh Undang-Undang tersebut telah memperhatikan aspek perlindungan korban.

2. Pelaksanaan tugas para penegak , hukum dalam rangka mengimplementasikan kebijakan perlindungan korban tersebut.
3. Gambaran kebijakan perlindungan korban yang bersifat prospektif yang diuraikan berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan.

Batasan penelitian perkara disampaikan mengingat penulis menyadari bahwa :

- a. Aplikasi kebijakan perlindungan korban bisa lebih meluas cakupannya, lebih-lebih bila kajian dilakukan pula terhadap peraturan di bawah Undang-Undang.
 - b. Praktik perlindungan korban bisa saja dilakukan oleh unsur penegak hukum, Tetapi tidak terdeteksi karena tidak semua kejahatan dilaporkan atau masuk jaringan sistem peradilan pidana
- Hulsman mengistilahkan hal ini sebagai "Kotak Hitam". Karena adanya reaksi terhadap kejahatan yang dicatat (input), ternyata tidak sebanyak kejahatan (tindak pidana) sesungguhnya yang terjadi di masyarakat.¹⁵

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Teoritik

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan sumbangan Viktimologi terhadap hukum pidana, khususnya di dalam menyusun perundang-undangan nasional yang ada muatan pidananya (kebijakan formatif).

Studi ini paling tidak diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berkait dengan upaya perlindungan korban yang telah terakomodasi di dalam undang-undang yang berlaku maupun di masa yang akan datang.

¹⁵ Hulsman menulis, dari jumlah lebih dari 380.000 tindak pidana (kejahatan) serious (misdijsen), yang tercatat dalam tahun 1973 oleh polisi hanya ditemukan 130 kasus, dan dari jumlah itu hanya 51.000 pelaku yang dihadapkan ke Pengadilan.
ML. HC. Hulsman dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Pengadilan Pidana, Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Jakarta, 1984), halaman 7 – 9

2. Praktis

Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konkrit perlindungan terhadap korban di dalam sistem peradilan pidana, khususnya oleh aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim. Identifikasi dimaksud tentunya dengan catatan jika penelitian di lapangan menemukan hal ini.

Manfaatnya adalah akan bisa diketahui bentuk-bentuk perlindungan konkrit terhadap korban yang bisa dikembangkan, jika hal itu benar-benar baik dan efektif, khususnya dalam rangka menyusun kebijakan hukum pidana mendatang (misalnya dalam bentuk Undang-Undang).

D. KERANGKA TEORI

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu komponen penting dari ilmu Hukum Pidana Modern. Demikian menurut Marc Ancel di dalam bukunya yang berjudul *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*. Kebijakan hukum pidana ini diistilahkan olehnya dengan nama Penal Policy, sejajar dengan komponen penting lainnya yaitu Criminology dan Criminal Law.¹⁶

Dikemukakan lebih lanjut, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: 1996), hal. 23
Periksa Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang, tanpa tahun), hal. 1

Berdasarkan makna di atas, kebijakan hukum pidana memiliki jelajah yang cukup luas dalam mengimplementasikan kerjanya, karena semua tujuan yang diarahkan untuk membuat hukum positif menjadi lebih baik termasuk ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini.

Untuk merumuskan atau membuat hukum pidana positif lebih baik, tentunya bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi ilmu hukum pidana sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang senantiasa terus berkembang bahkan berubah sesuai kondisi zaman. Hukum itu sendiri pada kenyataannya memang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang senantiasa terus berkembang bahkan berubah sesuai dengan kondisi zaman. Hukum itu sendiri pada kenyataannya memang merupakan gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perlakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu Hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah itu. Demikian menurut Soeryono Soekanto.¹⁷

Oleh sebab itu wajar jika dalam usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan perikeadilan, tidak cukup hanya dipelajari aspek-aspek teoritik dasar yang menjadi objek studi hukum pidana sebagaimana disinggung di muka tetapi dibutuhkan bantuan atau pedekatan kerja sama dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya yang bersifat fenomenal itu. Barda Nawawi Arief mengatakan¹⁸.

¹⁷ Soeryono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, 1983), halaman 17

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, halaman 30-31

“Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan hukum Indonesia”.

Di sini jelas bahwa yang dimaksud nilai sosio politik dan nilai sosio filosofik sangat mengandung makna yang luas, tetapi paling tidak pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan pendekatan studi bidang-bidang ilmu, yang merupakan “Saudara dekat” dari ilmu hukum pidana yaitu kriminologi. Dikatakan demikian karena sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana ini memang sangat erat. Artinya hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi banding etiologi kriminal dan Penologi. Di samping itu dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan Undang-Undang pidana kriminalisasi maupun pencabutan Undang-Undang (dekriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai “Signal Wetenschap”¹⁹

Von Liszt di dalam Is Soesanto juga mengatakan bahwa hendaknya kriminologi ini “bergabung” dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan “politik kriminal” sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaanya, yang semuanya ditujukan

¹⁹ IS Soesanto, *Kriminologi*, (Semarang, 1999), halaman 20

untuk melindungi “warga negara yang baik” dari penjahat. Pandangan ini nampaknya sejalan dengan apa yang dikatakan G.P. Hoefnagel sebagai berikut:²⁰

“Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reaction of those in power”.

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan utama di samping (pelaku) tindak pidana. Dengan alasan ini, kriminologi berperan penting. Sejarah kriminologi tidak seluas sejarah tentang pelanggaran kejahatan, sebagaimana halnya sejarah reaksi kriminologi terhadap kekuasaan.

Adapun mengenai Viktimologi, ilmu ini sebenarnya merupakan bagian dari kriminologi. Pengetahuan tentang korban ini di dalam sejarahnya merupakan bagian dari studi tentang pelaku kejahatan (penjahat) yang dipelajari dari aspek sebab-sebab orang melakukan kejahatan (etiologi kriminal). Studi tentang pelaku ini kemudian diperluas dengan studi tentang korban kejahatan, sebagaimana diawali pada tahun empat puluhan melalui karya Hans Von Hentig dan B. Mendelshohn. Tulisan Hans Von Hentig yang dipandang sebagai pioner viktimologi adalah papernya yang berjudul “*Remark in The Interaction of Perpetrator and Victim*” (1941) dan buku yang berjudul “*The Criminal and His Victim*” yang terbit pada tahun 1948. Sedangkan B. Mendelsohn pada tahun 1947 membuat paper dengan judul “*New Bio-Psycho Social Horizons: Victimology*”. Sejak tahun ini studi tentang korban terus berkembang, bahkan pada tahun 1963 New Zeland merespon masalah perlindungan

²⁰ Barda Nawawi, Op-cit, halaman 25

korban ini untuk pertama kalinya dalam bentuk pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan melalui mekanisme pengadilan. Di Inggris meskipun masih dalam taraf usulan partai namun sudah mulai ada pemikiran untuk memberikan hal itu, sementara itu di Amerika, beberapa negara bagian di sana juga mulai mengadopsi pemberian ganti rugi kepada korban.²¹

Walaupun ada kecenderungan bahwa victimologi ini dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri, serta pada kenyataannya masih ada silang pendapat mengenai hal ini, karena sebagian dari pemikiran yang berkembang tetap berpendapat bahwa victimologi ini adalah bagian (cabang) dari kriminologi. Di dalam simposium Internasional pertama viktimologi yang diselenggarakan di Yarussalem pada bulan September 1973 disimpulkan bahwa viktimologi akan diperkaya melalui orientasi studi yang bersifat viktimologis.

Dengan berkembangnya kriminologi setelah tahun 1960-an, yaitu lahirnya "kriminologi hubungan-hubungan" maka menjadi kurang tepat untuk memisahkan viktimologi ini dari kriminologi.²²

Beberapa alasan lain dikemukakan, sehubungan dengan tidak disepakatinya viktimologi melepaskan diri dari kriminologi, yaitu :

²¹ Israil Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology*, (Lexington, 1973), halaman xi-xii "....., the Zealand Parliamen lestablished the first crime compensation of victim....etc. the Tory government England announced a similar, but non statutory program....etc. in America, the first jurisdiction to adop the compenxation principle was California....etc. New York (1966), Hawai (1967), Massachussetts (1967), Maryland (1968), Nevada (1969),....etc".

²² IS Soesanto, *Op-cit*, halaman 12

1. Bahwa “perbuatan kejahatan” selalu merupakan hubungan dengan orang lain.
2. Dalam etiologi kriminal, maka bukan saja ciri-ciri pelaku yang dipelajari, tetapi juga ciri-ciri korban, khususnya dalam banyak kejadian, sulit menentukan siapa sebagai pelaku dan siapa korban kejahatan.
3. Kesepakatan dalam simposium pertama tentang victimologi di Yarussalem, memberikan pengakuan bahwa victimologi adalah cabang yang sangat vital bagi studi tentang kejahatan.²³

Terlepas dari polemik viktimologi kriminologi seperti yang telah disinggung di muka, yang lebih penting adalah pengaruh hasil studi kedua cabang ilmu tersebut terhadap perkembangan hukum pidana. Yang jelas titik tolak kajian yang akan dikembangkan melalui penelitian ini tidak lain berangkat dari kerangka pikir sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Undang-Undang yang dibuat, tentunya telah disusun atau dirumuskan sebaik-baiknya oleh pembuat Undang-Undang yang bersangkutan, termasuk di dalamnya mempertimbangkan aspek nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan penyusunan Undang-Undang tersebut.
2. Masalah perlindungan korban tindak pidana yang telah sedikit diuraikan, merupakan salah satu elemen nilai yang secara teoritik lahir

²³ Israil Drapkin, Op-cit halaman xii

dari hasil kajian mendalam ilmu kriminologi, khususnya viktimologi. Oleh sebab itu masalah perlindungan korban ini paling tidak nampak dalam bentuk "asas hukum: yang akan mewarnai esensi dan latar belakang dibuatnya Undang-Undang tersebut. Asas perlindungan korban ini diharapkan juga tersurat atau tersirat di dalam rumusan deliknya.

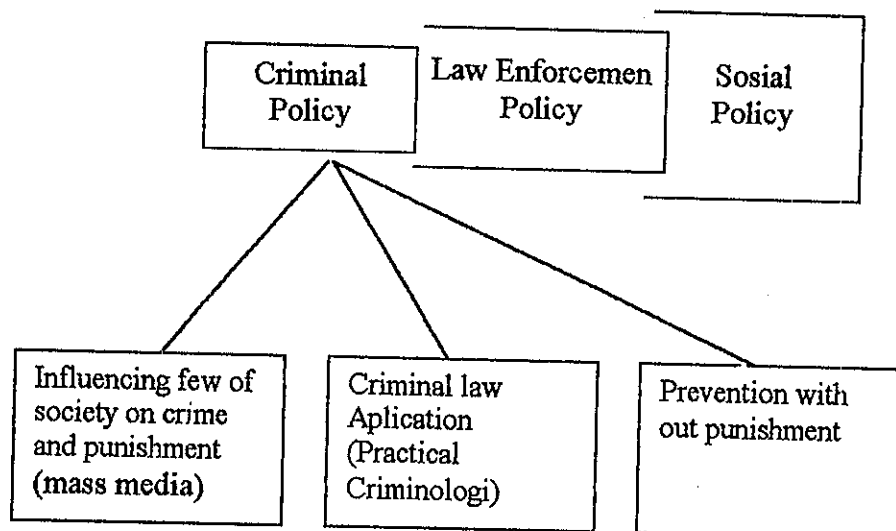
3. Dengan menggunakan indikator kualitatif melalui kajian terhadap latar belakang dibuatnya Undang-Undang, yang biasanya tertuang pada bagian penjelasan, namun dengan mempelajari materi Undang-Undang tersebut dengan menggunakan alat ukur tertentu, diharapkan bisa diketahui seberapa jauh Undang-Undang yang ada ini memperhatikan aspek perlindungan korban.

Mengingat masalah perlindungan korban ini merupakan persoalan baru di dalam kebijakan hukum pidana, karena pembicaraan intensif tentang ini baru terjadi pada dasawarsa terakhir, maka penelitian ini juga hanya akan dilakukan terhadap Undang-Undang yang dibuat dalam dasawarsa tersebut, diawali mulai pembuatan tahun 1980 an ke atas.

Untuk mempermudah memahami persoalan yang akan dibahas, perlu ditegaskan bahwa kebijakan hukum pidana ini sebenarnya merupakan bagian dari politik kriminal. Sudarto mendefinisikan politik kriminal sebagai "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi

kejahatan.²⁴ Politik kriminal ini adalah bagian dari politik penegakan hukum (Law enforcement policy), yang mencakup pula penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi, dan politik penegakan hukum merupakan bagian politik sosial (sosial policy) yang merupakan usaha setiap masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.²⁵

G.P Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief memberikan skema sebagai berikut :



Jika mengacu pada bagan yang dikemukakan Hoefnagels di atas, posisi kebijakan hukum pidana memang tidak eksplisit tampak. Tetapi dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik atau kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, halaman 3

²⁵ Muladi, *Op-Cit*, halaman 5-6

Di samping itu Barda Nawawi Arief juga mengingatkan bahwa masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik, namun kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan dari berbagai pendekatan, bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan nasional pada umumnya.

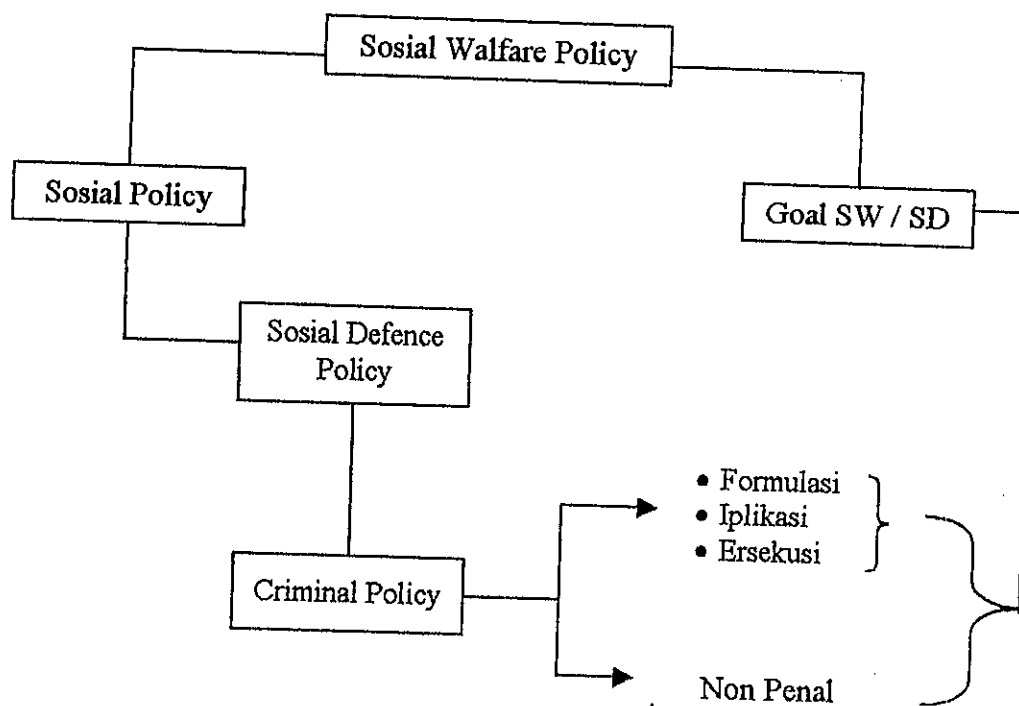
Dengan penegasan di atas berarti, masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih memang "pidana" sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi kriminologi.²⁶

Berdasarkan alasan ini, sangat beralasan apabila kebijakan hukum pidana dalam rangka perlindungan korban sangat terkait dengan "criminal law application" sebagaimana yang dimaksud oleh GP. Hoefnagels. Jika di satu sisi ada kebijakan "prevention without punishment", maka kebijakan hukum pidana ini diansumsikan sebagai model "prevention with punishment".

Sebenarnya criminal law application ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk (action) dari kebijakan kriminal (criminal policy), di

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, halaman 24-25.

mana kebijakan *prevention without punishment* dapat dipandang sebagai *non penal policy*, sedangkan asumsi “*Prevention with Punishment*” merupakan kebijakan yang bersifat “*penal policy*” yang keduanya mempunyai tujuan, yaitu *social defence* atau *social welfare*. Untuk ini Barda menjelaskan dalam diagram sebagai berikut :²⁷



Berdasarkan teori ini penulis mulai mengembangkan kajian ini

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dalam Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang, 2000), halaman 77-78

E. METODE PENELITIAN

1. Umum

Ada baiknya untuk disinggung kembali, bahwa dalam tulisan ini dibahas tiga permasalahan penting yang akan diteliti. Pertama menyangkut kajian terhadap kebijakan legislatif (kebijakan formulatif) yang berorientasi pada aspek perlindungan korban, dan kedua kajian terhadap praktik-praktik perlindungan korban di lapangan yang pernah dilaksanakan penegak hukum, dan ketiga tentang proyeksi kebijakan perlindungan korban tindak pidana mendatang.

Untuk menjawab permasalahan pertama, penelitian diarahkan pada bentuk inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar.²⁸ Langkah inventarisasi ini sebagaimana telah dikemukakan di muka hanya dilakukan terhadap aneka Undang-Undang yang dibuat mulai tahun 1980-an hingga tahun 1999. Agar tidak terlalu luas objeknya, maka fokus penelitian akan terbatas pada Undang-Undang yang secara khusus mengatur hukum pidana di dalamnya. Dengan melakukan kajian mendalam terhadap butir konsideran, diktum, isi maupun penjelasan dari masing-masing Undang-Undang tadi diharapkan bisa diidentifikasi aspek perlindungan korban, mulai dari bentuk abstrak sampai yang kongkrit,

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, dan Yarimetri (Jakarta, 1990), halaman 12.

bila hal itu memang ditemukan. Yang abstrak ini biasanya muncul dalam bentuk perlindungan korban sebagai asas, nilai atau norma, yang di dalam literatur dikategorikan sebagai asas hukum khusus yang bersifat regulatif. Jika digambarkan, skemanya adalah sebagai berikut.²⁹

Asas-asas hukum regulatif	Asas hukum umum	Asas hukum khusus
	Perlindungan Terhadap Masyarakat	Perlindungan Terhadap korban Kejahatan

Adapun bentuk kongkret yang dijumpai, yaitu bisa berupa pemberian ganti rugi atau rehabilitasi yang diatur tegas dalam Undang-Undang tersebut.

Untuk mencari jawab pada permasalahan yang kedua, penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara (interview) langsung kepada pihak terkait, yaitu unsur penegak hukum. Melalui wawancara terarah dan mendalam diharapkan akan diperoleh model perlindungan korban yang pernah ada dan terlaksana selama proses peradilan berlangsung, baik di tingkat penyelidikan, penuntutan maupun pengadilan. Bentuk perlindungan korban ini bisa dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan korban atas dasar pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri.

²⁹ *Ibid*, hal 17 Lihat Pula Soerjono Seokanto, Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, 1985), halaman 70-85.

- b. Perlindungan korban secara non yustisial, dalam arti hanya dilandasi pertimbangan kepatutan atau kemanusiaan semata. Bentuk yang kedua ini bisa berupa pemberian kompensasi atas inisiatif pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, apakah itu atas kehendak aparat, sipelaku atau si korban itu sendiri.

Untuk mengetahui persoalan yang ketiga, digunakan studi kepustakaan dengan metode perbandingan, serta melakukan pengembangan atas hasil analisis. Kajian persoalan pertama dan kedua tersebut kemudian juga dilakukan juga metode questioner, yaitu dengan menanyakan keinginan-keinginan korban tindak pidana di masa mendatang sehubungan dengan peristiwa yang mereka alami.

2. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Ronny Soemitro, terdapat lima tipe penelitian hukum normatif, yaitu yang di dalam kepustakaan Anglo-Amerika disebut sebagai legal research yaitu.³⁰

- a. Penelitian berupa inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma doktrin) hukum positif
- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian suatu perkara.
- d. Penelitian terhadap sistematis hukum
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-Cit*, Halaman 12- 27

Kelima tipe di atas sekaligus merupakan tahapan yang akan dikembangkan melalui penelitian ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tahap Inventarisasi hukum positif

Merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar, karena hanya dengan langkah ini dapat diketahui hukum positif apa saja yang sebenarnya berlaku saat ini.

Untuk melihat akses perlindungan korban sebagaimana yang menjadi tujuan penelitian, tidak semua hukum positif akan diteliti, tetapi dibatasi pada hukum positif dalam bentuk Undang-Undang yang dibuat dasa warsa terakhir.

Pada tahap ini bisa diketahui berapa banyak perundang-undangan yang memuat ancaman pidana maupun yang tidak.

b. Tahap untuk menemukan asas-asas hukum

Setelah Undang-Undang sebagaimana tersebut (1) terkumpul, barulah dapat ditelaah satu per satu, kemungkinan ada/ tidaknya asas hukum yang dicari, yaitu asas perlindungan korban di dalam Undang-Undang tersebut.

Pada tahap ini bisa diketahui secara kuantitatif maupun kualitatif seberapa besar pembuat Undang-Undang telah memberikan perhatian pada aspek perlindungan korban ini, meskipun masih dalam bentuknya abstrak dan normatif itu. Melalui tahapan ini

diharapkan juga akan bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan korban resmi, bila hal itu memang ada dan diatur menurut Undang-Undang tersebut.

c. Tahap menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto*

Ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang ada dan dibuat itu sesuai untuk diterapkan. Jika tahap (1) dan (2) termasuk studi *Law in Books* maka tahap yang ketiga ini disebut dengan studi *law in action*. Oleh sebab itu pada tahap ini lebih banyak dibutuhkan pengumpulan data empirik di lapangan. Melalui informasi yang diterima dari instansi yang terkait dengan penegakan hukum diharapkan akan memperoleh banyak temuan seputar upaya perlindungan korban yang pernah mereka alami dan laksanakan, khususnya selama petugas instansi tersebut mengabdikan dirinya.

Melalui tiga tahapan penelitian ini, terkumpul data-data yang dibutuhkan, di mana ini kemudian akan dianalisis secara induktif. Setelah itu baru ditarik kesimpulan, sebagai jawaban akhir apakah kebijakan hukum pidana yang diteliti itu sudah atau belum memperhatikan aspek perlindungan korban.

Adapun tipe ke empat (penelitian terhadap sistematika Hukum) tidak akan dikembangkan sebagai tahapan dalam penelitian ini, melainkan hanya akan digunakan sebagai metode, khususnya di dalam menjelaskan :

- a. Pengertian dasar subyek / obyek hukum
- b. Hubungan pelaku – korban sebagai subyek hukum
- c. Hak-hak korban tidak pidana
- d. Peristiwa hukum yang terkait dengan persoalan korban (viktinisasi)

Sedangkan untuk tipe ke lima (Penelitian Tahap Singkronisasi Hukum). Tidak dilakukan, karena penelitian ini memang tidak diarahkan untuk menganalisis adanya hubungan antara peraturan satu dengan lainnya, baik dilihat dari aspek kedudukan (vertikal) maupun padanannya (horisontal).

Andaikata hal ini terjadi/ ditemukan (misalnya dalam bentuk pembahasan/ penyempurnaan sebuah Undang-Undang) maka hal ini dipandang terjadi secara kebetulan saja.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial atau psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Fenomena sosial yang diamati tentunya dalam rangka untuk menemukan berbagai sumber yang diharapkan bisa memberikan informasi awal tentang obyek yang diteliti.

b. Interview

Teknik wawancara ini digunakan khususnya dalam rangka memperoleh data empirik dari informan yang memang berkepentingan langsung dengan penegakan hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim pengadilan. Informasi dari mereka diharapkan dapat melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara. Juga dimungkinkan akan mendapat temuan-temuan baru di bidang perlindungan korban ini, yang bentuknya bisa jauh berbeda dari yang dikehendaki oleh kebijakan perundangan-undangan. Wawancara ini akan dilakukan secara bebas terpimpin.

c. Kepustakaan

Teknik pustaka ini terutama diarahkan untuk mencari data awal yang dipakai sebagai rujukan untuk memperkuat alasan dilakukannya penelitian ini. Namun demikian di dalam membahas teori yang berkaitan studi tentang korban, maka studi kepustakaan ini menjadi semakin dominan dipergunakan mengingat bahwa kebenaran ilmiah itu pada umumnya berangkat dari pengembangan teori, walaupun kadangkala tidak masuk akal atau bahkan susah dimengerti.³¹

³¹ IS Soesanto, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang, 1995), halaman 5
Dijelaskan oleh beliau bahwa Teori adalah bagian dari suatu penjelasan mengenai "sesuatu". Sementara suatu penjelasan dipandang masuk akal akan dipengaruhi fenomena tertentu yang dipersoalkan di dalam keseluruhan bidang pengetahuandst"
Didalam sejarah intelektual, terhadap masalah penjelasan ini secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan mendasar, yakni pendekatan spiristik atau demologik dan pendekatan Naturalistik yang keduanya merupakan pendekatan yang dikenal pada masa kuno dan modern.

Studi kepustakaan dititik beratkan pada pengamatan terhadap dokumen-dokumen perundang-undangan yang dibuat badan legislatif, untuk kemudian dianalisis secara deduktif-induktif aspek-aspek yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Perbandingan

Dengan melakukan kajian terhadap sistem hukum perlindungan korban di negara lain, diharapkan wawasan pengetahuan tentang perlindungan korban akan lebih lengkap dan bertambah luas :

Rene David dan Brietly menulis bahwa manfaat studi perbandingan ini antara lain:

- 1) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis
- 2) Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri.
- 3) Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/ suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hungan internasional.³²

4. Alat Penelitian

Melihat teknik pengumpulan data sebagaimana diutarakan, maka penelitian ini membutuhkan penggunaan instrumen sebagai berikut :

³² Dalam Berda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta, 1994), halaman 18. Periksa Pula, Romli Atmasasmita, *Asas-asas perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta, 1989) halaman 32

a. Selama melakukan observasi

Yaitu model observasi terkontrol, dengan peralatan pokok berupa daftar, yang dipakai untuk mengidentifikasi gejala yang terjadi yaitu gejala yang berorientasi pada perhatian terhadap langkah perlindungan korban yang terdapat disetiap Undang-Undang yang dibuat.

Untuk mengetahui seberapa besar Undang-Undang itu memperhatikan aspek perlindungan korban, maka pengelompokannya akan menggunakan sistem rating scale.

Di samping daftar cek kelompok, dalam melakukan observasi ini juga dipergunakan alat tambahan yaitu daftar catatan berkala, yang akan dipakai untuk mendata persoalan atau kasus yang tidak bisa terakomodasi dalam daftar cek kelompok

b. Selama Wawancara

Karena model wawancaranya adalah bebas terpimpin, alat yang dibutuhkan adalah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, di samping alat bantu lainnya, yaitu daftar catatan yang dipakai untuk merekam jawaban responden. Tape recorder juga akan dipakai bilamana perlu. Yang penting adalah mengupayakan agar melalui interview ini diperoleh penjelasan seluas-luasnya tentang langkah kongkrit perlindungan korban.

c. Selama melakukan studi kepustakaan

Dengan menggunakan buku dokumen atau literatur, maka studi ini baru bisa dilakukan. Oleh sebab itu buku merupakan alat utama di dalam penelitian ini. Dari buku bisa diambil pernyataan-pernyataan penting yang terkait dengan pengembangan suatu teori. Pernyataan penting tersebut kemudian diangkat dan dicatat dalam sebuah kartu, pada gilirannya akan dipakai sebagai rujukan di dalam menyusun tesis ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua kebijakan perundang-undangan. Sedangkan sampelnya akan diambil Undang-Undang yang dibuat tahun 1980 ke atas, masing-masing dihitung per kelompok tahun pembuatan. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah random sampling, dalam arti setiap undang-Undang yang dibuat tahun itu memiliki peluang yang sama untuk diteliti. Adapun penentuannya dipakai cara random.

Di samping populasi dalam bentuk undang-undang di atas, dalam penelitian ini juga dirumuskan populasi lain, yaitu kebijakan aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui praktik pemberian perlindungan korban di lapangan, tidak terlepas dari peran tiga unsur penegak hukum tersebut. Memang yang lebih tepat

adalah jika hal itu dilakukan langsung terhadap korban tindak pidana yang bersangkutan. Tetapi akan sangat sulit dilakukan mengingat :

- a. Tidak semua korban tindak pidana memperoleh perlindungan atau jaminan atas hak-haknya
- b. Terlalu luasnya batasan tentang korban, lebih-lebih dilihat dari aspek etiologi kriminal
- c. Domisili korban yang tidak diketahui, serta tidak terdokumentasi sehingga sulit untuk dilacak.

Adapun sampel yang diwawancarai sebagai responden adalah aparat penegak hukum yang bertugas di Empat daerah tingkat II, yaitu Kota dan Kabupaten Magelang, Temanggung dan Purworejo.

Penentuan sampel yang kedua ini memang berbeda dibanding yang pertama. Jika sampel yang pertama ditentukan berdasarkan analisis pemikiran pandangan positifisme, penentuan sampel yang kedua lebih bersandar pada pemikiran aliran fenomenologi. Kalau yang pertama lebih banyak menghasilkan data kualitatif, maka yang kedua ini cenderung menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkat laku yang nyata.

Yang kedua ini merupakan ciri penelitian kualitatif.³³

³³ Bogdan dan Tailor dalam Agus Salim, *Bangunan Teori dalam Penelitian Kualitatif*, (Semarang, 1992), halaman 1.

6. Pengolahan data dan penyajian data

Setelah dilakukan editing (pembetulan), coding (pemberian kode) dan tabulasi (pemindahan data ke dalam tabel), penelitian ini dapat menyajikan dua data pokok, yang secara kasar sudah dapat menggambarkan jawaban permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu :

- a. Data tentang jumlah perundang-undangan buatan tahun 1980 ke atas yang sudah atau belum memperhatikan aspek perlindungan korban.
- b. Data tentang upaya konkrit penegak hukum yang didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi korban tindak pidana.

7. Analisis data

Analisis terhadap ada tidaknya asas perlindungan korban di dalam Undang-Undang ini sebenarnya sudah dimulai pada saat telaah terhadap Undang-Undang yang menjadi sampel dilakukan. Tetapi kecenderungan itu akan lebih jelas tampak setelah data itu dikumpulkan dan diketahui frekuensinya melalui tabel. Analisa data ini tentunya dalam rangka melihat, apakah kebijaksanaan pembuatan Undang-Undang yang diteliti itu sudah memperhatikan aspek perlindungan korban baik langsung (konkrit) atau tidak langsung (asbtrak).

Besar kecilnya angka yang menunjukkan jumlah Undang-Undang yang sudah dan belum menyinggung masalah perlindungan korban akan menentukan besar kecilnya perhatian pembuat kebijakan terhadap korban tindak pidana tersebut, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Adapun hasil wawancara terhadap para penegak hukum, analisis baru akan dilakukan setelah diadakan pengelompokkan data melalui sistem coding. Pengelompokkan ini perlu dilakukan karena data yang diperoleh masih mentah dan abstrak. Pengelompokkan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konkrit perlindungan korban yang dilakukan selama bertugas, baik dalam rangka melaksanakan Undang-Undang maupun di luar itu. Data semua tentang hal ini akan dituangkan apa adanya guna menggambarkan kemungkinan adanya bukti bahwa tindakan nyata untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana itu sudah atau mungkin belum dilakukan, tergantung hasil penelitian nanti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya tulis ini dibagi dalam empat bab, terdiri dari bab pertama yang menguraikan tentang pendahuluan, bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka, bab ketiga tentang hasil penelitian dan analisisnya, sedangkan bab keempat adalah kesimpulan yang akan berisi kristalisasi hasil penelitian dan saran.

Bab pendahuluan ini sebagaimana diketahui menjelaskan tentang latar belakang belakang yang mendasari penulisan, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan, untuk itu tidak dijelaskan lagi.

Bab kedua karya tulis ini terdiri dari dua sub bab. Pertama menguraikan studi viktimologi, mencakup pengertian tentang viktimologi, sejarah perkembangannya, ruang lingkup studi, hubungannya dengan pelaku kejahatan serta kedudukan korban di tengah masyarakat. Kedua menguraikan tentang; kebijakan umum perlindungan korban secara umum, kebijakan perlindungan perkembangan korban dengan hukum pidana dan perlindungan korban diberbagai negara.

Pada bab ketiga karya tulis ini, diketengahkan beberapa data hasil penelitian, meliputi ;

1. Data yang berkaitan dengan frekwensi perlindungan korban di dalam kebijakan legislatif hukum pidana.
2. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Analisis terhadap kedua data di atas, sekaligus akan dijadikan pedoman untuk menyusun uraian ke tiga, yaitu tentang kebijakan perlindungan korban di masa mendatang.

Bab empat adalah bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan, yaitu dalam bentuk pernyataan ringkas dari permasalahan pokok yang dikaji melalui proses penelitian yang dilakukan. Pada bagian terakhir dari penutup. Juga akan direkomendasikan saran-saran penting yang sekiranya bermanfaat bagi pengembangan studi bidang ini dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERKEMBANGAN STUDI VIKTIMOLOGI

1. Pengertian Viktimologi

Secara etimologis, viktimologi terdiri dari dua kata “Victima” dan “logos”. Victima mempunyai dua arti yaitu : ¹

1. Merujuk pada pengorbanan makhluk hidup kepada Yang Maha Kuasa, atau persembahan makhluk hidup dalam suatu upacara ritual keagamaan.
2. Merupakan istilah yang dipergunakan dalam kriminologi dan ilmu terkait lain, yang merujuk pada orang-orang yang telah menderita, luka-luka atau rugi sebagai akibat tindakan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau hasil dari suatu kejadian atau keadaan.

Sedangkan kata “logos” artinya pengetahuan, sehingga viktimologi pada dasarnya merupakan suatu studi tentang korban.

Dari tulisan Israil Drapkin dan Emilio Viano diperoleh makna “victim”, mengutip dari Oxford English Dictionary (vol. XII, 1961) sebagai berikut :²

¹ Israel Drapkin dan Emilio *Victimologi*, A New Vocus, (Lexington, 1974), halaman xiii.

² Israel Drapkin dan Emilio Viano, *The Origin and Scope of Victimology*, dalam *Victimology*, (Lexington, 1975.) halaman 1.

1. " a living creatur killed and offered as sacrifice to some deity or supranatural power ".

Dicontohkan seperti pengorbanan Kristus (ketika disalib) demi kemanusiaan.

2. " a person who is put to death or subjected to torture by another, one who suffers severely in body or property through cruel or oppressive treatment, one who is reduced or destined to suffer under some oppressive or destructive agency, one who perishes or suffer in health, etc, from some enterprise or pursuit voluntarily undertaken, in weaker sense; one who suffers some injury, hardship, or loss, in badly treated or taken advantage of, etc ".³

Dengan demikian menunjukkan bahwa hakikat korban adalah seorang yang "menderita", baik karena perbuatan orang lain atau karena ulah diri sendiri.

Menurut Muladi korban didefinisikan sebagai ; seseorang yang "menderita" kerugian sebagai akibat suatu kejadian dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁴

³ Terjemahan bebas;

"Orang yang dibunuh atau disiksa, orang yang disiksa tubuhnya atau dirampas hartanya dengan kejam serta ancaman, orang yang mengalami tekanan dan tertindas pihak lain, mendapat kecelakaan dan penderitaan kesehatan dll. Dengan demikian korban berarti orang yang mendapat perlakuan buruk (tidak adil), mendapat kesulitan, kehilangan (harta-benda), mendapat perlakuan buruk, menderita kerugian, dll.

⁴ Muladi dan Burda Nawawi arief, *Bunga Rampas Hukum Pidana*, (Bandung, 1992), halaman 78.

Arif Gosita mengatakan, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Selanjutnya ia mengemukakan arti viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁵

Apa yang dikemukakan Arif Gosita ini ternyata hampir sama dengan pendapat Guglielmo Gulotta yang menulis arti korban sebagai "Who suffers because of an event seen as criminal and in way suffer damage, even when related to his own criminal behavior"⁶. Maksudnya adalah cukup jelas, bahwa berbicara tentang korban berarti berbicara pula tentang kejahatan atau perilaku jahat.

Karena itu bisa dijelaskan secara singkat, viktimologi adalah ilmu yang berbicara tentang korban kejahatan.

2. Perkembangan studi viktimologi

Seperti telah disinggung pada bab pendahuluan, viktimologi sebenarnya merupakan pengembangan lanjut studi kriminologi, khususnya ketika membahas aspek sebab-sebab timbulnya kejahatan. Logika yang bisa diambil terlepas dari setuju dan tidak, viktimologi adalah cabang dari kriminologi.

⁵ Arief Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, (Jakarta, 1987), halaman 12.

⁶ Guglielmo Gulotta, *The Offender-Victim System dalam Victims and Society*, (Visage Press hic, 1979) halaman 58

Dari kajian teologis, soal kejahatan sebenarnya banyak disinggung dalam kitab suci, termasuk Al Qur'an. Misalnya dalam surat Al-Baqoroh : 30 :

“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat “sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang di muka bumi”. Mereka berkata “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?” Tuhan berfirman “sesungguhnya Aku mengerti apa yang tidak kamu ketahui”.

Firman Allah tadi banyak dijabarkan lebih lanjut di dalam Al Qur'an, misalnya di dalam surat Al-Maidah 30-31 yang menjelaskan kekejaman Qabil putera Nabi Adam yang membunuh adiknya Habil. Juga kisah-kisah tentang kekejaman Fir'aun yang banyak ditulis di dalamnya, maka pembicaraan tentang korban ini sebenarnya telah ada sejak peradaban manusia di jagad raya ini juga ada, meskipun penegasannya secara implisit.

Seperti juga telah ditegaskan, bahwa kajian mendalam tentang korban kejahatan ini memang baru tampak mulai awal tahun 1940-an, yaitu ketika Von Hentig menulis tentang hubungan antara pelaku (prepetator) dengan korban (victim). Karya Von Hentig ini merupakan usaha pertama untuk menjelaskan suatu analisa menyeluruh tentang hubungan antara pelaku dan korban tindak kejahatan. Penjelasannya itu tentunya masih dalam kontek studi kriminologi.

Ketika Baniamin Mendelsohn berpidato dimuka Rumanian Psychiatric Association, barulah mulai nampak adanya keinginan untuk mencoba memisahkan studi viktimologi dari kriminologi. Dalam pidato itu Mendelsohn mencita-citakan dibentuknya ilmu pengetahuan baru tentang korban lengkap dengan lembaga-lembaganya, klinik-klinik, perkumpulan Internasional, kongres dan mata kuliah di perguruan tinggi. Tetapi Menheim menolak tegas pemisahan tersebut, dengan alasan bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari si pelaku delik (the criminal), tetapi juga kejahatan (crime) dengan segala aspeknya. Kriminologi tidak mungkin sempurna tanpa mempelajari dengan sebenarnya korban delik. Lagipula, meskipun dengan sifat yang kurang sistematis, kriminologi melalui peneitiannya telah banyak membantu menjelaskan peranan korban.⁷

Dalam simposium viktimologi pertama di Jerusalem, W. H. Nagel mengangkat permasalahan pro dan kontra ini di dalam laporannya. Ia mengatakan tidak setuju melihat viktimologi sebagai "sub-category" atau suatu "new teritory" dalam kriminologi. Ia pun menolak jika viktimologi hanya dipandang sebagai pengetahuan yang menyimpulkan keterangan yang "victim centred". Menurutna viktimologi adalah suatu gagasan atau pemikiran yang mengganti nada dalam kriminologi⁸. namun demikiann kontroversi untuk memisahkan

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta, 1994), halaman 72

⁸ W.H. Nagel dalam Marjono Reksodiputro, *ibid*, halaman 73 lihat pula Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, New York; Random House, 1968, halaman 103.

viktimologi dan kriminologi ini tetap tidak tuntas, kendati pembicaraan tentang ini selalu muncul di dalam setiap penyelenggaraan simposium.

Masih terkait dengan dikotomi viktimologi – kriminologi, Israel Drapkin dan Emilio Viano mengatakan bahwa studi tentang korban merupakan konsekuensi dari akibat terjadinya perubahan objek (fokus) studi Kriminologi. Kira-kira seabad lamanya kriminologi ini memfokuskan studinya pada perilaku kejahatan dengan sasaran “pelaku” kejahatan. Pada perkara selanjutnya masalah “kejahatan”, bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai persoalan yang kompleks yang mencerminkan terjadinya interaksi antara bermacam-macam peran, budaya, norma maupun keinginan masyarakat yang saling berbeda. Hasil interaksi itu bisa berupa rumitnya hubungan karena faktor-faktor yang bersifat emosional, rasional, insidental dan situasional.

Kajian tentang korban ini menjadi persoalan penting karena terjadinya pergeseran fokus studi tersebut. Jika pada mulanya pembicaraan korban hanya dipandang sebagai sekedar objek, yang muncul karena kejahatan (pasif), tetapi dia dipandang ikut berperan (aktif) dengan cara yang berbeda di dalam kemungkinan terjadinya korban.

Selama kurang lebih tiga dasa warsa kajian tentang korban ini terus berkembang, terutama dalam rangka membahas hubungannya dengan kejahatan, peranan korban, tipe atau bentuk korban dan lain-

lain, sehingga pembicaraan tentang perilaku kejahatan ini sering dihubungkan dengan kajian yang berkaitan dengan korban.⁹

Dalam tataran Internasional, masalah korban kejahatan ini cukup mendapat perhatian baik, seperti tampak dengan diselenggarakannya simposium viktimologi secara periodik. Paling tidak sudah ada lima kali siposium Internasional, pertama yang sudah disinggung yaitu di Yerusalem (1973) kedua di Boston (1976) sedang yang ketiga di Univertas Westphalia Republik Federal Jerman (1979). Yang terakhir penulis ketahui adalah simposium Viktimologi ke lima di Zagreb Yugoslavia pada tahun 1985.

Pada tahun 1979 juga lahir sebuah organisasi Viktimologi Internasional yang dinamakan The Word Society of victimolgy. Di samping itu juga lembaga studi yang dinamakan Postgraduate Course On The Victim of Crime yang sudah dua kali menyelenggarakan kegiatan, yaitu di Dubrovnick Yugoslavia.¹⁰

Pihak perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memberikan perhatian yang sama terhadap masalah perlindungan korban ini, yaitu dengan diterimanya resolusi tentang Declaration of Basic Principle of Justice fo Victim of Crime and Abuse of Power (resolusi No 40/34), termasuk di sini direkomendasikannya beberapa statemen perlindungan

⁹ Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Op-cit*, halaman xi

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem, Peradilan Pidana*, (Semarang, 1995), halaman 65 dan 71. Lihat pula Marjono Reksodiputro, *op-cit*, halaman 70.

korban di dalam United Nation Congress on Preverntion of Crime and the treatment of Offenders, sebagaimana telah disinggung pada bab pendahuluan. Mengingat masih kuatnya pandangan viktimologi sebagai bagian integral kriminologi, maka studi korban juga selalu disinggung pada setiap konggres Internasional yang disebut International Society of Crimminologi (ISC) baik secara eksplisit maupun Implisit. Bahkan gagasan untuk menyelenggarakan simposium viktimologi juga muncul dari konggres ISC ini.¹¹

Lembaga Internasional yang juga melakukan kajian tentang korban adalah United Nation Commision on Crime Prevention and Criminal Justice (UNICRI). Badan ini antara lain memberikan layanan di bidang evaluasi dan pelayanan, training dan kerjasama teknik di bidang penanggulangan kejahatan dan sistem peradilanannya. Berkaitan dengan masalah korban, UNICRI menegaskan tugasnya sebagai ;¹²

“ Leads the field in the study of victimization at the Internal level, particularly for developing countries. An importan aspect of its work consist in co-ordinating the international crime (victim) surveys. The information provided thereby gives a greater understanding of crime risk group within the wide range of countries and cities studied. It allows for prevention strategies and victim support networks which are sympathetic to community needs”.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *op-cit*, halaman 70-71

¹² UNICRI Fact Sheet, *Seminar Kriminologi ke VII*, (Semarang, 1994) halaman II.

Intinya adalah melakukan kajian terhadap terjadinya korban di tingkat Internasional, serta memberikan penjelasan mendalam tentang resiko dari kejahatan yang bisa diderita Negara.

Dalam tataran nasional, tampaknya kajian mendalam tentang korban ini masih belum begitu menggembirakan. Meskipun perhatian yang muncul tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan Viktimologi global. Menurut Arif Gosifa pembicaraan secara nasional korban baru muncul pertama kali pada forum seminar Kriminologi III yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 26 – 27 Oktober 1976 oleh lembaga kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bekerja sama dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Jika studi tentang korban sebelumnya dikaji dalam lingkungan studi kriminologi, khususnya di beberapa fakultas ilmu sosial yang ada di perguruan tinggi, maka sejak seminar kriminologi III di atas viktimologi mulai diberikan sebagai mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Pattimura, dan diikuti universitas lainnya baik negeri maupun swasta.¹³

Pada tanggal 23 Maret 1985, kelompok studi Kriminologi fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan bekerjasama dengan Yayasan Asia Jakarta menyelenggarakan seminar sehari dengan tema “Relevansi Viktimologi di Indonesia Dewasa Ini”, yang kemudian disusul seminar viktimologi berikutnya. Namun demikian

¹³ Sahetapy, *Viktimologi sebuah Bunga rampai*, (Jakarta, 1987), halaman 10

diakui memang belum banyak tulisan yang membahas tentang korban yang bisa dicatat, tetapi karya Arif Gosita, Sahetapi, Mardjono Reksodiputro, IS Susanto, Muladi, Barda Nawawi Arif, Andi Mattalata dan Made Darma Weda, meskipun masih banyak dalam bentuk bunga rampai, namun sungguh sangat memberikan andil besar di dalam mengedepankan studi viktimologi di Indonesia. Terakhir patut dicatat adalah karya Iswanto yang berjudul “Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Positif Indonesia”. Tulisan beliau dalam mengedepankan peranan korban ini bisa dianggap sebagai tanda semakin berkembangnya studi viktimologi. Dari tulisan beliau inilah studi viktimologi tersebut bisa berkembang seperti yang bisa dilihat dewasa ini.

3. Ruang lingkup pengembangan studi

Pengakuan terhadap viktimologi yang merupakan bagian integral dari kriminologi telah menjadikan studi tentang kejahatan dikenal sebagai disiplin yang mempunyai pandangan yang lebih lengkap dan realistik. Hal ini dimungkinkan karena viktimologi bertujuan mempelajari proses sosial yang menjadikan individu atau kelompok menjadi “korban”, bukan sekedar masalah sosial, tetapi juga yang bersifat sosiologi. Karena itu menurut IS. Susanto ada dua bidang jelajah viktimologi yang integral, yaitu :

3.1 Kontek sosial terjadinya viktimologi. Konteks sosial merujuk kepada nilai-nilai kultural, tradisi dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan kedudukan, status individu atau

kelompok, seperti tekanan-tekanan sosial, konflik, cap jahat serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok yang berkuasa cenderung untuk memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekuasaannya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat sebagai suatu yang bersifat endemik terhadap viktimologi.

3.2 Akibat-akibat sosial dari viktimologi yang dapat berpengaruh buruk pada individu tertentu, kelompok masyarakat luas maupun kemanusiaan umumnya. Keadaan ini dapat berpengaruh pada pandangan yang timbul tentang masalah sosial yang dihadapi sehingga dapat diangkat sebagai problem seluruh masyarakat.¹⁴

Apa yang dikemukakan IS Susanto di atas menggambarkan betapa luasnya “lapangan” studi viktimologi, karena semua konteks sosial yang mengakses timbulnya korban dinyatakan sebagai lingkup kajian viktimologi.

Israel Drapkin dan Emilio Viano juga menulis tentang apa yang bisa dikembangkan dari studi tentang korban dalam artian menurut pendekatan perbendaharaan bahasa sebagai berikut :

- a. Victimhood, merupakan “the state of being a victim” atau mereka yang telah berstatus sebagai korban.

14 IS Soesanto, *Kriminologi*, (Semarang, 1995) halaman 90
 Lihat pula, RB Sularto, *Persepsi Masyarakat Tentang Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan* (Semarang, 1997). Halaman 73-74.
 Periksa pula Vahakam N Dadrian, *An Attempt of Defining victimology* dan Emilio Viano, *Victims and Society*, (Washington DC, 1976), halaman 40-41

- b. Victimizable, yaitu "capable of being victimized" atau mereka yang cenderung rawan menjadi korban.
- c. Victimization, yaitu "the action of victimizing, or fact of being victimized in various senses". Ini adalah tindakan penciptaan korban melalui berbagai langkah/cara yang bermacam-macam, seperti yang digambarkan IS Susanto di atas.
- d. Victimize, sebagai "to make a victim of; to cause to suffer inconvenience, discomfort, annoyance, etc, either deliberately or by misdirected attention; to cheat, swindle or defraud, to put to death, to slaughter, to destroy or spoil (plant) completely". Ini artinya semua tindakan yang dilakukan terhadap orang lain sebagai korban adalah viktimisasi.
- e. Victimizer, yaitu sebagai "one who victimize another or others" atau singkatnya adalah pelaku penimbul korban.
- f. Victimless, sebagai "the absence of clearly identifiable victim other than the doer" atau bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak secara tegas menimbulkan korban, tetapi ada kecenderungan terjadinya korban.¹⁵

Mengingat begitu luasnya jangkauan (jelajah) studi korban, maka tidaklah mungkin semuanya bisa dibahas melalui tulisan ini. Tetapi dalam kaitannya dengan ilmu hukum pidana, Mardjono

¹⁵ Israel Drapkin dan Emilio Viano, *op-cit*, halaman 1

Reksohadiputro mengatakan ada dua hal penting yang perlu dikaji melalui pendekatan viktimologi ini yaitu:

- a. Bahwa untuk kepentingan sikorban, perlu dipikirkan dan diberikan perhatian kepada penderitaan yang dialaminya karena terjadinya delik.
- b. Untuk si pelaku delik, perlu diketahui bagaimanaa peran korban dalam terjadinya delik, maupun keadaan kejahatan pada umumnya.¹⁶

Pemikiran dan hasil penelitian yang pertama akan mempunyai dampak pada ilmu hukum pidana dan proses peradilan pidana. Perhatian terhadap korban sangat penting artinya bila sistem peradilan pidana yang ada memang belum memberikan perlindungan atas kepentingan yang dirugikan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak individu korban.

Sedangkan pemikiran dan hasil penelitian kedua akan banyak membantu pengembangan studi kriminologi, khususnya etiologi kriminal yang bisa mengungkap banyak hal. Apalagi kriminologi hubungan-hubungan termasuk model pendekatan baru dalam studi kriminologi, yang kemudian disebut sebagai kriminologi aliran kritis.¹⁷

Aliran kritis sebagai aliran pemikiran, tidak berusaha menjawab apakah perilaku manusia itu bebas atau tidak, tetapi

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *op-cit*, halaman 76

¹⁷ IS Soesanto, catatan kuliah 13 Nopember 1995.

Dijelaskan setelah tahun 1940-an timbul Kriminologi hubungan-hubungan (Criminology of relationship) yang dikemukakan WH Nagel (Jerman) yang kemudian disebut sebagai Kriminologi aliran kritis.

mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Aliran ini melihat bahwa kejahatan merupakan konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai penjahat. Kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia hanya karena hal itu dinyatakan sebagai demikian oleh masyarakat. Kriminologi kritis mempelajari proses-proses yang menjadikan kumpulan dari orang-orang dan tindakan tertentu sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian bukan hanya sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum) serta mempertanyakan tindakan tertentu sebagai kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh cara undang-undang disusun dan dijalankan.¹⁸

¹⁸ IS Spoesanto, *op-cit*, halaman 6-8

Di samping aliran kritis, ada dua aliran yang lain yaitu klasik dan positive. Aliran klasik merupakan pendekatan yang berangkat dari asumsi bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas (indeterminisme) dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Intelgensi manusia sangat menentukan dalam hal ini, sehingga perbuatan dan kejahatan merupakan pilihan bebas yang telah diperhitungkan faktor-faktor di luar kontrolnya. Dengan demikian seseorang tidak bisa dipermasalahkan begitu saja atas perbuatan atau tindakannya, karena hal tersebut sebenarnya terkait dengan pengaruh diluar wataknya, baik yang bersifat biologik maupun kultural.

Pendekatan kritis menurut IS Soesanto ada dua, yaitu Interaktionis pendekatan konflik pendekatan intersktionis bertitik tolak pada asumsi bahwa perilaku manusia ditentukan melalui proses hubungan sosial maupun individual yang menghasilkan persepsi tertentu dalam melihat sesuatu, termasuk terhadap perbuatan dan kejahatan. Sedangkan pendekatan konflik lebih banyak mempertanyakan masalah "kekuasaan" dalam segala aspek termasuk ketika mendefinisikan perbuatan dan kejahatan. Perbuatan ataupun kejahatan secara mudah dapat didefinisikan oleh orang yang lebih berkuasa dibanding yang tidak berkuasa.

Bisa dilihat juga pada Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang, 1984), halaman 22-32.

Sudarto, *Hukum Pidana* (Semarang, 1990), halaman 87.

Mengenai betapa luasnya ruang lingkup viktimologi ini sebenarnya telah banyak diakui oleh kalangan ahli ilmu sosial, misalnya Von Bertalanffy, 1986; Straus 1973, Wilkins 1965. Hal ini dikemukakan oleh David Lewis Smith dan Kurt Weis dalam tulisannya yang berjudul *Toward an Open System Approach to Studies in the Field of Victimology*.¹⁹ Ia lebih lanjut mengatakan :

“Law, Criminology and other social sciences are showing renewed interest in the interaction among the offender, the victim and society. The resurgence of research and writing about the role of the victim may involve into a distinct discipline or may be subsumed in one or more of the behavioral and social sciences”

Ini menunjukkan bahwa setiap berbicara tentang korban, maka banyak terjadi interaksi dengan berbagai disiplin ilmu yang lain, lebih-lebih jika dikaitkan dengan hukum, kejahatan atau ilmu-ilmu sosial lainnya. Pendekatan yang demikian itu menurut Smith disebut dengan sistem pendekatan “terbuka” atau yang dikenal dengan pendekatan “menyeluruh” di lingkungan ilmu-ilmu sosial (general system).

Dalam menjelaskan luasnya ruang lingkup studi Viktimologi ini nampaknya David Lewis Smith lebih mengedepankan aspek ontologisnya dibanding epistemologi. Hal ini dilihat dengan pernyataan : victimology, like other more mature disciplines, has struggled to develop a general definition that does more than announce that it “is the study of” yang kemudian dirumuskan dengan diagram sebagai berikut :

¹⁹ David Lewis Smith dan Kurt Weis dalam *Victims and Society*, Emilio Viano, (Washington DC, 1976), halaman 43-44

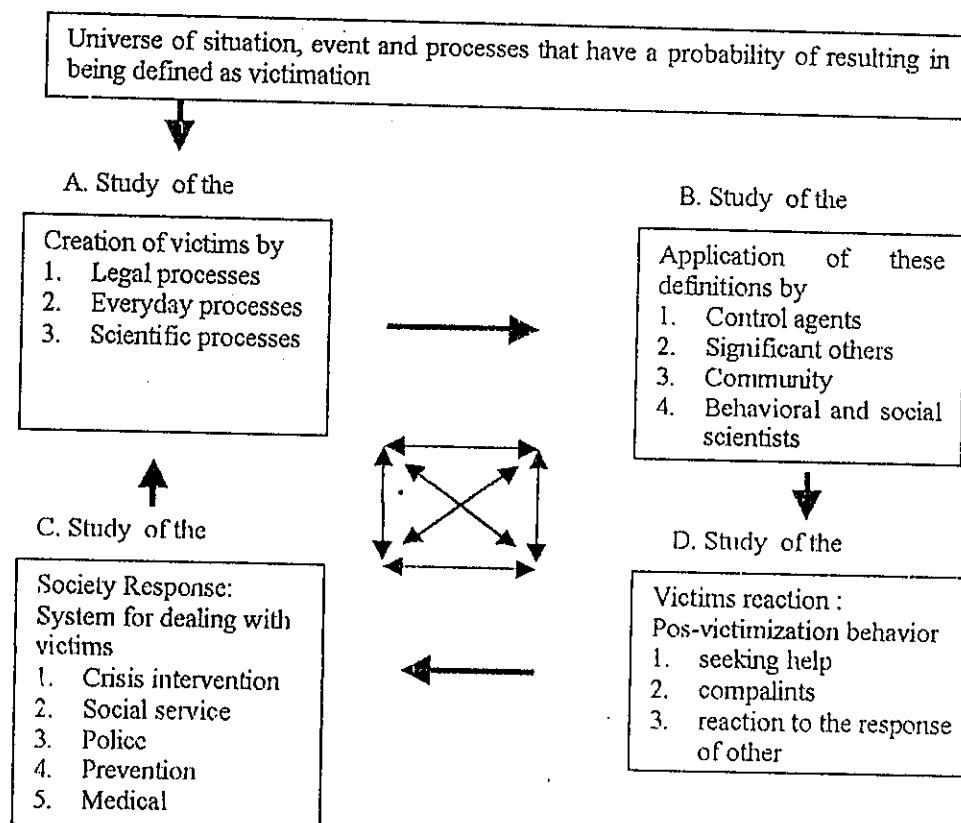


FIGURE 4.1. General model of the areas and research and application in the field of victimology.

Bagan ini makin mempertegas bahwa untuk berbicara tentang korban, diperlukan bantuan disiplin ilmu lain terutama ilmu-ilmu sosial dengan segala aspeknya. Sedangkan yang dikembangkan dari tulisan ini hanyalah sebagian kecil saja dari pendekatan yang terkait, yaitu Kriminologi dan ilmu hukum pidana.

4. Hubungan korban dengan pelaku

Suatu tindakan kejahatan (crime) pasti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku kejahatan (perpetrator) dan korban (victim). Sedangkan pada beberapa kejahatan tertentu seperti narkoba dan bunuh diri, pelaku dan korban adalah orang yang sama. hal tersebut menurut

Djamaludin Ancok menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keduanya, meskipun sebagian besar kalangan beranggapan bahwa kejahatan yang dimaksudkan harus mendapat legitimasi hukum.

Pendapat Djamaludin Ancok di atas ada kesesuaian dengan tulisan Hans Von Hentig pada tahun 1941 yang berjudul "Remark on the Interaction of perpetrator and Victim" yang dimuat dalam "Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science". Di sini Hentig banyak menekankan adanya peran aktif dari korban pada setiap terjadi kejahatan. Bahkan dalam beberapa kasus bisa terjadi bahwa antara korban dan pelaku malahan menjalin kerjasama yang disebut "mutual cooperation". Ia mencontohkan hal ini dalam beberapa bentuk kejahatan seperti : perjudian, perkosaan, penggelapan, atau penipuan.²⁰

Di dalam kasus perjudian digambarkan bahwa korban sendiri sebenarnya terlibat langsung dalam kejahatan itu, meskipun untuk ini Hentig menyebutkan sebagai "bukan sebagai kejahatan". Dalam perkosaan acapkali korban kurang terus terang untuk mengungkapkan apa yang terjadi menyimpannya, demi menjaga martabat. Jika hal ini dilakukan di depan pengadilan maka jelas akan menjadikan sesuatu yang menguntungkan bagi pelaku. Sementara dalam kasus penggelapan dan penipuan, korban sering menonjolkan statusnya sebagai orang "berduit" kepada orang lain, sehingga bermula dari hal itu pelaku lalu mengajak melakukan kerjasama tertentu yang menguntungkan,

²⁰ Hans Von Hentig Remarks on The Interaction of Perpetrator and Victim , dalam Victimology, Israel Drapkin dan Emilio Viano, *op-cit*, halaman 45-51

walaupun tujuan itu sebenarnya hanya untuk memancing agar sipelaku dapat memindahkan uang sikorban kepadanya. Oleh karena itu Hentig kemudian berpandangan bahwa antara pelaku dan korban dalam beberapa kasus malahan terjadi hubungan interaksi.

Menurut IS Soesanto, di dalam kejahatan paling tidak terkait dengan empat dimensi hubungan, yaitu :²¹

1. Perundang-undangan

Pendekatan kritis-interkasionis melihat Undang-Undang sebagai langkah untuk menentukan perbuatan tertentu sebagai kriminal di masyarakat. Oleh sebab itu mempelajari proses pembuatan Undang-Undang (kriminalisasi) menjadi sangat penting artinya, mengingat sering banyak kepentingan yang mempengaruhi pembuatan Undang-Undang ini, sehingga definisi kejahatan menjadi berat sebelah karena pilihan kepentingan tersebut. Dengan demikian tindakan-tindakan tertentu cenderung untuk dijadikan tindak pidana sedangkan tindakan yang lain langka, demikian juga orang-orang dengan ciri-ciri tertentu cenderung dijadikan pelaku kejahatan (korban kejahatan undang-undang) sedangkan yang lain tidak.

2. Penegak hukum.

Setiap kejahatan yang legitimate umumnya akan diproses oleh penegak hukum, dan proses peradilan pidana sendiri sebenarnya merupakan faktor kriminogen, karena criminal justice system yang

²¹ IS Soesanto, *Victimology catatan Kuliah*, 13 November 1995. Undip Semarang.

bertujuan “welfare” itu dilaksanakan dengan tindakan penegak hukum yang bersifat “unwelfare”²². Karena itu perilaku penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun hakim pada dasarnya ikut memberikan pengaruh besar di dalam menafsirkan makna kejahatan itu sendiri, lebih-lebih terhadap batasan kejahatan yang kurang begitu jelas. IS Soesanto memberikan contoh ketika polisi menanya saksi/korban perkosaan untuk menemukan unsur-unsur perkosaan yang dikehendaki undang-undang yang cenderung menyakitkan korban yang bersangkutan.

3. Pelaku.

Mencari sebab kejahatan dengan fokus “pelaku” telah dilakukan aliran positivis, sebab pada waktu itu orang percaya bahwa penjahat adalah jenis manusia khusus yang berbeda dengan orang kebanyakan. Lombroso adalah tokoh terkenal penganut aliran ini karena perhatiannya yang besar dalam mempelajari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat pada waktu itu (1876). Pengaruh teori Lombroso nampak pada timbulnya persepsi ahli hukum yang memandang penjahat sebagai “subyek” dan bukan sebagai obyek belaka.²³

²² Muladi, *op-cit*, halaman 21

²³ IS Soesanto, *op-cit*, halaman 22

2. Korban.

Peranan korban berkembang pesat ketika Hans Von Hentig berbicara tentang hubungan pelaku dengan korban seperti telah disinggung di muka. Hubungan pelaku dengan korban lebih mendapat perhatian utama ketika pendekatan kritis lahir di tahun 1960-an, yang berpandangan bahwa "perbuatan kejahatan" selalu merupakan hubungan dengan orang lain khususnya korban. Menurut IS Soesanto studi tentang korban ini adalah perkembangan lebih lanjut studi tentang pelaku.²⁴

Dari Is Soesanto ini tergambar bahwa baik pelaku maupun korban sebenarnya tidak hanya sekedar ada suatu hubungan, tetapi ada peranan atau pranata lain yang ikut membantu membentuk pemahaman tentang kejahatan tersebut. Inilah yang dikenal dengan konstruksi sosial yang mewujudkan realitas sosial tentang kejahatan, pelaku/penjahat maupun korban. Untuk itu baik korban maupun pelaku sebenarnya "constructed" dan di sini sangat tergantung seberapa jauh pranata itu menkonstruksikan hal itu dalam membentuk realitas sosial.²⁵

²⁴ *Ibid*, halaman 23

²⁵ Realitas sosial dapat diartikan sebagai kenyataan tentang peristiwa/ kejadian, atau gambaran tentang kenyataan yang pertama merupakan realitas fenomena, sedang yang kedua adalah realitas konseptual.

Realitas sosial ini sangat tergantung dari kehendak manusia dan merupakan produk pelaku-korban sosial yaitu yang berdasarkan ideologi dan kepentingan mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, yang dikenal dengan "Konstruksi Sosial"

Dari IS. Soesanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya* "suatu studi", halaman 52, sebagaimana dikutip RB. Sularto, *Ibid*, halaman 98".

Dengan menggunakan analisis perilaku psikologis, Glugielmo Gulota menegaskan, hubungan antara pelaku dan korban dipandang sebagai hubungan interaksi antar individu dengan individu yang bergerak dari hubungan intrapersonal ke arah hubungan interpersonal atau yang disebut hubungan transpersonal. Secara tegas Gullota menyatakan tidak mungkin perilaku korban ini dikaji secara mandiri, tetapi harus dilihat secara bulat dari aspek kejahatan dan korban.

Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan perilaku korban-pelaku, Gulota melihat pengaruh teori mekanik yang berkembang selama lebih dua abad, di mana setiap kesatuan itu bisa diurai menjadi bagian-bagian, sampai bagian yang paling kecil yang disebut inti kesatuan. Proses pembagian atau pemecahan tersebut tentunya saling berkait membentuk hubungan linier secara deterministik atau ketergantungan. Pandangan demikian kemudian banyak mempengaruhi aliran pemikiran positivisme di dunia ilmu pengetahuan. Kaitannya dengan hubungan pelaku-korban, di sini hanya akan terlihat sebagai hubungan sebab-akibat semata. Maksudnya karena kelakuan pelakulah maka timbul yang namanya korban.

Pada perkembangan selanjutnya teori mekanik ini dipandang keliru atau tidak tepat lagi, yaitu setelah muncul teori leratif atau Quatum, yang sebenarnya berangkat dari pengembangan temuan Newton yang dipandang sebagai tokoh puncak teori mekanik. Teori

relativitas ini dipandang sebagai kontemporer, karena para ahli melihat.²⁶

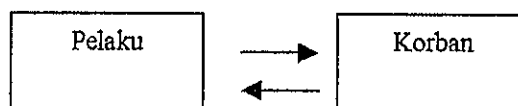
“.....the elaborations of new and more suitable coceptual schemes hinting at directions such as globality, totality, organization and the dynamic interaction of events”

Dengan demikiann maka tidak ada lagi kesatuan yang berdiri sendiri, kecuali membentuk sistem yang sangat luas, saling bergantung, membentuk sebuah organisasi yang tidak hanya sekedar terdiri dari bagian-bagian saja. kaitannya dengan hubungan antara pelaku-korban adalah bahwa antara keduanya tidak sekedar terjadi hubungan sebab akibat yang bersifat linier, tetapi hubungan keduanya itu terjadi karena adanya sebuah ikatan tertentu (organized) yaitu bisa karena perkawinan, teman, relasi dan sebagainya. Kaitannya dengan hal ini maka keluarga (famili) merupakan “The locus of victimization”.

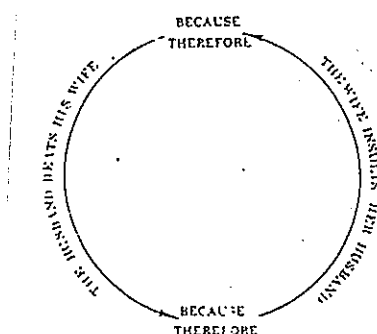
Dari teori relatif inilah maka dikenal model-model hubungan antar individu (kesatuan) seperti sibernetik yang dikenal dalam teori komunikasi. Sibernetik ini menjelaskan bahwa di dalam berbagai studi kasus diketahui adanya hubungan antara bagian yang satu dengan lainnya secara interaktif atau timbal balik. Jika teori ini dipakai, maka antara pelaku dan korban sebenarnya terjadi hubungan timbal balik diantara keduanya. Ini berarti baik pelaku maupun korban, keduanya bisa berperan sebagai variabel bebas dan variabel bergantung sesuai

²⁶ Ghuglielmo Gulota dan Marco Vagaggini, *op-cit*, halaman 51

dengan peran masing-masing. Jika digambarkan hubungan tersebut sebagai berikut : ²⁷



Kemudian masih ada lagi model hubungan yang di kembangkan dari teori ini, yaitu yang disebut hubungan sirkuler, yang sebenarnya merupakan pengembangan lanjut dari hubungan linier di dalam Newtonian. Gulota mencontohkan proses hubungan ini dalam kasus viktimisasi dalam sebuah keluarga, yaitu antara suami istri, yang membentuk diagram sebagai berikut : ²⁸



Jika demikian halnya, maka baik pelaku atau korban, keduanya lalu berperan ganda, dalam arti tergantung dari sisi mana peristiwa tersebut hendak dilihat, baik secara objektif maupun subjektif.

Berdasarkan berbagai pendekatan model hubungan di atas, dapat dikatakan hubungan pelaku dan korban ternyata tidak sederhana adanya, tetapi membentuk hubungan yang sistematis, saling

²⁷ *Ibid*, hal 53

²⁸ *Ibid*, hal 57

berinteraksi di antaranya dan terjadi dalam komunitas yang lebih luas, bisa dimulai dari hubungan antar individu, keluarga atau yang lebih kompleks lagi yaitu antar komponen yang ada dalam masyarakat sebagai kesatuan. Hubungan tersebut juga bisa membentuk kaukus hubungan yang lebih luas, yaitu apabila kesatuan individu yang terlibat di dalamnya tidak hanya melibatkan satu atau dua manusia, tetapi terhadap banyak pihak, yang jika hal ini terjadi tentunya akan membuat hubungan tersebut menjadi lebih rumit.

Hubungan yang amat rumit ini bisa di lihat umpamanya dalam berbagai bentuk kejahatan modern, seperti hubungan antara koruptor dengan negara/rakyat antara produsen dan konsumen, negara dengan bangsa, bank dengan para nasabahnya dan lain-lain. Beberapa contoh adalah :

1. Dampak kerugian perdagangan "Dishonest sale" di Jepang yang berdasarkan penelitian telah menyebabkan 98.800 orang menjadi korban dan kerugian mencapai 55.900.000.000 yen pada tahun 1991.²⁹
2. Skandal BRI, karena kredit macet para konglongmerat padahal dana itu disedot dari para nasabah kecil hingga ke desa-desa. Menurut sumber Tempo Uang, rakyat yang masuk ke konglongmerat itu mencapai Rp. 15,6 trilyun lebih, dan 53,7 % dari kredit kini macet.

²⁹ Hiedmichi Morozawa, *Peninjauan Kembali Terhadap Kejahatan dan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktiamisasi*, (Bandung, 1995) halaman 9.

Pemerintah kini harus menyuntikkan dana segar untuk menyelesaikan Bank yang sekarat, dari mana dana berasal, kalau bukan dari rakyat.³⁰

5. Kedudukan Korban Di Tengah Masyarakat

Konon menurut sejarahnya hubungan manusia dengan manusia lainnya pada mulanya terjadi dalam bentuk hubungan personal, dan semua urusan yang ada adalah menjadi tanggung jawab pribadi, termasuk di sini urusan untuk mempertahankan hidup. Dengan demikian manusia waktu itu boleh dikatakan lalu “menciptakan” hukum sendiri yang dalam hal ini bisa bertindak sebagai apapun yang dikehendakinya seperti sebagai polisi, jaksa atau hakim atau bahkan sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korbannya.³¹

Ketika terjadi konflik antar manusia, pada waktu itu diselesaikan sendiri antara keduanya termasuk di sini dalam memutuskan atau menghukum siapa yang bersalah dan siapa yang dihukum, siapa pelaku dan siapa korbannya.

Keadaan yang serba personal seperti itu, oleh John Locke disebut sebagai “natural” yaitu keadaan dimana manusia hidup bebas dan sederajat menurut kehendak hatinya sendiri. Keadaan ini menurutnya sudah bersifat sosial, karena manusia nalurinya ingin hidup rukun dan tenteram sesuai

³⁰ Tempo investigasi, Skandal BRI, kolosi yang mencekik Bank Rakyat, (Jakarta, 1999) hal 88-89. Menurut Andi Hamzah, kejahatan seperti ini mempunyai ciri-ciri :

(1) dilakukan secara transnasional (2) menggunakan alat canggih elektronik seperti komputer, telepon dll (3) metode akal juga canggih (4) kerugian yang timbul sangat besar (5) belum tersedia norma hukum positifnya (6) memerlukan keahlian khusus penegak hukum untuk menangannya (7) memerlukan biaya besar menangannya (8) diperlukan inteljen hukum untuk melacak. Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus (Jakarta, 1991)

³¹ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Random house Inc, (New York, 1968), hal. 8

dengan akalnyanya. John Locke juga menegaskan sifat hubungan antara manusia satu dengan yang lain sebagai "reciprocity" atau timbal balik.

Tetapi Thomas Hobbes yang lahir lebih dulu dibanding John Locke menegaskan bahwa keadaan alamiah (natural) bukannya sebagai suatu keadaan yang damai dan bahagia, tetapi suatu keadaan di mana segalanya kacau-balau dan tanpa aturan. Dalam keadaan demikian "hukum" dibuat oleh mereka yang fisiknya terkuat sebagaimana keadaannya di rimbaraya. Manusia seakan-akan merupakan binatang yang berada dalam keadaan bermusuhan, terancam oleh sesamanya dan menjadi mangsa bagi manusia yang lebih kuat fisiknya. Keadaan ini sangat dikenal dengan istilah "homo homini lupus", manusia adalah "binatang buas" bagi manusia yang lain.³²

Yang menarik di sini, justru pada masa-masa di mana hukum alam itu berlaku, kedudukan korban kejahatan sangat dihargai. Dikatakan demikian karena pada masa itu setiap individu dapat menuntut hak-haknya atas kerugian yang timbul akibat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan orang lain. Setiap korban kejahatan akan segera dapat menuntut ganti rugi atau imbalan yang setimpal dari sipelaku yang melakukan kejahatan. Jika kerugian itu bersifat fisik (person), maka sipelaku juga akan dibalas dengan bentuk tindakan yang sama, begitu juga bila kerugian

³² Periksa F. Isjwara SH. *Pengantar Ilmu Politik*.

Ia menggambarkan pernyataan Thomas Hobbes dengan mengutip W. Friedman sebagai berikut "... there is no place for industry, because the fruit there of is uncertain and consequently no culture of the earth, no navigation, nor use of commodities that may be imported by sea, no commodious building, no instrument of moving, and removing such things as require much force, no knowledge of the face of the earth, no account of time, no letter, no society, and which is worst of all, continual fear, and danger of violent death, and the life of man solitary, poor, nasty, brutish and short"

Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta, 1971) halaman 124.

itu bersifat material, pelakupun harus membayar kerugian materi yang sama. Pendeknya pada masa itu hak-hak manusia secara individual sangat mendapat kedudukan yang istimewa.

Menurut Stephen Schafes, keadaan demikian berlangsung cukup lama, yaitu sampai dengan abad pertengahan, dan ia menamakan sebagai "The Golden Age of the Victim" atau jaman kejayaan perhatian terhadap korban³³. Schafer juga menggambarkan sistem peradilan waktu itu sebagai berikut :

"..... The procedure was exclusively aimed at the private compensation of the victim, which took the form of private revenge (of private blood-vengence) or private composition. It did not require social sanction, and was nobody else's business".

Ketika orang menyadari bahwa keadaan "inferno" itu ternyata lebih banyak merugikan kepentingan manusia sendiri, maka kemudian manusia mengadakan suatu perjanjian untuk tidak saling menyerang yang dikenal dengan "perjanjian bersama". Di sini individu-individu tadi berjanji akan meyerahkan semua hak-hak kodrati yang dimilikinya secara alamiah itu kepada seorang atau badan. Thomas Hobbes menyebut penyerahan hak ini sebagai "Pactum subyectionis" yang bersifat mutlak. Artinya orang atau badan tersebut harus diberi wewenang penuh untuk "memerintah" secara

³³ Stephen Schafer antara lain menggambarkan berlakunya hukuman untuk pencuri berdasarkan Undang-undang dua belas meja. Percobaan mencuri hukumannya dua kali barang (obyek) yang dicuri, jika melawan pemilik empat kali, ditemukan di rumahnya dihukum tiga kali, dengan kekerasan empat kali. Keluarga ikut bertanggung jawab meskipun tidak tahu, semuanya untuk hukuman balasan kepada korban. Stephen Schafer, *op-cit*, halaman 13-20.

mutlak, sehingga kekuasaan negara atau raja itu tidak dapat disaingi atau ditandingi oleh kekuatan manapun.³⁴

Pergeseran sejarah di atas tentunya banyak berpengaruh pula pada persoalan hubungan serta kedudukan korban sebuah kejahatan. Hal ini mulai terlihat setelah abad pertengahan, di mana peranan publik mulai menggeser peranan individu. Manusia sejak saat itu mulai membedakan antara urusan publik dan urusan sipil. Hal ini tampak seperti ketika Voigt memdipersoalkan “sasaran “ sanki hukum dari Undang-Undang duabelas meja. Menurut Voigt, jika hukum itu ditujukan kepada orang berarti menjagi bagian hukum pidana, tetapi bila sasaran hukum itu diarahkan pada harta benda, berarti itu bagian hukum perdata. Sejak saat itu pula maka konsep tentang ganti rugi mulai terpisah dari konsep tentang hukuman.³⁵

Karena alasan tersebut, Stephen Schafer mengatakan bahwa masa “keemasan” korban berakhir karena :³⁶

“..... the injured person's right to restitution began to shrink, and after the treaty of verdun divided the Frankish empire, the fine that went to the state gradually replaced it entirely. The double payment continued, but now the king or overlord took all of it..... etc as the state monopolized the institution of punishment. The right of the injured were slowly sparated from the penal law composition, as the obligation to pay damages. Became sparated from criminal law and became a special field in civil law”.

³⁴ Thomas Hobbes dalam Isjwara, *op-cit*, halaman 125-126.

³⁵ Stephen Schrafer, *op-cit*, halaman 21.

³⁶ *Ibid*, halaman 21

Bandingkan juga dalam, Iswanto, Restitusi pada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pad tindak pidana lalu lintas jalan, (Yogyakarta, 1995), halaman 2-1

Dampak pengakuan terhadap lahirnya teori perjanjian ini memang amat luar biasa, karena konflik antar manusia tidak lagi diselesaikan sendiri oleh mereka, tetapi diserahkan sepenuhnya oleh badan yang ditunjuk, yaitu raja atau penguasa negara. Dengan demikian maka negaralah yang mengambil alih hak setiap individu, termasuk di sini hak-hak pelaku kejahatan maupun korban kejahatan. Karena itu seberapa jauh kepentingan korban ini terakomodasi, hal ini sangat tergantung pada kemauan politik dari penguasa negara yang bersangkutan. Namun Schafer melihat bahwa masalah hak-hak korban ini justru mengalami kemunduran (*decline*) ketika hak-hak individu ini bergeser menjadi kekuasaan raja atau Negara. Meskipun secara teoritik dikatakan raja atau Negara itu dipandang sebagai “wakil” dari setiap individu yang ada. Schafer juga mengatakan hal ini berlangsung berabad-abad lamanya dan baru berakhir pada dua dekade yang lalu.³⁷

Jika pada mulanya peran negara ini begitu dominan di dalam mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga acapkali mengabaikan kepentingan individu, mereka pada awal abad sembilanbelas hal di atas kembali dipersoalkan. Dengan menggunakan kekuasaannya seolah-olah negara bisa bertindak atas nama masyarakat di dalam menyelesaikan segala persoalan, termasuk dalam hal bila terjadi kejahatan. Di sini kejahatan diartikan sebagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat,

³⁷ Yang dimaksud berabad-abad disini adalah sejak abad pertengahan keatas, sedang terkahir sejak stephen Schrafer menulis bukunya, atau sekitar tahun 1940-an. *Ibid*, halaman 14 dan 30

bukan persoalan individu lagi. Oleh karena itu tindakan penuntutan atau dalam menghukum pelaku, hal ini sangat tergantung dari seberapa jauh kepentingan masyarakat (negara) itu dirugikan, dan seberapa jauh aturan hukum (Undang-Undang) yang ada dilanggar.

Kedudukan individu yang kurang mendapat perhatian negara inilah yang kemudian didipersoalkan, karena adanya anggapan bahwa masalah kejahatan sebenarnya bukan hanya sekedar urusan negara dan pelaku kejahatan, tetapi kejahatan sebenarnya juga menyangkut masalah moral, etika dan jiwa antara pelaku dan korban³⁸. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat (diwakili negara) dengan kepentingan individu (pelaku dan korban)³⁹. Pemikiran baru ini oleh Stephen Schafer disebut sebagai "orientasi universal".

Orientasi universal ini juga melihat secara berimbang aspek hubungan antara pelaku-korban, khususnya manakala sistem peradilan diberlakukan terhadapnya. Dari pemikiran Stephen Shafer ini kemudian lahir apa yang dikenal dengan Victim-offender Reconciliation Programs (VORPs) serta program mediasinya. Lahirnya VORPS ini tentunya didasarkan pada penolakan anggapan bahwa negaralah yang pertama kali menjadi korban kejahatan, karena urusan kejahatan ini telah diserahkan pada negara. Dalam hal ini VORPs melihat bahwa kejahatan sebenarnya

³⁸ *Ibid*, halaman 31

³⁹ Bandingkan dengan pandangan-pandangan monodualistik yang di kemukakan Barda Nawawi Arief, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidanan*, (Bandung, 1996), halaman 107-108.

merupakan konflik antara individu (pelaku-korban) sehingga individulah yang sebenarnya menjadi korban yang pertamakali, baru kemudian Negara. Karena itu seharusnya perlu upaya mendiasi antara pelaku dengan korban berikut kemungkinan pemberian pembayaran ganti rugi atas diri korban. Selanjutnya korban juga ikut berperan positif di dalam sistem peradilan yang dijalankan, tidak seperti yang dilihat selama ini, yaitu belum dikedepankannya peran korban ini di dalam proses peradilan, kecuali hanya sebatas sebaga saksi semata.⁴⁰

Lembaga VORPs ini pertamakali dilaksanakan oleh negara Kanada pada tahun 1974, kemudian berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1978. Mediasi VORPs ini terutama dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan yang menyangkut kerugian harta-benda. Menurut penelitian Coates dan Gehm di Indiana, tercatat bahwa 83% pelaku kejahatan merasa puas dengan program VORPs ini, sementara 53 % korban juga merasakan hal yang sama, 97 % korban juga mengatakan pentingnya program ini di masa mendatang, bahkan para korban yang diteliti berkomentar bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu secara pribadi dengan korban sehingga memahami persoalan mengapa pelaku melakukan kejahatannya. Para korban juga mengaku telah memperoleh

⁴⁰ Robert C. Davis, Arthur J. Lurigio, Wesley G. Skogan, *Victim of Crime*, (London-New Delhi, 1997), halaman 250.

ganti rugi yang hilang karena kejahatannya dari pelaku, dan para pelaku itu menurut korban kelihatan menyesali perbuatannya.⁴¹

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa tuntutan perlunya pendekatan komprehensif terhadap masalah kejahatan dan korban kejahatan tampak semakin jelas, yaitu bukan sekedar memperhatikan aspek perlindungan masyarakat (negara) semata, tetapi juga harus menjamin perlindungan individu, baik itu pelaku kejahatan maupun korban kejahatan. Inilah yang oleh Zehr disebut sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan. Zehr bahkan menyebut adanya perbedaan-perbedaan mendasar antara pendekatan lama dan baru dalam memahami kejahatan seperti tampak dalam diagram berikut :

Paradigma lama (Negara sebagai korban)	Paradigma baru (Pembaharuan keadilan)
1. Kejahatan dilihat sebagai urusan Negara	1. Kejahatan dilihat sebagai kekerasan terhadap seseorang atas orang lain.
2. Titik perhatian terletak pada pembuktian kesalahan	2. Titik perhatian terletak pada penyelesaian masalah pertanggungjawaban/kewajiban di masa mendatang.
3. Bersifat hubungan perlawanan dan proses acara sebagai landasan hukum	3. Dialog dan perundingan sebagai landasan hukum.
4. Pemberian penderitaan adalah untuk menghukum dan mencegah terjadinya kejahatan mendatang.	4. Pemberian ganti rugi bertujuan untuk pemulihan hubungan serta merupakan tujuan rekonsiliasi tersebut.
5. Keadilan dipandang sebagai tujuan dan proses peranan hak.	5. Keadilan dipandang sebagai tujuan dan proses peranan hak.
6. Hubungan dan konflik yang terjadi sesungguhnya tidak jelas/ kabur, tertekan; konflik terjadi antara individu dengan Negara	6. Kejahatan dilihat sebagai konflik interpersonal; nilai konflik diakui

⁴¹ *Ibid*, halaman 251.

“..... Victims who were satisfied noted that following reasons : They had the chance to meet with the offender personally and gain an understanding of why the offender committed the crime, they received restitution for their losses, they realized that the offender was sorry for the harm inflicted on them, and they were pleased with the concern expressed by the mediator”

Memang juga ditegaskan, ada sebagian dari ganti rugi tersebut tidak dipenuhi pelaku, tetapi jawaban ini hanya ada 3 % dari responden yang diteliti.

7. Ketidakadilan sosial dirumuskan kembali oleh orang lain	7. Ketidakadilan sosial adalah titik sentral yang ingin diperbaiki
8. Negara adalah abstraksi dari masyarakat.	8. Masyarakat langsung sebagai fasilitator dalam proses perbaikan hubungan.
9. Semangat persaingan, penilaian individualistik.	9. Semangat saling membantu antar pihak.
10. Tindakan negara terhadap pelaku-korban tidak jelas; pelaku terkesan pasif.	10. Korban dan pelaku menyadari permasalahannya. Korban diakui hak-haknya, sedangkan pelaku menyadari tanggungjawabnya.
11. Pelaku diperhitungkan untuk dihukum.	11. Pelaku dipertimbangkan untuk memahami akibat perbuatannya dan dibantu untuk memahami kebenaran.
12. Pelanggaran dipandang sebagai persoalan hukum bukan moral, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.	12. Pelanggaran dipahami dalam konteks menyeluruh, baik hukum, moral, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.
13. "hutang" yang ada hanya pada Negara, sedangkan peran masyarakat abstrak.	13. Hutang/tanggungjawab terhadap korban kejahatan diakui
14. Perhatian dipusatkan pada perilaku pelaku yang telah terjadi.	14. Perhatian dipusatkan pada konsumensi pelanggaran pelaku.
15. Stigma tentang kejahatan tidak akan berubah.	15. Stigma kejahatan bisa berubah dengan adanya upaya restorasi (perbaikan).
16. Tidak ada peluang untuk penyesalan dan pengampunan.	16. Ada kesempatan untuk menyesali perbuatan dan minta maaf.
17. Tergantung pada profesionalisme penguasa.	17. Tergantung pihak-pihak yang terlibat.

Paradigma keadilan menurut Zehr⁴²

Dari Zehr di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persoalan kejahatan sebenarnya bukan lagi menjadi sekedar urusan negara, tetapi dengan paradigma komprehensif hal tersebut dipandang pula sebagai urusan individual. Karena itu setiap individu yang terlibat dalam urusan kejahatan itu harus ikut diperhatikan hak-haknya, bahkan bila perlu harus diutamakan lebih dahulu urusannya, baru kemudian terhadap negara.

Dengan demikian makin jelas bahwa sebenarnya terjadi pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam masalah politik kriminal, setidaknya

⁴² *Ibid*, halaman 251

Adapun teks aslinya dalam Bahasa Inggris

Bandingkan dengan Muladi, *Pengaruh Gerakan Abolitionisme Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, dalam *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op-cit*, halaman 127-129

tidaknya berupa reposisi peran individu, apakah itu pelaku atau korban yang lebih diperhatikan hak-haknya.

Mengenai menguatnya peran individual ini John Naisbitt menulis bahwa abad 20 ini adalah abad kemenangan individu (Triumph of Individual) yang antara lain ditandai dengan :

“ an individual who create a work of art, embraces a political philosophy, best of life saving on a new business, inspires a colleague or family member to succeed, emigrates to a new country Etc, it is an individual who changes him or herself first before attempting to change society. Individual today can everage change for more effectively than most intitution ⁴³.

Dengan demikiann diprekdisikan bahwa peran individu ini akan menguat dan mewarnai segala aspek kehidupan di abad 20 itu.

Menurut John Naisbitt, peran individual yang makin kuat itu sebenarnya merupakan tuntutan zaman yang bersifat paradok dan global, sebagi fenomena baru yang tidak hanya terjadi di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga di bidang lainnya. Kuatnya pengaruh individual ini oleh Naisbitt digambarkan sebagai berikut :⁴⁴

“ Perubahan kekuasaan berubah dari Negara ke individu, dari vertikal ke horizontal, dari hierarki ke pembentukan jaringan. Kekuasaan mengalir kesegala arah tanpa dapat diramalkan, sedikit kacau, pasti berantakan, tidak tersusun baik seperti pengaturan hierarki dari atas ke bawah”.

Menguatnya peran individu ini juga pernah diingatkan oleh Alfin Tofler di dalam bukunya “Powershift”. Ketika membahas tentang “demokrasi

⁴³ John Naisbitt dan Patricia Aburdene, Mega Trend 2000, *The New Directions for the 1990's*, (New York, 1990) halaman 322.

⁴⁴ John Naisbitt, *Global Paradox*, Alih Bahasa Budinto, (Jakarta, 1994), halaman 49

massa” ia menegaskan bahwa banyak negara saat ini sedang mengalami proses pergeseran kekuasaan yang “sentralistik” kearah konsentrasi kekuasaan secara luas di tingkat bangsa. Maksudnya kekuasaan tidak lagi akan “seragam” melainkan akan menjadi “beragam”. Pergeseran kekuasaan ini telah terjadi secara radikal pada tingkat lokal, regional, nasional dan global. Bahkan kelompok “lokalis” kini menunjukkan peran aktifnya yang amat signifikan, dan hal ini bisa dilihat dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya.⁴⁵

Dengan berbagai alasan itu, dapat dikatakan bahwa telah ada perubahan cukup mendasar terhadap persoalan kedudukan korban ini di tengah masyarakat. Pada awalnya peranan korban memang cukup menonjol, yaitu ketika masalah hubungan hukum antara seorang dengan orang lain pada masa itu dipandang sebagai urusan individu. Tetapi kemudian zaman berubah, karena urusan hukum terutama masalah kejahatan berkembang menjadi urusan penguasa atau negara. Pada saat ini kedudukan korban dapat dikatakan mengalami kemunduran, bahkan dalam sistem peradilan hampir tidak tampak perannya. Jika semula korban menjadi subyek di dalam menuntut keadilan, maka setelah negara mengambil alih wewenang peran ini menjadi hilang. Munculnya paradigma baru, khususnya sejak pemikir-pemikir kritis kriminologi lahir setelah tahun enampuluan, makin terlihat adanya perhatian kembali terhadap kedudukan korban kejahatan ini, sehingga di dalam sistem peradilan, ia

⁴⁵ Alfin Tofler, *Pergeseran Kekuasaan*, Alih bahasa Hermawan Sulisty, (Jakarta, 1992), hal 6-7.

kembali ditempatkan sebagai subyek yang diakui hak-haknya. Dengan demikian maka korban bisa dikatakan telah mendapatkan pengakuan kembali di dalam masyarakat, yang perlu mendapat perlindungan, sejajar dengan pelaku serta subyek-subyek hukum lainnya.

Kembalinya perhatian terhadap korban kejahatan di atas sebenarnya tidak terlepas dari adanya perubahan wacana pemikiran yang berkembang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya di dalam percaturan dunia yang semakin menglobal akhir-akhir ini.

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI KORBAN.

a. Kebijakan Umum Perlindungan Korban.

Telah ditegaskan bahwa kebijakan hukum pidana itu memiliki jelajah kerja yang luas, karena semua tujuan untuk membuat hukum positif menjadi lebih baik menjadi ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal⁴⁶. Dengan mengemukakan pendapat Sudarto, Barda Nawawi Arief menjelaskan arti politik hukum itu sebagai :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

⁴⁶ Barda nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, 1996), halaman 27.

b. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁷

Berdasarkan asumsi di atas maka Sudarto menyatakan lebih lanjut bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-perundangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Karena itu politik hukum pidana menurut Sudarto adalah : “Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang.”⁴⁸

Situasi atau keadaan kemarin dengan saat sekarang tentu saja sudah berbeda. Begitu juga keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang juga sudah jauh berbeda. Oleh karena itu sungguh bukan merupakan pekerjaan mudah untuk membuat suatu perundang-undangan yang mampu menyesuaikan kondisi zaman, meskipun setiap undang-undang yang dibuat pada umumnya sudah dirancang untuk dapat menyesuaikan perkembangan zaman tersebut. Hal ini berlaku pula terhadap kebijakan pembuatan peraturan hukum pidana yang dampaknya dirasakan saat ini, sehingga hal tersebut berakibat pada

⁴⁷ *Loc-cit.*

⁴⁸ *Ibid*, halaman 28

persoalan efektifitas diberlakukannya hukum pidana itu sendiri. Sebagai contoh adalah mengenai sanksi pidana denda yang pada akhirnya harus sering diubah dan diganti dengan peraturan baru, karena nilai denda yang ditetapkan itu biasanya turun karena pengaruh inflasi di suatu waktu dan tempat.

Ketika masalah perlindungan korban tindak pidana mengedepan setelah tahun enam puluhan, maka hal ini berpengaruh pula pada aspek penyusunan kebijakan hukum pidana yang ada selama ini. Pertanyaan yang muncul adalah apakah perundang-undangan hukum pidana yang dibuat telah memberi tempat pada aspek perlindungan korban tindak pidana. Tentu saja ada-tidaknya perhatian pembuat Undang-Undang pada masalah perlindungan korban ini, bisa dipandang sebagai tolok ukur, yang pada akhirnya menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap “baik” maupun “tidak” nya perundang-undangan hukum pidana yang dibuat. Dengan kata lain ada pandangan bahwa untuk menilai baik atau tidaknya peraturan hukum pidana itu, harus dilihat pula apakah peraturan tersebut sudah mengatur atau setidaknya menyinggung masalah perlindungan korban ini di dalamnya. Jika kebijakan perlindungan korban ini sudah menjadi pilihan pembuat Undang-Undang itu adalah baik, sebaliknya jika belum, berarti Undang-Undang itu belum baik, atau belum menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Mengenai masalah perlindungan korban tindak pidana itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari aspek perlindungan masyarakat (social welfare) yang seyogyanya perlu mendapat perhatian yang

seimbang sebagaimana ketika hukum pidana memperhatikan sungguh-sungguh terhadap kedudukan pelaku tindak pidana di depan hukum. Tetapi karena masalah korban ini belum dipandang sebagai persoalan substansial dari hukum pidana, maka perhatian terhadap korban tindak pidana ini hanya dipandang sebagai persoalan di luar masalah pokok, yaitu perbuatan, pelaku atau pertanggungjawaban pelaku dan pidana. Karena itu di dalam pidato pengukuhan guru besarnya, Barda Nawawi Arief mengingatkan persoalan ini dengan begitu gamblang sebagai berikut :⁴⁹

“ Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai : a) perbuatan apa yang sepatutnya di pidana; b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu dst. Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan dalam menggunakan/ mengoperasionalisasikan/ mengfungsionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/ kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak diluar bidang hukum pidana sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dengan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan konsep nilai (pandangan/ideologi) sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat bangsa/negara”.

Jika persoalan perlindungan masyarakat dipandang sebagai hak dari masyarakat, maka di dalamnya tentunya termasuk hak para korban tindak pidana, yang secara substantif merupakan komponen dari unsur

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, 1998), halaman 111

masyarakat, yaitu masyarakat korban. Karena itu dari aspek kebijakan hukum pidana secara operasional, maka langkah atau upaya untuk melindungi korban menjadi bagian penting dari hukum pidana itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana ternyata tidak hanya terletak pada tiga persoalan pokok hukum pidana, tetapi juga harus memperhatikan persoalan di luar itu di dalam praktik/operasionalnya termasuk di sini terhadap masalah perlindungan korban. Bahkan menurut Iswanto, Persoalan Korban ini harus dipandang sebagai masalah pokok ke empat yang harus mendapat perhatian di samping, perbuatan, pelaku dan Pidana.⁵⁰

Berdasarkan kebijakan yang bersifat sosio politis misalnya terlihat dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, yang antara lain menyatakan :⁵¹

- Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku ;
- Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

⁵⁰ Iswanto, *Korban Tindak Pidana sebagai masalah Pokok Hukum Pidana seyogyanya diadopsi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Purwokerto, 2000), hal 19.

⁵¹ Budi Hermidi, *Beberapa Aspek Sistem Permsyarakatan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, 1996), halaman 60.

1. Kemanusiaan, dalam arti pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat".

Perhatian terhadap perlindungan korban kejahatan ini juga telah diterima sebagai resolusi PBB No 40/34 yaitu tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power". Muladi mengutip beberapa ketentuan penting dari resolusi tahun 1985 itu antara lain sebagai berikut :⁵²

- "6. The responsiveness of judicial and administrative processes to the needs of Victims should be facilitated by :
- a.
 - b. Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interest and consistent with the relevant national criminal justice system.

Dalam deklarasi tersebut juga diatur tentang restitusi, kompensasi dan asistensi pada korban yang berbunyi sebagai berikut :⁵³

⁵² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung, 1992), halaman 86.

⁵³ *Loc-cit*

- “ 8. Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate make fair restitution to victims. Their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses occurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.
9. Government should be review their practices, regulation and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanction.
-
12. When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavor to provide financial compensation.

Dilihat dari statement di atas sebenarnya sudah tidak perlu dipersoalkan lagi masalah perlindungan korban tindak pidana ini, karena bukan hanya sekedar menjadi kebijakan hukum pidana nasional, tetapi telah diakui sebagai kebijakan yang bersifat Internasional. Konsekuensinya adalah keharusan negara untuk mematuhi resolusi itu, jika di dalam percaturan dunia tidak ingin disisihkan, karena dipandang melanggar hak asasi manusia. Karena kebijakan hukum pidana ini menyangkut masalah perundang-undangan, maka yang harus dilakukan adalah mencoba melihat atau bahkan meninjau kembali apakah peraturan hukum pidana yang dibuat itu telah memperhatikan sapek perlindungan korban. Sedangkan apabila ingin membuat suatu perundang-undangan baru, pembuat harus memasukkan klausul perlindungan korban ini di dalamnya secara jelas.

Menurut Arnold N Enker, terdapat tiga tujuan berkaitan dengan pemberian kompensasi pada korban, yaitu.⁵⁴

1. Untuk membatasi upaya pemberian santunan, atau pemberian yang tidak ada keentuan di tengah masyarakat.
 2. Untuk menanamkan kepercayaan kepada korban terhadap pemberian kompensasi.
 3. Untuk memulihkan kembali kedudukan kedua belah pihak.
2. Kebijakan perlindungan korban dengan hukum pidana

Hingga saat ini, hukum pidana belum banyak mengatur soal perlindungan korban tindak pidana di dalam kebijakan aplikatif, khususnya berkenaan dengan pemberian sanksi pidana. Kebijakan hukum pidana yang ada tampaknya itu lebih berorientasi pada aspek "Perlindungan masyarakat" karena itu hukum pidana ini kemudian lebih dikenal sebagai "hukum publik".

Namun demikian bukan berarti peraturan hukum pidana sama sekali tidak memperhatikan aspek perlindungan korban. Menurut Barda Nawawi Arief, aspek perlindungan korban ini sebenarnya tetap ada, tetapi bersifat abstrak. Di dalam salah satu tulisannya beliau mengatakan⁵⁵ :

⁵⁴ 1. To limit recovery so as to asslere that the compasation el words wine not create indere, unforeseen financial drains upon puskik resources.
2. To recure by their operation only bona fide victim as a word recipients, and.
3. To render ajust dispotion in eath case deserving an award.

Arnold N. ENKER, *A Comparative, Review of Compensation for victims of crime*, (Lexington, London, 1974) dalam victimologi a new focus, halaman 120

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, halaman 55

“.... Dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “in abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak korban. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum “in abstracto”. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “in concreto”, tetapi “in abstracto”.

Dengan demikian Barda Nawawi Arief melihat bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan terhadap kerugian-kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Barda Nawawi Arief lebih lanjut mengemukakan :

“Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban potensial. Hal ini terlihat misalnya pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula pada jenis-jenis pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”, “perampasan barang-barang tertentu” dan “pengumuman putusan hakim”⁵⁶”.

Pencabutan hak-hak tertentu yang beliau contohkan adalah sebagai berikut :

⁵⁶ BNA, *Op-cit*, halaman 56

1. Pencabutan hak menjalankan pencaharian sebagai dokter/bidan dalam kasus pengguguran kandungan 349 KUHP).
2. Penutupan seluruh/sebagian perusahaan si terhukum (pasal 7 ayat 1b UU-TPE No. 7 Drt 1995).
3. Pencabutan izin usaha industri (terutama pasal 26 jo 19 Undang-undang No 5/1984 tentang perindustrian yang bermaksud melindungi standart bahan baku dan barang hasil industri) ;
4. Pencabutan surat ijin mengemudi SIM (pasal 70 Undang-undang No 14/1990 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya).

Meskipun pada umumnya perlindungan korban yang dimaksud bersifat tidak langsung, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam hal-hal tertentu hukum pidana positif (materiil/formil) memberi perhatian juga kepada korban secara langsung. Ia mengisyaratkan hal ini dengan menunjuk Pasal-Pasal yang tertulis dalam enam Undang-Undang, yaitu :

1. Pasal 14 c Kitab Undang-undang hukum Pidana.

Yaitu dalam hal hakim hendak menjatuhkan pidana bersyarat, ia dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk “mengganti kerugian” yang timbul dari tindak pidana, walaupun hal ini mengandung kelemahan dalam praktiknya⁵⁷.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 57

Kelemahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun; atau pidana kurungan.
- c. Hanya bersifat fakultatif, tidak imperatif.

2. Pasal 8 sub d Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No 7 Drt 1995).

Pasal ini memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi "Tata Tertib" atas biaya si terhukum⁵⁸.

3. Pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3/1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isinya memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti" yang jumlahnya sama dengan benda yang diperoleh dari korupsi.⁵⁹

4. Bab XIII (Pasal 98-101) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 / 1981).

Intinya memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, sehingga dalam putusan hakim berwenang menetapkan hukuman "pengganti Biaya" yang telah dikeluarkan pihak-pihak yang dirugikan.

5. Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1997), yaitu berupa tindakan tata tertib berupa :

- a. Perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 47 sub c)

⁵⁸ *Loc - cit*

Bentuknya adalah "kewajiban mengerjakan apa yang di lalaikan tanpa hak", "meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak" dan "melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat", atas biaya si terhukum.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 58.

Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana Korupsi. Periksa Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Penaggulangan Kejahatan*, (Semarang, 2000), halaman 62

- b. Mewajibkan menjerjakan apa yang dilakukan tanpa hak (Pasal 47 sub d).
- c. Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak (Pasal 47 sub e)
- 6. Tindak pidana Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 7, Tahun 1999) yaitu adanya Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Ganti Rugi (Pasal 63).

Atas dasar penafsiran empat Undang-Undang ini, Barda Nawawi Arief mengidentifikasikan empat bentuk kemungkinan pemberian ganti rugi langsung dalam hukum pidana positif sebagai berikut :

- a. Pemberian ganti rugi sebagai “syarat khusus” dalam pidana bersyarat (KUHP);
- b. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi sebagai tindakan tata tertib (Undang-undang No 7 Drt 1955);
- c. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-undang No 31/1999);
- d. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHP).

Yang menarik adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau uang pengganti yang disebut dalam Undang-Undang tersebut. Di sini terlihat bahwa pelaku atau terpidanalah yang paling harus bertanggung jawab atas pembayaran

tersebut, meskipun dalam hal ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tanggung jawab pembayaran itu dibebankan kepada negara. Ini menunjukkan bahwa peran negara sebagai pelindung masyarakat (korban) masih sangat kecil, lebih-lebih dalam praktik jarang sekali dijumpai kasus-kasus ganti rugi yang berhasil dicairkan, walaupun hakim mengabulkan tuntutan/gugatan yang diminta.⁶⁰ Oleh karena itu Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa perlindungan korban secara langsung ini sebagai “masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh sipelaku tindak pidana, dan belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana”.⁶¹

Menurut Marjono Reksodiputro, istilah pemberian ganti rugi oleh negara ini disebut dengan kompensasi. Sedangkan jika ganti rugi itu dibayar oleh pelaku, disebut Restitusi. Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat dibagi dua yaitu :

1. Bila mana negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Misalnya dalam kasus perkosaan, penganiyaan dan

⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan RI, No. 983/KMK.01/1983 Pasal 1 Hanya membatasi ganti rugi negara ini pada Tuntutan Praperadilan saja (Pasal 95 KUHP), Tidak termasuk Penggabungan Perkara. (Pasal 98).

Periksa pula Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangan dalam praktik* (Bandung, 1993), halaman 56-87

⁶¹ Loc-Cit

pembunuhan. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh, atau mengganti penghasilan yang hilang, mengganti biaya pemakaman, biaya penasihat hukum, ganti rugi cacat badan dan sebagainya.

2. Bilamana memang negaralah yang bertanggung jawab atas terjadinya penderitaan korban, misalnya dalam hal kekeliruan peradilan (judicial error) termasuk dalam hal kesalahan penjatuhan pidana (wrongfull imprisonment) atau dikategorikan sebagai telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of public power) termasuk pula kategori penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (abuse of economic power) yang menimbulkan kerugian karena kurang tanggapnya instansi pemerintahan, misalnya kerugian karena pencemaran lingkungan, keamanan dalam pekerjaan (labour safety) atau kerugian konsumen. Korban individual, tetapi umumnya sudah merupakan kelompok korban. Oleh karena itu penanganannya perlu secara khusus pula.

Terlepas dari perbedaan antara “restitusi” dengan “kompensasi”, yang penting adalah adanya kebijakan pemberian imbalan kepada korban kejahatan (tindak pidana) melalui perundang-undangan yang ada, termasuk di sini memberikan perhatian khusus terhadap korban, di dalam proses peradilan pidana yang dijalankan.

Mengenai kedudukan korban di dalam proses peradilan ini diakui memang belum tampak peran sertanya. Muladi bahkan mengatakan bahwa dilihat dari beberapa model sistem peradilan yang dikenal, ternyata agak sulit untuk menerima peranan korban ini. Sebagai contoh adalah sistem perlawanan (*adversary model*) yang dikenal di Amerika Serikat. Sistem ini hanya akan melihat dua kubu perlawanan antara pihak terdakwa dengan pembelanya disatu sisi, berhadapan dengan negara yang diwakili jaksa di pihak lain. Dengan demikian sulit untuk meletakkan kepentingan korban di dalam sistem peradilan model ini. Begitu pula di dalam sistem *Family model* yang dianut di Belanda. Walaupun model ini merupakan reaksi dari model perlawanan, tetapi justru di dalam pelaksanaannya menolak peranan korban di dalamnya. Ini terjadi karena sistem ini melihat pelaku tindak pidana bukan sebagai musuh masyarakat, tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Semua dilandasi cinta kasih yang berlanjut.⁶²

Guna pengaturan hukum pidana terhadap korban, Muladi kemudian memperkenalkan dua model yaitu :

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights Model*)

Di sini penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam

⁶² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op-Cit*, halaman 69-70

jalanya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga permasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat, dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis hal ini disebut *Partie Civile Model* (Civil Action System). Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

2. Model Pelayanan (service model)

Di sini penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standart baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh Polisi. Misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka natifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan penegak hukum yang lain.

Kemudian ada satu model lagi yang diperkenalkan yaitu yang berlaku di berbagai Negara Eropa Kontinental yang disebut dengan sistem inkuisitur. Proses peradilannya tidak bersifat kontes antara dua

pihak yang berkepentingan (*adversary model*), akan tetapi mendambakan kebenaran material dipimpin oleh hakim yang aktif. Tampilnya si korban dalam peradilan tidak akan dipandang sebagai gangguan terhadap proses peradilan.⁶³

Melihat apa yang dikemukakan Muladi itu, mempertegas pemahaman tentang kebijakan perlindungan korban yang seyogyanya dilakukan, yaitu tidak hanya sekedar memberikan santunan yang berbentuk "kompensasi" atau "restitusi" saja. Melainkan harus diperhatikan pula bagaimana memberikan peran korban ini di dalam proses peradilan, agar betul-betul memerankan posisi dirinya sebagai subyek dengan segala hak-haknya.

Di bawah ini dikemukakan beberapa hak korban yang patut diperhatikan yaitu :

1. Hak untuk melaporkan nasibnya dengan bebas, dalam arti terlepas dari kemungkinan tekanan-tekanan atau ketakutan;
2. Hak untuk memperoleh bantuan hukum, termasuk secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu.
3. Hak untuk mendapatkan pengobatan akibat kejahatan.
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.
5. Hak untuk mendapatkan pengakuan di dalam proses peradilan.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, halaman 67-70

⁶⁴ Moerdjono Reksodipuro, *Op-Cit*, halaman 92-93.

Dalam kongres PBB ke 7 mengenai "The Prevention of Crime and Treatment of offenders" direkomendasikan bahwa "victim's right should be Perceived as an integral part/ aspect of the total criminal justice sistem. Bahkan Zionimir Separovis, menyatakan bahwa hak-hak korban ini merupakan component part of the Concept of Human Right".

Lihat Barda Nawawi Arief, Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Dalam Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan, *Op-cit*, halaman 77

c. Gambaran perlindungan korban di beberapa Negara

Pada umumnya negara melihat persoalan perlindungan korban ini dari aspek seberapa jauh negara itu mengatur cara pemberian ganti rugi terhadap korban, baik melalui mekanisme peradilan pidana atau di luar itu. Beberapa negara yang telah melakukan kebijakan adalah :

1. New Zealand

Negara ini dikenal sebagai yang memiliki reputasi baik di bidang pemberian santunan terhadap korban, yaitu dengan diaturnya hal itu dalam Undang-Undang yang disebut "Criminal Injuries Compensation Act 1963". Dasar pemikiran pemuatan Undang-Undang ini adalah adanya tanggungjawab masyarakat terhadap para korban yang mengalami penderitaan akibat kegagalan negara dalam menanggulangi kejahatan.⁶⁵

Kompensasi kepada korban ini dipertimbangkan oleh badan yang disebut "Crime Compensation Tribunal" yang juga bertindak sebagai komisi penyelidik yang beranggota tiga orang dipimpin oleh seorang ketua. Sedangkan yang menjabat ketua haruslah seorang hakim yang telah berpengalaman kerja di atas tujuh tahun.

Lembaga tribunal ini untuk selanjutnya berwenang memohonkan yang diajukan pihak korban kemudian meneliti untuk mendengar pemohon itu.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op-Cit*, halaman 64-65.

Sayangnya pemberian kompensasi ini tidak berlaku untuk kerugian yang bersifat material, melainkan hanya dibatasi pada kerugian atau kerusakan yang berkaitan dengan diri korban itu sendiri, yaitu kerugian yang disebabkan karena kejahatan : perkosaan, perbuatan cabul terhadap anak di bawah 12 tahun, perbuatan tidak senonoh terhadap wanita umur 12-16 tahun atau terhadap wanita atau pria, pembunuhan atau percobaan pembunuhan penganiayaan, penganiayaan, pelanggaran hukum, mengancam untuk melanggar hukum, ancaman terhadap anak atau terhadap pria dan wanita melakukan tindakan kekerasan, meracuni dengan sengaja, penculikan gadis atau anak.

Kompensasi yang dapat diberikan sebagai akibat kejahatan di atas yaitu berupa penggantian atas biaya atau ongkos yang dikeluarkan, kerugian keuangan serta pengganti kerugian akibat rasa sakit dan penderitaan korban.

2. Inggris

Di negeri ini tidak semua tindak kejahatan bisa berakibat dapat menerima kompensasi. Pemberian kompensasi hanya diberikan kepada kejahatan tertentu yang dipandang pantas atau perlu mendapat pertolongan.

Pemberian kompensasi ini juga bukan karena negara mempunyai tanggung jawab untuk membayar, melainkan karena merupakan

bagian dari sebuah kebijakan sosial dan mungkin perluasan dari sistem kesejahteraan, atas dasar asumsi bahwa “terhadap korban kejahatan dengan kekerasan perlu diberikan sesuatu”.

Ada dua hal yang dipakai sebagai alasan pemberian kompensasi, pertama tuntutan (permintaan) kompensasi itu harus dibuat oleh lembaga (badan) peradilan atau semacamnya, dan kedua pemohon memang pantas diberi kompensasi tersebut. Untuk kejahatan (kasus) dimana korban ikut bersalah dalam kejadian itu tidak berhak mendapatkan kompensasi ini. selanjutnya negara menyusun perencanaan untuk program kompensasi ini yang ditangani sebuah badan yang disebut “The Criminal Injuries Compensation Board” di bawah kementerian dalam negeri. Badan inilah yang kemudian menentukan jumlah kerugian yang akan dibayar, tanpa ada hak untuk digugat/dibanding. Pemberian kompensasi juga diberikan apabila kasus yang terjadi bersifat “Personal injury” yang diakibatkan langsung oleh :

1. Kejahatan / tindak pidana
2. Penangkapan atau penahanan terasangka/terdakwa.
3. Tindakan pencegahan tindak pidana.
4. Membantu polisi dalam upaya melakukan penangkapan atau penahanan tersangka/terdakwa, atau membantu polisi melakukan pencegahan kejahatan.

Bila yang terjadi itu kasus besar atau pelanggaran yang terjadi senilai lebih dari 50 poundsterling (kurang-lebih 140 dolar atau Rp 1,2 juta) maka permohonan kompensasinya yang diperhatikan. Syaratnya peristiwa itu segera dilaporkan ke polisi, dan atau langsung disampaikan di depan pengadilan setelah permohonan sendiri diperiksa keadaanya oleh tim kesehatan.

Untuk kasus perkosaan, kompensasi diberikan sebagai imbalan rasa sakit, perlakuan terhadap korban maupun shock, atau karena kurang diperhatikannya kasus itu. Tetapi ganti rugi itu tidak akan diberikan bila yang diminta adalah biaya pemeliharaan bayi hasil kejahatan seksual, atau jika ganti rugi itu diminta oleh keluarga pelaku. Selanjutnya kompensasi ini tidak akan diberikan, jika sudah ada badan lainnya yang memberinya.

Hanya dalam waktu delapan bulan sejak badan the Criminal Injuries Compensation Board (CICB) berdiri, sudah ada 2216 permintaan kompensasi yang masuk. 1.184 diantaranya diproses, dengan akumulasi ganti rugi sebesar 304.643 poundsterling atau \pm 853.000 dolar. Sedangkan sisanya 1032 menunggu putusan.

Pemberian kompensasi di Inggris ini termasuk lebih baik (tinggi) dibanding New Zeland atau Scotlandia, terutama dilihat dari jumlah permintaan maupun besarnya pembayaran. Kini badan CICB

sudah berusia 35 tahun (berdiri pada tanggal 31 Maret 1965), dan kini sudah banyak klaim kompensasi yang masuk, tentunya sudah jauh lebih besar dari angka di atas.⁶⁶

3. Swiss

Di negeri ini pengajuan permintaan ganti rugi agak rumit dan sulit. Hal ini karena adanya 21 badan yang ikut terlibat di dalam pembuatan hukum di Swiss yang dikenal dengan "Cantonal Law". Setidaknya ada lima jalur pengaduan yang berbeda, yaitu yang disebut : Private complainment; Civil palintif; Interested party; Informer dan Injured Party. Menurut Stephent Schafer hal itu menunjukkan adanya dua jalur yang bisa ditempuh penuntut ganti rugi, yaitu jalur pidana atau perdata. Pada umumnya pemohon memakai jalur perdata / sipil ini.

Jika korban menggunakan jalur pidana, ia harus menerima apa yang disebut "adhesive prosedure" (Adhasionprozess) yaitu kemungkinan diterima atau ditolaknya permintaan yang diajukan, sehingga hal ini membatasi keberhasilan yang diminta.

Dua kemungkinan yang bisa didapat korban yang mengajukan tuntutan, yaitu :

1. Untuk korban tindak pidana yang pelakunya tidak mau memberi ganti rugi.

⁶⁶ Ibid, halaman 65-67

Ia bisa minta kepada pengadilan untuk memutuskan agar pelaku membayarnya. Atau pengadilan bisa memerintah pelaku untuk berjanji membayarnya melalui cara memberi barang, atau memberi hasil penjualan barang tertentu, atau berbuat sesuatu untuk negara.

2. Untuk kasus tindak pidana pada seseorang yang serius, sementara kompensasinya tidak ada kelanjutannya, ada kemungkinan akan memperoleh kompensasi dari yang disebut "Busse", yaitu pembayaran dari orang tertentu.

Yang jelas bagi terpidana yang bersedia memberikan ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan, hal itu bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman yang dijalani.⁶⁷

4. Amerika

Pemikiran tentang perlunya perlindungan korban baru muncul ketika para ahli kriminologi, mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut. Terakhir hal tersebut diagendakan dalam apa yang disebut Minnesetta Law Review Symposium. Tetapi penetapan kebijakan perlindungan korban ini tidak dibuat oleh pemerintah federal, tetapi langsung ditangani sendiri oleh negara bagian.

⁶⁷ Stefen Schafes, *Op-cit*, halaman 116-117

Adapun negara bagian yang pertama mengatur soal ganti rugi korban tindak pidana adalah Kalifornia pada tahun 1965, di dalam Undang-Undangnya Kalifornia tidak menggunakan istilah Kompensasi atau Retribusi terhadap korban, tetapi disebutkan sebagai "AID" (bantuan).

Maksimum bantuan yang dibagikan adalah \$ 100.000,- dan ini hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang keras/serius.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, halaman 132

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Legislatif Hukum Pidana Yang Berorientasi Pada Aspek Perlindungan Korban.

Yang dimaksud dengan kebijakan legislatif yaitu kebijakan (policy) dalam menetapkan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan¹. Makna "sesuatu" di sini tentunya haruslah tentang sesuatu yang terkait dengan hukum pidana, karena dalam konteks ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan hukum pidana, bukan kebijakan di bidang hukum lainnya. Oleh karena itu jika merujuk pada definisi kebijakan legislatif yang dikemukakan Barda Nawawi Arief di atas, maka kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah berupa : kebijakan dalam menetapkan atau merumuskan hukum pidana di dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa untuk dapat dikatakan sebagai kebijakan legislatif hukum pidana harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Merupakan kebijakan menetapkan/merumuskan ketentuan perundang-undangan
2. Terdapat substansi hukum pidana di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, 1996), halaman 245. Beliau juga mengistilahkan kebijakan legislatif dengan "Kebijakan Formulatif"

Jika kebijakan legislatif hukum pidana yang dimaksud difokuskan pada kebijakan hukum pidana di bisang perlindungan korban, konsekuensinya harus ada tambahan syarat yaitu adanya perhatian pembuat Undang-Undang terhadap persoalan perlindungan korban tersebut yang kemudian secara mutatis dituangkan di dalam rumusan perundang-undangan yang dibuatnya.

Tidak semua produk perundang-undangan yang dibuat badan legislatif merupakan kebijakan hukum pidana dan tidak semua kebijakan hukum pidana itu menyinggung masalah perlindungan korban. Tetapi untuk mengetahui Undang-Undang mana yang merupakan kebijakan hukum pidana dan bukan, serta kebijakan hukum pidana mana yang telah memperhatikan aspek perlindungan korban atau belum sepenuhnya, perlu dilakukan kajian yang menyeluruh terhadap semua produk perundang-undangan yang selama ini berhasil dibuat atau dirumuskan.

Mengingat untuk melakukan kajian terhadap seluruh produk perundang-undangan adalah tidak mungkin, maka penelitian ini mengambil sampel terbatas, yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap produk perundang-undangan yang dibuat mulai tahun 1980 ke atas, sampai dengan tahun 1999. Kajian terhadap produk perundang-undangan yang dimaksud memang tidak terlalu detail, tetapi berdasarkan pengamatan secara seksama ternyata bisa dipilah, mana yang merupakan produk yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dan tidak. Begitu pula yang merupakan kebijakan

hukum pidana yang secara kualitatif dipandang belum atau sudah memperhatikan aspek perlindungan korban.

Hasil inventarisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Undang-Undang Produk Tahun 1980

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
Nomor 1 Tahun 1980	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1980-1981
Nomor 2 Tahun 1980*	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu; Anggota Badan Pernusyawaratan Rakyat, Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975
Nomor 3 Tahun 1980	Tambahan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980.
Nomor 4 Tahun 1980	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970
Nomor 5 Tahun 1980	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971
Nomor 6 Tahun 1980	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973
Nomor 7 Tahun 1980	Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 8 Tahun 1980	Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Nomor 9 Tahun 1980	Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor 10 Tahun 1980	Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
Nomor 11 Tahun 1980*	Tindak Pidana Suap
Nomor 12 Tahun 1980	Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi Dan Tinggi Negara.
Nomor 13 Tahun 1980*	Jalan

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Departemen Penerangan Republik Indonesia

Tanda * : Merupakan kebijakan hukum pidana

Tabel 2
Undang-Undang Produk Tahun 1981

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
Nomor 1 Tahun 1981	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1981-1982
Nomor 2 Tahun 1981*	Metrologi Legal
Nomor 3 Tahun 1981	Tambahan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Nomor 4 Tahun 1981	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973
Nomor 5 Tahun 1981	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974
Nomor 6 Tahun 1981*	Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention Of Counterfeting Curency And Protocol, Geneva 1929).
Nomor 7 Tahun 1981*	Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan
Nomor 8 Tahun 1981*	Hukum Acara Pidana.

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Departemen Penerangan Republik Indonesia

Tanda* : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 3
Undang-Undang Produk Tahun 1982

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1982	Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Operasionalnya Mengenai Hal Memeroleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relation And Optional Protocol, The Vienna Diplomatic Relation Concerning Acquisition Of Nationality 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memeroleh Kewarganegaraan. (Vienna Convention Consular Relation And Optional Protocol To The Vienna Convention Onm Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality, 1963)
Nomor 2 Tahun 1982	Pengesahan Konvesnsi Mengenai Misi Khusus (Convention On Spesial Mission, New York 1969)
Nomor 3 Tahun 1982*	Wajib Daftar Perusahaan

1	2
Nomor 4 Tahun 1982*	Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nomor 5 Tahun 1982	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Nomor 6 Tahun 1982*	Hak Cipta
Nomor 7 Tahun 1982	Tambahan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981
Nomor 8 Tahun 1982	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975
Nomor 9 Tahun 1982	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
Nomor 10 Tahun 1982	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977
Nomor 11 Tahun 1982	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
Nomor 12 Tahun 1982	Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979
Nomor 13 Tahun 1982	Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor 14 Tahun 1982	Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor 15 Tahun 1982	Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Nomor 16 Tahun 1982	Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Nomor 17 Tahun 1982	Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Nomor 18 Tahun 1982	Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
Nomor 19 Tahun 1982	Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
Nomor 20 Tahun 1982	Ketentuan Pokok Pertahanan Dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 1982*	Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Departemen Penerangan Republik Indonesia

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 4
Undang-Undang Produk Tahun 1983

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
Nomor 1 Tahun 1983	Pengesahan Perjanjian Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Dilaut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Indonesia Yang Terletak Diantara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat
Nomor 2 Tahun 1983	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1983-1984
Nomor 3 Tahun 1983	Tambahan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
Nomor 4 Tahun 1983	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1970
Nomor 5 Tahun 1983*	Zona Ekonomi Eksklusif
Nomor 6 Tahun 1983*	Ketentuan Umum Tentang Tata Cara Perpajakan.
Nomor 7 Tahun 1983	Pajak Penghasilan
Nomor 8 Tahun 1983	Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1-55 Sekretaris Negara RI, 1983
Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 5
Undang-Undang Produk Tahun 1984

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1984	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
Nomor 2 Tahun 1984	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Nomor 3 Tahun 1984	Tambahan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984
Nomor 4 Tahun 1984*	Wabah Penyakit Menular
Nomor 5 Tahun 1984*	Perindustrian
Nomor 6 Tahun 1984*	Pos
Nomor 7 Tahun 1984	Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women)

UPI-POSTAL UNDIP

1	2
Nomor 8 Tahun 1984	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Menjadi Undang-Undang.

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Sekretaris Negara RI
Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 6
Undang-Undang Produk Tahun 1985

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1985	Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat, Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
Nomor 2 Tahun 1985	Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Nomor 3 Tahun 1985	Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya
Nomor 4 Tahun 1985	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
Nomor 5 Tahun 1985*	Referendum
Nomor 6 Tahun 1985	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982
Nomor 7 Tahun 1985	Tambahan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
Nomor 8 Tahun 1985	Organisasi Kemasyarakatan
Nomor 9 Tahun 1985*	Perikanan
Nomor 10 Tahun 1985	Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Sabang
Nomor 11 Tahun 1985	Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional
Nomor 12 Tahun 1985*	Pajak Bumi dan Bangunan
Nomor 13 Tahun 1985*	Bea Meterai

1	2
Nomor 14 Tahun 1985	Mahkamah Agung
Nomor 15 Tahun 1985*	Ketenagalistrikan
Nomor 16 Tahun 1985*	Rumah Susun
Nomor 17 Tahun 1985*	Pengesahan Convention On The Law Of The Sea (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut)

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Sekretariat Negara RI
Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 7

Undang-Undang Produk Tahun 1986

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
Nomor 1 Tahun 1986	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1986/1987
Nomor 2 Tahun 1986	Peradilan Umum
Nomor 3 Tahun 1986	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
Nomor 4 Tahun 1986	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983
Nomor 5 Tahun 1986	Peradilan Tata Usaha Negara

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986

Tabel 8

Undang-Undang Produk Tahun 1987

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1987	Kamar Dagang Dan Industri
Nomor 2 Tahun 1987	Pengesahan "Treaty Of Mutual Respect Friendship And Cooperation Between Republik Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea"
Nomor 3 Tahun 1987	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1987/1988
Nomor 4 Tahun 1987	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
Nomor 5 Tahun 1987	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984
Nomor 6 Tahun 1987	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985

1	2
Nomor 7 Tahun 1987*	Perubahan Atas Undang-Undang Mnomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta
Nomor 8 Tahun 1987	Protokol

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 9

Undang-Undang Produk Tahun 1988

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1988	Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Kelentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1988*	Prajurit ABRI
Nomor 3 Tahun 1988	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1988/1989
Nomor 4 Tahun 1988	Pengesahan Protokol Ameding The Treaty Of Amity And Cooporation In Soth East Asia
Nomor 5 Tahun 1988	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988
Nomor 6 Tahun 1988	Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1988

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 10

Undang-Undang Produk Tahun 1989

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1989	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1989/1990
Nomor 2 Tahun 1989*	Sistem Pendidikan Nasional
Noimor 3 Tahun 1989*	Telekomunikasi
Nomor 4 Tahun 1989	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990

1	2
Nomor 5 Tahun 1989	Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
Nomor 6 Tahun 1989 *	Hak Paten
Nomor 7 Tahun 1989	Peradilan Agama

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1988

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 11

Undang-Undang Produk Tahun 1990

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
Nomor 1 Tahun 1990	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1990/1991
Nomor 2 Tahun 1990	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990
Nomor 3 Tahun 1990	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1987/1988
Nomor 4 Tahun 1990*	Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
Nomor 5 Tahun 1990*	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Nomor 6 Tahun 1990	Pembentukan Kabupaten Tingkat II Halmahera Tengah
Nomor 7 Tahun 1990	Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bitung
Nomor 8 Tahun 1990	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 9 Tahun 1990*	Kepariwisata
Nomor 10 Tahun 1990	Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Medan Dan Ujungpandang
Nomor 11 Tahun 1990	Susunan Pemerintah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Sekretariat Negara Republik Indonesia

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 12
Undang-Undang Produk Tahun 1990

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
Nomor 1 Tahun 1991	Pengesahan Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Zone Of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East Timor And Northern Of Australia (Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Zona Kerjasama Daerah Antara Provinsi Timor Timur Dan Australia Bagian Barat).
Nomor 2 Tahun 1991	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Nomor 3 Tahun 1991	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
Nomor 4 Tahun 1991	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1988/1989
Nomor 5 Tahun 1991*	Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1991	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
Nomor 7 Tahun 1991	Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Sekretariat Negara Republik Indonesia

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 13
Undang-Undang Produk Tahun 1992

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1992	Pembentukan Daerah Tingkat II Denpasar
Nomor 2 Tahun 1992*	Usaha Perasuransian
Nomor 3 Tahun 1992*	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Nomor 4 Tahun 1992*	Perumahan Dan Pemukiman
Nomor 5 Tahun 1992*	Benda Cagar Budaya
Nomor 6 Tahun 1992	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
Nomor 7 Tahun 1992*	Perbankan
Nomor 8 Tahun 1992*	Perfilman

1	2
Nomor 9 Tahun 1992*	Keimigrasian
Nomor 10 Tahun 1992	Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Nomor 11 Tahun 1992*	Dana Pensiun
Nomor 12 Tahun 1992*	Sistem Budidaya Tanaman
Nomor 13 Tahun 1992*	Perkeretaapian
Nomor 14 Tahun 1992*	Lalu Lintas Angkutan Jalan
Nomor 15 Tahun 1992*	Penerbangan
Nomor 16 Tahun 1992*	Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan
Nomor 17 Tahun 1992	Tambahan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Nomor 18 Tahun 1992	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1989/1990
Nomor 19 Tahun 1992	Merek
Nomor 20 Tahun 1992	Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Yogyakarta, Bandarlampung, Dan Jambi
Nomor 21 Tahun 1992*	Pelayaran
Nomor 22 Tahun 1992	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Miulai Berlakunya Undang -Undang Nomor14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Nomor 23 Tahun 1992*	Kesehatan
Nomor 24 Tahun 1992	Penataan Ruang
Nomor 25 Tahun 1992	Perkoperasian

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, CV. Eka Jaya
Jakarta 1993

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 14
Undang-Undang Produk Tahun 1993

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
Nomor 1 Tahun 1993	Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 2 Tahun 1993	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
Nomor 3 Tahun 1993	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994
Nomor 4 Tahun 1993	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
Nomor 5 Tahun 1993	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
Nomor 6 Tahun 1993	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
Nomor 7 Tahun 1993	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1990/1991

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Sekretariat Negara Republik Indonesia

Tabel 15
Undang-Undang Produk Tahun 1994

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1994	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995
Nomor 2 Tahun 1994	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994
Nomor 3 Tahun 1994	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1991/1992
Nomor 4 Tahun 1994	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
Nomor 5 Tahun 1994	Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi PBB Mengenai Keaneka Ragaman Hayati)
Nomor 6 Tahun 1994	Pengesahan United Nation On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Nomor 7 Tahun 1994	Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Nomor 8 Tahun 1994*	Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia

1	2
Nomor 9 Tahun 1994*	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Nomor 10 Tahun 1994	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
Nomor 11 Tahun 1994	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Nomor 12 Tahun 1994	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, CV. Eka Jaya
Jakarta 1995

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 16

Undang-Undang Produk Tahun 1995

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1995	Perseroan Terbatas
Nomor 2 Tahun 1995	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996
Nomor 3 Tahun 1995	Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Bengkulu, Palu, Kendari, Dan Kupang
Nomor 4 Tahun 1995	Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995
Nomor 5 Tahun 1995	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995
Nomor 6 Tahun 1995	Pembentukan Daerah Tingkat II Kendari
Nomor 7 Tahun 1995	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1992/1993
Nomor 8 Tahun 1995*	Pasar Modal
Nomor 9 Tahun 1995*	Usaha Kecil
Nomor 10 Tahun 1995*	Kepabeanan

1	2
Nomor 11 Tahun 1995*	Cukai
Nomor 12 Tahun 1995*	Pemasyarakatan
Nomor 13 Tahun 1995	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1993/1994

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, CV. Eka Jaya
Jakarta 1995

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 17

Undang-Undang Produk Tahun 1996

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
Nomor 1 Tahun 1996	Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
Nomor 2 Tahun 1996	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Nomor 3 Tahun 1996	Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996
Nomor 4 Tahun 1996	Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Nomor 5 Tahun 1996	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor 6 Tahun 1996	Perairan Indonesia
Nomor 7 Tahun 1996*	Pangan
Nomor 8 Tahun 1996*	Pengesahan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
Nomor 9 Tahun 1996	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, CV. Eka Jaya
Jakarta, 1997

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 18

Undang-Undang Produk Tahun 1997

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1997	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995
Nomor 2 Tahun 1997	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
Nomor 3 Tahun 1997*	Pengadilan Anak

1	2
Nomor 4 Tahun 1997*	Penyandang Cacat
Nomor 5 Tahun 1997*	Psikotropika
Nomor 6 Tahun 1997	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Nomor 7 Tahun 1997*	Pengesahan United Nation Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic, Drugs, And Psycotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Narkotika Dan Psikotropika, 1998)
Nomor 8 Tahun 1997	Dokumen Perusahaan
Nomor 9 Tahun 1997*	Pengesahan Treaty On The South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Nuklir Di Asia Tenggara)
Nomor 10 Tahun 1997*	Ketenaga Nukliran
Nomor 11 Tahun 1997	Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Nomor 12 Tahun 1997*	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Nomor 13 Tahun 1997*	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Hak Paten
Nomor 14 Tahun 1997*	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
Nomor 15 Tahun 1997	Ketransmigrasian
Nomor 16 Tahun 1997*	Statistik
Nomor 17 Tahun 1997	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Nomor 18 Tahun 1997*	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Nomor 19 Tahun 1997	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Nomor 20 Tahun 1997*	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Nomor 21 Tahun 1997	Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan
Nomor 22 Tahun 1997*	Narkotika
Nomor 23 Tahun 1997*	Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nomor 24 Tahun 1997*	Penyiaran

1	2
Nomor 25 Tahun 1997*	Ketenagakerjaan
Nomor 26 Tahun 1997*	Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 1997*	Mobilisasi Dan Demobilisasi
Nomor 28 Tahun 1997*	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 1997	Pembentukan Kotamadia Tingkat II Tarakan
Nomor 30 Tahun 1997	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1995/1996
Nomor 31 Tahun 1997*	Peradilan Militer
Nomor 32 Tahun 1997*	Perdagangan Berjangka Dan Komoditi

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, CV. Eka Jaya Jakarta 1998

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 19

Undang-Undang Produk Tahun 1998

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1998	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1998	Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Nomor 3 Tahun 1998	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Nomor 4 Tahun 1998	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1998*	Pengesahan Convention Againsts Torture And Ather Cruel In Human Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia)

1	2
Nomor 6 Tahun 1998*	Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling, And Use Of Chemical Weapons And Their Destruction. (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan Produksi Penimbunan Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya)
Nomor 7 Tahun 1998	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Nomor 8 Tahun 1998	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1996/1997
Nomor 9 Tahun 1998*	Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum
Nomor 10 Tahun 1998*	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Nomor 11 tahun 1998	Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
Nomor 12 Tahun 1998	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Tingkat II Mandailing
Nomor 13 Tahun 1998*	Kesejahteraan Usia Lanjut

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, CV. Eka Jaya
Jakarta 1999

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Tabel 20

Undang-Undang Produk Tahun 1999

Nomor / Tahun	Perihal / Tentang
1	2
Nomor 1 Tahun 1999 *	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dengan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Mengenai Masalah Pidana
Nomor 2 Tahun 1999*	Partai Politik
Nomor 3 Tahun 1999*	Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 1999*	Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 5 Tahun 1999*	Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Nomor 6 Tahun 1999*	Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum

1	2
Nomor 7 Tahun 1999	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Nomor 8 Tahun 1999*	Perlindungan Konsumen
Nomor 9 Tahun 1999	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
Nomor 10 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
Nomor 11 Tahun 1999	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
Nomor 12 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Metro
Nomor 13 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lawu Utara
Nomor 14 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Simal
Nomor 15 Tahun 1999	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
Nomor 16 Tahun 1999	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
Nomor 17 Tahun 1999*	Penyelenggara Ibadah Haji
Nomor 18 Tahun 1999*	Jasa Konstruksi
Nomor 19 Tahun 1999*	Pengesahan International Labour Organization Convention Nomor 105.
Nomor 20 Tahun 1999*	Pengesahan International Labour Organization Convention Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Nomor 21 Tahun 1999*	Pengesahan International Labour Organization Convention Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan
Nomor 22 Tahun 1999*	Pemerintah Daerah
Nomor 23 Tahun 1999*	Bank Indonesia
Nomor 24 Tahun 1999*	Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar
Nomor 25 Tahun 1999	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Nomor 26 Tahun 1999*	Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
Nomor 27 Tahun 1999*	Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Nomor 28 Tahun 1999*	Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme

1	2
Nomor 29 Tahun 1999*	Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965
Nomor 30 Tahun 1999	Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Nomor 31 Tahun 1999*	Penyerantasan Tindak Pidana Korupsi
Nomor 32 Tahun 1999	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
Nomor 33 Tahun 1999	Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1997/1998
Nomor 34 Tahun 1999	Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Nomor 35 Tahun 1999*	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Nomor 36 Tahun 1999*	Telekomunikasi
Nomor 37 Tahun 1999	Hubungan Luar Negeri
Nomor 38 Tahun 1999*	Pengelolaan Zakat
Nomor 39 Tahun 1999*	Hak Azasi Manusia
Nomor 40 Tahun 1999*	Pers
Nomor 41 Tahun 1999*	Kehutanan
Nomor 42 Tahun 1999*	Jaminan Fidusia
Nomor 43 Tahun 1999	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Nomor 44 Tahun 1999	Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 45 Tahun 1999	Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Peniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
Nomor 46 Tahun 1999	Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 47 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang
Nomor 48 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeuleu.

1	2
Nomor 49 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Mentawai
Nomor 50 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Gualenjo
Nomor 51 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan.
Nomor 52 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Lembata
Nomor 53 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.
Nomor 54 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Karolangan, Kabupaten Lebo, Kabupaten Moara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Nomor 55 Tahun 1999	Pembentukan Kabupaten Landak
Nomor 56 Tahun 1999*	Rakyat Terlatih

Sumber : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1999, CV. Eka Jaya Jakarta 2000

Tanda * : Merupakan Kebijakan Hukum Pidana

Berdasarkan tabel; 1 s/d 20 di atas, dapat diketahui frekuensi produk perundang-undangan yang dibuat badan legislatif selama 20 tahun terakhir, baik yang merupakan kebijaksanaan hukum pidana atau tidak sebagai berikut² :

² Dikatakan kebijaksanaan hukum pidana bila di dalam Undang-Undang memuat antara lain ; aturan formil/materiil hukum pidana, atau ketentuan lain yang setidaknya-tidaknya menyangkut persoalan hukum pidana. Adapun substansi pokok hukum pidana meliputi tiga persoalan, yaitu perbuatan, pertanggungjawaban dan pidana. Barda Nawawi Arief menyebut hal ini dengan tindak pidana (1), kesalahan (2), dan pidana (3). Periksa Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Penegasan Hukum Pidana*, (Bandung, 1998) hal 111.

Tabel 21
Jumlah Undang-Undang Yang Dibuat Tahun 1980 s/d 1999

No	Tahun Pembuatan	Merupakan Kebijakan Hukum Pidana	Tidak Merupakan Kebijakan Hukum Pidana	Jumlah
1	1980	3	10	13
2	1981	4	4	8
3	1982	4	17	21
4	1983	2	6	8
5	1984	3	5	8
6	1985	7	10	17
7	1986	-	5	5
8	1987	1	7	8
9	1988	1	5	6
10	1989	3	4	7
11	1990	3	8	11
12	1991	1	6	7
13	1992	16	9	25
14	1993	-	7	7
15	1994	2	10	12
16	1995	5	8	13
17	1996	2	7	9
18	1997	21	11	32
19	1998	5	8	13
20	1999	29	27	56
Jumlah		112	174	286

Dari Tabel 21 ini dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak tahun 1980 s/d tahun 1999 badan legislatif telah memuat 286 Undang-Undang.
- b. Undang-Undang tersebut terdiri atas 112 atau 39,16% yang memuat kebijakan legislatif hukum pidana, sedangkan 174 atau 60,84% tidak memuat kebijakan hukum pidana.
- c. Hampir setiap tahun kebijakan legislatif hukum pidana itu dibuat bersama-sama kebijakan legislatif bukan hukum pidana, kecuali pada tahun 1986 dan tahun 1993.

Untuk mengetahui seberapa jauh aspek perlindungan korban di dalam kebijakan legislatif hukum pidana, berikut ini adalah analisis terhadap 112 Undang-Undang yang memuat kebijakan hukum pidana itu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Undang-Undang ini dikatakan sebagai kebijakan hukum pidana karena di dalamnya memuat rumusan tindak pidana, diantaranya Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi³ :

“seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan pada seorang pekerja untuk memberikan suara tanpa alasan bahwa pekerjaan itu dari padanya tidak dimungkinkan dipidana.....dst”

Dengan demikian Undang-Undang ini berarti juga telah memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja agar tidak menjadi korban dari perlakuan pengusaha. Akan tetapi sifat perlindungan itu masih abstrak/tidak secara langsung⁴.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Konsideran undang undang ini, yaitu butir a mengatakan⁵ :

“ bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya diluar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya bertentangan dengan kesusilaan, moral pancasila, dan membahayakan kehidupan masyarakat dan negara”.

³ Periksa *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1980 halaman 305.

⁴ Periksa kembali Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, 1988), hal 55-56.

⁵ *Lembaran Negara Republik Indonesia, opcit*, halaman 506

bunyi pernyataan di atas menunjukkan bahwa sasaran yang ingin dilindungi Undang-Undang ini adalah masyarakat dan bangsa. Walaupun perannya sebagai kebijaksanaan legislatif tidak diragukan, tetapi Undang-Undang ini memang kurang tegas menyebutkan siapa sebenarnya yang paling dirugikan karena tindak pidana suap yang dilakukan. Hal ini perlu dikemukakan karena dalam perbuatan suap baik pelaku maupun korban keduanya sama-sama dipidana. Ini berarti bahwa tampaknya masyarakat itulah yang dipandang paling menjadi korban akibat tindak pidana itu.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan.

Bab II Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang ini mengatakan ⁶ :

“Jalan merupakan perlengkapan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “

Bunyi rumusan Undang-Undang di atas setelah diteliti merupakan satu-satunya yang menunjukkan arah tujuan disusunnya Undang-Undang ini. Sedangkan di bagian ketentuan pidana justru hal ini tidak begitu tampak, karena tidak disebut dengan tegas sasaran korban yang terkait dengan tindak pidana itu, kecuali nama presiden dan Undang-Undang seperti tampak pada pasal 20 Ayat 2 dan 3 berikut ini ⁷ :

(2) Dilarang menyelenggarakan wewenang pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dilarang menyelenggarakan ruas jalan sebagai jalan tol tanpa keputusan presiden.

⁶ *Ibid*, halaman 1172

⁷ *Ibid*, halaman 1177

Sedangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang masih berupa pidana penjara atau denda, dan belum mengarah pada pemikiran pemberian ganti rugi⁸.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Butir konsideran Undang-Undang ini antara lain menegaskan :

“Untuk melihat kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dst “.

Ini berarti masih ada arah perlindungan korban yang di inginkan, meskipun masih bersifat umum. Tetapi terhadap kerugian perseorangan atau kelompok yang terjadi karena tindak pidana yang berkaitan dengan metrologi ini terlihat belum terakomodasi di dalam Undang-Undang, karena sanksi pidana yang tertulis masih berupa penjatuhan pidana atau denda (Pasal 32). Kemungkinan tanggungjawab keuangan terhadap korban masih ada, namun ini berlaku jika tindak pidana ini melibatkan badan usaha / korporasi. Inipun tampaknya harus melalui proses di luar tuntutan pidana, karena Undang-Undang ini tidak tegas mengatur cara memperolehnya.

⁸ RM Jackson misalnya mengatakan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif karena perbandingan pengulangan atau penghukuman kembali (Reconfiction rate) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku. Sementara pidana Denda hanya akan memberi pemasukan kepada negara, bukan kepada korban secara individu.

Periksa Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, 1996), halaman 45.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu (International Convention or the Suppression of Counterfeiting and Protocol, Geneva 1929)

Undang-Undang ini merupakan pengakuan bahwa tindak pidana pemalsuan uang itu merupakan salah satu bentuk kejahatan Internasional, dan penanggulangannya harus berpedoman pada rambu-rambu yang diatur dalam konvensi ini. Misalnya dalam hal penegasan bentuk tindak pidana uang palsu, larangan membedakan hukuman untuk para pelaku antar bangsa (asli/asing) maupun pengaturan Ekstradisi dan lain-lain.

Yang jelas ratifikasi ini hanya menyangkut kepentingan langsung dari negara, karena tampaknya memang negaralah yang pada umumnya dirugikan akibat perbuatan pemalsuan uang ini⁹. Namun demikian tindak pidana pemalsuan uang ini sebenarnya tidak hanya menimbulkan korban bagi negara, tetapi peroranganpun bisa menjadi korban. Apalagi jika uang palsu itu digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli dan lain-lain. Mengenai tindak pidana uang palsu ini, telah diatur dalam pasal 244 s/d 252 KUHP pidana tambahan dapat dijatuhkan untuk kejahatan ini bila perlu.

9 Artikel I konvensi menyebutkan :

"The High Contracting Parties recognise the rules laid down in Part I of convention as most effectif means in prsent circumtences for ensuring the prevention and punishment the offence counterfeiting currency". Sementara ketentuan tentang jenis pidana upal, ekstradisi dan lain-lain terdapat dalam Part I ini.

Lihat *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Departemen Penerangan RI, Tahun 1982, halaman 252-253

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

Butir (a) konsideran Undang-Undang ini menegaskan bahwa wajib laporan perusahaan ini merupakan kebijaksanaan pokok dan menyeluruh dalam kaitannya dengan perluasan kesempatan kerja maupun perlindungan tenaga kerja. Tetapi pasal 3 Undang-Undang menyebut bahwa laporan perusahaan ini hanyalah bertujuan untuk memperoleh informasi resmi dari pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan. Walaupun disebut terdapat banyak aspek perlindungan terhadap tenaga kerja, tetapi di sini tidak kelihatan dimana letak perlindungan yang bisa dikatakan langsung. Dengan demikian tampaknya hanya kepentingan pemerintah yang dominan ingin dilindungi, apalagi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini hanya berupa kurungan atau denda saja ¹⁰. Dengan demikian perlindungan korban yang terdapat pada Undang-Undang ini juga abstrak dan tidak langsung.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sering disebut peraturan yang paling maju di zamannya dalam hal melindungi korban, meskipun korban yang dimaksud terbatas hanya diarahkan pada tersangka,

¹⁰ Pasal 10 ayat (1) antara lain berbunyi "Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban...dst, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)".

terdakwa atau terpidana¹¹. dikatakan demikian karena Undang-Undang ini memberikan kemungkinan memperoleh ganti rugi bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang di dalam proses peradilan menjadi korban perlakuan penegak hukum yang tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan dengan benar¹². Di samping adanya ganti rugi, KUHAP juga mengatur masalah kemungkinan memperoleh rehabilitasi, yaitu hak untuk mendapat pemulihan kedudukan harkat dan martabat sebagai akibat pemeriksaan perkara disemua tingkat yang nonprodesural. Di dalam kemungkinan pemberian ganti rugi ini, KUHAP memang tidak mengatur bagaimana pelaksanaan, tetapi hanya menyebut diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah¹³. Yang jelas KUHAP merupakan langkah maju di bidang perlindungan korban dibanding dengan peraturan sebelumnya¹⁴, karena telah menyinggung soal ganti rugi secara langsung.

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang ini adalah untuk memperoleh sumber informasi yang benar dari perusahaan secara lengkap bagi pemerintah.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, halaman 58

¹² Yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah tersangka, terdakwa atau terpidana kepada Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan. Jika tuntutan itu dilakukan ketika masih dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, tuntutan itu harus melalui lembaga pra peradilan (Pasal 79 s/d 81 KUHAP). Sedangkan bila tuntutan sudah dalam tingkat pemeriksaan pengadilan, tuntutan ganti rugi harus diajukan kepada pengadilan negeri.

Lihat Nico Ngani dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta, 1985), halaman 30-33.

¹³ Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Intinya pembayaran ganti rugi oleh negara harus diajukan dalam tenggang 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus, baik melalui keputusan praperadilan atau peradilan biasa.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, 1995), halaman 72.

Karena itu pemerintahlah yang akan menjadi korban pertama jika terjadi pelanggaran atas Undang-Undang ini, meskipun kemudian dapat terjadi pula korban lain secara individual.

Ada tiga bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a. Lalai tidak melaksanakan wajib daftar perusahaan (Pasal 32) sebagai kejahatan.
- b. Melakukan/menyuruh melakukan pendaftaran dengan data yang tidak benar (Pasal 33) sebagai pelanggaran.
- c. Tidak memenuhi kewajiban daftar perusahaan (Pasal 34) sebagai pelanggaran.

Adapun pidananya adalah berupa kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Ini berarti belum ada perlindungan langsung bagi korban di luar pemerintah/negara.

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu pertimbangan dibuatnya Undang-Undang ini yaitu butir c berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran hidup umat manusia “.

kalimat ini cukup menggambarkan bahwa kehadiran Undang-Undang ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya pengrusakan lingkungan yang setiap saat bisa dilakukan manusia.

Sementara itu Pasal 4 Undang-Undang ini menegaskan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah¹⁵ :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- e. Terlindunginya segera terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa semua perbuatan merusak lingkungan yang terjadi berarti akan menyangkut semua aspek kehidupan semua makhluk, apalagi manusia. Karena itu di dalam Pasal 20 Undang-Undang ini menegaskan : “Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada penderita yang telah melanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Sementara itu kepada pelaku perusak dan pencemar yang sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang ini diancam pidana penjara 10 tahun maksimum dan atau denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan bagi yang lalai sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan atau tercemarnya

¹⁵ Periksa *Lenbaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1982, Sekretariat Negara Republik Indonesia, halaman 209 dst.

lingkungan hidup, dapat dipidana penjara maksimum satu tahun atau denda maksimum Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Walaupun di dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang menegaskan bahwa tatacara pengajuan oleh penderita (korban), jenis dan besarnya kerugian serta tatacara penuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang, tetapi Undang-Undang ini terlihat lebih tegas di dalam memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Dikatakan demikian karena menurut Koesnadi Hardjasoemantri Undang-Undang ini menganut prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), yaitu azas yang dianut dan diterapkan secara konsekuen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan dan jalan keluar bagi kasus pencemaran di negara-negara maju yang menjadi anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)¹⁶.

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Butir (a) konsideran Undang-Undang ini mengatakan :

“Bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum, sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dst serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu seni dan sastra mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia dst, maka perlu disusun Undang-Undang tentang hak cipta “.

Sedangkan Pasal 2 menegaskan bahwa yang dimaksud hak cipta adalah :

hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau

¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta, 1994), halaman 372.

memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷.

Dari butir (a) konsideran ini cukup jelas bahwa terdapat pihak yang ingin dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu pemegang hak cipta, baik sebagai pencipta maupun penerima hak cipta. Penyebutan pihak yang dilindungi secara khusus oleh Undang-Undang pada hakikatnya sudah merupakan langkah maju, dibandingkan dengan sebutan perlindungan secara umum. Di samping itu Pasal 42 ayat 1 s/d 3 juga menegaskan :

- (1). Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang di umumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyak yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberi hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan sejumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta tersebut;
- (2). Jika dituntut penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan itu baru dilaksanakan setelah dibayar ganti rugi oleh orang yang menuntut kepada pihak yang beritikad baik.

¹⁷ Periksa Lembaran Negara Republik Indonesia, *Op-cit*, halaman 249

- (3). Jika ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 merupakan pelanggaran, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, selain untuk mendapat ganti rugi juga supaya pengadilan negeri memerintahkan pelanggar mengadakan perubahan sedemikian rupa, sehingga pelanggaran hak cipta itu ditiadakan, dengan ketentuan sipelanggar membayar sejumlah ganti rugi apabila dalam waktu yang ditentukan perintah pengadilan negeri tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan rumusan di atas, makin tergambar bahwa Undang-Undang ini telah memberikan jaminan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta secara lebih baik dibanding terhadap korban tindak pidana biasa. Lebih-lebih dengan tuntutan ganti rugi itu tidak berarti menghilangkan tuntutan pidana yang timbul karena pelanggaran Undang-Undang ini. Karena itu Undang-Undang hak cipta ini dipandang sebagai yang memberi perlindungan langsung/konkrit terhadap korban.

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Pasal 19 Undang-Undang ini berbunyi sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan penerbitan pers untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakibatkan penyelewengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers dst, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

- (2). Barang siapa yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUP dst dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan rumusan delik di atas terlihat bahwa korban dari tindak pidana yang dimaksud Undang-Undang tampaknya bukan masyarakat perorangan, melainkan pihak penentu kekuasaan yaitu pemerintah. Karena itu tidak ada kesan pemberian perlindungan langsung pada Undang-Undang ini, bahkan jika dikaji dengan pendekatan kriminologi kritis terlihat bahwa Undang-Undang ini dibuat karena ada kepentingan tertentu dari penguasa yang ingin memberangus kebebasan pers dengan menggunakan perangkat hukum¹⁸.

Pandangan kritis demikian menjadikan perubahan persepsi yang tentang kejahatan, sehingga dalam kasus ini justru pelaku;ah yang sebenarnya menjadi korban yang tersirat pada Undang-Undang ini memang tidak begitu tampak, siapa korbannya kecuali hanya negara, sehingga perlindungan korban adalah abstrak / tidak langsung.

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu perbuatan yang dilakukan di wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut, tanpa izin pemerintah Republik Indonesia. Perbuatan itu meliputi antara lain :

- a. Eksploitasi sumberdaya alam hayati (Pasal 5)
- b. Membuat atau menggunakan pulau buatan (Pasal 6)

18 Bandingkan dengan teori labelling dari Howard Becker. Menurutnya kelompok sosiallah yang menciptakan aturan, dan pelanggaran terhadap aturan itu adalah penyimpangan. Pemberian label "Outsiders". Ditujukan kepada mereka yang menyimpang terhadap aturan tersebut. Lihat IS Soesiant, *Kriminologi*, (Semarang, 1995), halaman 76.

c. Penelitian ilmiah (Pasal 7)

d. Pencemaran lingkungan (Pasal 8 s/d 12)

Terhadap pelaku yang melanggar ketentuan pasal 5 s/d 7 di atas di ancam pidana denda, maksimum Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan jika tindakan-tindakan itu menyebabkan rusaknya lingkungan maka terhadap si pelaku tadi dapat dikenakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.

Yang menarik dari Undang-Undang ini adalah adanya ketentuan untuk membayar ganti rugi bagi siapa yang melakukan tindak pidana itu, baik kepada pemerintah Republik Indonesia atau pihak ketiga, misalnya pemilik pulau buatan, pemilik instalasi atau bangunan yang berada di wilayah zona ekonomi eksklusif (Pasal 9, 10, 11) bahkan Pasal 11 ini dimungkinkan juga pembayaran biaya rehabilitasi lingkungan yang rusak. Karena itu Undang-Undang ini dipandang telah mempertimbangkan sungguh-sungguh aspek perlindungan korban, meskipun korban yang dimaksud masih banyak diwakili Negara. Dan kecil kemungkinan korban adalah perorangan. Ini merupakan bentuk perlindungan langsung terhadap korban.

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. lalai tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau sudah menyampaikan tetapi isinya tidak benar (Pasal 38)
- b. sengaja tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak, atau menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (Pasal 39)

- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitang /SPPT (Pasal 39)
- d. sengaja memberikan dokumen yang palsu (Pasal 39)
- e. sengaja tidak memperlihatkan dokumen yang benar (Pasal 39)
- f. tidak membayar pajak yang telah dihitung (Pasal 39)
- g. pegawai atau pejabat yang melalaikan tugas atau meninggalkan tugas berkaitan dengan pajak (Pasal 39)

Ancaman pidana untuk Pasal 38 yaitu pidana kurungan maksimum satu tahun dan atau denda sebanyak empat kali pajak terutang.

Ancaman pidana untuk pelanggaran yang lalai melaksanakan tugas, maksimum kurungan enam bulan dan atau denda maksimum Rp 1.000.000,-. Jika melakukan dengan sengaja, dipidana maksimum satu tahun penjara dan atau denda maksimum Rp 2.000.000,-.

Korban pelanggaran Undang-Undang pajak ini tidaklah perorangan, melainkan negara. Tidak ada ganti rugi dalam Undang-Undang ini.

15. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Bab II Pasal 2 Undang-Undang ini menegaskan sebagai berikut : ¹⁹

“Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.”

¹⁹ *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1984, Sekretariat Negara Republik Indonesia, halaman 153.

Sedangkan dalam Bab VII Pasal 14 dan 15 dirumuskan mengenai beberapa tindak pidana, berikut ancaman pidananya meliputi :

- a. Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman maksimum 1 tahun dan atau denda Rp 1.000.000,- (Pasal 14 ayat 1);
- b. Lalai mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana kurungan maksimum 6 (enam) bulan dan atau denda maksimum Rp 500.000,- (Pasal 14 ayat 2);
- c. Mengelola bahan-bahan secara tidak benar dan menimbulkan wabah, diancam pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan atau denda maksimum Rp 100.000.000,- (Pasal 15 ayat);
- d. Lalai mengelola bahan-bahan dan menimbulkan wabah, diancam pidana maksimum 1 (satu) tahun dan atau denda maksimum Rp.10.000.000,- (Pasal 15 ayat 2).

Undang-Undang ini juga telah mengatur soal ganti rugi dalam Pasal 8 sebagai berikut :

- (1) Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud ... dst, dapat diberikan ganti rugi.
- (2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi ... dst diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban sudah mendapatkan perhatian secara langsung, karena sudah sampai pada tahun pemberian ganti rugi.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini meliputi : ²⁰

- a. Tidak memiliki Izin Usaha Industri, atau sudah memilikinya tetapi tidak melaporkan secara periodik kegiatan industrinya itu kepada pemerintah. Terhadap pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 25.000.000,- dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya (Pasal 26 ayat 1);
- b. Lalai melakukan ketentuan tersebut pada huruf a di atas diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun, atau denda maksimum Rp 1.000.000,-, dengan hukuman tambahan dicabut Izin Usaha Industrinya (Pasal 24 ayat 2);
- c. Sengaja meniru desain produk industri, dipidana maksimum 2 tahun penjara atau denda maksimum Rp 10.000.000,- (Pasal 25);
- d. Melanggar baku mutu yang ditetapkan pemerintah, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 25.000.000,- (Pasal 26);
- e. Sengaja melakukan kegiatan industri yang merusak lingkungan, dipidana penjara maksimum 10 tahun dan atau denda maksimum Rp.100.000.000,- (Pasal 27 ayat 1);
- f. Lalai melakukan tersebut pada huruf e di atas, dipidana kurungan maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum Rp 1.000.000,-.

²⁰ *Ibid*, halaman 172-176.

Berdasarkan rumusan tindak pidana di atas, dapat diketahui bahwa pelaku pidana yang dimaksud adalah kalangan pemilik industri. Sementara korbannya adalah pemerintah selaku yang berwenang melakukan pengawasan dan pemberi izin, tetapi bisa juga kelompok atau perorangan yang mungkin terkena akibat langsung dari kegiatan industri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan korban pada Undang-Undang ini sudah ada, namun masih bersifat umum/tidak langsung.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang POS

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini adalah :

- a. Menyelenggarakan kegiatan jasa pos tanpa izin, diancam pidana maksimum 2 tahun penjara atau denda maksimum Rp 20.000.000,- (Pasal 19 ayat 1);
- b. Tidak melaksanakan kewajiban mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya, diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 19 ayat 2).

Berdasarkan rumusan di atas sudah jelas bisa diketahui bahwa korban yang dilindungi oleh Undang-Undang ini yaitu negara selaku penyelenggara pos. Namun demikian ada yang menarik, karena di dalam Undang-Undang juga terdapat ketentuan ganti rugi bagi pengirim pos, yaitu bilamana terjadi kehilangan atau kerusakan atas surat atau barang yang dikirim (Pasal 12 ayat 1 dan 2). Dengan demikian Undang-Undang ini telah memperhatikan pula perlindungan terhadap korban pengiriman pos, meskipun besarnya ganti rugi ditentukan "hanya sebesar jumlah yang dipertanggungkan"²¹

²¹ *Ibid*, halaman 214-215.

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum

Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju mengenai kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang – Undang Dasar 1945.²²

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan referendum ini adalah :

- a. Memberi data diri sendiri atau orang lain dalam Daftar Pemberi Pendapat Rakyat, dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 20 ayat 1);
- b. Meniru atau memalsu surat yang berkaitan dengan penyelenggaraan referendum, dengan pidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 20 ayat 2);
- c. Mengetahui surat palsu tetapi menggunakannya untuk kepentingan referendum, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 20 ayat 3);
- d. Menerima suap sehingga menjalankan/ tidak menjalankan haknya untuk memberikan suara, dipidana penjara maksimum 3 tahun (Pasal 20 ayat 4);
- e. Melakukan penipuan yang mengakibatkan batalnya surat suara, dipidana maksimum 3 tahun penjara (Pasal 20 ayat 5);
- f. Menggunakan hak suara orang lain, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 20 ayat 6);

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Sekretaris Negara Republik Indonesia, halaman 564.

- g. Menggunakan hak suara lebih dari satu, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 20 ayat 7);
- h. Mengacau, menghalangi atau mengganggu jalannya referendum, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 20 ayat 8);
- i. Dengan kekerasan menghalang – halangi penggunaan hak suara orang lain, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 20 ayat 9);
- j. Menggagalkan pemungutan suara atau melakukan penipuan hasil pemungutan suara, dipidana penjara maksimum 5 tahun penjara (Pasal 20 ayat 10);
- k. Majikan yang tidak memberi kesempatan buruhnya untuk menggunakan hak suara, dipidana maksimum 3 bulan kurungan (Pasal 21 ayat 1);
- l. Petugas penyelenggara referendum yang melalaikan tugas, dipidana maksimum 3 bulan kurungan atau denda maksimum Rp 15.000,- (Pasal 21 ayat 2).

Berdasarkan rumusan di atas menunjukkan bahwa korban dari tindak pidana ini tampaknya cenderung pada unsur pemerintah selaku penyelenggara referendum. Sedangkan aspek perlindungannya juga masih bersifat umum / tidak langsung, termasuk kemungkinan korban yang bersifat individual seperti yang dirumuskan pada Pasal 21

Karena itu Undang-Undang ini dipandang baru memperhatikan perlindungan korban secara tidak langsung, apalagi aspek ganti rugi sama sekali tidak ditentukan di dalamnya. Undang-Undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Karena dipandang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi.

4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

Pasal 17 Undang–Undang ini menegaskan: ²³ Pemerintah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi usaha nelayan dan petani ikan kecil terutama melalui koperasi nelayan dan atau koperasi petani ikan. Tetapi bila dilihat rumusan ketentuan pidana yang ada, terlihat bahwa bentuk perlindungan yang ada masih bersifat umum. Ketentuan pidana yang dimaksud adalah :

- a. Melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan/ alat yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan (Pasal 24). Pidananya adalah penjara maksimum 10 tahun penjara dan atau denda maksimum Rp 100.000.000,- ;
- b. Melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia tanpa izin (Pasal 25). Pidananya berupa penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 50.000.000,- jika menggunakan kapal berukuran 30 gros ton atau lebih. Jika dibawahnya dipidana penjara maksimum 2 tahun 6 bulan atau denda maksimum Rp 25.000.000,- ;
- c. Melakukan usaha budidaya ikan tanpa izin di wilayah perikanan Republik Indonesia, dipidana kurungan maksimum 6 (enam) bulan atau denda maksimum Rp 5.000.000,- (Pasal 26);

²³ *Ibid*, halaman 820.

- d. Melakukan pengelolaan ikan tidak sesuai ketentuan pemerintah, dipidana denda maksimum Rp 25.000.000,- (Pasal 27 ayat 1);
- e. Mengeksport atau mengimport jenis ikan tertentu dengan melanggar ketentuan yang ditetapkan, dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Pasal 27 ayat 2).

Melihat rumusan tindak pidana ini, makin terlihat bahwa baru negara saja yang mendapat kompensasi dari tindak pidana yang dilakukan, dalam kapasitasnya sebagai korban, sedangkan nelayan dan petani ikan sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang ini belum atau bahkan tidak merasakan hal itu secara langsung.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini adalah :

- a. Lalai tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak atau menyampaikannya tetapi isinya tidak benar. Sanksinya adalah pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum dua kali pajak terutang (Pasal 24);
- b. Sengaja melakukan perbuatan sebagaimana huruf a di atas atau memperlihatkan dokumen palsu atau tidak memperlihatkan dokumen/keterangan lain yang diperlukan sehingga menimbulkan kerugian negara, dengan sanksi pidana maksimum 2 tahun penjara atau denda maksimum lima kali pajak terutang (Pasal 25 ayat 1);

- c. Bahwa wajib pajak yang tidak mau memperlihatkan dokumen dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 2.000.000,- (Pasal 25 ayat 2);

Ketentuan pidana ini membuktikan juga bahwa korban yang terkena akibat tindak pidana yang dilakukan tidak lain adalah negara, bukan perorangan. Dengan demikian negaralah yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang ini.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

Perbuatan yang diancam pidana oleh Undang-Undang ini yaitu: meniru atau memalsukan meterai; menyimpan untuk diedarkan atau memalsukan meterai palsu/ dibuat tidak sah; menggunakan, menjual, menyerahkan, menyediakan, memasukkan ke wilayah Republik Indonesia meterai yang sudah digunakan; menyimpan bahan dan perkakas yang dipakai untuk meniru/memalsu meterai. Sanksi pidana untuk perbuatan di atas adalah sesuai ketentuan KUHP²⁴.

Masih ada lagi ketentuan pidana yang berkaitan dengan dengan materai, yaitu tidak membayar bea materai dalam dokumen tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran atas ketentuan ini dipidana penjara maksimum 7 tahun.²⁵

²⁴ Ketentuan yang dimaksud adalah pasal 253 KUHP, dimana pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

²⁵ Periksa Pasal 14 Undang-Undang ini, *Lembaran Negara Republik Indonesia* 1985, halaman 1514.

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, dapat diketahui bahwa korban tindak pidana ini adalah negara, bukan perorangan. Dengan demikian negaralah yang diuntungkan oleh Undang-Undang ini.

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

Berbagai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini pada umumnya masih menyangkut adanya kepentingan negara, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan. Hal ini bisa dilihat pada bagian konsideran Undang-Undang butir b sebagai berikut : ²⁶

“Bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik“.

Namun demikian Undang-Undang juga telah memperhatikan pula kemungkinan terjadinya korban individual dengan cukup baik, misalnya bila dilihat ketentuan pidana pada Pasal 21 sebagai berikut : ²⁷

- (1) Barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemegang Kuasa Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

²⁶ *Ibid*, halaman 1573.

²⁷ *Ibid*, halaman 1580.

- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi.
- (4) Penetapan, tata cara dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ganti rugi ini juga terdapat dalam Pasal 12 yang pada intinya pihak Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan diharuskan memenuhi pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan maupun tumbuh-tumbuhan yang akan dipergunakan untuk pembangunan kelistrikan. Pembayaran ganti rugi tersebut harus sudah selesai sebelum proyek dimulai, kecuali bila mereka yang mendirikan bangunan itu serta yang menanam tumbuh-tumbuhan melakukan dengan sengaja agar memperoleh ganti rugi (Pasal 13).

Atas dasar pertimbangan di atas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Ketenagalistrikan ini sudah cukup baik dalam menjamin perlindungan korban secara langsung.

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan pembangunan rumah susun ini meliputi²⁸

- a. Membangun rumah susun yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

²⁸ *Ibid*, halaman 1585-1596

Ketentuan pidana yang dimaksud diatur dalam Pasal 21 s/d 23.

Rumusan tindak pidana sebagaimana huruf l s/d c terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), sedangkan untuk perbuatan pada huruf d diatur dalam Pasal 21 ayat (3).

Undang-Undang ini juga menegaskan, Pemerintah dapat membuat ketentuan pidana berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dengan pelaksanaan Undang-Undang dengan ancaman pidana kurungan maksimum satu tahun dan / atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 23)

- b. Menjual bangunan rumah susun, padahal terhadap bangunan itu masih ada beban jaminan hipotik / fiducia.
- c. Memasarkan rumah susun untuk dihuni, sebelum memperoleh izin kelayakan dari pemerintah.
- d. Melakukan perbuatan a s/d c karena lalai.

Untuk perbuatan a s/d c ancaman pidanya berupa penjara maksimum 10 tahun, atau denda maksimum Rp 100.000.000,- sedangkan untuk point d, diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 1.000.000,-.

Melihat ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang kemungkinan besar menjadi korban akibat tindak pidana di sini adalah bisa negara/pemerintah, bisa pihak pemberi pinjaman kredit (Bank), tetapi bisa juga para penghuni rumah susun itu. Akan tetapi di sini belum tampak adanya kebijakan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan langsung, kecuali hanya terhadap pemerintah/negara.

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Yang diatur dalam konvensi hukum laut ini sungguh sangat luas dan menyeluruh, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana. Karena itu meskipun hanya dalam bentuk ratifikasi, tetapi hal ini mengandung konsekuensi negara kita untuk tunduk pada ketentuan yang diatur di dalamnya termasuk yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana tersebut.

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana diantaranya adalah :

- a. Ketentuan yurisdiksi untuk kejahatan yang dilakukan di dalam kapal asing yang diatur dalam artikel 27 yang antara lain menegaskan²⁹.

“The criminal jurisdiction of the coastal state should not be exercised on board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed on board the ship during its passage“.

dengan ketentuan ini berarti ada kebijakan hukum pidana Internasional yang harus dihormati, karena adanya larangan melakukan tindakan hukum untuk kejahatan yang terjadi di kapal asing itu bagi negara pantai.³⁰

- b. Ketentuan tentang larangan pengangkutan budak (artikel nomor 99).
- c. Tentang Kejahatan Perompakan di laut lepas (artikel nomor 101)

Di bawah ini beberapa definisi tentang perompakan, yaitu :

- (a) Any illegal acts of violence or detection, or any act of depredation, committed for private air craft and directed :
 - (i) on the seas, against another ship or aircraft or against persons property on board such ship or aircraft.
 - (ii) Against a ship, aircraft, persons and property in a place outside the jurisdiction of any state.

²⁹ *Ibid*, halaman 1635.

³⁰ Ada pengecualian dari ketentuan ini, yaitu jika (1) Kejahatan (perbuatan) itu melibatkan kepentingan negara pantai (2) Kejahatan itu merupakan salah satu yang mengganggu perdamaian negara pantai atau berkait dengan benda yang ada di wilayah teritorial negara pantai (3) Pemimpin kapal meminta bantuan, termasuk perwakilan diplomatik/Konsulat dari bendera kapal (4) Jika kejahatan itu berobyek narkoba. *Loc-cit*

- (b) Any act of voluntary participation on the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it pirate-ship or aircraft;
- (c) Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in paragraph (a) or (b).

Ketentuan ini jelas mengarah pada adanya tindak pidana di bisang perompakan ini.

- d. Tentang Lingkungan Hidup berikut kewenangan mengatur perundang-undangannya, antara lain dengan ketentuan sebagai berikut³¹

“ States shall adopt of laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land based sources, including rivers, estuaries, pipelines and outfall structures, taking to account Internationally agreed rules, standard and recommended practices and procedures “

Dalam hal ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 seperti yang telah diuraikan di muka.

Atas dasar beberapa ketentuan konvensi tadi, dapat dikatakan bahwa konvensi hukum laut ini telah memperhatikan kepentingan negara-negara anggota untuk dilindungi hak-haknya, termasuk dalam mengatur sendiri ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian Ketentuan dalam konvensi ini belum bisa dianggap sebagai kebijakan perlindungan korban secara langsung, karena menurut Yasin Tasrif

31 Periksa Artikel Nomor 207 Konvensi, *Ibid*, halaman 1714.

Terjemahan bebas;

Negara hendaknya mengadopsi ketentuan hukum dan perundang-undangan guna mencegah, mengurangi dan mengawasi polusi di lingkungan perairan maritim, termasuk lingkungan sungai, kuala, terhadap jaringan pipa-pipa dan kegiatan lainnya dengan mengacu kepada kesepakatan Internasional, maupun prosedur dan pelaksanaan yang telah diakui.

ketentuan yang diatur tersebut belum memenuhi syarat sebagai tindak pidana, mengingat masih diperlukan syarat-syarat pemidanaan. Untuk itu di dalam prakteknya, negara yang telah menyetujui dan meratifikasi suatu konvensi internasional, maka negara yang bersangkutan akan memberlakukan ketentuan dalam konvensi itu di dalam aturan-aturan nasionalnya.

Dengan demikian Undang-Undang ini dipandang belum memberikan perlindungan langsung terhadap korban, kecuali hanya terdapat kepentingan negara anggota yang dirugikan hak-haknya.

24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Perubahan ini dilakukan atas dasar pertimbangan semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk tindak pidana pembajakan³². Karena itu penekanan perubahan terletak pada diperberatnya ancaman pidana ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44, yang bentuk perbuatannya sebagai berikut :

- a. Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Pidananya adalah maksimum 7 (tujuh) tahun penjara, dan/atau denda maksimum Rp 100.000.000,- ;

32 Periksa bagian konsideran huruf b yang berbunyi "bahwa di tengah pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana kejahatan".
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1987, Sekretariat Negara Republik Indonesia, halaman 731.

- b. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Pidananya adalah maksimum 5 tahun penjara dan/ atau denda maksimum Rp 50.000.000,-;
- c. Menumumkan ciptaan yang menyalahi ketentuan pemerintah, pidananya penjara maksimum 3 tahun dan/ atau denda maksimum Rp 25.000.000,-;
- d. Memperbanyak atau menggunakan ciptaan potret, tanpa izin pihak yang dipotret. Pidananya berupa penjara maksimum 2 tahun dan/atau denda maksimum Rp 15.000.000,-³³

Yang patut dicatat dari perubahan Undang-Undang ini adalah dengan diaturnya ketentuan tentang tindakan mengajukan upaya gugatan pihak pemegang hak cipta ini. Sedangkan di dalam pemeriksaan itu hakim diberi wewenang untuk memerintahkan pelanggar hak untuk menghentikan kegiatannya, guna mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Undang-Undang baru ini semakin menunjukkan adanya upaya perlindungan langsung terhadap korban, yaitu pemegang hak cipta.

25. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah :³⁴

- a. Tidak memenuhi panggilan wajib dinas militer, dengan maksud nyata-nyata menghindari diri.

33 Bandingkan dengan Ketentuan sanksi yang ditetapkan sebelum diubah, yaitu Pasal 44 yang berbunyi : (1) melanggar hak cipta dipidana 3 tahun penjara atau denda Rp 3.000.000,- (2) jika melanggar ketentuan huruf b di atas dipidana maksimum penjara 9 (sembilan) bulan atau denda Rp 5.000.000,-. Widoyo Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, (Jakarta, 1992), halaman 21

³⁴ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Sekretariat Negara Republik Indonesia*, halaman 32.

Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 39 s/d 40.

- b. Membuat atau menyuruh diri sendiri atau orang lain menjadi tidak cakap melakukan dinas wajib militer.
- c. Melakukan tipu muslihat sehingga diri sendiri atau orang lain terhindar dari dinas wajib militer.
- d. Mengajukan dengan segala daya upaya untuk tidak menjalani dinas wajib militer.
- e. Memutus hubungan kerja sepihak selaku prajurit.
- f. Tidak memenuhi panggilan dinas.
- g. Menghina / mengancam atasan.

Untuk perbuatan a s/d f ancaman pidananya adalah maksimum 2 tahun 8 bulan penjara. Sedangkan untuk perbuatan pada huruf g, maksimum pidana penjara 1 tahun. Dan jika penghinaan itu dilakukan dengan tindakan nyata maka ancaman pidananya menjadi 1 tahun 8 bulan.

Dari rumusan delik di atas, sudah kelihatan bahwa yang menjadi korban atas perbuatan pidana di atas terutama adalah Negara. Sedangkan kemungkinan yang lain yaitu komandan atau atasan prajurit yang bersangkutan.

Adapun bentuk perlindungan yang bisa diketahui adalah masih bersifat umum.

26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang ini ialah³⁵ :

- a. Menggunakan gelar atau sebutan lulusan Perguruan Tinggi tanpa hak (Pasal 55). Sanksinya adalah pidana penjara maksimum 18 bulan atau denda maksimum Rp 15.000.000,- ;
- b. Penggunaan gelar atau sebutan yang tidak sesuai dengan yang diterima dari Perguruan Tingginya atau melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau menggunakan gelar asing atau singkatannya dengan tidak benar, atau melanggar kewajiban untuk menjadi pendidik (Pasal 56). Terhadap pelanggaran ketentuan ini ancaman pidananya adalah kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp.5.000.000,-.

Melihat rumusan tindak pidana demikian, dapat diketahui bahwa terdapat kemungkinan dua korban, yaitu pihak negara dan pihak lain/ ketiga yaitu bisa badan atau perorangan. Tetapi bila dilihat dari ancaman hukuman, yang tampak hanya bentuk perlindungan tidak langsung karena yang dijatuhkan hanya pidana pokok saja dan tidak ada pidana tambahan lain khususnya ganti rugi.

27. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi

Pasal 2 Undang-Undang ini mengatakan bahwa tujuan telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata (Pasal 2).

³⁵ *Timpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1989*, (Jakarta, 1990), halaman 40.

Sedangkan perbuatan pidana yang diatur melalui Undang-Undang ini antara lain meliputi :

- a. Menghubungkan jaringan telekomunikasi dan atau memanipulasi penyelenggaraan telekomunikasi tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian pada penyelenggaraan telekomunikasi atau pemakai jasa telekomunikasi (Pasal 35).
- b. Menggunakan peralatan telekomunikasi dengan gelombang radio atau elektro magnet tanpa izin (Pasal 36 ayat 1).
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan telekomunikasi (Pasal 36 ayat 2).
- d. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan telekomunikasi serta matinya seseorang (Pasal 36 ayat 3).
- e. Lalai melakukan perbuatan sebagaimana poin c (Pasal 36 ayat 4).
- f. Lalai melakukan perbuatan sebagaimana poin d (Pasal 36 ayat 5).
- g. Menggunakan, memiliki, memasang pemancar radio tanpa izin (Pasal 37 ayat 1).
- h. Memasukkan, memperdagangkan, membuat, merakit pemancar radio di dalam negeri dengan tidak memenuhi persyaratan telekomunikasi yang ditetapkan (Pasal 37 ayat 2).
- i. Menyebarkan berita yang seharusnya dirahasiakan (Pasal 38).

Terhadap tindak pidana yang dirumuskan tadi sebenarnya tidak hanya negara saja yang dirugikan, tetapi juga perorangan / individu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat 3, yaitu jika perbuatan tersebut

mengakibatkan matinya seseorang. Tetapi di sini tampak belum ada jaminan perlindungan terhadap korban perorangan ini. Padahal dalam masalah pertelekomunikasian ini sering terjadi banyak pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya banyak kerugian bagi korban perorangan, misalnya pihak pemilik tanah yang terkena galian untuk proyek telekomunikasi, pihak pelanggan telepon yang mendapat tagihan tidak sesuai dengan keadaan penggunaan pulsa dan sebagainya. Untuk itu dapat dikatakan Undang-Undang telekomunikasi ini belum dapat dikatakan memberikan perlindungan langsung terhadap para korban, kecuali hanta terdapat negara yang mendapatkan pemasukan dari pidana denda.³⁶

28. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Hak Paten.

Di dalam konsideran huruf c ada ketentuan sebagai berikut :

“Bahwa dengan memperhatikan pentingnya perkembangan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dan perangkatnya, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut. “

selanjutnya bisa dilihat ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang ini, di sana hanya diatur sanksi pidana yang berupa penjara maksimum 7 tahun dan denda Rp 100.000.000,-. Untuk perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak paten. Ini berarti bentuk perlindungan hukum untuk para korban, yaitu para pemilik hak cipta belum maksimal, karena para korban tersebut belum mendapat perlindungan konkrit,

36 Sanksi pidana untuk semua tindak pidana di bidang telekomunikasi hanya berupa pidana penjara maksimum antara 4 s/d 5 tahun, atau denda antara maksimum Rp 10.000.000,- hingga Rp 40.000.000,- Tidak ada pidana tambahan.

Lihat *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 1989*, *Ibid*, halaman 79.

misalnya tentang pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana terhadap korban.³⁷

29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Karya Cetak atau rekam merupakan hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila.³⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi musnah/ hilangnya karya cetak dan karya rekam yang dibuat seseorang/ badan. Ini juga berarti ada maksud untuk melindungi pembuat / pemilik karya rekam atau cetak yang dimaksud secara tidak langsung.

Tetapi jika dilihat dari aspek ketentuan pidana yang berkaitan dengan karya rekam atau cetak, dapat diketahui bahwa pihak yang ingin dilindungi selaku korban adalah pemerintah sedangkan sebagai pelakunya adalah justru para pembuat karya cetak atau rekam yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini.³⁹

³⁷ Tindak pidana delik hak Paten ini diatur dalam Pasal 126-128, *Ibid*, halaman 184.

³⁸ Periksa bunyi alirnya Undang-Undang ini. *Lembaran Negara Republik Indonesia* 1990, Sekretariat Negara Republik Indonesia, halaman 525.

³⁹ Pasal 11 mengatur sebagai berikut :

Barang siapa:

- (1) Tidak menyerahkan karya rekam/cetak baik produksi dalam/luar negeri, atau menyalahgunakan karya rekam yang telah disimpan untuk komersial, diancam pidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 5.000.000,-
- (2) Penerbit/pengusaha rekaman yang tidak menyerahkan judul terbitan/rekaman kepada Perpustakaan Nasional dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 2.500.000,- *Ibid*, halaman 529.

30. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain:

- a. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam atau melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 40 ayat 1).
- b. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan meniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya (Pasal 40 ayat 2a).
- c. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain / luar Indonesia (Pasal 40 ayat 2a).
- d. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, meniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Pasal 40 ayat 2b).
- e. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, meniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 40 ayat 2b).
- f. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain di dalam/luar negeri (Pasal 40 ayat 2b).
- g. Meniagakan, menyimpan, memiliki kulit, tubuh, bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian lain dari satwa atau mengeluarkan dari suatu tempat ke tempat lain di dalam atau di luar negeri (Pasal 40 ayat 2b).

h. Mengambil, merusak, memusnahkan, meniagakan, menyimpan, memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi (Pasal 40 ayat 2b).

Jika perbuatan merusak ekosistem sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas dilakukan dengan sengaja, maka terhadap pelakulah tindak pidana dimaksud dapat diancam pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan atau denda maksimum Rp 200.000.000,- sedangkan jika hal itu disebabkan karena kelalaiannya maka bisa dipidana penjara maksimum 1 (satu) tahun dan atau denda maksimum Rp 50.000.000,-.⁴⁰

Melihat ketentuan pidana di atas terkesan memang ada upaya serius untuk melindungi korban dari tindak pidana yang berkaitan dengan konservasi alam ini. Namun demikian tingginya ancaman pidana Undang-Undang ini belum dirasakan sebagai bentuk perlindungan pidana secara langsung, karena terhadap penderitaan korban baik yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun satwa alam yang dilindungi itu tidak ada tindak atau langkah-langkah rehabilitasi yang seharusnya dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Ini berarti masih seperti halnya Undang-Undang lainnya, dan belum bisa dikatakan memberikan perlindungan langsung terhadap korban tindak pidana itu.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 545.

31. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain meliputi : ⁴¹

- a. Merusak, mengurangi atau mengurangi nilai, memisahkan atau membuat tidak berfungsinya obyek dan daya tarik wisata atau bangunan obyek wisata (Pasal 35).
- b. Menyelenggarakan jasa impresariat yang berkaitan dengan pariwisata yang bertentangan dengan nilai agama, budaya, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 36).

Jika perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja, ancaman pidananya adalah maksimum 5 tahun penjara dan atau denda maksimum Rp.50.000.000,-. Sedangkan jika dilakukan karena lalai, maksimum 2 tahun penjara dan atau denda Rp 10.000.000,-.

Tampaknya yang menjadi korban dari Undang-Undang ini adalah obyek wisata. Sedangkan peran manusia sebagai korban tidak tampak. Dengan demikian sifat perlindungan manusia adalah bersifat tidak langsung karena di dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan tegas tentang tindakan yang harus dilakukan pelaku tindak pidana terhadap korban yang bersangkutan.

32. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Karena mengatur tugas, kedudukan, hak dan kewajiban Jaksa khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana maka Undang-Undang ini

⁴¹ *Ibid*, halaman 890.

merupakan bagian dari kebijakan formil hukum pidana⁴². Dan tidak terkait langsung dengan persoalan perlindungan korban, kecuali hal ini dipandang sebagai rambu-rambu untuk membatasi kewenangan Jaksa dalam melaksanakan tugas, demi menjamin perlindungan terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenang darinya. Ini tidak bisa dipandang sebagai perlindungan korban.

33. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan perasuransian tanpa izin yang berwenang, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 2.500.000.000,- (Pasal 1 ayat 1).
- b. Menggelapkan premi asuransi, diancam pidana maksimum 15 tahun penjara dan denda maksimum Rp 2.500.000.000,- (Pasal 21 ayat 2).
- c. Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, dipidana maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 2.500.000.000,- (Pasal 21 ayat 3).

⁴² Hukum pidana formil hanya mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan hukum pidana. Hal ini sering diistilahkan dengan pengertian IUS PUNIEDI. Lihat Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, 1990), halaman 10.

- d. Menerima, menadahi, membeli atau menagunkan atau menjual kembali kekayaan perusahaan asuransi, diancam pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 500.000.000,- (Pasal 21 ayat 4).
- e. Memalsu dokumen perusahaan asuransi, diancam pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 250.000.000,- (Pasal 21 ayat 5).

Pasal 22 Undang – Undang ini menegaskan sebagai berikut : ⁴³

“ Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. “

Penegasan Pasal 22 tersebut merupakan langkah maju, karena pembuat Undang–Undang tampaknya ingin sungguh–sungguh di dalam melindungi kepentingan korban. Adanya jaminan pemberian ganti rugi atas tindak pidana yang diatur di sini meskipun akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah juga menunjukkan bahwa Undang–Undang Perasuransian ini dipandang telah memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban.

34. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Butir b konsideran Undang–Undang ini mengatakan : ⁴⁴

“Bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja. ”

⁴³ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Sekretariat Negara Republik Indonesia, halaman 172.*

⁴⁴ *Ibid, halaman 175.*

Ketentuan pidananya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melaporkan program jaminan sosial ⁴⁵ (Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 29).
- b. Tidak melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja serta perkembangannya dalam waktu 2 x 24 jam (Pasal 10 ayat 1 dan 2 jo Pasal 29).
- c. Tidak mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja (Pasal 10 ayat 3 jo Pasal 29).
- d. Tidak memiliki daftar tenaga kerja berikut keluarganya, daftar upah dan perubahannya serta daftar kecelakaan kerja (Pasal 18 ayat 1 jo Pasal 29).
- e. Tidak menyampaikan daftar tersebut huruf d pada badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 29).
- f. Memberikan data daftar tenaga kerja, daftar upah dan daftar kecelakaan kerja secara tidak benar (Pasal 18 ayat 3 jo Pasal 29).
- g. Tidak memberikan jaminan kecelakaan kerja (Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 29).
- h. Tidak membayar iuran Jaminan Sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara (Pasal 26 jo Pasal 29).

Terhadap pelanggaran ketentuan di atas, pelaku dapat dikenakan pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 50.000.000,-. Jika pelaku yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini,

⁴⁵ Program jaminan sosial yang dimaksud menurut Undang-Undang ini meliputi (Pasal 6 ayat 1)

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja
- b. Jaminan kematian
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Ibid, halaman 179

terhadapnya bisa dikenakan sanksi tambahan baik sanksi administrasi, ganti rugi atau denda.⁴⁶ Ini berarti ada pemikiran kemungkinan korban untuk mendapatkan perlindungan langsung dari pelakunya.

35. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan :

- a. Membangun rumah/ perumahan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan; baik persyaratan teknis, ekologis maupun administratif (Pasal 36).
- b. Tidak melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak pembangunan dan tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai rencana (Pasal 36 ayat 1 jo Pasal 7 ayat 1).
- c. Badan Usaha Perumahan yang tidak memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan Undang-Undang ini.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, halaman 257.

⁴⁷ Hal-hal yang wajib dipenuhi Badan Usaha itu meliputi :

- a. Melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan penguasaan tanah dan penataan pemilikan tanah;
- b. Membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan pembangunan rumah, memelihara dan mengelola sampai dengan pengesahan dan penyerahannya kepada Pemerintah Daerah;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas tanah;
- d. Membantu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan hak atas tanah di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah;
- e. Melakukan penghijauan lingkungan;
- f. Menyediakan tanah untuk sarana lingkungan
- g. Membangun rumah.

Tersebut di atas terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang ini, terhadap Badan Usaha yang lalai melakukan tindak pidana didenda maksimum Rp 200.000.000,-.

Jika yang melakukan hal ini bukan Badan Usaha, tetapi karena kelalaiannya dipidana maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum Rp 10.000.000,-.

Jika perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, baik oleh Badan Usaha atau bukan, dipidana penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimum Rp 100.000.000,-.

Periksa lebih lanjut Pasal 7; Pasal 24; Pasal 26 Undang-Undang Perumahan ini, *Ibid*, halaman 257, 262 dan 263

- d. Badan Usaha Perumahan yang telah membangun lingkungan siap bangun, tetapi menjual tanah kaveling tanpa rumah (Pasal 36 jo Pasal 26 ayat 1).
- e. Laki melakukan perbuatan a dan b di atas (Pasal 36 ayat 2).
- f. Badan Usaha Perumahan yang lalai melakukan tindak pidana a s/d d di atas (Pasal 36 ayat 3).
- g. Melanggar kesepakatan penghuni rumah, baik melalui perjanjian sewa menyewa atau bukan (Pasal 12 jo Pasal 36 ayat 4).⁴⁸

Melihat rumusan tindak pidana di atas, memang ada keinginan Undang - Undang ini untuk melindungi korban dalam arti langsung, yaitu para penghuni perumahan, maupun pihak-pihak yang dirugikan akibat sewa menyewa rumah. Tetapi jika melihat sanksi pidana yang ditetapkan Undang-Undang, tidak menunjukkan adanya realisasi pemberian perlindungan yang langsung kepada para korbannya, kecuali terhadap negara / pemerintah.

36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya.

Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Ungkapan ini jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk melindungi benda cagar budaya

⁴⁸ Periksa bagian konsideran Undang-Undang butir a serta bunyi Pasal 2 yang menegaskan tujuan dari Undang-Undang ini. *Ibid*, halaman 285-287.

sesuai dengan keinginan pembuat Undang-Undang. Tetapi sekaligus penegasan itu menunjukkan bahwa yang ingin dilindungi itu adalah benda, bukan manusia. Hal ini semakin jelas dipahami pada ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang ini, yaitu meliputi perbuatan :

- a. Merusak, mengambil, memindahkan benda–benda cagar budaya, dengan ancaman pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan atau denda Rp 100.000.000,- (Pasal 26).
- b. Mencuri, menggali tanpa izin benda cagar budaya, diancam pidana penjara maksimum 4 tahun dan atau denda maksimum Rp 50.000.000,- (Pasal 27).
- c. Tidak mendaftarkan kepemilikan; meniru; tidak melaporkan kehilangan; tidak melaporkan penemuan atau memanfaatkan benda cagar alam budaya, dipidana penjara maksimum 1 tahun atau denda Rp 10.000.000,- (Pasal 28).

Berdasarkan ketentuan di atas bisa dipahami bahwa sebenarnya juga ada pihak kedua (selain benda) yang secara tidak langsung bisa dirugikan akibat tindak pidana itu, yang dalam hal ini bisa perorangan maupun negara (umum). Tetapi persoalan korban yang kedua ini kurang diperhatikan oleh Undang-Undang. Hal ini juga bisa diartikan Undang-Undang ini belum memberikan perlindungan secara langsung kepada korban manusia, kecuali dalam arti umum / Negara.

37. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang–Undang ini meliputi perbuatan– perbuatan sebagai berikut :

- a. Melakukan praktek perbankan tanpa izin yang berwenang.

Ancaman pidananya berupa penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp10.000.000.000,- (Pasal 46). Ketentuan ini berlaku bagi badan hukum atau bukan.

- b. Memaksa pihak Bank untuk pemberian keterangan tentang keadaan keuangan atau hal – hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan tanpa izin menteri (Pasal 47 ayat 1).

Perbuatan ini diancam pidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp 3.000.000.000,- .

- c. Badan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana huruf b di atas, dapat dipidana maksimum 2 (dua) tahun dan denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (Pasal 47 ayat 2).

- d. Dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi kepada Bank Indonesia, dipidana penjara maksimum 2 tahun dan denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (Pasal 48 ayat 1). Jika hal itu karena kelalaian, dipidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp.1.000.000.000,- (Pasal 48 ayat 2).

- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu usaha Bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun penjara dan denda maksimum Rp.10.000.000.000,- (Pasal 49 ayat 1);
- d. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja ;
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan keluarga atau pribadinya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain untuk memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat- surat wesel, promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberi persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada bank;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketentuan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Terhadap perbuatan di atas diancam pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum Rp 6.000.000.000,- (Pasal 49 ayat 2).

- e. Pihak terafiliasi ⁴⁹ yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, dipidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum Rp 6.000.000.000,- (Pasal 50).

Untuk tindak pidana a* s/d d di atas, Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku yang bersangkutan, termasuk memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha yang bersangkutan.

Meskipun sanksi pidana yang dirumuskan Undang-Undang ini cukup berat, tetapi yang terlihat belum ada perlindungan korban dalam arti langsung. Yang terjadi barulah pemberian perlindungan kepada pihak pemerintah, termasuk Bank Indonesia. Sementara korban yang berstatus sebagai nasabah bank jelas sama sekali belum mendapat perlindungan langsung dari Undang-Undang ini, meskipun penjelasan Undang-Undang menyinggung hal ini.

⁴⁹ Yang dimaksud adalah :

- a. Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, badan pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan termasuk konsultan hukum, akuntan publik, penilai;
- d. Pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank.

Lihat Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang ini, *Ibid*, halaman 354.

38. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan :

- a. Dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan / atau menayangkan film dan/ atau reklame film yang ditolak Lembaga sensor film;
- b. Sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan atau menayangkan potongan film dan/ atau suara tertentu yang ditolak Lembaga sensor film;
- c. Sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/ atau menayangkan film yang tidak disensor lembaga sensor film;
- d. Melakukan usaha perfilamn tanpa izin yang berwenang;
- e. Mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor;
- f. Melakukan kerjasama dengan perusahaan film asing tanpa izin.

Terhadap ketentuan butir a s/d c dapat dikenakan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/ atau denda maksimum Rp 50.000.000,- (Pasal 40).

Sedangkan untuk tindak pidana butir e s/d f diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun dan / atau denda maksimum Rp 40.000.000,- (Pasal 41 ayat 1).

Usaha perfilman yang tidak memiliki izin usaha tetapi mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/ atau menayangkan film dan/ atau reklame film yang tidak memiliki tanda lulus sensor, pidananya ditambah sepertiga (Pasal 41 ayat 2). Terhadap barang-barang yang digunakan melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan dan tindakan pemusnahan sebagai pidana tambahan.

Dari rumusan tindak pidana di atas, dapat diketahui bahwa korban yang ingin dilindungi dari perbuatan di atas bisa berupa unsur pemerintah, lembaga sensor film, bisa pengusaha film maupun insan perfilman tetapi bisa pula masyarakat yang menjadi penonton film yang bersangkutan. Undang-Undang ini dipandang menunjukkan kemajuan dalam upaya melindungi korban yang dimaksud, karena di samping pemberian pidana pokok ada pula penjatuhan pidana tambahan yang berupa penyitaan atau perampasan/pemusnahan barang. Hal ini dipandang bisa mengurangi kekecewaan/penderitaan korban yang bersangkutan. Tetapi hal ini belum bisa dipandang sebagai bentuk perlindungan langsung.

39. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Ketentuan pidananya meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Keluar masuk wilayah Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan petugas Imigrasi, diancam pidana penjara maksimum 3 (tiga) tahun atau denda maksimum Rp 15.000.000,- (Pasal 48).
- b. Orang asing yang sengaja memalsu visa atau menggunakan visa palsu, dipidana pidana penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum Rp 30.000.000,- (Pasal 49).
- c. Orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian, dipidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau denda maksimum Rp 25.000.000,- (Pasal 50).

- d. Orang asing yang tidak memberikan keterangan yang diperlukan petugas; tidak memperlihatkan surat jalan/ dokumen keimigrasian; tidak mendaftarkan diri untuk izin tinggal di wilayah Republik Indonesia; tidak memenuhi kewajiban membayar biaya beban atas kelebihan tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ditentukan, dipidana kurungan maksimum 1 tahun dan/ atau denda maksimum Rp 5.000.000,- (Pasal 51).
- e. Orang asing yang izin keimigrasiannya habis dan masih tinggal di wilayah Indonesia malampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 25.000.000,- (Pasal 52).
- f. Orang asing yang berada di Indonesia secara tidak sah atau pernah diusir atau dideportasi, dipidana penjara maksimum 6 tahun dan/ atau denda maksimum Rp 30.000.000,- (Pasal 53).
- g. Menyembunyikan, melindungi, memberikan pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan orang asing yang diketahui atau patut diduga (Pasal 54):
 - (a) Pernah diusir atau dideportasi dan kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan / atau denda maksimum Rp 30.000.000,- ;
 - (b) Berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan / atau denda maksimum Rp 25.000.000,- ;

- (c) Izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana penjara maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 5.000.000,- .
- h. Menggunakan paspor palsu atau diduga palsu, dipidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 25.000.000,- (Pasal 55a).
- i. Menggunakan paspor orang lain; paspor yang dinyatakan batal atau menyerahkan paspor untuk digunakan orang lain yang tidak berhak, dipidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp.25.000.000,- (Pasal 55b).
- j. Memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh paspor bagi dirinya/ orang lain, dipidana penjara maksimum 2 (dua) tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,- (Pasal 55c).
- k. Memiliki atau menggunakan dua paspor yang semuanya berlaku, dipidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum Rp.10.000.000,- (Pasal 55d).
- l. Sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blangko paspor atau blangko dokumen keimigrasian, atau membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang digunakan untuk mensahkan dokumen paspor/ keimigrasian. Maksimum pidana penjara 6 tahun dan / atau denda maksimum Rp 30.000.000,- (Pasal 56).
- m. Sengaja atau melawan hukum merusak, menghilangkan, mengubah sebagian/ seluruhnya atas paspor atau cap yang terdapat dalam paspor, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan atau denda maksimum Rp 20.000.000,- (Pasal 57).

- n. Sengaja dan melawan hukum mempunyai, mengubah, atau menggunakan data keimigrasian untuk diri sendiri atau orang lain, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 58).
- o. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya paspor atau dokumen keimigrasian, dipidana penjara maksimum 7 tahun (Pasal 59).
- p. Orang asing yang memiliki izin tinggal, tetapi tidak melapor kepada kepolisian setempat jangka waktu 30 hari sejak izin diperoleh, dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 5.000.000,- (Pasal 61).
- q. Memberi kesempatan orang asing menginap, dan tidak melapor pada kepolisian setempat dalam waktu 24 jam sejak kedatangan, diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp.5.000.000,- (Pasal 60).

Yang tampak sebagai korban dari tindak pidana ini tidak lain adalah pemerintah/ negara, dan bukan korban dalam arti perorangan. Untuk itu tidak ada perlindungan langsung terhadap perorangan ini.

40. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan :

- a. Dengan sengaja mengeluarkan dana pensiun tanpa izin yang berwenang, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 56).
- b. Mengalihkan dana pensiun tanpa izin, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 57).

- c. Melakukan atau turut serta melakukan pembayaran pensiun menyimpang peraturan yang berlaku, dipidana penjara 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 58).
- d. Memalsu dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan atau pembayaran dana pensiun, dipidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan denda maksimum Rp 6.000.000.000,- .

Menurut penjelasan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang ini, bahwa peraturan ini dibuat dalam rangka untuk melindungi kepentingan peserta dari praktek yang mengundang konflik kepentingan yang merugikan dana pensiun. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi kemungkinan penyalahgunaan dana pensiun tersebut. Dengan demikian dirugikan akibat tindak pidana di atas adalah peserta dana pensiun yang telah menyetor uangnya kepada penyelenggara dana tersebut. Tetapi sebagai korban ternyata belum mendapat perlindungan yang pasti berdasarkan Undang – Undang ini. Ini berarti perlindungan terhadap mereka belum langsung dirasakan atau dipandang belum memadai.

41. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Pasal 60 ayat 1 Undang – Undang ini merumuskan beberapa tindak pidana sebagai berikut :

- a. Mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tanpa izin.⁵⁰
- b. Mengedarkan hasil penelitian Varietas luar negeri yang belum dilepas.

⁵⁰ Yang dimaksud plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Periksa Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ini, *Ibid*, halaman 529.

- c. Mengedarkan benih yang tidak sesuai label.
- d. Mengeluarkan benih atau memasukkan benih ke dalam wilayah Indonesia tanpa izin.
- e. Menggunakan cara atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan atau mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label.
- g. Mengedarkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar.
- h. Mengadakan, mengedarkan atau menanam benih yang dilarang pemerintah.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 250.000.000,- . Sedangkan tindak pidana yang sama, yang dilakukan karena kelalaian, maksimum 12 (dua belas) bulan atau denda maksimum Rp 50.000.000,-.

Ketentuan pidana bidang budidaya tanaman ini juga diatur dalam Pasal 61, meliputi pidana sebagai berikut :

- a. Tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan setifikasi tanpa izin;⁵¹

⁵¹ Yaitu proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang ini) *loc-cit*.

- c. Memelihara tanaman dengan menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam atau lingkungan hidup;
- d. Melakukan budidaya tanaman tanpa izin;
- e. Mengedarkan atau menggunakan pestisida yang dilarang pemerintah.

Terhadap ketentuan di atas bisa diancam pidana maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp 150.000.000,-. Sedangkan jika hal itu terjadi karena kelalaiannya dapat dipidana kurungan maksimum 12 (dua belas) bulan atau denda maksimum Rp 50.000.000,- terhadap barang-barang/ alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas.⁵²

Berdasarkan rumusan tindak pidana di atas bisa diketahui bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana yang dimaksud masih sangat bersifat umum, karena Undang-Undang tidak mengatur secara tersendiri apa yang harus dilakukan pelaku terhadap korban yang terkena akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan.

42. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian.

Ketentuan pidananya adalah sebagai berikut :

- a. Membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul dan bangunan lain, menanam jenis pohon, menempatkan barang pada jalur kereta api, sehingga mengganggu pandangan dan membahayakan, dipidana

⁵² Barang/alat yang dimaksud bisa berupa tumbuhan atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh/digunakan untuk melakukan tindak pidana. *Ibid*, halaman 547.

kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- dan diwajibkan membayar ganti rugi dan wajib membongkar atau menghilangkan gangguan tersebut (Pasal 37);

- b. Perbuatan yang mengakibatkan rusaknya pintu kereta api, atau tanpa hak membuka pintu perlintasan kereta api pada waktu akan atau sedang berjalan, dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- dan wajib membayar ganti rugi kepada badan penyelenggara (Pasal 38);
- c. Perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api, dapat dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- dan wajib membayar ganti rugi kepada badan penyelenggara (Pasal 39);
- d. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak atau mengurangi nilai atau tidak dapat berfungsinya sarana/ prasarana kereta api, dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- dan membayar ganti rugi kepada badan penyelenggara.

Dengan adanya pidana ganti rugi yang dapat diputuskan sekaligus bersama pidana pokok menurut Undang-Undang ini menunjukkan bahwa pihak penyelenggara kereta api sebagai korban nyata-nyata akan memperoleh jaminan perlindungan dari pihak pelaku secara langsung, dan hal ini dipandang merupakan kebijakan perlindungan yang sangat baik seandainya putusan ganti rugi itu sekaligus menyertai putusan pidananya.

43. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Raya

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan :

- a. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan; tidak sesuai dengan kelas jalan, dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- (Pasal 54);
- b. Memasukkan; membuat; atau merakit kereta gandengan / tempelan atau kendaraan khusus ke dalam negeri tidak sesuai peruntukan atau syarat teknis atau kelas jalan, dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 12.000.000,- (Pasal 55);
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor umum tidak dilengkapi lulus uji kendaraan, dipidana kurungan maksimum 2 (dua) bulan atau denda maksimum Rp 2.000.000,-; sedangkan jika surat tanda lulus itu memang tidak dimiliki, dipidana maksimum 6 bulan kurungan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 56 ayat 1 dan 2);
- d. Mengemudikan kendaran bermotor yang tidak didaftarkan sesuai ketentuan, dipidana maksimum kurungan 6 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,-; jika tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dipidana maksimum 2 bulan kurungan atau denda maksimum Rp 2.000.000,- (Pasal 57 ayat 1 dan 2);

- e. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan keselamatan yang ditentukan, dipidana kurungan maksimum 7 hari atau denda maksimum Rp 250.000,- (Pasal 58);
- f. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), dipidana kurungan maksimum 2 bulan atau denda maksimum Rp 2.000.000,-; jika SIM itu tidak dimiliki, dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 59 ayat 1 dan 2);
- g. Mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan tidak mampu mengemudikan dengan wajar, dipidana kurungan maksimal kurungan 3 bulan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- (Pasal 60 ayat 1);
- h. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengindahkan keselamatan pejalan kaki yang ditentukan, dipidana kurungan maksimum 1 bulan atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 61 ayat 1);
- i. Melanggar rambu – rambu lalu lintas, dipidana kurungan maksimum 1 bulan atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 61 ayat 1);
- j. Tidak menggunakan sabuk pengaman sewaktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat, atau memakai helm pengaman sewaktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua, dipidana kurungan maksimum 1 bulan atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 61 ayat 2);

- k. Duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat tanpa menggunakan sabuk pengaman atau membonceng kendaraan roda dua tanpa helm, dipidana kurungan maksimum 1(satu) bulan atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 61 ayat 3);
- l. Menggunakan jalan di luar fungsinya atau melakukan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin, dipidana kurungan kemsimum 1 bulan atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 62);
- m. Tabrak lari (Pasal 63)⁵³ ; dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- ;
- n. Tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik atas kendaraannya sendiri maupun kemungkinan umum, baik atas kendaraannya sendiri maupun kemungkinan kerugian bagi pihak ketiga dipidana kurungan maksimum 3 (tiga) bulan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- (Pasal 64);
- o. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dari kemungkinan kecelakaan, dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- (Pasal 65);
- p. Melakukan usaha angkutan wisata, atau angkutan orang atau angkutan barang tanpa izin, dipidana maksimum 3 bulan kurungan atau denda maksimum Rp 3.000.000,- (Pasal 66);

⁵³ Pasal 63 ini terkait dengan Pasal 27 yang berbunyi : “Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib (a) menghentikan kendaraan (b) menolong korban kecelakaan (c) melaporkan kecelakaan tersebut kepada Polisi terdekat”
Warta Perundang-undangan, Edisi No. 1129, (Jakarta : 1992), halaman 13.

- q. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang atau tingkat kebisingan, dipidana kurungan maksimum 2 bulan atau denda maksimum Rp 2.000.000,- (Pasal 67);

Melihat lengkapnya rumusan tindak pidana di atas, terlihat bahwa Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan jalan raya ini begitu sungguh- sungguh di dalam menerapkan kebijakan perlindungan korban, baik terhadap pejalan kaki, penumpang umum, sesama pengemudi kendaraan maupun terhadap awak kendaraan itu sendiri. Apalagi sistem pemberian ganti rugi ini juga diatur, yaitu di dalam Pasal 28 sebagai berikut : ⁵⁴

“ Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor “.

Kemudian Pasal 31 menegaskan : ⁵⁵

- (1) Apabila korban meninggal dunia, pengemudi dan atau angkutan umum wajib memberikan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/ atau biaya pemakaman;
- (2) Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut cukup membuktikan bahwa Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan raya ini telah memperhatikan aspek perlindungan korban secara langsung, khususnya terhadap korban yang timbul karena perbuatan kesalahan pengemudi kendaraan, baik penumpang umum, awak kendaraan, pejalan kaki, bahkan terhadap pemilik barang

⁵⁴ *Ibid*, halaman 14

⁵⁵ *Ibid*, halaman 15

yang diangkut, walaupun pada awalnya Undang-Undang ini mendapat reaksi keras dari masyarakat akibat tingginya sanksi pidana, khususnya yang berupa denda.⁵⁶

44. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Bab II Pasal 3 Undang-Undang penerbangan ini menyebutkan :

“Tujuan penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur dst, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional dst”.

Ini berarti bahwa Undang-Undang tersebut benar-benar berkeinginan untuk melindungi penumpang, termasuk terhadap perusahaan dalam negeri. Bukti kesungguhan hal ini antara lain dapat dilihat pada bunyi Pasal 43 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :⁵⁷

- (1) Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas :
 - a. kematian dan lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut apabila hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.
- (2) Batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab pengangkut dst diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

Pasal 44 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara atau kecelakaan dst;
- (2) Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh ganti rugi dst diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

⁵⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tertanggal 17 September 1992, maka Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini ditangguhkan pelaksanaannya selama satu tahun, yaitu dengan disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992.

⁵⁷ *Lembaran Negara Republik Indonesia* 1992, Opcit, halaman 706.

Adanya ketentuan mengenai ganti rugi terhadap para korban pengangkutan pesawat udara ini cukup membuktikan bahwa di sini ada jaminan perlindungan langsung terhadap korban, di samping kepada pelakunya masih bisa dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan. Adapun ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang penerbangan ini meliputi perbuatan :

- a. Mengoperasikan pesawat udara di kawasan udara terlarang, dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan denda maksimum Rp 72.000.000,- (Pasal 54);
- b. Mengoperasikan pesawat udara yang tidak terdaftar sesuai ketentuan, dengan ancaman pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 55);
- c. Mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter tanpa tanda kebangsaan yang ditentukan, dengan ancaman hukuman pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 56);
- d. Memberi atau mengubah tanda-tanda pesawat udara sipil menyerupai pesawat udara Negara, dengan ancaman pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 18.000.000,- (Pasal 57);
- e. Mengoperasikan pesawat udara asing dari, ke atau melalui wilayah Indonesia secara melawan hukum, diancam pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 60.000.000,- (Pasal 58);

- f. Melakukan pendaratan atau tinggal landas tidak sesuai ketentuan, dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 59);
- g. Menerbangkan pesawat udara yang dapat membahayakan pesawat udara, penumpang atau barang atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum, atau merugikan harta benda milik orang lain, dapat dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 60.000.000,- (Pasal 60);
- h. Melakukan perekaman dari udara menggunakan pesawat udara tanpa izin, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 60.000.000,- (Pasal 61);
- i. Mengemudikan pesawat udara tanpa memiliki sertifikat kecakapan, dipidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 62);
- j. Mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat kelaikan yang ditentukan, dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 63);
- k. Mengoperasikan fasilitas dan/atau peralatan penunjang penerbangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan, dipidana kurungan maksimum 6 tahun atau denda maksimum Rp 18.000.000,- (Pasal 64);

- l. Membangun atau mengoperasikan bandar udara tanpa izin yang wajib, dipidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp 100.000.000,- (Pasal 65);
- m. Berada di tempat-tempat tertentu di bandar udara tanpa hak atau mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan disekitar bandara sehingga mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan, dapat dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 18.000.000,- (Pasal 66);
- n. Orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap pesawat udara yang mengalami kecelakaan, dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 67);
- o. Merusak atau menghilangkan bukti atau mengambil barang atau reruntuhan pesawat yang mengalami kecelakaan sebelum dilakukan penelitian sebab- musabab kecelakaan, dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 18.000.000,- (Pasal 68 ayat 1); jika perbuatan ditujukan untuk menghilangkan bukti-bukti penyebab kecelakaan, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 60.000.000,- (Pasal 68 ayat 2);
- p. Melakukan kegiatan angkutan udara atau niaga tanpa izin, bisa dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 18.000.000,- (Pasal 69);

- q. Tidak mengasuransikan pesawat udara yang dioperasikan dapat dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 70);
- r. Tidak mengasuransikan awak pesawat yang dipekerjakan, dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 71);
- s. Mengoperasikan pesawat yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas kebisingan yang ditentukan, dapat dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 36.000.000,- (Pasal 72);

Dari rumusan tindak pidana di atas memang tidak tergambar adanya perlindungan langsung terhadap korban, tetapi dengan adanya ketentuan ganti rugi dan asuransi dalam Undang-Undang, maka ketentuan pidana ini bisa dipandang sebagai pelengkap dari prinsip perlindungan korban secara langsung itu.

45. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-Tumbuhan.

Rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan karantina ini adalah :

- a. Memasukkan ke wilayah Indonesia; membawa atau mengirim antar daerah di Indonesia; mengirim atau mengeluarkan ke luar Indonesia hewan, ikan atau tumbuh-tumbuhan dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan; tidak melalui tempat yang ditentukan atau tidak diserahkan kepada petugas karantina; orang, alat angkut, bungkus, air yang diduga membawa hama tetapi tidak ikut dikarantina, atau tidak memusnahkan

media pembawa hewan, tumbuh-tumbuhan di luar karantina yang tidak dimusnahkan, dapat dipidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp 150.000.000,- (Pasal 31);

- b. Lalai melakukan perbuatan tersebut Pasal 31, dapat dipidana penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp 50.000.000,- (Pasal 32).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa korban dari tindak pidana ini sebenarnya tidak hanya pemerintah tetapi juga bisa setiap orang yang terkena wabah penyakit akibat pelanggaran ketentuan pidana ini yang dilakukan para pelaku. Tetapi terhadap korban perorangan ini Undang-Undang ternyata tidak memberikan jawaban perlindungan secara tegas, kecuali hanya secara umum/ tidak langsung melalui keharusan karantina ini.

Adapun yang dimaksud dengan karantina adalah tempat pengasingan dan/ atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit atau organisme pengganggu tumbuh-tumbuhan dari luar negeri atau dari suatu tempat di wilayah Republik Indonesia.⁵⁸

46. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang-Undang ini pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pemilik merek, baik merek dagang, merek jasa maupun merek kolektif.⁵⁹

⁵⁸ Penjelasan makna karantina ini terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang ini. Dengan definisi tersebut sekaligus sudah terjawab tujuan dari dilakukannya tindakan karantina itu. *Ibid*, halaman 745.

⁵⁹ Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya; merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. *Ibid*, halaman 1190-1191.

Penegasan hal ini bisa dilihat pada konsideran Undang-Undang yang mengatakan :

“Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam Undang – Undang dst “

penegasan tersebut juga menunjukkan bahwa di dalam dunia usaha masalah merek ini sangat mempunyai arti penting bahwa karena persaingan usaha acap kali terhadap merek suatu usaha yang sudah terkenal sering dipalsukan atau ditiru. Perbuatan demikian tentu saja merugikan bagi pemilik merek asli yang bersangkutan, yang dalam hal ini menjadi korban perbuatan tidak terpuji tersebut.

Undang-Undang ini juga telah mengatur mekanisme ganti rugi melalui gugatan yang bisa diajukan ke Pengadilan oleh pemilik merek yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Bab VIII, Pasal 72 s/d 76. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang Merek ini telah memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap nasib para pemilik merek, dalam bentuk pemberian perlindungan secara langsung. Adapun ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Sengaja menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum untuk barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 7 tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,- (Pasal 81);

- b. Sengaja menggunakan merek yang pada pokoknya sama dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 50.000.000,- (Pasal 82);
- c. Memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui menggunakan merek palsu, dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,- (Pasal 84).

Ketentuan pidana ini tentu saja tidak menghapus tuntutan ganti rugi yang telah dijelaskan di muka.⁶⁰

47. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Tindak pidana di bisang pelayaran ini meliputi perbuatan

- a. Melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana navigasi dan fasilitas alur pelayaran di Indonesia. Jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dipidana penjara maksimum 12 tahun; jika mengakibatkan bahaya dan kapal tenggelam, dipidana maksimum 15 tahun penjara; jika mengakibatkan bahaya dan matinya seseorang, dapat dipidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun (Pasal 100 ayat 1);
- b. Karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di Indonesia. Jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar, dipidana maksimum 4 bulan 2 minggu atau denda maksimum Rp 6.000.000,-; jika

⁶⁰ Pasal 76 Undang-Undang ini mengatakan "Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi idak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bisang merek. " *Ibid*, halaman 1214.

mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar, dipidana penjara maksimum 9 bulan atau kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 12.000.000,-; jika mengakibatkan matinya orang, dipidana maksimum 1 tahun 4 bulan atau kurungan maksimum 1 tahun (Pasal 100 ayat 2);

- c. Nahkoda atau pimpinan kapal yang tidak mematuhi aturan-aturan lalu-lintas, alur, sistem rute, sarana bantu navigasi atau telekomunikasi pelayaran, dapat dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 101);
- d. Nahkoda atau pemimpin kapal yang memasuki perairan wajib pandu, tetapi tidak menggunakan tenaga pandu tanpa izin, dipidana kurungan maksimum 2 bulan atau denda maksimum Rp 4.000.000,- (Pasal 102 ayat 1);
- e. Melaksanakan pemanduan tidak memenuhi persyaratan dan kewenangan, dapat dipidana maksimum kurungan 2 bulan atau denda maksimum Rp 4.000.000,- (Pasal 102 ayat 2);
- f. Pemilik kapal dan/ atau nahkoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan kerangka kapal yang rusak, dapat dipidana kurungan maksimum 1 bulan atau denda maksimum Rp. 2.000.000,- (Pasal 103);
- g. Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal yang rusak, sehingga mengganggu keselamatan pelayaran, dipidana maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp. 24.000.000,- (Pasal 104 ayat 1);

- h. Pemilik kapal yang tidak memenuhi kewajiban asuransi yang ditetapkan Undang-Undang, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 104 ayat 2);
- i. Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kapal yang rusak, sehingga mengganggu keselamatan pelayaran yang menyebabkan kapal lain mengalami kecelakaan dan menimbulkan kematian, dipidana maksimum 10 tahun penjara (Pasal 104 ayat 3);
- j. Membangun pelabuhan umum tanpa izin, dapat dipidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum Rp 48.000.000,- (Pasal 105 ayat 1);
- k. Mengoperasikan pelabuhan umum tanpa izin, dapat dipidana penjara maksimum 3 tahun atau denda maksimum Rp 72.000.000,- (Pasal 105 ayat 2);
- l. Membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus, dipidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum Rp 48.000.000,- (Pasal 106);
- m. Menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, dapat dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp.24.000.000,- (Pasal 107);
- n. Tidak melaporkan kepada pejabat pemerinah tentang perubahan atas kapal, dapat dipidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp 24.000.000,- (Pasal 108);

- o. Nahkoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapalnya melampaui daerah pelayaran yang ditentukan, dapat dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 109);
- p. Nahkoda atau pemimpin kapal yang tidak mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu-lintas kapal di pelabuhan, dapat dipidana kurungan maksimum 3 (tiga) bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 110 ayat 1);
- q. Nahkoda atau pemimpin kapal yang berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar yang ditetapkan, dapat dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 24.000.000,- (Pasal 110 ayat 2);
- r. Menggunakan peti kemas sebagai bagian alat angkut yang tidak memenuhi syarat kelaikan yang ditentukan, dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 111);
- s. Pemilik kapal yang tidak memasang pendaftaran pada kapal sesuai ketentuan, dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 112);
- t. Menerima pengalihan hak milik kapal dan tidak melakukan balik nama dalam batas waktu yang ditentukan, dipidana denda maksimum 10 kali lipat biaya balik nama yang ditentukan (Pasal 113);
- u. Tidak memenuhi ketentuan pengibaran bendera kapal, dipidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan atau denda maksimum Rp 32.000.000,- (Pasal 114);

- v. Nahkoda atau pemimpin kapal yang meninggalkan kapalnya tanpa alasan yang sangat memaksa, dipidana maksimum 5 tahun 6 bulan (Pasal 115 ayat 1);
- w. Nahkoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapal yang diketahuinya tidak laik laut, dipidana kurungan maksimum 3 (tiga) bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 115 ayat 2);
- x. Pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan kewajibannya, dipidana kurungan maksimum 9 bulan atau denda maksimum Rp.18.000.000,- (Pasal 115 ayat 3);
- y. Nahkoda atau pemimpin kapal yang tidak menyelenggarakan atau tidak melaporkan buku harian kapal kepada pejabat yang berwenang, atau tidak memperlihatkan salinannya, dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 116);
- z. Pemilik atau operator kapal tanpa terdaftar dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang ditentukan, dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 12.000.000,- (Pasal 117 ayat 1);
- aa Nahkoda atau pemimpin kapal yang mempekerjakan anak buah kapal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dipidana kurungan maksimum 3 (tiga) bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 117 ayat 2);

- ab Anak buah kapal yang tidak memenuhi perintah nahkoda atau pemimpin kapal atau meninggalkan kapal tanpa izin, dipidana penjara maksimum 1 (satu) tahun 4 bulan (pasal 118);
- ac Membuang limbah atau bahan lain dari kapal, dipidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 120.000.000,- (Pasal 119 ayat 1);
- ad Jika perbuatan pada ac (Pasal 119 ayat 1) di atas mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup, dipidana penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimum Rp.240.000.000,- (Pasal 119 ayat 2);
- ae Nahkoda atau pemimpin kapal yang tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran, dipidana penjara maksimum 2 (dua) tahun atau denda maksimum Rp 48.000.000,- (Pasal 120);
- af Pemilik atau operator kapal yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya, dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 12.000.000,- (Pasal 121);
- ag Penyelenggara usaha kegiatan angkutan di perairan atau usaha penunjang yang melakukan usahanya tanpa izin, dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 122);
- ah Pengusaha kegiatan angkutan perairan yang tidak mengasuransikan kewajiban yang ditetapkan, dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 123);

- ai Setiap orang yang berada di atas kapal mengetahui terjadi kecelakaan, tetapi tidak memberi pertolongan sedapat mungkin atau melaporkan kejadian kepada yang bersangkutan, dipidana kurungan maksimum 2 bulan atau denda maksimum Rp 4.000.000,- (Pasal 124 ayat 1);
- aj Nahkoda atau pemimpin kapal yang tidak mengambil tindakan pencegahan atau tidak menyebarluaskan berita keadaan bahaya yang terjadi, dipidana kurungan maksimum 4 bulan atau denda maksimum Rp 8.000.000,- (Pasal 124 ayat 2);
- ak Nahkoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar, tidak memberikan pertolongan sesuai kemampuan pada kapal lain yang sedang dalam bahaya, dipidana kurungan maksimum 3 bulan, atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 125 ayat 1);
- al Nahkoda atau pemimpin kapal yang terlibat dalam tubrukan dengan kapal lain, tidak memberikan pertolongan pada penumpang, awak kapal maupun kapalnya, dipidana penjara maksimum 4 tahun (Pasal 125 ayat 2);
- am Nahkoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan keadaan yang kemungkinan membahayakan keselamatan berlayar kepada petugas, dipidana kurungan maksimum 2 bulan atau denda maksimum Rp.4.000.000,- (Pasal 126);
- an Nahkoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan kecelakaan melibatkan kapalnya atau kapal lain dan mengakibatkan kerusakan alur atau bangunan di perairan atau bahaya keselamatan berlayar, dipidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp 6.000.000,- (Pasal 127);

ao Mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah, setelah itu diberitahukan pemerintah kepadanya, dipidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp 24.000.000,- (Pasal 128).

Berdasarkan ketentuan pidananya di atas dapat diketahui bahwa yang bisa menjadi korban atas tindak pidana menurut Undang-Undang ini bisa pihak pemerintah/ Negara, pemilik fasilitas pelayaran, awak kapal maupun pengguna jasa pelayaran, baik yang berupa penumpang kapal maupun penyewa angkutan. Semuanya ingin dilindungi kepentingannya dengan Undang-Undang ini. Adanya kewajiban asuransi dan pembayaran ganti rugi yang juga diatur dalam Undang-Undang semakin mempertegas adanya keinginan memberikan perlindungan kepada korban tersebut secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban di bidang tindak pidana pelayaran ini bisa dikatakan cukup baik.⁶¹

48. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan:⁶²

- a. Melakukan tindak medis tertentu terhadap ibu hamil yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dipidana kurungan maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 500.000.000,- (Pasal 80 ayat 1);

⁶¹ Adanya kewajiban asuransi berlaku bagi pemilik/operator kapal (Pasal 121) maupun bagi setiap orang yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum yang merusak/mengakibatkan rusak sarana pelabuhan; termasuk pemilik atau operator kapal yang melakukan perbuatan yang sama. Terhadap pemilik/operator yang melakukan perbuatan yang merusak sarana pelabuhan ini bahkan diwajibkan memberi jaminan kepada korban. Periksa Pasal 33 Undang-Undang ini, *Ibid*, halaman 1403.

⁶² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, *Op cit*, halaman 1459-1462. Sanksi pidana yang ditetapkan dapat diperberat, yaitu ditambah seperempat jika menimbulkan luka pada korban, dan sepertiga jika mengakibatkan kematian korban. Periksa Pasal 83 Undang-Undang ini.

- b. Menghimpun dana pemeliharaan kesehatan tanpa izin; tidak melaksanakan ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku, dipidana penjara maksimum 15 tahun penjara dan maksimum Rp 500.000.000,- (Pasal 80 ayat 2);
- c. Melakukan transplantasi organ tubuh, jaringan tubuh atau transfusi darah dengan tujuan komersial, dipidana penjara maksimum 15 tahun dan pidana denda maksimum Rp 300.000.000,- (Pasal 80 ayat 3);
- d. Mengedarkan makanan atau minuman yang tidak memenuhi syarat atau membahayakan kesehatan yang ditetapkan, atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dipidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 300.000.000,- (Pasal 80 ayat 4);
- e. Melakukan transplantasi organ/ jaringan tubuh, inplan pemasangan alat kesehatan, bedah plastik atau rekonstruksi tanpa keahlian dan kewenangan, dipidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum Rp 140.000.000,- (Pasal 81 ayat 1);
- f. Mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan atau tanpa persetujuan donor atau ahli waris atau keluarganya; memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin; menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan dan keselamatan sesuai ketentuan, dipidana penjara maksimum 7 tahun dan/ atau denda maksimum Rp 140.000.000,- (Pasal 81 ayat 2);

- g. Melakukan pengobatan atau perawatan; transfusi darah; memberi obat; melakukan pekerjaan farmasi; bedah mayat, tanpa keahlian dan kewenangan, dipidana penjara maksimum 5 (lima) tahun dan atau denda maksimum Rp 100.000.000,- (Pasal 82 ayat 1);
- h. Melakukan upaya kehamilan di luar cara alami tidak sesuai ketentuan; memproduksi atau mengedarkan obat tradisional tidak memenuhi syarat; mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat; memproduksi atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan atau denda maksimum Rp.100.000.000,- (Pasal 82 ayat 2);

Ancaman pidana atas tindak pidana di atas dapat ditambah seperempat jika mengakibatkan luka berat atau sepertiga jika mengakibatkan kematian korban (Pasal 83). Tetapi aspek perlindungan korban dalam rumusan delik masih dipandang biasa, karena sifat perlindungan terhadap korban tersebut belum atau tidak secara langsung (konkrit).

49. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia.

Isi Undang–Undang ini ternyata hanya mengatur kebijakan hukum pidana formil, yaitu berupa hak dan kewajiban kedua Negara dalam proses penyerahan pelaku tindak pidana yang terjadi.

Karena tidak mengatur masalah perlindungan korban tindak pidana maka dalam kajian ini hanya dipandang sebagai kebijakan hukum pidana yang dibuat untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aturan formal hukum pidana serta perjanjian bilateral di bidang hukum pidana.

50. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Perubahan yang dilakukan ini pada intinya tidak begitu besar pengaruhnya dilihat dari kebijakan perlindungan korban. Hal ini terjadi karena perubahan tersebut hanya merubah dan menambah pasal-pasal baru atau delik baru yang ada kaitannya dengan perpajakan, sedangkan korbannya tetap, yaitu negara. Karena itu perubahan ini secara substantif tidak berpengaruh terhadap kebijakan perlindungan korban, kecuali hanya sekedar yang berupa pemberatan ancaman pidananya saja⁶³.

51. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Tindak Pidana yang dirumuskan di dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan :

a. Melakukan kegiatan di Pasar modal tanpa izin. Kegiatan ini meliputi :

Usaha bursa efek; Lembaga kliring, lembaga penyimpanan dan penyelesaian; Reksa Dana; Perusahaan Efek; Penasihat Investasi; Kustodian; Biro Administrasi Efek; Wali Amanat; Akuntan Konsultan

⁶³ Yang berubah hanya pidana denda, dari maksimum semula Rp 2.000.000,- menjadi Rp.5.000.000,- untuk petugas pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas di bidang pelayanan pajak.
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Tahun 1994, Jilid 1. (Jakarta, 1995) halaman 633.

- Hukum, penilai, Notaris dan profesi lain yang berkaitan dengan kegiatan Pasar modal. Ancaman pidananya yaitu pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 103 ayat 1).
- b. Bertindak sebagai wakil penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manager Investasi tanpa Izin, dengan ancaman pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000,- (Pasal 103 ayat 2)
 - c. Melakukan penipuan yang bertujuan mempengaruhi jual beli efek, dapat dipidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 15. 000.000.000,- (Pasal 104);
 - d. Manager investasi atau pihak terafiliasi yang menerima imbalan sesuatu sehingga mempengaruhi jual-beli efek untuk reksa dana, diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000,- (Pasal 105);
 - e. Emiten tidak terdaftar di Bapepam yang melakukan penawaran umum atau menjual efek kepada masyarakat, diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 5. 000.000.000,- (Pasal 106 ayat 1);
 - f. Perusahaan publik yang tidak menyampaikan pendaftaran ke Bapepam, diancam pidana penjara maksimum 3 (tiga) tahun dan denda maksimum Rp 5. 000.000.000,- (Pasal 106 ayat 2);
 - g. Sengaja menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah mengaburkan menyembunyikan, memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh

- izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik, diancam pidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 107);
- h. Mempengaruhi orang lain melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 103 s/d 107 di atas, dipidana sebagai pelaku (Pasal 108);
- i. Tidak mematuhi atau menghambat ketentuan atau tugas-tugas Bapepam, diancam pidana maksimum Rp 1.000.000.000,- (Pasal 109).

Di dalam penjelasan juga ditegaskan bahwa pengaturan kegiatan pasar modal ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan⁶⁴. Atas kerugian yang terjadi tersebut dalam beberapa hal bisa dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelakunya⁶⁵. Ini berarti aspek perlindungan korban pada Undang-Undang ini sudah mendapat perhatian cukup baik, bahkan beberapa diantaranya bersifat langsung.

52. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini berbunyi sebagai berikut⁶⁶

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara hukum dengan mengaku atau memakai usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bisang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborong pekerjaan pemerintah yang

⁶⁴ Ibid, halaman 242

⁶⁵ Misalnya pada ketentuan Pasal 46 yang menyatakan : “Kostodian wajib membenikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Periksa pula Pasal 80 tentang ganti rugi yang bisa dilakukan terhadap pelaku pasar modal.
Ibid, halaman 217, 227 dan 228

⁶⁶ *Ibid*, halaman 319

diperuntukkan dan dicadangkan bagi pengusaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Jika perbuatan di atas dilakukan oleh pengusaha menengah atau besar, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Ketentuan pidana pada pasal 34 dan 36 di atas menunjukkan bahwa korban yang ingin dilindungi Undang-Undang ini adalah kalangan pengusaha kecil yang sering tidak berdaya menghadapi persaingan usaha dengan pengusaha besar .

Tetapi perlindungan yang dimaksud dipandang masih bersifat umum dan tidak langsung , meskipun ada aspek pemberatan sanksi pidana.

53. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kepabeanan ini meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyelundupan, mengeluarkan barang impor secara ilegal, membuat, menyetujui atau turut serta membuat data palsu, menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor atau selundupan. Ancaman pidananya adalah penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimum Rp 250.000.000,- (Pasal 104);

- b. Mengangkut barang selundupan; memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, membuang dokumen kepabeanan; menyimpan dan atau menyediakan blangko faktur dari perusahaan luar negeri secara tidak sah. Ancaman pidananya berupa penjara maksimum 2 (dua) tahun dan/ atau denda maksimum Rp 100.000.000,- (Pasal 106);
- c. Membongkar barang impor ditempat lain yang sudah ditentukan; membuka, melepas, merusak segel pengaman yang dipasang petugas bea cukai. Ancaman pidananya adalah penjara maksimum 2 tahun dan/atau denda maksimum Rp 150.000.000,- (pasal 105);
- d. Pengusaha kepabeanan yang tidak melakukan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 tahun dan/ atau denda maksimum Rp 125.000.000,- (Pasal 106);

Melihat bentuk tindak pidana di atas, dapat diketahui bahwa korban yang dimaksud lebih mengarah pada negara selaku pemegang otoritas kepabeanan. oleh sebab itu tidak ada keistimewaan dalam Undang-Undang ini, kecuali hanya menunjukkan adanya perlindungan yang bersifat umum terhadap korban tindak pidana, walaupun di sini ada tambahan berupa perampasan barang hasil tindak pidana.

54. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Tindak pidana yang berkaitan dengan cukai ini meliputi :

- a. Menjalankan usaha pabrik, tempat penyimpanan atau impor barang kena cukai tanpa izin, dapat dipidana penjara maksimum 4 tahun dan denda maksimum 10 kali nilai cukai yang harus dibayar (Pasal 50);

- b. Pengusaha pabrik dan tempat penyimpanan barang yang tidak melakukan pencatatan sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda maksimum 10 kali cukai yang harus dibayar (Pasal 51);
- c. Pengusaha pabrik atau pengusaha atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian negara, dapat dipidana penjara maksimum 4 tahun dan denda maksimum 10 kali cukai yang harus dibayar (Pasal 52 KUHP);
- d. Membuat, menggunakan, menyerahkan buku dokumen cukai palsu/dipalsukan, diancam pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun dan denda maksimum Rp 150.000.000,- (Pasal 53);
- e. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai yang telah ditentukan, dipidana maksimum denda 10 kali nilai cukai yang harus dibayar (Pasal 54);
- f. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai hasil tindak pidana, dapat dipidana penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda maksimum 10 kali nilai cukai yang harus dibayar (Pasal 56);
- g. Membuat, meniru, memalsu, membeli, menyimpan, menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, mengimpor pita palsu; Menggunakan, menjual, menawarkan,

- menyerahkan, menyediakan untuk dijual, mengimpor pita yang sudah dipakai, dipidana penjara maksimum 8 tahun atau denda maksimum 20 kali nilai cukai yang harus dibayar (Pasal 55);
- h. Membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, tanda pengaman yang berkaitan dengan cukai tanpa izin, dipidana penjara maksimum 2 tahun dan /atau denda maksimum Rp 150.000.000,- (Pasal 57);
- i. Menawarkan, menjual, menyerahkan, pita cukai kepada yang tidak berhak, atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya, dipidana penjara maksimum 4 tahun dan/ atau denda maksimum 10 kali nilai cukai yang harus dibayar (Pasal 59).

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, korban yang dimaksud Undang-Undang adalah negara. Karena itu perlindungan terhadap korban bersifat umum dan langsung, meskipun di sini ada ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan⁶⁷.

55. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Tidak ada rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang ini, karena yang diatur di dalamnya hanya berbagai ketentuan formil yang menyangkut tatacara melaksanakan tugas pemasyarakatan pada umumnya. Mengingat hanya mengatur kebijakan hukum pidana formil, maka tidak dibahas lanjut dalam tulisan ini. meskipun dapat diketahui bahwa Undang-Undang ini secara eksplisit juga bertujuan untuk melindungi narapidana dari kesewenang-wenangan petugas pemasyarakatan yang bersangkutan.

⁶⁷ Pidana tambahan itu berupa perampasan atas barang kena cukai maupun barang-barang lain yang tersangkut dengan tindak pidana ini. Periksa pasal 62 Undang-Undang ini, *Ibid*, halaman 462.

56. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan .

Butir konsideran huruf b, menggariskan sebagai berikut :

“ Bahwa pangan yang aman, bermutu.... dst merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya sistem pangan yang memberi perlindungan bagi kegiatan kesehatan ...dst”⁶⁸

Kemudian dalam Bab VI Pasal 41 s/d Pasal 44 ada penegasan tentang tanggung jawab badan yang memproduksi pangan untuk memberikan ganti rugi kepada korban, sebagai akibat dari memakai/mengkonsumsi pangan yang dihasilkannya.

Bahkan jika materi kerugiannya sangat besar, atau korban yang terjadi banyak maka pemerintah berwenang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut kepada pihak yang bersangkutan.

Adapun jumlah maksimum tuntutan ganti rugi yang diajukan adalah Rp 500.000.000,- (Pasal 41).

Pejabat yang berwenang juga bisa memberikan sanksi administratif bagi pelanggar yang bersangkutan mulai dari tegoran, denda sampai pencabutan izin usaha.

Adapun tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain meliputi perbuatan :

- a. Melakukan kegiatan /proses produksi, menyimpan, mengangkut atau mengedarkan pangan tidak memenuhi syarat sanitasi⁶⁹.

⁶⁸ *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Tahun 1996, (Jakarta, 1997) Jilid II, hal. 36.

⁶⁹ Sanitasi kesehatan artinya memenuhi syarat pembuatan yang ditentukan Undang-Undang ini. *Ibid*, halaman 37.

- b. Menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melampaui batas ;
- c. Menggunakan bahan yang membahayakan kesehatan manusia;
- d. Mengedarkan pangan terlarang;
- e. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan;
- f. Memperdagangkan pangan yang mutunya beda dengan yang dijanjikan;
- g. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi syarat sertifikasi;
- h. Mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal bulan tahun kadaluarsa.

Pelanggaran atas ketentuan di atas dikenai pidana penjara maksimum 5 tahun dan/ atau denda maksimum Rp 600.000.000,-.(Pasal 55). Jika perbuatan a s/d d dilakukan karena lalai maka ancaman pidananya adalah kurungan maksimum 1 tahun dan /atau denda maksimum Rp 120.000.000, (Pasal 56). Jika menimbulkan kerugian manusia pidana ditambah seperempat dan jika menimbulkan kematian ditambah sepertiga (Pasal 58).

Pada Pasal 59 ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan tambahan atau mengedarkan pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia;
- b. Mengedarkan, menggunakan bahan baku/bahan baku tambahan atau bahan bantu lain yang dihasilkan dari proses genetika tanpa pemeriksaan keamanan terlebih dahulu sesuai ketentuan;
- c. Menggunakan iradiasi dalam kegiatan proses tanpa izin;

- d. Menggunakan bahan sebagai kemasan yang tidak memenuhi syarat;
- e. Membuka kemasan akhir; lalu dikemas kembali untuk diperdagangkan ;
- f. Mengedarkan pangan yang belum diuji;
- g. Mengedarkan pangan yang tidak memenuhi syarat gizi;
- h. Memproduksi atau memasukkan ke wilayah Indonesia pangan yang dikemas tanpa label;
- i. Memberikan keterangan tidak benar tentang pangan dalam label atau iklan;
- j. Memberikan keterangan pada label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan telah memenuhi persyaratan agama/kepercayaan;
- k. Memasarkan ke Indonesia atau mengedarkan pangan yang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- l. Menghambat proses pemeriksaan.

Untuk tindak pidana di atas dapat diancam pidana penjara maksimum 3 tahun dan atau denda maksimum Rp 360.000.000,-.

Masih ada ketentuan pidana lagi, yaitu yang diatur dalam pasal 59 sebagai berikut:

- a. Tidak menjelaskan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau mengedarkan pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan atau kesehatan manusia atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala atau tidak menyelenggarakan pengawasan atau pemenuhan syarat sanitasi;

- b. Tidak memenuhi persyaratan sanitasi bagi yang menangani langsung kegiatan proses produksi, menyimpan, mengangkut atau mengedarkan sesuai yang diwajibkan;
- c. Tidak melakukan tatacara pengemasan yang ditentukan;
- d. Tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu;
- e. Tidak menuat keterangan yang diwajibkan dalam label.

Ancaman pidana untuk perbuatan ini adalah penjara maksimum 4 tahun dan atau denda maksimum Rp 400.000.000,-.

Berdasarkan rumusan tindak pidana pada Pasal 55 s/d 59 ini, menunjukkan bahwa Undang-Undang Pangan ini betul-betul memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah perlindungan korban, khususnya kalangan konsumen pangan yang sering mendapat perlakuan buruk dari kalangan produsen. Di dalam Undang-Undang ini juga sudah ada perlindungan langsung kepada korban melalui mekanisme ganti rugi.

57. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention Psychotropic Substance 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).

Undang-Undang ini memang termasuk bagian dari kebijakan di bidang hukum pidana, karena isinya banyak menyinggung perlunya kerjasama Internasional dalam mengatasi peredaran gelap obat-obatan jenis psikotropika. Karena Undang-Undang ini hanya sebagai pengesahan sebuah konvensi maka dipandang tidak berkaitan langsung dengan persoalan perlindungan korban tindak pidana⁷⁰.

⁷⁰ Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral.

58. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang ini secara substansif hanya berbicara tentang bagaimana melindungi anak yang terlibat perkara pidana, yang dalam beberapa hal dibedakan dengan pelaku tindak pidana golongan dewasa.

Kosideran Undang-Undang ini secara tegas juga mengatakan bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia potensial yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang⁷¹.

Adanya perlakuan khusus di bidang hukum acara pidana ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap korban yaitu anak, dari kemungkinan perlakuan sewenang-wenang tindakan penegak hukum.

Masalahnya tidak ada sanksi yang tegas dalam Undang-Undang, jika penegak hukum yang dimaksud melakukan pelanggaran, meskipun Pasal 40 menegaskan bahwa hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini⁷². Karena itu yang ada masih bersifat tidak langsung.

⁷¹ *Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1997*, (Jakarta, 1998), halaman 63.

⁷² Hukum acara yang dimaksud khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu meskipun di dalam Undang-Undang Peradilan Anak tidak ada ketentuannya, tetapi jika KUHAP berlaku baginya maka terhadap pelanggaran hukum acara ini bisa dikenakan tuntutan Praperadilan.

59. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Dilihat dari isinya, Undang-Undang ini jelas bermaksud ingin memberikan perlindungan terhadap para penyandang cacat yang pada kenyataannya sering menjadi korban sebagai akibat dari realitas perbedaan fisik yang disandangnya. Karena itu tekanan dari Undang-Undang ini terletak pada upaya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam mendapat kesempatan pendidikan dan lapangan kerja. Satu-satunya perbuatan pidana di dalam Undang-Undang ini mengatakar, sebagai berikut⁷³:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Di samping itu masih ada sanksi administratif, tetapi akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini dipandang telah memberikan perhatian pada aspek perlindungan korban, khususnya bagi para penyandang cacat, meskipun hal ini kurang didukung dengan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran⁷⁴. Dengan demikian perlindungan terhadap penyandang cacat masih bersifat tidak langsung.

⁷³ Op-cit, Halaman 107.

Pasal 14 berbunyi : “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan / atau kualifikasi perusahaan”.

⁷⁴ Misalnya bagi penyandang cacat yang tidak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial dll, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang ini”

60. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Pasal 3 Undang-Undang ini menegaskan bahwa tujuan dari pengaturan di bidang psikotropika adalah :

- a. Menjamin kesediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. Memberantas penyalahgunaan psikotropika.

Penjelasan Undang Undang juga menyebutkan sebagai berikut :

“Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara”⁷⁵

Di dalam Pasal 46 Undang-Undang psikotropika ini juga ditegaskan bahwa salah satu arah pembinaan yang dilakukan pemerintah antara lain dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan dan/ atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika ini adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan, memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan dan atau membawa tanpa hak psikotropika golongan I ⁷⁶.

⁷⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, OP-cit, halaman 143.

⁷⁶ Psikotropika golongan I adalah yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. *Ibid*, halaman 146.

Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat dipidana penjara minimum 4 (empat) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda minimum Rp. 150.000.000,- maksimum Rp. 750.000.000,- (Pasal 15 ayat 1). Jika tindak pidana ini dilakukan secara terorganisir, dapat diancam pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (Pasal 59 ayat 1). Jika hal ini dilakukan oleh korporasi, disamping pidana di atas maka terhadap korporasi itu dapat dipidana denda sebesar 5 milyar rupiah. (Pasal 59 ayat 3);

- b. Memproduksi tanpa izin, memproduksi atau mengedarkan dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar/persyaratan, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan. Ancaman pidananya adalah maksimum 15 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 200.000.000,- (Pasal 60 ayat 1);
- c. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan Undang-Undang, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 60 ayat 2);
- d. Menerima penyaluran psikotropika secara melawan hukum, dipidana penjara maksimum 3 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 60.000.000,- (Pasal 60 ayat 3);

- e. Menyerahkan psikotropika secara melawan hukum, dapat dipidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp. 60.000.000,- (Pasal 60 ayat 4);
- f. Menerima penyerahan psikotropika secara melawan hukum, dipidana penjara maksimum 3 (tiga) tahun dan denda maksimum sebanyak Rp. 60.000.000,-. Jika yang menerima penyerahan adalah pengguna, dipidana penjara maksimum 3 bulan (Pasal 60 ayat 5).
- g. Mengeksport atau mengimport, melakukan pengangkutan eksport atau import psikotropika secara melawan hukum, diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan pidana denda maksimum Rp.300.000.000,- (Pasal 61 ayat 1);
- h. Tidak menyerahkan surat persetujuan eksport kepada yang berhak untuk itu, diancam pidana penjara maksimum 3 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 60.000.000,- (Pasal 61 ayat 2);
- i. Memiliki, menyimpan dan atau membawa tanpa hak psikotropika, dapat dipidana penjara maksimum 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 62);
- j. Melakukan pengangkutan secara tidak sah, merubah negara tujuan eksport secara melawan hukum, mengemas kembali secara tidak sah psikotropika, diancam pidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp. 60.000.000,- (Pasal 63 ayat 1);

- k. Tidak mencantumkan label, mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label, mengiklankan, memusnahkan psikotropika secara tidak sah, dapat dipidana penjara maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 63 ayat 2);
- l. Menghalang-halangi penderita untuk menjalani perawatan, menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tanpa izin, dapat dipidana penjara maksimum 1 tahun dan/ atau denda maksimum Rp.20.000.000,-(Pasal 64);
- m. Tidak melapor penyalahgunaan atau kepemilikan psikotropika kepada yang berwajib, dipidana penjara maksimum 1 tahun penjara dan/ atau denda maksimum 20.000.000,- (Pasal 65);
- n. Saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang menjalani pemeriksaan yang menyebut nama, alamat dan hal-hal yang dapat mengungkap identitas pelapor, dapat dipidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 65).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa korban dari tindak pidana psikotropika ini bisa individu/ anggota masyarakat sebagai pengguna, sebagai saksi pelapor. Tetapi secara umum korban yang dimaksud adalah negara sebagai cerminan dari pengemban kepentingan masyarakat tersebut. Aspek perlindungan korban yang tercermin dalam Undang-Undang ini cukup baik, karena di sini ada bentuk perlindungan langsung yaitu berupa upaya rehabilitasi bagi pengguna psikotropika.

Bahkan terhadap pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana, Hakim yang memutuskan perkara dapat memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan⁷⁷.

61. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substance 1988.

Walaupun Undang-Undang ini hanya bersifat mengesahkan, tetapi di dalamnya terkandung maksud untuk melindungi bangsa dari praktek penyalahgunaan narkotik maupun Psikotropika. Hal ini dapat dipahami dari pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi maupun pokok-pokok isi konvensi sebagaimana yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang sebagai berikut ⁷⁸ :

“Didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1998”.

Pada bagian pokok-pokok isi konvensi antara lain juga dinyatakan bahwa terhadap kejahatan narkotika dan psikotropika ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan

⁷⁷ Rehabilitasi adalah proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin. Rehabilitasi ini diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat.

Periksa Pasal 39, *Ibid*, halaman 130

⁷⁸ *Ibid*, halaman 201

penyitaan aset. Sedang kepada pelaku (pengguna) dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi atau reintegrasi sosial⁷⁹. Atas dasar uraian di atas cukup memberikan alasan bahwa Undang-Undang ini sangat memperhatikan aspek perlindungan korban, meskipun masih bersifat tidak langsung⁸⁰.

62. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Testy on The South East Asia Nuclear-Weapon Free Zone.

Walaupun hanya berupa pengesahan traktat, Undang-Undang ini juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana karena dengan diundangkannya traktat kawasan bebas nuklir, berarti segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata nuklir dilarang.

Padahal sebagaimana diketahui senjata nuklir ini adalah jenis senjata, yang apabila digunakan dapat mematikan semua makhluk hidup secara massal termasuk manusia⁸¹. Karena itu itu penandatanganan traktat jelas

⁷⁹ *Ibid*, halaman 202

⁸⁰ Dikatakan bersifat tidak langsung karena ratifikasi atas konvensi ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut di masing-masing negara anggota melalui Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud sudah dibuat yaitu :

a. Undang-Undang no. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Lihat himpunan aturan perundang-undangan republik Indonesia, *Ibid*, halaman 119-167rtfgvb54; *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1997 Jilid II* (Jakarta, 1998) halaman 1-32.

81 Sebagai contoh adalah korban bom atom Hiroshima pada 6 Agustus 1945, yaitu 80.000 manusia dari 344.000 penduduk terbunuh dan 80.000 lainnya mengalami luka-luka; 80 persen gedung bangunan hancur, 270 dari 280 dokter meninggal; 1645 dari 1780 juru rawat juga meninggal dan 42 dari 45 rumah sakit hancur.

Amin Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini*, (Surabaya, 1989), halaman 16.

dimaksudkan untuk melindungi manusia sebagai korban keganasan penggunaan senjata nuklir ini secara tidak langsung⁸²

63. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang ketenaganukliran ini telah tersirat pada bagian konsideran butir c yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa demi keselamatan, keamanan, ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan keuntungannya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”⁸³

Di dalam Undang-Undang ini juga telah diatur mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reaktor nuklir, sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 28 s/d 40. Inti dari pertanggungjawaban ini adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kecelakaan nuklir yang terjadi (pasal 28)
- b. Pertanggungjawaban atas kerugian itu ditentukan paling banyak adalah Rp 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah), dan atas jumlah tersebut pengusaha yang bersangkutan harus menjaminnya melalui asuransi atau jaminan keuangan lainnya (pasal 34 dan 35).

⁸² Dikatakan tidak langsung karena traktat, sebagaimana bentuk perjanjian internasional lainnya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, di dalam pelaksanaannya melalui Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud kini berlaku adalah Undang-Undang no. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran sebagai pengganti Undang-Undang nomor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan pokok tenaga atom. Tetapi perlu diperhatikan pula Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan traktat ini.

Periksa Penjelasan Undang-Undang Nomor Tahun 10 Tahun 1979, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1997, *Op-cit*, halaman 300.

⁸³ *Ibid*, halaman 284

- e. Ganti rugi itu diperuntukkan bagi pihak ketiga, yaitu orang atau badan yang menderita kerugian nuklir, dapat berupa kematian, cacat, cidera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk kerugian akibat pemulihan lingkungan hidup, kecuali pengusaha instalasi nuklir dan pekerjanya (Pasal 28 jo Pasal 1 ayat 16-18).

Tanpa harus melihat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor ketenaganukliran ini pun sudah dapat diketahui bahwa Undang-Undang nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran ini telah memperhatikan sungguh-sungguh aspek perlindungan korban secara langsung.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ketenaganukliran ini meliputi perbuatan sebagai berikut ;

- a. Membangun, mengoperasikan atau melakukan dekomisioning tanpa izin⁸⁴, diancam pidana maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000, (Pasal 41 ayat 1); jika perbuatan itu mengakibatkan kerugian nuklir, dipidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda maksimum 1 milyar rupiah (pasal 41 ayat 2). Jika denda tidak mampu dibayar terpidana dipidana kurungan maksimum 1 tahun (pasal 41 ayat 3);

⁸⁴ Dekomisioning adalah kegiatan menghentikan beroperasinya reaktor nuklir, *Ibid*, halaman 286.

- b. Petugas instalasi nuklir yang memanfaatkan sumber radiasi pengion tanpa memiliki izin, diancam pidana penjara maksimum Rp.50.000.000,- (Pasal 42 ayat 1). Jika denda tidak mampu dibayar terpidana dipidana kurungan maksimum 6 bulan (pasal 42 ayat 2)
 - c. Memanfaatkan tenaga nuklir tanpa izin, diancam pidana denda maksimum Rp 100.000.000,- (pasal 43 ayat 1). Jika denda tidak mampu dibayar terpidana dipidana kurungan maksimum 1 tahun (pasal 43 ayat 2);
 - d. Melanggar ketentuan tentang pengelolaan limbah radio aktif tingkat tinggi, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp. 300.000.000,- (pasal 44 ayat 1), jika hanya tingkat sedang dan rendah, dipidana denda maksimum Rp. 100.000.000,- (pasal 44 ayat 2). Jika denda tidak mampu dibayar, terpidana dipidana kurungan paling lama 1 tahun.
64. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
- Perubahan ini ternyata tidak sampai pada persoalan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana. Namun demikian ada dua hal penting yang dipandang memberi kontribusi besar pada aspek perlindungan korban, yaitu penambahan pasal 43 A dan pasal 45 yang berbunyi sebagai :
- Pasal 43 A: Pencipta atau ahli warisnya dapat pengajuan gugatan ganti rugi atas pelanggaran ketentuan Pasal 24.

- Pasal 45 : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta berdasarkan putusan pengadilan dapat :
- a. Dirampas untuk negara guna dimusnahkan atau
 - b. Diserahkan kepada pemegang hak cipta, sepanjang pemegang hak cipta yang bersangkutan telah mengajukan gugatan perdata atas perkara pelanggaran hak cipta tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Di samping itu juga ada perpanjangan jangka waktu perlindungan hak cipta dari 25 tahun menjadi 50 tahun (Pasal 43 D)

Tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang baru ini semata-mata diarahkan untuk lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pemilik/pemegang hak cipta. Berkaitan dengan semakin maraknya kasus pembajakan karya cipta dewasa ini. Penegasan tersebut di atas juga menunjukkan adanya aspek perlindungan korban secara langsung di dalam Undang-Undang hak cipta ini.

65. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten.

Perubahan Undang-Undang paten ini tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan hukum pidana yang terkandung di dalamnya.

Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan aspek perlindungan korban antara lain tentang :

- a. Adanya penegasan tentang hak menggugat bagi pemegang paten atau pemegang lisensi (pasal 122) ;
- b. Perpanjangan jangka waktu perlindungan hak paten (Pasal 9 dan 10)

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang ini memang dimaksudkan untuk memberikan bukti kesungguhan untuk melindungi pemegang hak paten secara lebih baik, baik secara langsung maupun tidak langsung⁸⁵.

66. Undang – undang nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 19 tahun 1992 tentang merk.

Ada beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan aspek perlindungan korban yang bertujuan menyempurnakan dan menambah Undang – undang merk yang ada sebelumnya yaitu :

- a. Pemberian perlindungan kepada pemilik merk terkenal, melalui mekanisme gugatan pembatalan merk (Pasal 56), atau melalui penolakan langsung oleh kantor merk;
- b. Pemberian perlindungan kepada indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau manusia atau kombinasi keduanya meberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di samping itu diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir sama dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungan diberikan tanpa harus didaftarkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara maksimum 7 tahun dan denda maksimum RP. 50.000.000,- Jika tanda tersebut pada pokoknya sama⁸⁶.

⁸⁵ Secara langsung perlindungan bisa dalam bentuk pemberian ganti rugi, meskipun harus melalui gugatan perdata, sedangkan perlindungan yang tidak langsung cukup dengan adanya pemberian sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran hak paten yang bersangkutan. Periksa Pasal 122 ayat 1, *Ibid*, halaman 398.

⁸⁶ Lihat pasal tambahan 82A dan 82B. *Ibid*, halaman 439. Lihat pula bagian penjelasan Undang-Undang, *Ibid*, halaman 443.

Adanya kebijakan hukum di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang merk yang dilakukan adalah dalam rangka untuk lebih menjamin perlindungan terhadap pemegang merk sebagai korban, maupun konsumen yang bisa juga menjadi korban.

Perlindungan tersebut bisa secara langsung melalui mekanisme ganti rugi yang telah ditentukan itu.

67. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang statistik ini meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan sensus secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 tahun dan denda maksimum Rp.50.000.000,- (Pasal 34)⁸⁷.
- b. Menyelenggarakan kegiatan statistik dan tidak menyerahkan sinopsis hasilnya kepada badan pusat statistik diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp. 25.000.000,- (Pasal35);
- c. Penyelenggaraan statistik yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui hasil atau memperoleh manfaat statistik yang dilakukan, diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp. 25.000.000,- (Pasal 36 ayat 1);

⁸⁷ Sensus menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Statistik adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
Ibid, halaman 494.

- d. Tidak menjamin kerahasiaan data yang diberikan responden, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 36 ayat 2). Jika perbuatan dilakukan petugas statistik, dipidana penjara maksimum 1 tahun 6 bulan dan denda maksimum 15.000.000,-(pasal 37);
- e. Responder yang tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan Badan Penyelenggara Statistik, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun 6 bulan dan denda maksimum Rp. 25.000.000,- (Pasal 38).
- f. Mencegah, Menghalang-halangi atau menggagalkan jalannya kegiatan statistik yang dilakukan penyelenggara, diancam pidana maksimum 5 tahun penjara dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 39).

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa yang bisa menjadi korban tindak pidana terutama adalah badan penyelenggara statistik, tetapi juga bisa juga unsur masyarakat.

Tetapi tidak tampak di sini adanya pemberian perlindungan yang bersifat langsung kepada pihak korban ini, kecuali terhadap negara.

68. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Tindak pidana yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini meliputi perbuatan :

- a. Lalai tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah, atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan tidak benar, diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum dua kali jumlah pajak terutang (pasal 37 ayat 1).

- Jika perbuatan di atas dilakukan dengan sengaja, diancam pidana maksimum 2 tahun penjara dan atau denda maksimum 4 kali jumlah pajak terutang (Pasal 37 ayat 2);
- b. Tidak membayar retribusi, diancam pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum 4 kali retribusi terutang (Pasal 39);
 - c. Pejabat yang lalai tidak menjamin kerahasiaan wajib pajak, diancam pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp.2.000.000,- (Pasal 40 ayat 1). Jika hal itu disengaja, diancam pidana kurungan 1 tahun atau denda maksimum Rp. 5.000.000,- (Pasal 40 ayat 2).

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa korban yang dimaksud Undang-Undang pajak daerah dan retribusi ini adalah pihak pemerintah daerah maupun masyarakat wajib pajak. Tetapi untuk perlindungan kepada keduanya masih bersifat tidak langsung, karena tidak ada jaminan ganti rugi yang bisa diterimakan langsung kepada para korban ini. Bahkan menurut pasal 41, denda yang dijatuhkan terhadap para pelaku tersebut dianggap sebagai bentuk penerimaan negara, bukan penerimaan pemerintah daerah yang bersangkutan.

69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketentuan pidananya adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang lalai tidak menyampaikan laporan penerimaan negara bukan pajak yang terutang , atau lalai menyampaikan laporan penerimaan negara bukan pajak yang terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar atau tidak

melampirkan keterangan yang benar sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 2 kali jumlah penerimaan bukan pajak yang terutang (Pasal 20);

- b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar, tidak menyetor atau tidak melaporkan jumlah penerimaan bukan pajak yang terutang; tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; tidak melaporkan penerimaan bukan pajak yang terutang; atau menyampaikan laporan penerimaan Bukan pajak yang terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 4 kali jumlah penerimaan bukan pajak yang terutang (pasal 21 ayat 1).

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, tampak bahwa korban yang dimaksud adalah semata-mata negara, dan bukan pihak perorangan. Jika sasaran korban yang dimaksud memang hanya negara maka di sini bisa dikatakan penerimaan denda kepada negara tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan dalam arti langsung. Tetapi jika perbuatan tersebut dipandang sebagai merugi kepentingan rakyat, dalam arti warga negaranya, maka bentuk perlindungan tersebut adalah tidak langsung.

70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Pasal 3 Undang-Undang ini menegaskan sebagai berikut :

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tentu saja memberikan indikasi bahwa pelaku/ pengguna narkotika ini dalam beberapa hal sekaligus juga sebagai korban kejahatan. Penegasan mengenai perlunya perlindungan terhadap pengguna narkotika yang sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkotika di dalam Bab VII mulai Pasal 44 s/d 51 yang mengatur tentang jaminan pengobatan dan rehabilitasi, cukup membuktikan bahwa di dalam Undang-Undang narkotika yang baru ini sudah ada bentuk pemberian perlindungan korban dalam arti langsung ⁸⁸.

Di dalam Bab VII Tentang Ketentuan Pidana, juga diketahui bahwa untuk menjamin ditaatinya peraturan narkotika ini , maka untuk beberapa tindak pidana yang dipandang serius dapat diancam hukuman mati, seumur hidup

⁸⁸. Pasal 45 Undang-Undang Narkotika ini menyebutkan : "Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan / atau perawatan". Sedangkan pengobatan dan/ atau perawatan tersebut dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah (Menteri).

Perikasa Pasal 48 s/d 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1997, jilid II (Jakarta , 1988), halaman 19.

atau pidana dengan sistem minimum khusus. Tindak pidana serius ini pada umumnya ditandai hal – hal sebagai berikut :

- a. Tindak pidana dilakukan atas penyalahgunaan narkoba golongan I⁸⁹
- b. Tindak pidana dilakukan dengan permufakatan jahat atau
- c. Tindak pidana dilakukan secara terorganisasi.

Terhadap pelaku kejahatan narkoba ini juga dapat diancam pidana denda yang cukup tinggi, yang bisa mencapai maksimum Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) ⁹⁰

Penjatuhan pidana penjara dengan pidana denda pada umumnya bersifat kumulatif, namun demikian pemberian sanksi seperti ini betapapun beratnya bukan merupakan bentuk perlindungan korban dalam arti langsung.

Secara ringkas tindak pidana di bisang narkoba ini dapt dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk

⁸⁹ Menurut penjelasan Undang-Undang Narkoba ini, ada tiga golongan narkoba sebagai berikut:
Golongan I : yaitu Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Golongan II : yaitu narkoba yang berkhasiat pengobatan , digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Golongan III : yaitu narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ibid, Halaman 43.

⁹⁰ Denda ini berlaku bagi korporasi yang mengimpor, mengeksport menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli atau menukar narkoba golongan I tanpa hak / melawan hukum (Pasal 82 ayat 4).

persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp.500.000.000,- (Pasal 78 ayat 1).

Jika perbuatan itu didahului permufakatan jahat, dipidana minimum 2 tahun dan maksimum 12 tahun dan denda minimum Rp. 25.000.000,- dan maksimum Rp. 750.000.000,- (Pasal 178 ayat 2). Jika perbuatan itu dilakukan secara terorganisasi, diancam pidana minimum 3 tahun, maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda minimum Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp.2.500.000.000,- (Pasal 79 ayat 3). Jika perbuatan dilakukan korporasi, dipidana denda maksimum Rp. 5.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 4).

- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II tanpa hak dan melawan hukum, diancam pidana maksimum 7 tahun dan denda maksimum Rp.250.000.000,- (Pasal 79 ayat 1a). Jika perbuatan didahului dengan permufakatan jahat, dipidana maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp. 400.000.000,- (Pasal 79 ayat 2a), jika dilakukan secara terorganisasi diancam pidana maksimum 12 tahun dan denda maksimum Rp. 2.000.000.000,- (Pasal 79 ayat 3a); jika dilakukan korporasi, dipidana denda maksimum Rp. 3.000.000.000,- (Pasal 79 ayat 4a).

- c. Memiliki , menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba golongan III, diancam pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 79 ayat 1b). Jika perbuatan didahului dengan permufakatan jahat, dipidana maksimum 7 tahun dan denda maksimum Rp.150.000.000,- (Pasal 79 ayat 2b), jika dilakukan secara terorganisasi diancam pidana maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp.400.000.000,- (Pasal 79 ayat 3b); jika dilakukan korporasi, dipidana denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (Pasal 79 ayat 4b).
- d. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkoba golongan I, diancam pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 1a). Jika perbuatan didahului dengan permufakatan jahat , dipidana mati atau seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun dan denda minimum Rp. 200.000.000,- dan denda maksimum Rp. 2.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 2a), Jika dilakukan secara terorganisasi diancam pidana mati atau paling singkat 5 tahun dan maksimum 20 tahun dan denda maksimum Rp. 500.000.000,- (Pasal 80 ayat 3a); jika dilakukan korporasi, dipidana denda maksimum Rp. 7.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 4a).

- e. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda maksimum Rp 500.000.000,- (Pasal 80 ayat 1b). Jika dilakukan dengan permufakatan jahat, dipidana penjara maksimum 18 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 2b). Jika dilakukan secara terorganisasi, diancam pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum Rp 3.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 3b). Jika dilakukan korporasi dipidana denda maksimum Rp.4.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 4b).
- f. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan III, diancam pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun dan denda maksimum Rp 200.000.000,- (Pasal 80 ayat 1c). Jika didahului mufakat jahat, dipidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 400.000.000,- (Pasal 80 ayat 2c). Jika dilakukan secara terorganisir dipidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 3c). Jika dilakukan korporasi diancam pidana denda maksimum Rp 3.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 4c).
- g. Membawa, mengirim, mentransito atau mengangkut narkotika golongan I, diancam pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda maksimum Rp 750.000.000,- (Pasal 81 ayat 1a). Jika didahului permufakatan jahat, dipidana minimal 2 tahun dan

maksimum 18 tahun dan denda minimum Rp 100.000.000,- maksimum Rp 2.000.000.000,- (Pasal 80 ayat 2a). Jika dilakukan terorganisasi diancam pidana penjara minimum 4 tahun maksimum 20 tahun dan denda minimum Rp 500.000.000,- dan maksimum Rp 4.000.000.000,- (Pasal 81 ayat 3a). Jika dilakukan korporasi, dipidana denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 81 ayat 4a).

- h. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, diancam pidana maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp 500.000.000,- (Pasal 81 ayat 1b). Jika didahului permufakatan jahat, dipidana penjara maksimum 12 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000,- (Pasal 81 ayat 2b). Jika dilakukan secara terorganisir, dipidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (Pasal 81 ayat 3b). Jika dilakukan korporasi dipidana denda maksimum Rp 3.000.000.000,- (Pasal 81 ayat 4b).
- i. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III, diancam pidana penjara maksimum 7 tahun dan denda maksimum Rp 200.000.000,- (Pasal 81 ayat 1c). Jika didahului permufakatan jahat, dipidana penjara maksimum 9 tahun dan denda maksimum Rp 500.000.000,- (Pasal 81 ayat 2c). Jika dilakukan secara terorganisasi, diancam pidana maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000,- (Pasal 81 ayat 3c). Jika dilakukan korporasi dipidana denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (Pasal 81 ayat 4c).

- j. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, atau menukar narkoba golongan I, dipidana mati atau seumur hidup atau maksimum 20 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 1a). Jika didahului permufakatan jahat dipidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara minimum 4 tahun dan denda minimum Rp 200.000.000,- dan maksimum Rp 2.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 2a). Jika dilakukan terorganisasi diancam pidana mati atau seumur hidup atau minimal penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp 500.000.000,- dan maksimal Rp 3.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 3a). Jika dilakukan oleh korporasi, dipidana denda maksimum Rp 7.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 4a).
- k. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli atau menukar narkoba golongan II, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp.500.000.000,- (Pasal 82 ayat 1b). Jika didahului permufakatan jahat, dipidana penjara maksimum 18 tahun dan denda maksimum Rp.1.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 2b). Jika dilakukan terorganisir, dipidana penjara maksimum 20 tahun dan denda maksimum Rp 4.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 3b). Jika dilakukan korporasi dipidana denda maksimum Rp 4.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 4b).

- l. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli atau menukar narkoba golongan III, diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 10.000.000,- (Pasal 82 ayat 1c). Jika didahului permufakatan jahat, dipidana penjara maksimum 12 tahun dan denda maksimum Rp 750.000.000,- (Pasal 82 ayat 2c). Jika terorganisir dipidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 3c). Jika dilakukan korporasi dipidana denda maksimum Rp.3.000.000.000,- (Pasal 82 ayat 4c).
- m. Melakukan percobaan tindak pidana tersebut a/s/d 1 di atas dipidana dengan ketentuan yang sama. (Pasal 83)
- n. Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberi narkoba golongan I, dipidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 750.000.000,-. Jika golongan II dipidana maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 500.000.000,-. Jika golongan III dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp.250.000.000,- (Pasal 84).
- o. Menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri, dipidana penjara maksimum 4 tahun. Jika golongan II maksimum 2 tahun. Jika golongan III maksimum 1 tahun (Pasal 85).

- p. Orang tua atau wali pecandu narkoba belum cukup umur yang tidak melaporkan kepada yang berwajib, dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 86).
- q. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan pidana narkoba, dipidana seumur hidup atau pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 20 tahun dan denda minimum R.20.000.000,- dan maksimum Rp. 600.000.000,- (Pasal 87).
- r. Pecandu cukup umur yang sengaja tidak melaporkan diri kepada petugas, diancam pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp. 2.000.000,-(Pasal 88 ayat 1). Keluarga pecandu yang tidak melaporkan hal itu diancam pidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp. 1.000.000,-(Pasal 88 ayat 2).
- s. Pengurus pabrik narkoba yang tidak mengemas dan memberi label secara sempurna sesuai ketentuan, dipidana penjara maksimum 7 tahun dan denda maksimum Rp. 200.000.000,- (Pasal 89).
- t. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas perkara narkoba diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 150.000.000,- (Pasal 92).

- u. Nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan pengangkutan narkotika, dipidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 150.000.000,- (Pasal 93).
- v. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditentukan berkaitan dengan narkotika, dipidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp 1.000.000,- (Pasal 94 ayat 1). Jika penyidik adalah polisi negara, dikenakan sanksi yang berlaku (Pasal 94 ayat 2).
- w. Saksi yang tidak memberikan keterangan dengan benar dalam pemeriksaan perkara narkotik di muka pengadilan, dipidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 300.000.000,- (Pasal 95).
- x. Pimpinan rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, saran penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik dan dokter yang mengedarkan narkotik golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan; Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan tersebut diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 200.000.000,- (Pasal 99) ⁹¹

71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan yang menonjol antara kedua Undang-Undang terletak pada lebih diperhatikannya kepentingan korban pada Undang-Undang yang baru, seperti adanya beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Adanya pengawasan yang sangat ketat terhadap kegiatan usaha yang mencemari lingkungan (Pasal 22 s/d 24).
- b. Adanya penegasan sanksi administrasi yang bersifat memaksa, sampai dengan kemungkinan dicabutnya izin usaha kegiatan usaha (Pasal 25 s/d 27).
- c. Adanya mekanisme audit lingkungan (Pasal 28 dan 29).
- d. Adanya sistem penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan luar pengadilan, termasuk penegasan soal pembayaran ganti rugi secara langsung dan seketika kepada pihak korban pencemaran (Pasal 30 s/d 34).
- e. Perubahan rumusan tindak pidana serta sanksi pidana. (pasal 40 s/d 48). Tindak pidana ini meliputi perbuatan sebagai berikut :
 1. Mengakibatkan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup, dengan ancaman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp 500.000.000,- . Jika mengakibatkan mati atau luka berat, dipidana 15 tahun dan denda Rp 750.000.000,- (Pasal 41).

⁹¹ Disarikan dari ketentuan pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, *Ibid*, halaman 29 s/d 39.

2. Lalai mengakibatkan pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup dipidana maksimum penjara 3 tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,-. Jika mengakibatkan mati / luka berat, pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp.150.000.000,- (Pasal 42).
3. Melepas atau membuang zat berbahaya, mengimpor, mengekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan zat berbahaya dengan sengaja dan menimbulkan akibat pencemaran dan membahayakan kesehatan atau nyawa; memberi informasi palsu, menghilangkan, merusak, menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan perbuatan pidana lingkungan yang diketahui menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Diancam pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum Rp.300.000.000,- (Pasal 43 ayat 1 dan 2). Jika mengakibatkan mati atau luka berat, dipidana penjara maksimum 9 tahun dan denda maksimum Rp 450.000.000,- (Pasal 43 ayat 3).
4. Lalai melakukan perbuatan tersebut Pasal 43 ayat 1 dan 2, dipidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp.100.000.000,- (Pasal 44 ayat 1). Jika mengakibatkan mati atau luka berat, dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp. 150.000.000,- (Pasal 44 ayat 2).

5. Bagi badan hukum yang melakukan tindak pidana, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Ditambah kemungkinan dijatuhkannya tindakan tata tertib berupa :
 - a. Perampasan keuntungannya yang diperoleh dari tindak pidana, dan /atau
 - b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, dan/ atau
 - c. Perbaikan akibat tindakan pidana dan atau
 - d. Wajib mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/ atau
 - e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa dan atau
 - f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan maksimum 3 tahun (Pasal 46 dan 47).

Dengan demikian Undang-Undang lingkungan hidup Nomor 23 Tahun 1997 ini dipandang jauh lebih memperhatikan aspek perlindungan korban dibanding yang ada sebelumnya, dan perlindungan tersebut bersifat langsung.

72. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran.

Tindak pidana yang berkaitan dengan penyiaran ini meliputi perbuatan :

- a. Menyiarkan hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentang dan atau bertentangan dengan ajaran agama, merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa, memuat hal-hal yang patut diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;

Menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan pornografi dan hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/ atau bertentangan dengan agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa, atau memuat hal-hal yang patut diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan di atas dapat dipidana penjara maksimum 7 tahun atau denda maksimum Rp 700.000.000,- (Pasal 64).

- b. Menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi dan/ atau bersifat perjudian, diancam pidana penjara maksimum 3 tahun dan/ atau denda maksimum sebesar Rp. 300.000.000,- (Pasal 65);
- c. Menyelenggarakan siaran tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 8 tahun dan/ atau denda maksimum Rp. 800.000.000,- (Pasal 66);
- d. Mendirikan Lembaga penyiaran asing di Indonesia, dipidana penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (Pasal 67);
- e. Menyelenggarakan siaran berlangganan melalui satelit atau kabel tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp. 500.000.000,- (Pasal 68 ayat 1).
- f. Menyelenggarakan siaran berlangganan melalui terrestrial, yang disalurkan melalui radio atau televisi berlangganan, menyalurkan siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih, dalam lingkungan

- terbatas atau menyelenggarakan jasa audio visual atas permintaan tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 3 tahun atau denda maksimum Rp. 300.000.000,- (Pasal 68 ayat 2);
- g. Menyelenggarakan jasa audio visual secara terbatas di lingkungan terbuka, menyelenggarakan jasa layanan informasi suara dengan teks, dengan gambar dan teks tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum Rp. 200.000.000,- (Pasal 68 ayat 3);
- h. Menyelenggarakan siaran khusus tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum sebesar Rp. 500.000.000,- (Pasal 68 ayat 4).
- i. Memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran, dipidana kurungan 1 tahun dan/ atau denda maksimum Rp.100.000.000,- (Pasal 69);
- j. Melakukan kegiatan siaran tidak tetap tanpa izin dan/ atau melakukan kegiatan jurnalistik asing di Indonesia tanpa izin, diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun dan/ atau denda maksimum Rp.100.000.000,- (Pasal 70);
- k. Melakukan kerjasama penyiaran dengan lembaga penyiaran luar negeri tanpa izin diancam pidana kurungan maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp. 200.000.000,- (Pasal 71)

- l. Menggunakan perangkat khusus penerima siaran untuk tujuan komersial tanpa izin, diancam pidana kurungan maksimum 9 bulan atau denda maksimum Rp. 1.00.000.000,- (Pasal 72);
- m. Menyiarkan iklan niaga tanpa izin, diancam pidana maksimum 1 tahun atau denda maksimum Rp. 1.00.000.000,- (Pasal 73);
- n. Menyiarkan iklan niaga yang isinya melanggar hukum, diancam pidana kurungan 9 bulan atau denda maksimum Rp. 1.00.000.000, (Pasal 74).

Terhadap barang atau alat yang digunakan melakukan tindakan pidana dapat disita untuk negara atau dimusnahkan. Berdasarkan ketentuan pidana di atas, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana di atas bisa orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran, tetapi bisa juga pelaku tersebut adalah orang. Sedangkan korban yang dimaksud lebih ditekankan pada subyek yang berbentuk negara, sekalipun korban ini bisa juga mengenai orang perorang, sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat tindak pidana di bidang penyiaran. Perlindungan korban yang tampak masih bersifat umum dan tidak langsung, karena tidak ada mekanisme lain yang dirumuskan di dalam Undang-Undang kecuali hanya penjatuhan sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Jenis sanksi ini tidak bisa dirasakan langsung bagi korban dalam arti individual.

73. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada bagian konsideran Undang-Undang Ketenagakerjaan ini antara lain ditegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dimaksudkan meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Di samping itu juga dimaksudkan untuk menjamin

hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam hubungan industrial yang berkeadilan⁹². Tujuan untuk melindungi tenaga kerja ini juga ditegaskan ulang di dalam Bab II Pasal 4 Undang-Undang ketenagakerjaan ini, dan perlindungan tersebut dipandang sangat menyeluruh karena tidak hanya untuk para pekerja dewasa saja, tetapi juga anak-anak, orang muda dan juga tenaga kerja wanita, termasuk wanita hamil, bahkan tenaga kerja yang bergerak di sektor informal⁹³.

Perlindungan dimaksud antara lain meliputi :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja;
- b. Perlindungan untuk berorganisasi dan berunding dengan pengusaha;
- c. Perlindungan di bidang keselamatan kerja
- d. Perlindungan upah dan
- e. Jaminan sosial tenaga kerja.

Demi efektifnya perlindungan ini, Undang-Undang juga mengamankan adanya pengawasan oleh pemerintah dengan kemungkinan memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini mulai dari tingkat pemberian teguran s/d diancam pidana pencabutan izin usaha (Pasal 170). Undang-Undang ini juga memberikan kemungkinan penyelesaian perselisihan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan (Pasal 57). Semua demi menjamin kepentingan tenaga kerja sebagai pihak yang wajib dilindungi.

⁹² *Ibid*, halaman 187.

⁹³ *Ibid*, halaman 231

Adapun tindak pidana yang diatur dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 1997 ini meliputi perbuatan :

- a. Tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja atau pekerja, diancam pidana penjara maksimum 4 tahun dan/atau denda maksimum Rp. 400.000.000,- (Pasal 171);
- b. Menghalang-halangi pekerja untuk membentuk organisasi serikat buruh/ gabungan serikat buruh atau menjadi anggotanya, diancam pidana maksimum 2 tahun dan denda maksimum Rp. 200.000.000,- (Pasal 172);
- c. Tidak memiliki peraturan perusahaan diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan/ atau denda maksimum Rp. 100.000.000 (Pasal 173).
- d. Tidak memenuhi ketentuan pengeledahan perubahan peraturan perusahaan, diancam pidana maksimum 6 bulan dan atau denda maksimum Rp. 50.000.000,- (Pasal 174).
- e. Tidak memberitahukan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan kepada pekerja diancam pidana maksimum 6 bulan dan atau denda maksimum Rp. 50.000.000,- (Pasal 175).
- f. Tidak membayar upah tenaga kerja selama mogok diancam pidana maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- ditambah putusan membayar upah pekerja (pasal 176).

- g. Melakukan mogok kerja tidak sah, melakukan tindakan pembalasan mogok kerja tidak sah, melakukan penutupan perusahaan secara tidak sah diancam pidana penjara maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp. 50.000.000,- (Pasal 177).
- h. Mempekerjakan anak secara tidak sah, diancam pidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp. 200.000.000,- (Pasal 178).
- i. Mempekerjakan anak muda secara tidak sah, diancam pidana maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 179).
- j. Mempekerjakan wanita secara tidak sah, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (pasal 180).
- k. Melaksanakan waktu kerja melebihi ketentuan, tidak membayar upah lembur sesuai ketentuan, memperkerjakan buruh melebihi waktu kerja lembur, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 181).
- l. Tidak memberikan waktu istirahat, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 182).

- m. Tidak memberikan kesempatan menyusui bayi, tidak memberikan cuti hamil/ gugur kandungan , diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan/ atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 183).
- n. Mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi secara tidak sah, atau mempekerjakannya tanpa membayar upah lembur sesuai ketentuan, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- dan dapat dijatuhkan putusan membayar upah lembur tersebut (Pasal 184).
- o. Tidak memberikan perlindungan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan/ atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 185).
- p. Menyelenggarakan pelatihan kerja tanpa izin , dapat diancam pidana penjara maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp. 50.000.000,- (Pasal 189).
- q. Melaksanakan pemagangan di luar wilayah Indonesia tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 190).
- r. Menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,- (Pasal 191).

- s. Menyelenggarakan penempatan pelayanan tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat yang berlaku diancam pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp. 50.000.000,- (Pasal 192).
- t. Menyelenggarakan penempatan tenaga kerja yang tidak memenuhi jaminan perlindungan yang ditentukan, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 193).
- u. Warga negara asing yang bekerja di Indonesia tanpa izin dapat diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 194).
- v. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 2 tahun dan denda maksimum Rp. 200.000.000,- (Pasal 195).
- w. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa menunjuk pendamping dari tenaga kerja Indonesia, serta tidak melatih tenaga kerja Indonesia untuk pengalihan jabatan orang asing tersebut, diancam pidana penjara maksimum 6 bulan atau denda maksimum Rp. 50.000.000,- (Pasal 196).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan ini benar benar menunjukkan komitmennya di dalam upaya melindungi korban pekerja. Tetapi karena tidak ada ketentuan jelas tentang apa yang harus dilakukan pelaku terhadap korban maka sifat perlindungan yang ada masih bersifat tidak langsung.

74. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang ini dipandang sebagai bagian kebijakan hukum pidana karena di dalam Undang-Undang ada ketentuan hukuman disiplin murni dan tidak murni

Hukuman disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan Perintah Kedinasan, Peraturan Kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Kehidupan Prajurit.⁹⁴

Sedangkan hukuman disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan tindak pidana ringan sifatnya, tetapi dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit (Pasal 5 Ayat 1 dan 2).⁹⁵

Bagian lain yang menunjukkan bagian Kebijakan Hukum Pidana tampak pada ketentuan Pasal 23 sebagai berikut :

- (1) Dalam hal seorang prajurit melakukan tindak pidana yang menjadi wewenang peradilan militer.....dst, maka terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan.
- (2) Apabila hak penuntutan terhadap suatu pelanggaran yang hanya diancam pidana denda karena pembayaran maksimum denda secara sukarela, maka terhadap pelaku tersebut tidak boleh dijatuhi tindakan disiplin.

94 Hukuman disiplin murni ini agak mirip dengan istilah "Treatment" dari ALF ROSS, dibanding istilah "Punishment". Menurutnya perbedaan antara Punishment dengan Treatment tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur penekan.

Lihat Muladi – Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang, 1984), halaman 5.

95 Hukuman disiplin tidak murni ini juga mirip dengan istilah pelanggaran yang hukumannya lebih ringan dibanding kejahatan.

Periksa : Siti Sutarni, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung, 1992), halaman 56

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana*, (Jakarta, 1986), halaman 25.

Dari klausul di atas dapat ditafsirkan bahwa asas dari dibuatnya Undang-Undang ini tidaklah untuk membatasi pemberian hukuman disiplin bagi seorang prajurit (pelaku) Angkatan Bersenjata, bahkan jika prajurit itu melakukan tindakan pidana sekalipun. Dengan demikian ada aspek perlindungan di dalamnya walaupun masih sangat abstrak.

75. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Menurut Eab I ketentuan umum pasal 1 ayat 2 mobilisasi adalah ⁹⁶ ;

“Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dalam negeri”.

Sedangkan demobilisasi adalah :

“tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi”

Tindak pidana yang berkaitan dengan mobilisasi dan demobilisasi ini adalah :

- a. Sengaja atau lalai tidak memenuhi panggilan mobilisasi, sengaja atau tanpa alasan tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang miliknya untuk kepentingan mobilisasi; membuat dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan mobilisasi; sengaja melakukan tipu

⁹⁶ *Ibid*, hal 317

daya yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhinder mobilisasi; melakukan tipu niaslihat sehingga orang lain atau dirinya sendiri tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barangnya untuk mobilisasi; sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau putusnya pendidikan negara dengan warga negara (mobilisan). Terhadap perbuatan di atas diancam pidana maksimum 8 tahun (Pasal 30);

- b. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, menyalahgunakan kekuasaan atau mempengaruhi dengan kekerasan, melakukan tipu daya atau menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani mobilisasi dan/ atau tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang untuk mobilisasi, diancam pidana penjara maksimum 10 tahun (Pasal 31);
- c. Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan tidak melaksanakan pengembalian demobilisan ke fungsi/ status semula, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun (pasal 32 ayat 1); jika karena kelalaiannya diancam pidana penjara maksimum 2 tahun 6 bulan (Pasal 32 ayat 2);
- d. Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan mobilisasi kepada pemilik semula, diancam pidana penjara maksimum 8 tahun (Pasal 33 ayat 1); jika hal ini dilakukan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimum 4 tahun (Pasal 33 ayat 2).

Melihat ketentuan pidana di atas menunjukkan bahwa korban dari tindak pidana ini secara umum adalah negara; tetapi bisa juga warga negara secara individual. Masalahnya adalah tidak diaturnya jaminan, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang ini dalam arti langsung terhadap korban yang dimaksud dalam bentuk sanksi selain pidana penjara yang ditetapkan, meskipun di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai soal rehabilitasi (Pasal 26), Penggantian barang (Pasal 27) dan pengembalian mobilisan (Pasal 24). Hal ini menunjukkan pula bahwa perhatian Undang-Undang terhadap masalah perlindungan korban masih kurang optimal dan belum secara langsung dirasakan korban dalam arti secara individual.

76. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang kepolisian ini pada dasarnya tidak secara langsung berhubungan dengan persoalan perlindungan korban tindak pidana, karena di dalamnya (isinya) hanya mengatur soal susunan, tugas wewenang, pembinaan serta hubungan dan kerja sama dengan badan atau lembaga lain. Memang ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban, yaitu sebagaimana tersirat dalam pasal 2 dan 3 tentang tujuan dan fungsi kepolisian negara yang berbunyi sebagai berikut:⁹⁷

Pasal 2 : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya

⁹⁷ *Ibid*, hal 344

ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 3 : Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib serta tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kemudian dalam bab 3 pasal 13 huruf B disebutkan salah satu tugas kepolisian negara adalah selaku pengayom dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan Perundang-undangan⁹⁸.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara ini merupakan *Ius Puniendi*, karena mengatur bagaimana alat perlengkapan negara di dalam melaksanakan pidana⁹⁹. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketentuan Undang-undang kepolisian tersebut telah menyinggung aspek perlindungan korban yaitu masyarakat, tetapi dalam bentuknya yang masih abstrak atau tidak langsung.

⁹⁸ *Ibid*, hal 347

⁹⁹ Sudarto, *Op-cit*, Halaman 10.

77. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Isi Undang-Undang ini antara lain mencakup :

1. Susunan dan Tata kerja Peradilan Militer
2. Susunan dan Tata Kerja Peradilan Tata Usaha Militer
3. Hukum Acara Peradilan (Pidana) Militer
4. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer

Yang menarik adalah, dengan telah diaturnya masalah ganti rugi dan Rehabilitasi dalam Undang-Undang ini yang didefinisikan sebagai berikut:¹⁰⁰

Pasal 1 ayat 3 : Rehabilitasi adalah hak terdakwa untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat dalam hal terdakwa diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang putusannya bukan pemidanaan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 1 ayat 40 : Ganti rugi adalah hak seorang yang menjadi korban tindak pidana yang langsung/tidak langsung mendapat kerugian untuk mendapat pemenuhan atas tindakan yang berupa imbalan uang menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Kemudian diatur pula masalah pengadilan perkara gugatan ganti rugi sebagai berikut :¹⁰¹

Pasal 183 (1) : Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan militer/pengadilan militer tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 420-421

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 422

Pasal 183 (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diajukan paling lambat sebelum auditor mengajukan tuntutan pidana.

Juga telah ditetapkan bahwa Kepala Kepaniteraan Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi jabatannya adalah juru sita, khusus untuk putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi ini (Pasal 186).

Pasal 342 Secara jelas juga mengatur masalah eksekusi ganti rugi ini, yaitu :

1. Salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirim kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana ayat 1 dikirimkan pula oleh pengadilan militer tinggi kepada badan atau pejabat tata usaha Angkatan Bersenjata yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Pembayaran ganti rugi tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 308 ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ¹⁰²

¹⁰² *Ibid*, halaman 535. Pasal 308 Tentang Kewajiban Badan/pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata akibat dikabulkannya gugatan meliputi :

- a. Pencabutan surat Keputusan
- b. Pencabutan Surat Keputusan dan Penerbitan Surat Keputusan Baru
- c. Penerbitan Surat Keputusan untuk yang belum ada Surat Keputusan
- d. Pencabutan Surat Keputusan dan pemberian ganti rugi
- e. Jika menyangkut personil berupa pemberian rehabilitasi

Meskipun masalah ganti rugi ini hanya berlaku di dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer saja, tetapi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Peradilan Militer ini telah secara kongkrit/langsung memperhatikan aspek perlindungan korban.

78. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perdagangan berjangka komoditi adalah prasarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani, usaha kecil dan produsen kecil untuk melindungi dirinya dari resiko fluktuasi harga. Petani dan produsen kecil pada umumnya tidak mempunyai kemampuan secara langsung dalam menggunakan barang perdagangan berjangka. Agar mereka dapat memanfaatkan perdagangan berjangka komoditi, maka kepentingan mereka dapat diorganisasikan melalui koperasi, kelompok pemasaran, atau pola kemitraan, pengusaha dengan petani dan produsen kecil.¹⁰³

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tampaknya kelompok petani dan pengusaha kecil ini termasuk pihak yang sering terkena akibat dari perbuatan-perbuatan pidana yang berkaitan dengan perdagangan komoditi berjangka ini. Di samping itu korban bisa juga terdiri atas anggota masyarakat secara individual, misalnya mereka yang menanam investasi melalui pembelian sertifikat sentra dana berjangka, yang oleh Undang-Undang ini mendapat perhatian untuk dilindungi jika terjadi penyelewengan (Pasal 40 ayat 3).

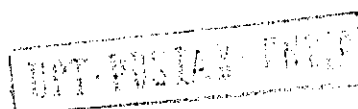
¹⁰³ Himpunan peraturan perundang-undangan tahun 1997, *Op-cit*, halaman 659

Terhadap pelanggaran yang terjadi atas ketentuan Undang-Undang ini, dapat diancam pidana penjara yang berkisar antara kurungan 1 tahun dan pidana penjara maksimum sampai dengan 5 tahun serta denda maksimum yang berkisar antara Rp. 1000.000.000,- hingga Rp. 6.500.000.000,-. Pidana denda ini tampaknya memang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau manipulasi di bidang perdagangan berjangka ini. Tetapi karena hanya dipandang memberi pemasukan kepada negara, maka belum dianggap sebagai bentuk perlindungan langsung.

79. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia).

Undang -Undang ini walaupun hanya bersifat mengesahkan, tetapi isinya jelas mengandung pesan adanya suatu usaha untuk melindungi manusia sebagai korban dari tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, kejam atau dipandang merendahkan martabat manusia. Dengan pengesahan konvensi ini berarti Indonesia terikat untuk ikut memenuhi kewajiban yang diamanatkan konvensi, yaitu mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana di dalam Perundang-undangnya dan terhadap pelakunya kemudian dijatuhi hukuman yang setimpal dengan sifat tindak pidananya¹⁰⁴.

¹⁰⁴ *Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1998 jilid II*, (Jakarta, 1999), halaman 93. Konvensi ini juga mewajibkan pihak negara anggota untuk memasukkan tindak penyiksaan ini sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi. Loc-cit



Berdasarkan hal di atas cukup jelas bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi penyiksaan di atas dipandang sebagai langkah untuk menjamin perlindungan korban, tindak pidana, meskipun bersifat tidak langsung, karena masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut.

80. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production Stock Piling and Use of Chemical Weapon and Their Distruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Pemusnahannya).

Bahwa salah satu pertimbangan Indonesia di dalam ikut meratifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 ini adalah dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban, keamanan dan perdamaian dunia, antara lain dengan membebaskan dunia dari ancaman bencana yang dapat ditimbulkan dari keberadaan dan penggunaan senjata pemusnah, yaitu senjata nuklir biologi dan kimia¹⁰⁵. Hal ini disebabkan karena jenis senjata ini dipandang sangat berbahaya dan mengancam kehidupan manusia, ketika terbukti bahwa dalam perang dunia ke I telah terjadi korban akibat penggunaan senjata jenis ini sebanyak seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cidera¹⁰⁶. Berdasarkan alasan di atas menunjukkan bahwa penandatanganan konvensi ini tidak lain untuk melindungi

¹⁰⁵ Konsideran butir a, *ibid*, hal 99

¹⁰⁶ Lihat bagian umum penjelasan alenia 1 dan 2. Sebelum konvensi sebenarnya sudah ada deklarasi Brusel, 1874 yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun dalam perang dan konferensi Den Haag 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas mengakibatkan sesak napas. Tetapi ternyata setelah itu senjata kimia tetap dipakai.

Ibid, hal 102

terjadinya korban yang disebabkan penggunaan senjata kimia tersebut, dan ini merupakan suatu bukti adanya perhatian terhadap perlindungan korban walaupun dalam bentuk yang abstrak.

81. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Filosofi dari pembuatan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ini sebenarnya merupakan sebuah pengakuan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, maupun deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Karena itu sebenarnya tujuan Undang-Undang ini adalah ingin melindungi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum agar tidak menjadi korban tindakan kesewenang-wenang oleh tindak penguasa atau pemerintah. Maka dari itu di dalam Pasal 4 huruf b kemudian ditegaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan di bidang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini adalah untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Karena itu di dalam pasal 18 diatur ketentuan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun”¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 163.

Kemudian terhadap pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat, dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku, jika perbuatannya itu melanggar hukum. Sedangkan terhadap penanggung jawab kegiatan dapat dikenakan tambahan sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan, bila melakukan pelanggaran yang sama (Pasal 16 dan 17). Berdasarkan uraian di atas memperlihatkan Undang-Undang ini memang telah memperhatikan aspek perlindungan korban walaupun tidak secara langsung, karena disini belum ada bentuk perlindungan kongkrit yang memberikan jaminan yang bisa dirasakan langsung oleh korban yang bersangkutan, kecuali hanya terbatas pada dipidanya pihak pelaku.

82. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Perubahan penting yang ada kaitannya dengan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini adalah :

- a. Adanya ketentuan bagi bank untuk wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan melalui lembaga penjamin simpanan (tambahan Pasal 37 b).
- b. Perubahan terhadap bentuk sanksi pidana yang semula memakai sistem minimum umum dan maksimum khusus, menjadi sistem minimum khusus dan maksimum khusus. Dengan perubahan ini berarti dalam sanksi pidana yang baru para pelaku tindak pidana dalam perbuatan-perbuatan tertentu tidak mungkin bisa terhindar dari

pengenaan sanksi pidana yang dipandang sangat ringan oleh masyarakat. Perubahan ini juga menitikberatkan perlunya pemidanaan dengan sanksi yang berat terhadap tindak pidana perbankan tersebut¹⁰⁸.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa pada Undang-Undang perbankan yang baru ini telah terdapat aspek perlindungan terhadap korban yang jauh lebih baik, khususnya terhadap para nasabah bank yang bersangkutan, berkenaan dengan adanya jaminan atas dana yang disimpan oleh masyarakat tersebut. Ini merupakan jaminan perlindungan langsung terhadap para nasabah yang sering menjadi korban tindak pidana perbankan.

83. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Usia Lanjut.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial usia lanjut bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang maha Esa¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 2 sampai 7 tahun, sedangkan bila denda berkisar antara satu sampai sepuluh miliar rupiah maksimum khusus pidana penjara adalah antara 4 - 15 tahun jika denda berkisar antara Rp. 8 - 200 miliar rupiah. *Ibid*, halaman 189-193.

¹⁰⁹ Pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun atau lebih (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang kesejahteraan usia lanjut), *Ibid*, halaman 247.

Atas dasar ketentuan pasal 4 ini berarti telah keinginan luhur pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan khusus kepada kaum usia lanjut, agar memperoleh perlakuan yang sama di tengah masyarakat. Perlindungan dimaksud memang patut diberikan karena para usia lanjut ini sering menjadi atau mendapat perlakuan yang kurang adil dan wajar berhubung kondisi fisiknya yang pada umumnya sudah kurang produktif. Adapun bentuk perlindungan dimaksud meliputi hak untuk memperoleh berbagai pelayanan, baik di bidang keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, kesempatan kerja maupun pendidikan dan pelatihan. Di samping itu juga hak untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum, layanan bantuan hukum dan bantuan sosial. Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah meliputi perbuatan:

- a. Tidak memberikan keringanan biaya kepada usia lanjut yang tidak mampu; Tidak memberi perlindungan sosial kepada lanjut usia tidak potensial melalui taraf kesejahteraan sosial; tidak memakamkan lanjut usia potensial terlantar yang meninggal dunia sesuai agamanya. Terhadap perbuatan ini kepada pelakunya dapat diancam pidana kurungan maksimum satu tahun atau denda maksimum Rp.20.000.000,- (Pasal 26)¹¹⁰.

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 251

- b. Sengaja tidak menyediakan ekseibilitas berupa pelayanan penggunaan sarana dan prasarana umum, dapat dikenai sanksi teguran lisan, teguran tertulis atau pencabutan izin (Pasal 27).
- c. Menyalahgunakan izin di bidang sosial, dapat dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan penghargaan (jika ada), penghentian bantuan (jika mendapat) dan pencabutan izin operasional (Pasal 28).

Melihat sanksi pidana atas perbuatan di atas, terlihat bahwa terhadap korban pidana lanjut usia tidak ada jaminan yang bisa dirasakan langsung oleh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada maksud yang sungguh-sungguh dari Undang-Undang di dalam melindungi korban, tetapi bentuk perlindungan itu masih bersifat abstrak/ tidak langsung.

84. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Indonesia dengan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang efektif dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan antara kedua negara yang meliputi :

- a. Pengambilan alat bukti/ barang bukti untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;
- b. Pemberian dokumen dan catatan;
- c. Lokasi dan identifikasi dari orang;

- d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;
- e. Upaya untuk mencari, menahan, dan menyita hasil kejahatan;
- f. Mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahan sementara ke negara tersebut;
- g. Penyampaian dokumen dan
- h. Bantuan lainnya yang sesuai dengan tujuan perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum negara diminta¹¹¹.

Beberapa bagian penting yang disepakati dalam perjanjian ini adalah :

1. Penolakan pemberian bantuan.

Maksudnya negara yang diminta berhak untuk menolak memberikan bantuan secara mutlak / tidak mutlak. Misalnya jika permohonan itu bertentangan dengan prinsip perjanjian internasional. Misalnya soal ne bis in idem.

2. Perlindungan terhadap kerahsiaan dan pembatasan penggunaan alat-alat bukti, barang bukti serta informasi;
3. Menghadirkan tahanan, narapidana atau orang lain untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan;
4. Jaminan perlindungan keselamatan bagi saksi atau saksi ahli yang diminta, agar tidak ditahan, dituntut atau dipidana¹¹².

¹¹¹ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1999 jilid 1*, (Jakarta, 1999), halaman 7.

¹¹² *Himpunan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1998 jilid 1*, (Jakarta, 1999), halaman 7.

Melihat isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 seperti dikemukakan tersebut, memang ada sedikit maksud pembuat perjanjian untuk melindungi saksi/ saksi ahli, yang dimungkinkan dapat menjadi korban perlakuan oleh negara peminta. Dengan demikian dapat dipandang Undang-Undang ini telah menyinggung aspek perlindungan korban, tetapi dalam pengertian yang sangat abstrak, lebih-lebih jika dilihat dari status Undang-Undang yang hanya berupa pengesahan.

85. Undang-Undang nomor 2 tahun 1999 Tentang partai politik.

Tindak pidana yang berkaitan dengan partai politik ini meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Memberi uang atau barang kepada partai politik melebihi ketentuan, yaitu Rp.15.000.000,- Jika perorangan dan Rp.150.000.000,- jika perusahaan atau badan, dengan ancaman pidana kurungan maksimum 30 hari atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 19 ayat 1);
- b. Memberi uang atau barang kepada orang lain agar ia menyumbang partai politik melebihi ketentuan, diancam pidana kurungan maksimum 30 hari atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 19 ayat 2);
- c. Menerima uang atau barang dari seseorang, agar dirinya menyumbang partai politik melebihi ketentuan, diancam pidana kurungan maksimum 30 hari atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 19 ayat 3)
- d. Memaksa seseorang atau badan untuk memberi sumbangan partai politik melebihi ketentuan, diancam pidana kurungan maksimum 30 hari atau denda maksimum Rp. 100.000.000,- (Pasal 19 ayat 4)

Melihat ketentuan pidana di atas, terlihat tidak begitu tegas siapa yang menjadi korban tindak pidana partai politik ini, kecuali hanya dengan membuat asumsi bahwa pihak yang menjadi sasaran korban adalah masyarakat. Dengan demikian bentuk perlindungan korban yang dimaksud sangat abstrak serta tidak langsung.

86. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum adalah :

- a. Memberikan keterangan palsu mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal untuk pengisian daftar pemilih, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 72 ayat 1);
- b. Meniru atau memalsu surat untuk digunakan seolah-olah asli guna kepentingan pemilihan umum, dipidana penjara maksimum 5 tahun; (Pasal 72 ayat 2);
- c. Mengetahui surat palsu, tetapi mempergunakannya seperti asli bagi dirinya atau orang lain, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 72 ayat 3);
- d. Mengacau, mengganggu atau menghalangi jalannya pemilihan umum, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 73 ayat 1);
- e. Menghalang-halangi dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang yang sedang memilih dipidana maksimum 5 tahun (Pasal 73 ayat 2);

- f. Memberi janji menyuap orang untuk tidak menjalankan haknya atau menjalankan haknya dengan cara tertentu dipidana penjara maksimum 3 tahun, dan hal ini berlaku juga bagi yang menerima janji. (Pasal 73 ayat 3);
- g. Melakukan tipu muslihat yang menyebabkan suara seseorang tidak sah atau menyebabkan partai tertentu mendapat tambahan suara, dipidana penjara maksimum 3 tahun (Pasal 73 ayat.4).
- h. Menggunakan hak pilih orang lain, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 73 ayat 5);
- i. Anggota DPR yang terbukti terlibat organisasi terlarang, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 73 ayat 6);
- j. Menggunakan hak suara lebih dari satu kali, dipidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 73 ayat 7).
- k. Menggagalkan pemungutan suara, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 73 ayat 8).
- l. Majikan/ atasan yang tidak memberi kesempatan pekerja untuk memilih, diancam pidana maksimum 3 tahun (Pasal 73 ayat 9).
- m. Lalai melaksanakan tugas berkaitan dengan pemilu dipidana penjara kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp. 10.000.000,- (Pasal 73 ayat 10).
- n. Menyumbang partai melebihi ketentuan, dipidana penjara maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp. 20.000.000,- (pasal 73 ayat 11).

Melihat perbuatan yang dirumuskan di atas, ternyata menjadi kurang jelas siapa sebenarnya yang dipandang sebagai korban dari perbuatan tersebut, tetapi paling tidak dapat dipahami bahwa kepentingan umum tampaknya lebih ditenjolkan dalam Undang-Undang ini, sehingga seandainya kepentingan umum ini yang dilindungi maka berarti perlindungan tersebut adalah bersifat tidak langsung.

87. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang ini tidak memuat ketentuan pidana, tetapi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Alasannya karena di dalam Bab VII, Bagian Kedua Pasal 43 terdapat klausul sebagai berikut :¹¹³

“Dalam hal seorang anggota MPR-DPR dan DPRD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus mendapat persetujuan dari Presiden bagi anggota MPR dan DPR, atau persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD I, dan persetujuan tertulis dari Gubernur bagi anggota DPRD II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Di sini terlihat ada upaya Undang-Undang untuk melindungi para wakil rakyat itu dari tindakan sewenang-wenang petugas penegak hukum, tetapi tentang perlindungan tersebut tidak bersifat langsung, sebab jika terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal ini, tidak ada ketentuan lanjut sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelakunya. Sedangkan jika hal ini dipandang sebagai pelanggaran Hukum Acara Pidana, maka penggunaan Undang-Undang (KUHP) tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban itu tidak secara langsung bisa dinikmati oleh para wakil rakyat tersebut.

¹¹³ *Undang-Undang Partai Politik Tahun 1999*, (Jakarta, 1999), halaman 153

88. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di dalam ketentuan Umum Bab I Pasal I ayat 1 dan 2 dinyatakan sebagai berikut:

1. "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum"¹¹⁴.

Adapun perbuatan yang dilarang berkaitan dengan monopoli ini adalah sebagai berikut :

- a. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat (Pasal 4 ayat 1).
- b. Pelaku usaha yang patut diduga secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa dengan jumlah 2 atau 3 atau kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar lebih dari 75 % (Pasal 4 ayat 2).
- c. Membuat perjanjian dengan pesaing usaha untuk membagi wilayah pemasaran sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat (Pasal 9).

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 174

- d. Membuat perjanjian dengan pesaing usaha yang dapat menghalangi pelaku usaha lain melaksanakan usaha yang sama atau untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga mengakibatkan hal itu merugikan/ akan merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual/ membeli setiap barang/ jasa dari pasar bersangkutan (Pasal 10).
- e. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran (Pasal 11).
- f. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran barang/ jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli/ persaingan usaha tidak sehat (pasal 12).
- g. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan, dan atau patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau pasokan sebanyak 75% lebih pangsa pasar (Pasal 13).

- h. Membuat perjanjian dengan pengusaha lain untuk menguasai produksi (Pasal 14).
- i. Membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang mengakibatkan praktek monopoli (Pasal 16).
- j. Melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran (Pasal 17).
- k. Menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal (Pasal 18).
- l. Melakukan kegiatan sendiri atau bersama yang mengakibatkan praktik monopoli yang berupa :
 - Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk usaha yang sama;
 - Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk tidak melakukan hubungan ;
 - Membatasi peredaran barang / jasa di pasar;
 - Melakukan diskriminasi (Pasal 19).
- m. Menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung ¹¹⁵(Pasal 25).
- n. Memiliki mayoritas saham yang sama pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha yang sama atau mendirikan

¹¹⁵ Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan , kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang / jasa tertentu.
Ibid, halaman 174.

beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha pada pasar yang sama sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan satu pengusaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar (Pasal 27).

- o. Melakukan penggabungan ambil alih saham atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat (Pasal 28).
- p. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang harus dibayar, kecuali dalam usaha patungan atau karena Undang-Undang (Pasal 5).
- q. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang mengakibatkan pembeli satu dengan lainnya harus membayar harga yang berbeda (Pasal 6).
- r. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang/ jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang/ jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang diperjanjikan (pasal 8).
- s. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang/ jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang / jasa tersebut kepada pihak tertentu atau tempat tertentu (Pasal 15).

- t. Membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak penerima barang/ jasa tertentu harus bersedia membeli dari pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat 2).
- u. Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atau barang/ jasa yang sesuai persyaratannya bahwa pelaku usaha yang menerima barang/ jasa dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing (Pasal 15 ayat 3).
- v. Melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau harga rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan pesaing di pasar (Pasal 20).
- w. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa (Pasal 21).
- x. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender (Pasal 22).
- y. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan (Pasal 23).
- z. Bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan pemasaran barang atau jasa atau pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa tersebut ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24).

- aa. Menduduki jabatan atau direksi atau komisaris perusahaan lain yang sama atau merangkap jabatan jika perusahaan itu ;
- Berada pada pasar yang sama.
 - memiliki keterkaitan erat dalam bidang jenis usaha
 - dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa (Pasal 26).
- ab. Pelaku usaha yang atau pihak lain yang tidak menyertakan alat bukti yang dibutuhkan petugas penyidik; menolak diperiksa atau menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan atau menghambat proses tersebut (Pasal 41).

Terhadap pelanggaran larangan yang tersebut pada huruf a sampai dengan o diancam pidana denda serendah rendahnya sebesar Rp.5.000.000.000,- maksimum Rp. 100.000.000.000,- atau pidana kurungan pengganti denda selama 6 bulan (Pasal 48 ayat 1). Terhadap pelanggaran larangan tersebut pada huruf p sampai dengan huruf aa diancam pidana denda minimal Rp. 5.000.000.000,- dan maksimum Rp. 25.000.000.000,- atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan (Pasal 48 ayat 2);

Terhadap pelanggaran larangan huruf ab diancam pidana denda minimal Rp. 1000.000.000,- maksimum Rp. 5.000.000.000,- atau pidana kurungan pengganti selama-lamanya 3 bulan (Pasal 48 ayat 3)

Sebagian besar dari tindak pidana tersebut ternyata merupakan delik materiil, karena diakhir kalimat disertai kata “dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat”. Ini berarti bahwa titik berat tindak pidana terletak pada akibat dari perbuatan yang dirumuskan, atau dengan kata lain yang dilarang oleh Undang-Undang ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan itu¹¹⁶. Disamping pidana pokok sebagaimana disebutkan, terhadap tindak pidana itu juga dapat dikenakan pula pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha.
- b. Larangan menduduki jabatan direksi/ komisaris minimal 2 tahun maksimum 5 tahun atau
- c. Penghentian kegiatan atas tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain¹¹⁷

Kecuali pidana tambahan masih ada kemungkinan dikenakan tindakan administratif terhadap pelaku pelanggaran oleh komisi pengawas persaingan usaha yaitu sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini. Komisi ini terlepas dari kekuasaan pemerintah, tetapi bertanggung jawab kepada presiden¹¹⁸.

¹¹⁶ Sudarto, *opcit* hal 57.

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

¹¹⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1999 jilid 1, *opcit*, halaman 193

¹¹⁸ Lihat Bab 6 Pasal 30 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Ibid*, hal 185

Di dalam Pasal 47 dijelaskan tindakan administrasi yang dimaksud yaitu berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian.
- b. Perintah untuk menghentikan integrasi vertikal¹¹⁹
- c. Perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan monopoli menyebabkan persaingan tidak sehat atau merugikan masyarakat.
- d. Perintah untuk menghentikan posisi dominan
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- f. Penetapan ganti rugi
- g. Pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan maksimum Rp. 25.000.000.000,-

Melihat beratnya sanksi pidana maupun sanksi administratif di atas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Anti Monopoli betul-betul ingin melindungi kepentingan kelompok usaha atau bahkan masyarakat yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi korban perlakuan pelaku usaha besar. Undang-Undang ini juga mengisyaratkan bahwa pelanggaran melakukan praktek monopoli yang dipandang merugikan masyarakat itu bisa dikenakan ganti rugi atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa dan kemungkinan korban tindak pidana untuk memperoleh ganti rugi itu dari pelaku sebagai bukti bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memperhatikan aspek perlindungan korban secara langsung.

¹¹⁹ Integrasi vertikal adalah pengadaan serangkaian proses atas barang tertentu mulai dari hilir sampai hulu atau proses yang berlanjut atas layanan jasa tertentu oleh pelaku tertentu (periksa penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor Tahun 1999), *Ibid*, hal 200-201

89. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum.

Pencabutan Undang-Undang ini antara lain dengan pertimbangan bahwa mekanisme Referendum ini dipandang tidak sesuai lagi dengan arah kebijakan Reformasi Pembangunan (Dekriminilisasi).

Pencabutan ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, yang bermaksud ingin meluruskan kembali sendi-sendi demokrasi yang selama 32 tahun terbelenggu di bawah kekuasaan orde baru yang berbau otoriter. Karena itu, langkah ini dipandang sebagai upaya menyelamatkan bangsa dan negara dari kehancuran. Dengan demikian kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah kebijakan politik dalam rangka melindungi korban, dalam arti yang masih sangat abstrak.

90. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Secara umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang acap kali menjadi korban kalangan pelaku usaha khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas perdagangan dan jual beli barang dan jasa. Beberapa ketentuan penting dari Undang-Undang ini antara lain :

- a. Adanya penegasan hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pengusaha atau pelaku usaha atau produsen;
- b. Adanya lembaga penyelesai sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan umum .

- c. Adanya lembaga yang disebut badan perlindungan konsumen nasional serta pengakuan terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- d. Adanya sanksi pidana dan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan di bidang perlindungan konsumen ini dalam bentuk :
 - 1. Penetapan ganti rugi hingga maksimum Rp. 200.000.000,- jika putusan ini dijatuhkan badan penyelesaian sengketa konsumen (Pasal 60).
 - 2. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimum Rp. 2.000.000.000,-. Jika putusan ini dijatuhkan oleh hakim pengadilan. Bahkan jika pelanggaran atas Undang-Undang perlindungan konsumen ini mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka dapat dipidana dengan hukum yang berlaku (Pasal 62).
 - 3. Hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok yang berupa: Pengumuman putusan hakim; perampasan barang tertentu; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

Melihat berbagai ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut memang dibuat untuk menjamin perlindungan korban yang disebut konsumen dari perbuatan yang merugikan akibat pemakaian barang atau jasa yang dibuat oleh kalangan pelaku usaha. Undang-Undang juga menjamin adanya perlindungan tersebut secara kongkrit dan langsung.

91. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Salah satu tujuan dibuatnya aturan penyelenggaraan ibadah haji ini adalah untuk melindungi para calon atau jemaah haji yang sering menjadi korban penipuan calo haji dalam setiap kesempatan. dengan demikian diharapkan penyelenggaraan haji ini dapat berjalan sebaik-baiknya sehingga tercapai haji mabrur¹²⁰

Sesuai dengan tujuan tersebut maka perbuatan pidana yang dilarang menurut Undang-Undang ini adalah seperti berikut :

- a. bertindak sebagai penerima Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) secara tidak sah, diancam pidana penjara maksimum 4 tahun dan atau denda maksimum Rp. 500.000.000,- (Pasal 27 ayat1).
- b. Bertindak sebagai penyelenggara ibadah umroh secara tidak sah diancam pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun dan atau denda maksimum Rp. 500.000.000,- (Pasal 27 ayat 2).

¹²⁰ Periksa Pasal 5 Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1999, *Ibid*, halaman 446

- c. Penyelenggara ibadah haji yang tidak melaksanakan peraturan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ini diancam pidana penjara maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum Rp.1.000.000.000,- (Pasal 28 ayat 1) disamping itu dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan; pencabutan izin penyelenggaraan; pencabutan izin usaha (Pasal 24).
- d. Penyelenggara ibadah umroh yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang berlaku diancam pidana penjara maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (pasal 28 ayat 2).

Terhadap pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif yang sama.

Meskipun ada maksud untuk melindungi korban calon jemaah haji tetapi karena di dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan lain yang menjamin perlindungan itu kecuali penerapan sanksi pidana dan administratif yang telah disebut maka dapat dipastikan bahwa bentuk perlindungan tersebut masih abstrak dan tidak langsung.

92. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi .

Dalam Undang-Undang ini ada mekanisme pemberian ganti rugi kepada pihak korban yaitu pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan konstruksi tersebut. Kemungkinan memperoleh ganti rugi ini adalah melalui upaya gugatan pengadilan atau di luar pengadilan (Pasal 29 jo Pasal 38 - 40). Yang menarik adalah adanya ketentuan Pasal 38 yang antara lain menegaskan bahwa pemerintah wajib berpihak kepada

kepentingan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Hal ini mempertegas bahwa Undang-Undang jasa konstruksi ini memang memberikan perhatian sungguh-sungguh di bidang perlindungan korban (masyarakat) terhadap pelanggaran atas penyelenggaraan jasa konstruksi ini terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha atau profesi (Pasal 42). Hal ini berlaku juga bagi pengguna jasa konstruksi yang bersangkutan.

Adapun ketentuan pidananya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi syarat sehingga mengakibatkan kegagalan bangunan, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 10% dari nilai kontrak (Pasal 43 ayat 1).
- b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi dan memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan itu sehingga mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi, dapat dipidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau denda maksimum 5% dari nilai kontrak (Pasal 43 ayat 2).
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan itu secara melanggar ketentuan keteknikan dan menimbulkan kegagalan pekerjaan konstruksi, diancam pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum sebesar 10% dari nilai kontrak (Pasal 43 ayat 3).

Dengan adanya beberapa ketentuan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi ini telah memperhatikan aspek perlindungan korban dengan cukup baik dan langsung.

93. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Internasional Labour Organization Convention Nomor 105. Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa).

Dapat dipastikan bahwa motivasi dari kebijakan pengesahan konvensi ini semata-mata dilandasi adanya keinginan melindungi buruh dari praktek kerja paksa walaupun dengan alasan¹²¹.

- a. As a mean of political coercion or education or as punishment for holsing or expressing political view ideologically opposed to the established political, social or economic system;
- b. As a methode of mobilising and using labour for purposes of economic developing;
- c. As a mean of labour discipline;
- d. As a mean of racial, social, national ar religius discrimination;

Dengan demikian ada aspek perlindungan korban yaitu buruh yang ingin dilindungi kepentingan dengan dilakukannya pengesahan Undang-Undang ini, walaupun dalam bentuk yang masih abstrak/ tidak langsung.

¹²¹ Periksa Artikel Konvensi No.1, *Ibid*, halaman 526

94. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Internasional Labour Organization Convention NO. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Dapat Diperbolehkan Bekerja)

Konvensi ini merupakan penegasan dari ILO (International Labour Organization) bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun. Pembatasan usia ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak dasar anak. Untuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 tahun¹²².

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengesahan konvensi ini merupakan pernyataan adanya tekad Indonesia untuk melindungi anak sebagai korban dari praktek pengerahan tenaga kerja yang sering terjadi di berbagai sektor kegiatan usaha. Tetapi perlindungan itu juga bersifat tidak langsung.

95. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan International Labour Organization Convention NO. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Konvensi pada prinsipnya melarang adanya setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan ketrampilan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik kebangsaan atau asal usul keturunan¹²³.

¹²² *Ibid*, halaman 539

¹²³ *Ibid*, halaman 567

Ketentuan tersebut juga mengandung maksud negara harus menjamin dan melindungi buruh dari kemungkinan menjadi korban perlakuan yang tidak sama dari pihak pengusaha, sehingga Undang-Undang ini dapat dipandang telah memperhatikan aspek perlindungan korban dalam arti luas/ tidak langsung.

96. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Berapa ketentuan yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini antara lain :

1. Ketentuan Pasal 55 yang berbunyi¹²⁴ :

- Ayat 1 : Tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dilakukan setelah ada persetujuan tertulis Presiden
- Ayat 2 : Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 - b. Dituduh melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati.
- Ayat 3 : Setelah tindakan penyidikan sebagaimana ayat 2 dilakukan hal itu harus dilaporkan kepada Presiden paling lambat 2 x 24 jam

2. Ketentuan Pasal 71¹²⁵

- Ayat 1 : Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruh atau sebagian kepada pelanggar.
- Ayat 2 : Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimum Rp 5.000.000,- dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

¹²⁴ *Ibid*, halaman 600

¹²⁵ *Ibid*, halaman 605

3. Ketentuan Pasal 74¹²⁶

Ayat 1 : Penyidikan/penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 : Dengan peraturan daerah dapat ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa :

1. Terhadap seorang Kepala Daerah diberikan perlindungan dengan hukum. Agar tidak diperlakukan semena-mena bilamana yang bersangkutan melakukan tindak pidana.
2. Ketentuan tindak pidana bisa dibuat melalui Peraturan Daerah, meskipun klasifikasi ancamannya ringan. Ini berarti demi melindungi kepentingan umum Peraturan Daerah bisa dibuat.
3. Untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah tersebut berlaku ketentuan untuk acara pidana.

Ini berarti ada jaminan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yang bisa menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Dengan demikian Undang-Undang ini tercermin aspek perlindungan korban meskipun secara tidak langsung. Bahkan meskipun Undang-Undang ini bukan/ tidak mencantumkan materiil hukum pidana.

¹²⁶ *Locit*

97. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan transaksi tukar atau bayar di Indonesia tidak menggunakan mata uang rupiah, dapat dipidana kurungan minimum 1 bulan maksimum 3 bulan serta denda minimum Rp. 2.000.000,- maksimum Rp. 6.000.000,- (Pasal 65);
- b. Menolak pembayaran dengan rupiah di wilayah Indonesia, diancam pidana penjara minimum 1 tahun maksimum 3 tahun serta denda minimum Rp. 1.000.000.000,- dan maksimum Rp. 3.000.000.000,- (Pasal 66);
- c. Melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas bank Indonesia, diancam pidana penjara minimal 2 tahun maksimum 5 tahun serta denda minimum Rp. 2.000.000.000,- maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 9 ayat 1 jo Pasal 67);
- d. Anggota dewan gubernur atau pejabat bank Indonesia yang tidak menolak campur tangan atau tidak mengabaikan campur tangan pihak luar, dipidana penjara minimum 2 (dua) tahun maksimum 5 (lima) tahun serta denda minimum Rp. 2.000.000.000,- maksimum 5 (lima) tahun serta denda minimum Rp 2.000.000.000,- maksimum Rp.5.000.000.000,- (Pasal 9 ayat 2 jo Pasal 68);

- e. Badan yang tidak memberikan data/ keterangan yang dibutuhkan Bank Indonesia, dipidana denda maksimum sebesar Rp 50.000.000,- (Pasal 14 ayat 1 jo pasal 69).
- f. Orang/ pejabat yang memberi perintah atas nama Bank Indonesia yang melakukan pembelian untuk diri sendiri surat-surat utang negara, diancam pidana penjara minimum 1 tahun maksimum 3 tahun serta denda minimum Rp. 6.000.000.000,- (Pasal 70).
- g. Pejabat atau pegawai atau badan lain yang ditujuk oleh bank Indonesia yang memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dipidana penjara minimum 1 tahun maksimum 3 tahun serta denda minimum Rp.1.000.000.000,- maksimum Rp 3.000.000.000,- (Pasal 71). Jika pelakunya badan hukum dipidana denda minimum Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maksimum Rp 6.000.000.000,-¹²⁷

Melihat ketentuan pidana di atas, tampaknya fokus yang menjadi sasaran korban tindak pidana adalah kepentingan negara sebagai simbol dari kepentingan umum/ masyarakat. Oleh sebab itu sifat perlindungannya pun juga masih abstrak, tidak langsung mengarah pada korban dalam arti individual.

¹²⁷ Di samping sanksi pidana di atas kepada pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, teguran tertulis, pencabutan izin usaha atau sanksi disiplin kepegawaian. Lihat Pasal 72 ayat 2 UUBI, *Ibid*, halaman 667).

98. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar¹²⁸.

Yang dilarang Undang-Undang ini sebagai tindak pidana adalah perbuatan tidak memenuhi kewajiban berupa memberi keterangan mengenai lalu lintas devisa yang dilakukannya yang ditetapkan Bank Indonesia (Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 6).

Terhadappelaku tindak pidana ini dapat diancam pidana denda minimum Rp 250.000.000,- maksimum Rp 1000.000.000,-. Di samping itu juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda atau pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang, apabila pelanggaran itu dilakukan oleh badan usaha.

Melihat rumusan tindak pidana yang demikian bunyinya, dapat diketahui bahwa korban tindak pidana yang dimaksudkan Undang-Undang nomor 24 ini adalah pihak Bank Indonesia. Sedangkan perlindungan korban yang ada masih bersifat abstrak/ tidak langsung.

99. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNS/1963 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi.

Salah satu pertimbangan dicabutnya Undang-Undang Nomor 11/PNS/1963 ini adalah karena Undang-Undang tersebut dipandang bertentangan dengan hak azasi manusia serta prinsip negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di dalam masyarakat.

¹²⁸ Lalu lintas devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, *Ibid*, halaman 723)

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa ketika Undang-Undang ini diberlakukan, yang terjadi justru adanya tindakan pihak penguasa yang mengatas namakan hukum lalu berbuat sewenang-wenang terhadap mereka (korban) yang dipandang sebagai "musuh" pemerintah. Hal ini berarti pencabutan tersebut adalah dalam rangka melindungi korban secara tidak langsung.

100. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Inti perubahan dimaksud adalah menambah ketentuan pidana baru di dalam Pasal 107, yaitu menjadi Pasal 107a s/d 107f. Penambahan tersebut dalam rangka mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman dan bahaya ajaran komunis/ marxisme-leninisme yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan¹²⁹.

Perbuatan tersebut meliputi :

- a. menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis/ marxisme leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, diancam pidana penjara maksimum 12 tahun (pasal 107a);
- b. Menyatakan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, sehingga menimbulkan kerusuhan, korban dan kerugian harta benda, diancam pidana penjara maksimum 20 tahun (Pasal 107b);

¹²⁹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, *Ibid*, halaman 773

- c. Menyebarkan/ mengembangkan ajaran komunis/ marxisme leninisme, sehingga menimbulkan kerusuhan, korban jiwa dan kerugian harta benda, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 107c);
- d. Menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/ Marxisisme-leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara diancam pidana penjara maksimum 20 tahun (Pasal 107d)
- e. Mendirikan oragnisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/ Marxisme-Leninisme; mengadakan hubungan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri yang diketahui berazaskan ajaran komunis/ marxime-leninisme, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintahan yang sah, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 107e).
- f. Merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, memusnahkan instansi negara atau militer; menghalangi, menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak, diancam pidana sabotase dengan pidana penjara maksimum 20 tahun (Pasal 107f).

Dengar rumusan tersebut dapat diketahui bahwa korban dari tindak pidana yang dimaksud tidak lain adalah negara sebagai cerminan dari komunitas masyarakat umum. Karena itu aspek perlindungan adalah bersifat umum/ tidak langsung.

101. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu dasar pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini adalah karena praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara¹³⁰.

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan KKN ini adalah sebagai berikut :

a. Pasal 20 ayat (1)

“Setiap warga negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1, 2, 3, 5 atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

b. Pasal 21 ayat (2)

“Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”¹³¹.

c. Pasal 21

“Setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 4 dipidana

¹³⁰ Periksa konsideran butir c, *Ibid*, halaman 775.

¹³¹ *Ibid*, halaman 784.

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

d. Pasal 22

“Setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas)¹³² tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Berdasarkan rumusan tindak pidana di atas, pihak korban pidana dimaksud lebih cenderung pada negara, sebagai institusi yang mewakili kepentingan umum. Karena itu sifat perlindungan adalah tidak langsung, walaupun ada mekanisme keperdataan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud berbunyi sebagai berikut :

“setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk :

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memegang jabatan;
2. Bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;

¹³² *Ibid*, halaman 778

4. Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

102. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965).

Pengakuan Indonesia terhadap konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum sehingga segala bentuk diskriminasi rasial harus dicegah dan dilarang¹³³.

Diskriminasi rasial pada dasarnya merupakan suatu penolakan terhadap hak azasi manusia (HAM) dan kebebasan mendasar. Tidak jarang diskriminasi

¹³³ Konsideran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, *Ibid*, halaman 796.

rasial terjadi karena dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan diskriminasi rasial dalam bentuk *apartheid*, pemisahan dan pengucilan atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis. Oleh karena itu diskriminasi rasial merupakan musuh, baik bagi masyarakat luas maupun masyarakat internasional. Maka harus dihapuskan dari peradaban manusia.¹³⁴

Atas dasar pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pengakuan Indonesia atas konvensi ini sebagai bentuk perwujudan untuk melindungi korban perlakuan di luar batas kemanusiaan terhadap ras-ras tertentu.

Tetapi karena masih dalam bentuk pengesahan sebuah Undang-Undang, maka belum ada perwujudan konkrit tentang bagaimana melaksanakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial ini. Karena itu maka perlindungan yang dimaksud masih bersifat tidak langsung.

103. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini antara lain berbunyi¹³⁵

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

¹³⁴ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 alinea pertama, *Ibid*, halaman 799.

¹³⁵ Himpunan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, tahun 1999, *Jilid III*, (Jakarta, 2000), halaman 46).

- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menghambat kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Adapun yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, pada pokoknya meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, diancam pidana penjara minimum 4 tahun maksimum 20 (dua puluh) tahun, dan denda minimum Rp 200.000.000,- maksimum Rp 1.000.000.000,- bahkan dalam keadaan tertentu dapat dipidana mati (Pasal 2).
- b. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara, diancam pidana penjara minimum 1 tahun maksimum 20 (dua puluh) tahun dan atau denda minimum Rp 50.000.000,- maksimum Rp 1.000.000.000,- (Pasal 30).
- c. Melanggar Pasal 209 KUHP, dapat dipidana penjara minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun dan atau denda minimum Rp 50.000.000,- dan maksimum Rp 250.000.000,- (Pasal 5)
- d. Melanggar Pasal 210 KUHP, dipidana minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun dan atau denda minimum Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maksimum Rp 750.000.000,- (Pasal 6)
- e. Melanggar Pasal 387 dan 388 KUHP, dipidana penjara minimum 2 tahun maksimum 7 tahun dan atau denda minimum Rp 100.000.000,- maksimum Rp 350.000.000,- (Pasal 7)

- f. Melanggar Pasal 415 KUHP, diancam pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun dan atau denda minimum Rp 150.000.000,- maksimum Rp 750.000.000,- (Pasal 8);
- g. Melanggar Pasal 416 KUHP, diancam pidana penjara minimum 1 tahun maksimum 5 (lima) tahun dan atau denda minimum Rp.50.000.000,- dan maksimum Rp. 250.000.000,- (Pasal 9).
- h. Melanggar Pasal 417 KUHP, dipidana penjara minimum 2 tahun dan maksimum 7 tahun dan atau denda minimum Rp. 100.000.000,- dan maksimum Rp. 350.000.000,- (Pasal 10).
- i. Melanggar Pasal 418 KUHP, dipidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun dan atau denda minimum Rp. 50.000.000,- dan maksimum Rp. 250.000.000,- (Pasal 11).
- j. Melanggar pasal 419, 420, 423, 425 atau 435 KUHP, dipidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun atau penjara seumur hidup dan atau denda minimum Rp. 200.000.000,- dan maksimum Rp.1.000.000.000,- (Pasal 12).
- k. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri mengingat kekuasaannya, kedudukan atau jabatannya, dipidana penjara maksimum 3 tahun dan atau denda maksimum Rp. 150.000.000,- (pasal 13)
- l. Mencegah, melindungi atau menggagalkan penyelidikan dan pemeriksaan pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi, dipidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 12 tahun dan atau denda minimum Rp. 150.000.000,- maksimum Rp. 600.000.000,- (Pasal 21).

- m. Pihak terkait yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar, dipidana penjara minimum 3 tahun maksimum 12 tahun dan atau denda minimum Rp. 150.000.000,- maksimum Rp.600.000.000,- (pasal 22).
- n. Melanggar Pasal 220, 231, 421, 422 dan 429 atau 430 KUHP dipidana penjara minimum 1 tahun maksimum 6 tahun dan atau denda minimum Rp. 50.000.000,- maksimum Rp. 300.000.000,-
- o. Saksi yang melanggar larangan memberitahu pelapor dipidana penjara maksimum 3 tahun dan atau denda maksimum Rp. 150.000.000,- (pasal 24).

Terhadap tindak pidana di atas juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa (Pasal 18 ayat 1):

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungann tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana ¹³⁶

Melihat pertimbangan, beratnya sanksi maupun adanya bentuk pidana tambahan yang memungkinkan pembayaran uang pengganti untuk korban yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban yang tercermin di dalamnya sudah bersifat langsung/ konkrit.

- 104. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan ini secara umum hanya meliputi :

- a. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada dibawah masing-masing departemen terkait, menjadi wewenang Mahkamah Agung (Pasal 11).
- b. Pengalihan kewenangan dari Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas (Pasal 22).
- c. Penegasan masa transisi untuk pelaksanaan tersebut di atas (a dan b) selama 5 tahun (Pasal 11 A).

¹³⁶ *Ibid* , halaman 51

Perubahan tersebut berarti menyangkut persoalan kebijakan hukum pidana meskipun tidak terkait dengan persoalan korban tindak pidana. Namun demikian karena Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tidak diubah¹³⁷, berarti aspek perlindungan korban terutama korban pelaku dari kesewenang-wenangan penegak hukum masih tetap berjalan. Ini menunjukkan adanya aspek perlindungan korban di dalamnya walaupun secara tidak langsung.

105. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang sudah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

Berbagai perubahan mendasar yang terkait dengan aspek perlindungan korban antara lain adalah :

- a. Telah diaturnya mekanisme kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak-pihak, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi (Pasal 15).
- b. Adanya keharusan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan layanan universal¹³⁸ (Pasal 16)

¹³⁷ Pasal 6 ayat 2 ini menegaskan tentang asas Culpabilitas yang pada intinya mengandung maksud "Tiada pidana tanpa kesalahan" Periksa sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, 1990), hal 85.

¹³⁸ Layanan Universal merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang dapat terlayani.

Lihat penjelasan Pasal 16 UU No 135 / 1999. *Ibid*, halaman 179.

- c. Adanya keharusan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengguna jasa (Pasal 17).
 - d. Adanya keharusan penyelenggara untuk mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi oleh pengguna jika hal itu dibutuhkan. (Pasal 18).
 - e. Adanya perubahan sanksi pidana yang jauh lebih lebih berarti dibanding yang diatur dalam Undang-Undang yang ada sebelumnya¹³⁹. Dengan adanya ketentuan baru yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang telekomunikasi ini kini jauh lebih baik, dan sudah memperhatikan aspek perlindungan korban secara langsung.
106. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar negeri Kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain adalah :¹⁴⁰
- Pasal 18 ayat (1) : Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau Badan Hukum Indonesia yang menghadapi masalah hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
 - Pasal 18 ayat (2) : Perlindungan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan kebiasaan Internasional.
 - Pasal 19 : Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :
 - a. Memupuk persaudaraan dan kerukunan antar sesama warga Indonesia di luar negeri
 - b. Memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan Internasional.

¹³⁹ Jika sanksi pidana penjara pada peraturan sebelumnya maksimum hanya 5 tahun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 meningkat menjadi 15 tahun yaitu untuk tindak pidana penyadapan pembicaraan telekomunikasi. Sedangkan denda tertinggi adalah Rp.600.000.000,- (semula maksimum Rp. 40.000.000,-).

¹⁴⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Jilid III, *Op-cit*, halaman 198-199.

- Pasal 20 : Dalam hal terjadi sengketa antar sesama warga negara Indonesia/Badan Usaha Indonesia di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Pasal 21 : Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.
- Pasal 22 : Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, menteri atau pejabat yang ditunjuk presiden mengkoordinir usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional termasuk warga negara Indonesia.
- Pasal 25 ayat (1) : Kewajiban pemberian suaka kepada orang asing berada ditangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri,
- Pasal 25 ayat (2) : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- Pasal 26 Pemberian suaka pada orang asing dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- Pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa Undang-Undang menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia/ Badan Usaha Indonesia yang bermasalah di luar negeri.
- Bahkan sebaliknya pemerintah juga dapat memberikan perlindungan bagi warga negara asing jika dipandang perlu. Khusus perlindungan tersebut
- Pasal 21 membuktikan bahwa Undang-Undang ini telah memperhatikan aspek perlindungan korban langsung bahkan dari negara.

107. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Zakat.

Perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana berkaitan dengan pengelolaan zakat ini adalah pengelola zakat yang lalai tidak mencatat atau mencatat tetapi secara tidak benar harta zakat, infak, sodakoh, hibah, wasiat, warisan dan kifar¹⁴¹. Perbuatan ini diancam pidana kurungan maksimum 3 bulan dan atau denda maksimum Rp. 30.000.000,- (Pasal 31).

Dari ketentuan pidana di atas, memang ada beberapa kemungkinan pihak-pihak yang menjadi korban dari tindak pidana di atas, yaitu mereka yang telah memberikan zakat/ sumbangan yang disebutkan tadi dan bisa juga korbannya adalah pihak-pihak yang dipandang berhak atas penerimaan zakat yang dimaksud seperti fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Di dalam Undang-Undang ini tidak ditegaskan apa yang harus diperbuat terhadap korban tindak pidana yang dimaksud kecuali berupa penjatuhan sanksi pidana. Oleh sebab itu sifat perlindungan korban masih bersifat abstrak dan tidak langsung.

108. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹⁴².

¹⁴¹ Kifar¹⁴¹ adalah denda wajib yang diberikan pada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Ibid, halaman 230.

¹⁴² *Ibid*, halaman 235

Pada bagian konsideran huruf b juga dinyatakan :

“Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati, melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun”¹⁴³.

hak – hak tersebut antara lain berupa :

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Hak mengembangkan diri.
- d. Hak memperoleh keadilan.
- e. Hak atas kebebasan pribadi.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas kesejahteraan.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan.
- i. Hak wanita.
- j. Hak anak

Terhadap semua hak tersebut, negara mengakui dan menjunjung tinggi serta melindunginya. Oleh karena itu di dalam Undang–Undang HAM ini diatur pula tentang pengaduan dan atau gugatan atau pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Undang–Undang Nomor 39 tentang HAM ini memang benar–benar lahir karena dorongan murni untuk melindungi manusia yang sering menjadi korban kebiadaban oleh manusia yang lain. Kesungguhan ini dapat dilihat pula

¹⁴³ *Ibid*, halaman 234

dengan diaturnya pembentukan komisi Nasional Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang tersebut, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.¹⁴⁴

Dengan demikian Undang-Undang ini dipandang sangat memperhatikan aspek perlindungan korban, meskipun sifat perlindungan tersebut masih abstrak dan tidak langsung.

109. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan Pokok Pers, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pers.

Ketentuan pidana yang diatur di dalamnya meliputi perbuatan :

- a. Menghambat atau menghalangi pelaksanaan kebebasan pers (Pasal 4 ayat (2) dan (3) jo Pasal 18).
- b. Memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan serta melanggar azas praduga tak bersalah, atau memasang iklan yang melanggar martabat agama, mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, iklan minuman keras, narkoba atau iklan peragaan wujud rokok dan atau pengguna rokok (Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan 13 Jo Pasal 18 ayat 2).

¹⁴⁴ Lihat Bab VII Pasal 75 huruf b, Tujuan Komnas HAM
Ibid, halaman 252.

- c. Perusahaan pers tidak berbadan hukum atau perusahaan pers yang tidak memuat nama, alamat, penanggung jawab penerbitan dan nama serta alamat percetakan melalui media yang bersangkutan (Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Jo Pasal 18 ayat (3).

Sanksi untuk tindak pidana di atas adalah pidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum Rp. 500.000.000,- untuk tindak pidana huruf a, sedangkan untuk tindak pidana sebagaimana huruf b, dipidana maksimum Rp. 500.000.000,- sedangkan untuk tindak pidana pada huruf c dipidana denda maksimum Rp. 1.000.000.000,-

Melihat tindak pidana yang dirumuskan di atas, bisa diketahui bahwa korban tindak pidana yang dimaksud bisa perusahaan pers yang bersangkutan dan anggota masyarakat pers yang dirugikan akibat pemberitaan pers. Tidak ada kompensasi langsung yang dapat diterima korban dalam bentuk materiil yang dirumuskan di dalam Undang-Undang ini. Tetapi adanya keharusan memuat hak jawab pihak korban, sebenarnya juga menunjukkan bahwa Undang-Undang ini bisa dipandang sebagai telah memperhatikan aspek perlindungan korban, walaupun dalam bentuknya yang masih abstrak ¹⁴⁵.

110. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Tindak Pidana menurut Undang-Undang ini meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, diancam pidana pidana

¹⁴⁵ Hak jawab adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun orang lain (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 13, *Ibid*, halaman 286).

maksimum 10 tahun dan denda maksimum sebesar Rp.5.000.000.000,- (Pasal 78);

- b. Mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; merambah kawasan hutan atau penebangan pohon di kawasan hutan terlarang ¹⁴⁶

Diancam pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 2)

- c. Membakar hutan di ancam pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 3)
- d. Menebang pohon, memungut atau memanen hasil hutan tanpa izin yang sah diancam pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 5)
- e. Menerima membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui diambil atau di pungut secara tidak sah diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum sebanyak Rp 5.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 5)
- f. Melakukan penyelidikan umum eksplorasi atau eksploitasi tambang atau penambangan umum dan terbuka tanpa izin diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp.5.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 6)

¹⁴⁶ Radius terlarang yaitu jarak sampai dengan :

- a. 500 meter dari tepi waduk atau danau
 - b. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 meter dari kiri kanan tepi;
 - d. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. Dua kalikedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah tepi pantai.
- (Pasal 1ayat 3, *Ibid*, halaman 317)

- g. Mengangkut atau menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dipidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 10.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 7)
- h. Mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak diperuntukkan untuk itu dipidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan dan denda maksimum Rp 10.000.000,- (Pasal 78 ayat 8)
- i. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lain yang patut diduga digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 5.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 9)
- j. Membawa alat-alat yang lazim dipakai untuk menebang memotong atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin diancam pidana penjara maksimum 3 (tiga) tahun dan denda maksimum Rp.1.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 10)
- k. Membuang benda yang dapat menimbulkan kebakaran dan kerusakan atau membahayakan fungsi/ keberadaan hutan diancam pidana penjara maksimum 3 (tiga) tahun dan denda maksimum Rp.1.000.000.000,- (Pasal 78 ayat 11)
- l. Mengangkut, mengeluarkan, membawa tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang tanpa izin, diancam pidana penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp.50.000.000,- (Pasal 78 ayat 12)

Karena penguasaan hutan ini berada di tangan negara, maka dapat dikatakan korban tindak pidana di bidang kehutanan ini adalah negara, yang dalam hal ini melaksanakan kedaulatan rakyat Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini memang diatur tentang hak untuk menggugat bagi masyarakat, serta untuk menuntut ganti rugi yang ditimbulkan karena terjadinya kerusakan hutan. Tetapi di dalam ketentuan Pasal 72 ditegaskan bahwa gugatan tersebut dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pihak yang berhak untuk memperoleh ganti rugi maupun rehabilitasi, Pasal 80 menyatakan adalah kepada negara, bukan perorangan. Ini berarti bahwa Undang-Undang ini memang hanya memberikan perlindungan kepada negara, bukan kepada individu atau warga negara. Dengan demikian perlindungan tersebut bersifat tidak langsung.

111. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan

yang diutamakan kepada penerima fidusia, terhadap kreditor lainnya¹⁴⁷.

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini adalah :

- a. Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau menghilangkan keterangan yang menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan paling banyak Rp.100.000.000,- (Pasal 35).
- b. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimum Rp. 50.000.000,- (Pasal 36).

Melihat rumusan tindak pidana di atas, dapat diketahui korban tindak pidana dimaksud yaitu pihak penerima fidusia. Dengan demikian tampaknya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada penerima fidusia tersebut, yang menurut Undang-Undang ini dijamin haknya untuk didahulukan terhadap kreditor lainnya di dalam mengambil pelunasan hutang atas hasil eksekusi benda yang dijaminkan (Pasal 27). Di samping itu penerima fidusia juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15).

¹⁴⁷ Periksa Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Ibid*, halaman 371

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui, masalah jaminan fidusia ini sebenarnya berangkat dari persoalan perdata. Tetapi kemudian memerlukan sarana pidana ketika di dalam hubungan hukum tersebut ada maksud untuk melindungi pihak kreditor, yang dalam praktek sering dirugikan debitur yang wanprestasi. Di sini pihak kreditor (penerima fidusia) berarti berperan menjadi korban, dan Undang-Undang ini merupakan bukti adanya aspek perlindungan korban tersebut secara kongkrit/ langsung.

112. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih.

Tindak pidana yang berkaitan dengan rakyat terlatih ini meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi panggilan wajib prabakti ; atau membuat/menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap untuk menjalani prabakti, diancam pidana penjara maksimum 6 bulan (Pasal 32 ayat 1).

Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap pelaksanaan wajib bakti, diancam pidana penjara maksimum 9 bulan (Pasal 32 ayat 2)¹⁴⁸.

- b. Melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya atau orang lain ditanggguhkan atau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan wajib prabakti; atau setiap orang yang dengan suatu pemberian atau janji menyalahgunakan

¹⁴⁸ Wajib prabakti adalah kewajiban warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan rakyat terlatih; wajib bakti adalah pelaksanaan kewajiban pengabdian anggota rakyat terlatih dalam susunan kesatuan rakyat terlatih, setelah menyelesaikan wajib pra bakti. Lihat Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999, *Ibid*, halaman 688

kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan wajib prabakti, diancam pidana penjara maksimum 9 bulan. Jika dilakukan terhadap pelaksanaan wajib bakti diancam pidana penjara maksimum 1 tahun. (Pasal 33 ayat 1 dan 2).

- c. Anggota rakyat terlatih yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah sekurang-kurangnya 15 hari, diancam pidana penjara maksimum 9 bulan (Pasal 34)
- d. Pimpinan instansi, lembaga/lembaga pendidikan yang tidak memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja atau peserta didik untuk menjalani wajib prabakti atau wajib bakti , diancam pidana penjara maksimum 1 tahun (Pasal 35).
- e. Penyelenggara yang sengaja atau lalai tidak melaksanakan atau membiarkan tidak terlaksananya wajib prabakti atau wajib bakti atau menyelenggarakan dengan menyimpang peraturan yang berlaku, diancam pidana penjara maksimum 2 tahun (Pasal 36).
- f. Anggota rakyat terlatih yang tidak melaporkan perubahan data pribadi kepada atasannya, diancam pidana penjara maksimum 6 bulan (Pasal 37).
- g. Memutuskan hubungan kerja atau mengakibatkan berhentinya pendidikan wajib prabakti dan wajib bakti, diancam pidana penjara maksimum 2 tahun (Pasal 38).

- h. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk melaksanakan Undang-Undang diancam pidana penjara maksimum 5 tahun (Pasal 39)
- i. Hukuman tersebut di atas diperberat 1/3, jika perbuatan dilakukan pada saat negara pada keadaan bahaya (Pasal 40).
- j. Jika perbuatan dilakukan korporasi, maka ancaman pidana penjara dikenakan kepada pengurusnya (Pasal 41).

Melihat ketentuan pidana tersebut, tampaknya korban tindak pidana yang dimaksud adalah tidak perorangan tetapi negara, dan ancaman pidana yang tertulis hanya berupa pidana pokok berupa penjara. Hal ini menggambarkan bahwa aspek perlindungan korban yang dimaksud adalah tidak langsung.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap 112 Undang-Undang tersebut, dapat diperoleh data tentang muatan aspek perlindungan korban di dalamnya dalam dua katagori, yaitu yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Dikatakan langsung apabila di dalam Undang-Undang itu sudah ada ketentuan yang memungkinkan para korban untuk memperoleh kompensasi atas penderitaan yang dialaminya ketika tindak pidana itu terjadi. Kompensasi tersebut bisa dalam bentuk pemberian ganti rugi, rehabilitasi, atau bentuk pembayaran lain dari pelaku tindak pidana¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Pembayaran lain yang dimaksud bisa juga dalam bentuk penjatuhan pidana tambahan oleh hakim, meskipun tidak semua bentuk pidana tambahan ini menggambarkan adanya aspek perlindungan korban secara langsung. Periksa kembali Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, 1998), hal. 56-57.

Selanjutnya dikatakan tidak langsung apabila peraturan itu hanya menjelaskan perlindungan secara umum dalam bentuk ancaman sanksi pidana, atau hanya mendiskripsikan persoalan perlindungan korban itu dalam ketentuan Undang-Undang sehingga masih dibutuhkan sarana lain untuk melaksanakannya¹⁵⁰.

Dengan mengacu pada kriteria yang dikemukakan tadi, penelitian menghasilkan data sebagai berikut :

Tabel 22

Klasifikasi Undang-Undang yang memberikan perlindungan korban, langsung atau tidak langsung (n = 112)

Tahun	Langsung	Tidak langsung	Jumlah
1980	-	3	3
1981	1	3	4
1982	2	2	4
1983	1	1	2
1984	2	1	3
1985	1	6	7
1986	-	-	-
1987	1	-	1
1988	-	1	1
1989	-	3	3
1990	-	3	3
1991	-	1	1
1992	7	9	16
1993	-	-	-
1994	-	2	2
1995	1	4	5
1996	1	1	2
1997	8	13	21
1998	1	4	5
1999	8	21	29
Jumlah	34 30,35 %	78 69,65%	112 100%

¹⁵⁰ Betapapun beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan, apakah itu dalam bentuk pidana mati, penjara atau seumur hidup atau pidana denda yang bernilai miliaran rupiah hal itu tidak akan dirasakan langsung oleh korban tetapi hanya dinikmati oleh negara sebagai penjelmaan masyarakat termasuk masyarakat korban, adapun yang dimaksud dengan *sarana lain* adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut tanpa adanya aturan pelaksana, Undang-Undang ini tidak ada artinya meskipun isinya nyata-nyata bertujuan ingin melindungi kepentingan korban. Sebagai contoh adalah beberapa penegasan konfransi Internasional dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Data di atas menunjukkan bahwa belum semua kebijakan legislatif hukum pidana memberikan perhatian penuh terhadap masalah perlindungan korban. Tetapi arah untuk mewujudkan hal itu sudah ada dan cukup menggembirakan, karena ada peningkatan yang cukup signifikan pada periode tahun tahun terakhir, khususnya tahun 90-an ke atas.¹⁵¹

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap 34 Undang-Undang yang memberikan jaminan perlindungan korban secara langsung itu, diketahui bahwa hampir seluruhnya mengandalkan mekanisme pembayaran ganti rugi, sebagaimana tampak dalam tabel 23 berikut ini :

Tabel 23

Bentuk perlindungan korban secara langsung yang terdapat dalam Undang-Undang (n = 34)

No	Bentuk	Jumlah	%
1	Ganti rugi	22	64,70
2	Ganti rugi dan rehabilitasi	4	11,76
3	Ganti rugi dan asuransi	2	5,88
4	Rehabilitasi	3	8,82
5	Jaminan simpanan uang	1	2,94
6	Hak menjual jaminan/hak di-dahulukan piutangnya	1	2,94
7	Jaminan dipulangkan dari luar negeri atas biaya negara	1	2,94

¹⁵¹ Dari 32 Undang-Undang yang memuat perlindungan korban secara langsung itu ternyata 21 diantaranya dibuat pada dekade 90-an, sedangkan sisanya 11 merupakan produk tahun 80-an. Jadi dalam dasawarsa terakhir perkembangannya hampir dua kali lipat.

Penjelasan nama undang-undang yang terkait dengan tabel 22 dan 23 adalah tampak dalam tabel 24 sebagai berikut:

Tabel 24

**Rekapitulasi Undang-undang
yang sudah menjamin perlindungan korban secara langsung**

NO	TAHUN	TENTANG	BENTUK	PASAL	HAL.
8	1981	KUHAP	G + R	79 s/d 81; 98	121-122
4	1982	Ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup	G + R	20	123-125
6	1982	Hak cipta	G	42 (1-3)	125-127
5	1983	Zona ekonomi eksklusif	G + R	9, 10, 11	128-129
4	1984	Wabah penyakit menular	G	8	130-131
5	1984	Pos	G	12 (1)	130
15	1985	Ketenagalistrikan	G	21 (3 dan 4)	139-140
7	1987	Perubahan UU hak cipta No. 6/1982	G	Periksa UU No. 6/1982 di atas	144-145
2	1992	Perasuransian	G	22	154-155
3	1992	Jaminan sosial tenaga kerja	G	30 jo PP 14/1993 pasal 47	155-157
13	1992	Perkeretaapian	G	37 s.d. 40	170-171
14	1992	LLAJR	G	28, 31	172-176
15	1992	Penerbangan	G	43, 44	176-180
19	1992	Merk	G	72, 76	181-183
21	1992	Pelayaran	G	121; 33	183-190
8	1995	Pasar modal	G	46; 80	193-195
7	1996	Pangan	G	41 s.d. 44	200-203
5	1997	Psikotropika	R	39	206-210
10	1997	Ketenaganukliran	G	28 s.d. 40	212-214
12	1997	Perubahan UU hak cipta	G	43; 45	214-215
13	1997	Perubahan UU hak paten	G	122	215-216
14	1997	Perubahan UU merk	G	56	216-217
22	1997	Narkotika	R	44 s.d. 51	221-231
23	1997	Pengelolaan lingkungan hidup	G	30 s.d. 34	231-233
31	1997	Peradilan militer	G + R	1 (31 dan 40)	247-249
10	1998	Perubahan UU perbankan	JS	37	253-254
5	1999	Larangan monopoli	G	47f	262-269
8	1999	Perlindungan konsumen	G	60	270-272
18	1999	Jasa konstruksi	G	29; 38 s.d. 40	273-275
31	1999	Korupsi	G	18 (1b)	287-291
36	1999	Telekomunikasi	G	15	292-293
37	1999	Hubungan luar negeri	BP	18 s.d. 22	293-294
41	1999	Kehutanan	G	72; 80	298-301
42	1999	Jaminan fiducia	D	15; 27	301-303

Keterangan: G = ganti rugi; R= Rehabilitasi; BP= biaya pemulangan WNI di luar negeri;
D= didahulukan pembayaran hutang ; JS= jaminan simpanan nasabah

Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi, ternyata semua Undang-Undang mengisaratkan hal itu kepada pelaku tindak pidana¹⁵².

Di sini lalu timbul masalah, karena Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut mengenai teknik untuk memperoleh ganti rugi tersebut, bahkan ketentuan tentang hal ini kemudian menjadi kabur karena Undang-Undang hanya menyebut bahwa pemberian ganti rugi dan lain-lainnya itu sebagai bentuk kewajiban/ keharusan bagi pelaku, tetapi bukan sebagai bagian dari sanksi pidana. Hal ini tentunya akan menjadi beban berat bagi pihak korban, karena mereka harus terlebih dahulu membuktikan terjadinya kerugian itu melalui proses tuntutan atau gugatan, baik langsung terhadap pelaku atau melalui pengadilan. Inilah sebenarnya persoalan besar yang perlu mendapat perhatian besar untuk di atasi, agar korban yang sudah mengalami penderitaan hebat, ketika musibah tindak pidana terjadi, tidak lagi menjadi korban “kedua kali” atau bahkan korban “ketiga kali”, karena mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan ganti rugi itu. Upaya ini bahkan belum tentu juga berhasil, karena tidak adanya jaminan yang jelas apakah gugatannya itu akan dimenangkan atau sebaliknya.

¹⁵² Pelaku tersebut bisa berupa alat perlengkapan negara, sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, atau Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Tentang telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran. Terhadap kerugian yang terjadi akibat perbuatan pihak pihak ini tentunya akan membawa konsekuensi pada kerangan negara sebagai pihak yang membayar ganti rugi tersebut .

Padahal proses gugatannya itu saja telah memakan waktu yang panjang serta tahapan yang berbelit-belit¹⁵³.

Satu-satunya Undang-Undang yang merumuskan ganti rugi langsung sebagai bagian dari ancaman pidana (sanksi pidana) diantara 112 Undang-Undang yang dikaji yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992. Tentang Perkeretaapian, karena di dalam rumusan deliknya langsung dinyatakan ancaman pidana dalam kalimat yang berbunyi : "Barang siapadst, dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.3.000.000,- dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada badan penyelenggara"¹⁵⁴. Penegasan pembayaran ganti rugi di dalam rumusan tindak pidana di atas, dapat dipandang sebagai terobosan baru karena hal ini dapat memberikan jaminan pasti bagi korban untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut sekaligus bersamaan dengan pidana lain (pidana

¹⁵³ Sebagai contoh adalah peristiwa yang menimpa keluarga Yustiana di Jakarta, yaitu ketika terjadi perampokan di rumahnya pada tanggal 28 Februari 2001. Di samping telah kehilangan harta benda, dia harus kehilangan suaminya yang pada waktu itu mengejar perampok itu, tetapi justru Yudianto (suaminya) sendiri yang ditembak polisi karena dikira ia sendiri perampoknya. Baru setelah seminggu kemudian tepatnya Selasa (7/3) kadispem Polda Metro Jaya, Kombes Pol Drs. Anton Bachrul Alam, SH secara terbuka dihadapan wartawan mengakui adanya kesalahan tembak. Penembakan itu dilakukan oleh brigadir Pambudi, anggota Polres Jakarta Barat. Yang pada waktu itu sedang melakukan pencarian terhadap tersangka perampokan bersama tim buru sergap Polres Jakarta Barat. Yudianto yang pada waktu itu mengejar perampok bersama Marwan dengan menggunakan sepeda motor dikejar oleh Pambudi, yang kemudian lalu ditembaknya. Pambudi mendapat informasi dari tersangka perampok Ashari, kalau Yudianto itulah yang ditujuk sebagai kawan Ashari yang sama-sama terlibat perampokkan padahal yang dimaksud adalah bernama Robby, bukan Yudianto. Meskipun polisi sudah minta maaf, pihak keluarga korban bertekad habis-habisan menuntut keadilan walaupun harus menjual rumah.

(Nova, Edisi 18 Maret 2001, halaman 3-5)

¹⁵⁴ Lihat Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian, yang ringkasannya ada pada tulisan ini, halaman 170-171

badan) yang harus dilaksanakan pelaku. Hal ini berarti sudah memutuskan rangkaian panjang proses tuntutan ganti rugi yang terjadi pada umumnya, yang biasanya berbelit-belit itu ¹⁵⁵.

Dari 112 Undang-Undang tersebut juga dapat diketahui banyaknya Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana dan tidak sebagai berikut :

(Tabel 25)

Undang-Undang Yang Memuat/ Tidak memuat Ketentuan Tindak
Pidana (n = 112)

No	Klasifikasi Undang-Undang	Jumlah	%
a	Yang memuat Ketentuan Tindak Pidana	89	79,46
b	Yang Tidak Memuat Ketentuan Tindak Pidana	23	20,54
Jumlah		112	100

Data di atas menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang masih sangat percaya bahwa penggunaan sarana pidana untuk menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik kriminal masih dipandang sebagai sarana yang terbaik. Di samping itu hal ini juga menggambarkan bahwa secara tidak langsung pemberian pidana itu bisa dipandang sebagai

¹⁵⁵ Masalahnya adalah perlunya ada kajian lanjut apakah terobosan ancaman pidana seperti itu tidak menyalahi baatasan mengenai jenis pidana yang dikenal menurut Pasal 10 KUHP, yang hanya terdiri atas :

- Pidana pokok meliputi pidana badan, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) dan,
- Pidana tambahan terdiri atas pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan beberapa barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 10 bahwa KUHP di atas, jelas bahwa jenis pidana membayar ganti rugi tidak dikenal dalam KUHP, sehingga bagi yang berpendapat demikian, bisa berdampak pada timbulnya pendapat bahwa perumusan tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkereta Api ini mempunyai cacat hukum.

bentuk upaya hukum dalam rangka memberi jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana, walaupun dalam bentuknya yang masih abstrak.

Adapun isi dari 23 Undang-Undang yang bukan merupakan kebijakan materiil hukum pidana di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

(Tabel 26)

Klasifikasi Undang-Undang Yang Tidak Memuat Ketentuan Pidana Menurut Isinya (n = 23)

No	Klasifikasi	Jumlah	%
a	Isinya berkaitan dengan kebijakan formil hukum pidana	8	34,78
b	Isinya berkaitan dengan pengakuan berbagai konvensi Internasional hukum pidana dan hubungan luar negeri.....	14	60,87
c	Langkah Dekriminalisasi	1	4,35

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam dua dasa warsa terakhir, hukum pidana Indonesia banyak dipengaruhi perkembangan hukum pidana Internasional yang mana hal ini merupakan dampak dari era globalisasi.

Delapan Undang-Undang penting yang menyangkut kebijaksanaan formil hukum pidana itu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana Undang-Undang ini merupakan pengganti Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang berlaku berdasarkan staablad Tahun 1941 Nomor 44 yang peninggalan kolonial. Hal ini

- dipandang sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia karena sejak tahun 1981 telah memiliki hukum acara buatan bangsa kita sendiri.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan pengganti ketentuan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan yang penting antara lain menyangkut peran jaksa yang diperluas tidak hanya sebagai penuntut umum saja tetapi juga sebagai wakil negara dalam perkara perdata.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Ketentuan penting yang diatur dalam Undang-Undang baru antara lain mengenai penegasan kedudukan Polri sebagai penyidik tunggal di dalam perkara pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yang mengisyaratkan adanya perubahan kedudukan hakim yang secara administratif dilimpahkan sepenuhnya kepada mahkamah agung sedangkan semula menjadi wewenang departemen kehakiman.
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin ABRI. Khususnya mengenai tatacara pemiidanaannya.

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut penyidikan terhadap anggota tersebut.
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Khusus yang menyangkut acara pemeriksaan terhadap Kepala Daerah, serta penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, termasuk ketentuan maksimum pidana untuk Peraturan Daerah.¹⁵⁶

Dengan adanya 8 (delapan) Undang-Undang baru di atas tentunya akan membuat pengaruh besar terhadap kebijakan hukum pidana formil yang berlaku dalam kurun dua dasa warsa tersebut. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mungkin lagi diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum, baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

Pembatasan kesewenang-wenangan terhadap penegak hukum atas pelaku ini tampak misalnya dalam hal melakukan penahanan, karena baik polisi, jaksa maupun hakim tidak lagi berhak menahan tersangka/terdakwa melebihi wewenangnya yang dalam KUHAP sudah sangat dibatasi.

Hal ini jelas memberikan jaminan bagi pelaku tindak pidana, di mana jaminan itu dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi para pelaku tindak pidana dari kemungkinan menjadi korban kesewenang-wenangan

¹⁵⁶ Untuk 14 Undang-Undang yang terkait dengan pengakuan berbagai konvensi Internasional, mohon diperiksa kembali halaman 311 buku ini (tabel 25). Sedangkan ketentuan Dekriminalisasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang referendum (lihat halaman 270).

pihak aparat hukum. untuk menjamin hal tersebut maka Undang-Undang telah menjaminkannya dengan yang disebut lembaga praperadilan, di mana pihak pelaku (tersangka/ terdakwa) yang dirugikan berhak menuntut sah/ tidaknya tindakan yang dilakukan para penegak hukum itu, untuk kemudian meminta ganti rugi dan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku¹⁵⁷.

B. Pelaksanaan Perlindungan Korban Oleh Penegak Hukum.

Guna mengetahui seberapa jauh pelaksanaan perlindungan korban oleh penegak hukum ini, penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri di dua tempat yaitu Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Kota Mungkid. Putusan yang diteliti meliputi putusan hakim yang terjadi dalam kurun tiga tahun terakhir, mulai tahun 1998 s/d tahun 2000.

Hasil awal dari penelitian, menemukan data jumlah perkara Tindak Pidana Biasa (TPB) dan Tindak Pidana Ringan (TPR) sebagai berikut :

Tabel 27

Jumlah perkara di Pengadilan Negeri
Magelang dan Kota Mungkid Tahun 1998 s/d 2000

TAHUN	PN MAGELANG		PN MUNGKID	
	TPB	TPR	TPB	TPR
1998	99	3392	180	2717
1999	99	1958	181	3402
2000	82	2678	196	4727
Jumlah	280	8024	557	11346

¹⁵⁷ Mengenai pembatasan penangkapan, penahanan dan tindakan lain penegak hukum ini diatur dalam Bab 5 KUHAP, mulai Pasal 16 s/d Pasal 68. Sedangkan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi, diatur dalam Bab XII, mulai Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Lembaga praperadilan maupun lembaga ganti rugi ini merupakan hal baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Demikian menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara tindak pidana ringan yang diperiksa di Pengadilan Negeri jauh lebih besar dibanding perkara biasa. Sedangkan jenis tindak pidana ringan yang dimaksud, hampir seluruhnya berupa tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa diantara 112 Undang-Undang yang dibuat dalam dua dasawarsa terakhir, terdapat satu Undang-Undang yang paling sering dilanggar, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi karena hanya pelanggaran, maka tidak ada korban langsung dari anggota masyarakat, kecuali korban dalam arti negara sebagai wakil dari unsur masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terhadap 36 sampel perkara tindak pidana biasa yang dilakukan secara acak di dua Pengadilan Negeri tersebut, diperoleh data tentang frekwensi pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang jauh lebih besar dibanding terhadap Undang-Undang di luar KUHP dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 28

Angka Pelanggaran terhadap Delik KUHP /Non KUHP

(n = 36)

Jenis Pelanggaran	Jumlah	%
Pelanggaran terhadap delik di dalam KUHP	30	83,33
Pelanggaran terhadap delik di luar KUHP	6	16,67
Jumlah	36	100%

Dilihat dari data ini, dapat diketahui bahwa ternyata pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, terbesar terjadi terhadap delik-delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan terhadap tindak pidana di luar KUHP jumlahnya hanya sedikit.

Adapun dari 30 pelanggaran tindak pidana di dalam KUHP, jika diperinci merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana sebagai berikut :

Tabel 29
Bentuk Tindak Pidana KUHP Yang dilanggar (n = 30)

Bentuk Tindak Pidana	Jumlah	%
Pencurian	9	30,00
Peripuan	7	23,33
Penganiayaan	5	16,67
Pembunuhan	2	6,67
Penggelapan	4	13,33
Alpa menyebabkan matinya korban	3	10,00
Jumlah	30	100%

Melihat variasi bentuk tindak pidana pada tabel 28, menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang paling sering diproses penegak hukum terbesar adalah masih berupa kejahatan konvensional yang pada umumnya sedikit menimbulkan korban. Bahkan dari kasus yang diteliti, ternyata jumlah korban tindak pidana adalah sama dengan jumlah pelaku tindak pidananya.

Adapun bentuk tindak pidana yang merupakan pelanggaran Undang-Undang di luar KUHP, perinciannya sebagaimana tabel 29 berikut :

Tabel 30

Bentuk Tindak Pidana di Luar KUHP Yang dilanggar (n = 6)

Bentuk Tindak Pidana	Jumlah	%
Bentuk Membawa senjata tajam (Undang-Undang) Darurat Nomor 12 Tahun 1951	2	33,33
Narkotika (Ur.dang-Undang) Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)	2	33,33
Korupsi (Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2	33,33
Jumlah	6	100

Tabel 29 di atas menggambarkan bahwa ternyata pelanggaran terhadap Undang-Undang di luar KUHP merata dan sangat jarang terjadi. Padahal seperti telah dikemukakan dalam dua dasawarsa terakhir terdapat 89 Undang-Undang yang dibuat dengan disertai ketentuan pidana¹⁵⁸. Selanjutnya bila dilihat kembali Tabel 26 maka pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah yang menduduki peringkat tertinggi.

Sementara itu untuk tindak Pidana Korupsi, meskipun sudah diperbaruhi,tetapi yang terjadi masih merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang lama. Meskipun data menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hukum di luar KUHP itu relatif kecil, tetapi bukan berarti bahwa upaya kriminalisasi yang dirumuskan dalam berbagai Undang-Undang di luar KUHP itu diasumsikan sebagai tidak efektif.

Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa ternyata tidak mudah menentukan efektifitas dari suatu sanksi pidana, meskipun penelitian tentang hal ini sudah banyak dilakukan. Bahkan Barda Nawawi Arief lebih lanjut mengatakan, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah efektifitas pidana selama ini, belum dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk dasar pembenaran perlu tidaknya pidana penjara sebagai salah satu sarana rasional untuk menanggulangi kejahatan¹⁵⁹.

Yang patut disampaikan adalah adanya temuan bahwa untuk beberapa kasus tindak pidana, baik yang merupakan pelanggaran KUHP maupun di luar KUHP ternyata dijumpai tindakan penegak hukum yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana.

¹⁵⁸ Lihat kembali Tabel 24.

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang, 1996), halaman 107.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan : "Ada dua tujuan yang bisa digunakan sebagai tolok ukur efektifitas pidana ini, yaitu *perlindungan masyarakat* dan *perbaikan sipelaku*. Jika menitikberatkan aspek pertama, maka suatu pidana dikatakan efektifitas jika pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dilihat dari titik berat yang demikian maka berapa jumlah orang yang mengulangi lagi tindak pidananya dan berapa jumlah orang yang menjadi baik bukan merupakan indikator untuk menentukan efektifitas pidana. Yang dilihat bukan masalah apakah si pelaku itu menjadi baik tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi yang lebih diutamakan ialah apakah pidana penjara itu dapat menekan atau mengurangi jumlah keseluruhan dari tindak pidana atau tidak. Jadi lebih menekankan dari aspek prevensi general dari sanksi pidana, yaitu seberapa jauh pidana itu dalam mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana."

Ibid, halaman 96-97.

Periksa pula IS Soesanto, *Kriminologi*, (Semarang, 1995) Statistik kriminal bukan merupakan pencerminan kejahatan yang ada, tetapi hanya gambaran aktifitas penegakan hukum. *Ibid*, halaman 29.

Dari 36 kasus perkara pidana yang dipelajari, terdapat bentuk upaya perlindungan korban sebagai berikut :

Tabel 31

Bentuk upaya penegak hukum dalam rangka membantu atau melindungi korban

(n = 36)

Dalam perkara	Upaya yang dilakukan	Jumlah kasus	%
Pencurian	Penetapan Hakim untuk mengembalikan barang yang dicuri kepada saksi korban.	6	16,67
Penggelapan	Penetapan Hakim untuk mengembalikan barang bukti yang digelapkan kepada saksi korban.	2	5,55
Penadahan	Penetapan Hakim untuk mengembalikan barang yang ditadah kepada saksi korban.	1	2,78
Penganiayaan	Atas nasihat polisi/penyidik, pelaku diminta membuat pernyataan tertulis, agar memberi nafkah kepada keluarga korban yang dianiaya.	1	2,78
Korupsi	Membayar uang pengganti kepada pihak korban (Instansi yang terkait)	2	5,55
Lalai mengakibatkan mati	Polisi/penyidik menekankan agar pelaku memberikan bantuan biaya kepada korban/keluarganya, baik biaya perawatan maupun biaya penguburan termasuk uang duka.	2	5,55
Jumlah		14	(38,8)

Jumlah ini menunjukkan bahwa 14 dari 36 kasus perkara pidana atau 38,8% dari kasus tindak pidana yang diperiksa, para penegak hukumnya sudah menunjukkan perhatiannya di dalam membantu kepentingan korban, atau paling tidak telah ikut membantu meringankan penderitaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang upaya perlindungan korban oleh penegak hukum, berikut ini dikemukakan hasil jajak pendapat terhadap 24 orang penegak hukum, terdiri atas :

- a. Polisi = 9 orang (37,50 %)
- b. Jaksa = 9 orang (37,50 %)
- c. Hakim = 6 orang (25,00 %)

Jajak pendapat ini dilakukan di empat wilayah hukum kodia/kabupaten, meliputi: Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Purworejo. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 32

Persepsi Penegak Hukum Terhadap Fungsi Tugas Yang Diemban
(Responden diminta untuk memilih 3 jawaban yang dianggap penting)
(n = 24)

No	Tugas	P	J	H	Jumlah	%
1.	Menegakkan hukum	9	9	6	24	100
2.	Mengayomi masyarakat	8	8	6	22	91,66
3.	Mencari kebenaran/keadilan	7	7	6	20	83,33
4.	Menjaga keamanan	1	-	-	-	4,16
5.	Melindungi pelaku	-	-	-	-	-
6.	Melindungi korban	1	3	-	4	16,64
7.	Menyelesaikan konflik	1	-	-	-	4,16
8.	Mencari nafkah	-	-	-	-	-
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-

Keterangan : P = Polisi, J = Jaksa, H = Hakim

Ternyata hanya terdapat 4 (empat) responden yang melihat masalah perlindungan korban ini sebagai bagian penting dalam fungsi tugas yang diembannya. Dan responden yang mengatakan demikian adalah hanya polisi dan jaksa. Hal ini dapat dimaklumi karena secara umum kedua pejabat inilah yang paling sering melakukan pemeriksaan di lapangan mengenai keadaan kasus yang sebenarnya. Sedangkan hakim pada umumnya hanya mengenal hal itu berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan saja, dan jarang sekali melakukan peninjauan lapangan.

Ketika terhadap 24 responden itu diminta untuk memilih satu jawaban yang paling penting diantara sembilan pilihan jawaban yang disediakan, hanya ada seorang polisi saja (4,16%) yang menjawab perlindungan korban sebagai bagian yang terpenting mereka dalam menegakkan hukum. Ini berarti bahwa *Polisi dipandang lebih peka terhadap aspek perlunya perlindungan korban, dibanding penegak hukum lainnya.*

Kemudian ketika kepada responden ditanyakan, apakah dia pernah membantu korban tindak pidana ketika sedang melaksanakan tugas, data menunjukkan bahwa :

Tabel .33

Pernah/Tidaknya Penegak Hukum Membantu Korban (n = 24)

No	Pernah/belum pernah	P	J	H	Jumlah	%
1.	Pernah melakukan	9	6	4	19	79,16
2.	Belum pernah	-	3	2	5	20,84

Kepada yang pernah melakukan upaya membantu korban lebih lanjut ditanyakan mengenai bentuknya. Hasil jawabannya adalah :

Tabel : 34

Bentuk/Macam Bantuan Yang Dilakukan Untuk Melindungi Korban (n = 24)

No	Bentuk bantuan	P	J	H	Jumlah	%
1.	Menyarankan pelaku tindak pidana untuk mengurangi penderitaan korban atau keluarganya.	3	4	1	8	33,33
2.	Menyarankan korban untuk meminta/ menuntut ganti rugi kepada pelaku	2	-	3	5	20,83
3.	Mempertemukan pelaku dengan korban untuk berunding	2	-	-	2	8,33
4.	Pelaku minta maaf kepada korban	-	2	-	2	8,33
5.	Korban agar hati-hati	-	3	-	3	12,5
6.	Tidak ingat	2	-	-	2	8,33

Pada tabel 32 diketahui terdapat lima responden yang merasa tidak/belum pernah melakukan tindakan untuk membantu korban tindak pidana 5 (lima) orang (20,84 %) ini beralasan bahwa membantu korban itu adalah bukan merupakan bagian dari tugasnya. Karena yang menjawab hal ini adalah jaksa dan hakim, bisa diasumsikan masih ada hakim dan jaksa yang ternyata tidak peduli terhadap aspek perlindungan korban. Hal ini sungguh cukup memprihatinkan.

Pada tabel 33 juga dapat diketahui bahwa bagi responden yang menjawab pernah memberikan bantuan perlindungan terhadap korban ini, semuanya hanya dalam bentuk bantuan moril, dan tidak satu pun yang memberikan bantuan materiil.

Selanjutnya bila tabel 33 ini dihubungkan dengan hasil data yang terdapat pada tabel 30, dapat ditarik sebuah analisis, bahwa: Permintaan menuntut umum atau penetapan/ perintah hakim untuk mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya/ korban, ternyata tidak dipandang sebagai bentuk langkah perlindungan korban. Padahal di dalam praktek, kembalinya barang yang hilang kepada pemiliknya ini dipastikan menjadi dambaan utama setiap korban yang mengalami musibah tindak pidana. Namun demikian persepsi penuntut umum atau hakim ini dapat dipahami karena dasar pembeda untuk melakukan tindakan mengembalikan barang kepada korban itu lebih dipandang sebagai konsekuensi pelaksanaan hukum, dibanding sebagai tindakan non yuridis yaitu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap penderitaan korban. Dengan demikian seandainya hal ini disadari sebagai bentuk perlindungan, maka hakimlah sebenarnya paling berjasa di

bidang perlindungan korban ini. Perbedaan pandangan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) di atas sebenarnya terjadi karena ketiga badan tersebut ternyata tidak berada dalam satu badan kehakiman, melainkan baru dalam satu badan peradilan. Jika ketiga lembaga tersebut terintegrasi dalam satu kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan bahwa perbedaan persepsi akan bisa diminimalisasi atau bahkan dihilangkan karena kekuasaan kehakiman mencakup keseluruhan proses pelaksanaan kekuasaan (menyidik, menuntut dan mengadili) yang terintegrasi (integrated criminal justice system). Karena itu Barda Nawawi Arief mengingatkan agar pengertian kekuasaan kehakiman tidak hanya ditafsirkan secara sempit yaitu sebagai kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970), tetapi dalam arti luas kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum.¹⁶⁰

C. Kebijakan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Mendatang

Membicarakan masalah perlindungan korban tindak pidana di dalam hukum pidana mendatang, berarti melakukan kajian terhadap kebijakan yang sama sekali belum pernah dilakukan, dan hal ini masih merupakan "ius constituendum". Kajian terhadap masalah perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan kritis dan alternatif yang memang seyogyanya dilakukan, karena menurut Barda Nawawi Arief, hal ini merupakan suatu keharusan agar hukum tidak lagi statis-dogmatis, dalam arti hanya berorientasi pada hukum pidana positif semata, hal ini merupakan ciri

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang, 2000), halaman 47-48

dari pola pikir lama yang dipandang dapat menghambat pengembangan/pembaharuan hukum pidana itu sendiri¹⁶¹.

Untuk melakukan kajian yang bersifat prospektif ini, akan dilakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap kondisi objektif persoalan perlindungan korban berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada sekarang (Hukum Positif), termasuk mengevaluasi berbagai bentuk pengalaman empirik (*in concreto*) yang dialami para penegak hukum dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan tersebut di atas.

Analisis terhadap persoalan yang bersifat "*Ius Constituendum*" tersebut sudah dilakukan, bahkan termasuk berbagai kajian teoritik yang membahas persoalan perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan (legislatif) hukum pidana yang ada.

Esensi dari analisis yang telah dilakukan, ternyata menghasilkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa Kebijakan legislatif hukum pidana sebagai bagian dari hukum positif yang ada, sebenarnya telah memperhatikan aspek perlindungan korban. Masalahnya adalah kebijakan tersebut pada umumnya masih bersifat tidak langsung (abstrak), meskipun beberapa kebijakan legislatif diantaranya telah memberikan perlindungan secara langsung, yaitu dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada korban yang bersangkutan.

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan Guru Besar, (Semarang, 1994), halaman 10.

Periksa Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Hukum dan Pengembangan Hukum*, (Semarang, 1998) halaman 104-105. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan "...sepanjang hukum pidana Indonesia belum mantap, bahkan masih merupakan "*Ius constituendum*" yang sedang dikaji dan dikembangkan, maka Ilmu Hukum Pidana (IHP) yang diajarkan seyogyanya tidak terlalu statis dan rutin. Tetapi juga harus dikembangkan kajian kritis dan alternatif".

2. Walaupun masalah ganti rugi ini sudah mendapat perhatian pembuat Undang-Undang, tetapi hal ini masih menjadi persoalan besar. Masalahnya adalah tidak/ belum adanya ketentuan yang jelas tentang mekanisme pembayaran ganti rugi itu sehingga hal ini menyulitkan bagi pihak korban, bahkan dapat dipandang sebagai “menambah penderitaan baru “ bagi korban yang bersangkutan.
3. Di dalam praktek peradilan sebenarnya telah ada langkah-langkah penegak hukum yang dimaksudkan untuk melindungi korban ini, tetapi hal ini dipandang bukan sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang, melainkan hanya sebagai pertimbangan kemanusiaan.
4. Paradigma baru melihat bahwa tindak pidana (kejahatan) tidak hanya penjelmaan konflik yang terjdiantara individu dengan negara, tetapi juga merupakan konflik interpersonal antar individu (pelaku-korban), karena itu penanggulangannya juga harus memperhatikan dua pilar ini, termasuk dalam rangka memberikan perhatian terhadap korban tindak pidana.
5. Terhadap persoalan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi terhadap korban, sebenarnya memang telah ada solusi untuk menyelesaikannya menurut KUHAP. Yaitu melalui Pasal 98 sebagai berikut :

Ayat 1 : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;

Ayat 2 : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Namun demikian pada kenyataannya jarang sekali hal ini dimanfaatkan oleh pihak korban. Apalagi jika pihak penegak hukum sendiri masih melihat bahwa upaya untuk melakukan hal itu bukanlah menjadi bagian dari tanggung jawabnya, melainkan menjadi urusan pihak korban sendiri. Karena itu persepsi penegak hukum yang demikian harus diubah, sehingga penegak hukum harus melihat bahwa di dalam proses peradilan pidana itu korban tidak hanya sekedar sebagai saksi yang secara pasif akan diminta keterangannya mengenai apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, melainkan harus dilihat pula bahwa ia (korban) adalah mereka atau pihak yang menderita dan banyak dirugikan oleh pelaku karena kejahatan yang menimpanya¹⁶². Oleh karena itu penegak hukum mempunyai kewajiban moral untuk mengupayakan agar kerugian moral atau materiil yang dialaminya itu bisa dipulihkan, sekaligus bersamaan dengan proses peradilan atas kejahatan tersebut¹⁶³. Jika hal ini bisa dilaksanakan diharapkan akan mulai ada kasus-kasus tindak pidana yang di dalam pemeriksaan terintegrasi sekaligus dengan tuntutan ganti rugi perdata sebagaimana yang diamanatkan KUHAP.

¹⁶² Andi Mattalatta, *Santunan Bagi Korban dalam Victimologi, Sebuah Bunga Rampai*, Sahettapy, (Jakarta, 1987), halaman 43-44.

¹⁶³ Dengan adanya upaya penggabungan perkara, tentunya dapat dihindari, cara melakukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata yang biasanya berbelit-belit, memerlukan waktu lama (karena kemungkinan upaya banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali). Itupun belum tentu dijamin keberhasilannya karena tidak ada lagi dukungan penegak hukum yang menangani perkara yang bersangkutan. Karena itu kepentingan korban harus mendapat prioritas pula bagi penyidik dan penuntut umum.

Permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan masih terbelenggunya kewenangan hakim untuk memutus perkara yang mengandung unsur gabungan perkara ini, karena hal ini dipandang tidak lazim dilakukan¹⁶⁴. Di samping itu jenis pidana yang dirumuskan Undang-Undang pada umumnya menganut sistem tunggal (absolut-imperatif) sehingga hal tersebut tidak memberikan kelonggaran yang dianggap paling tepat atau paling efektif bagi terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem ancaman tunggal, membuat hakim mau tidak mau terpaksa menjatuhkan pidana penjara, walaupun menurut hakim sebenarnya lebih baik atau lebih tepat apabila dijatuhkan jenis pidana yang lain, dilihat dari tujuan pemidanaan. Karena itu penjatuhan pidana yang demikian jelas bukan atas pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada pelaku (termasuk korban), tetapi hanya karena keterikatan dan "hormat"nya kepada Undang-Undang¹⁶⁵.

Adapun jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan dalam praktek adalah pidana penjara, di mana jenis pidana ini meliputi ± 81 % dari kasus pidana yang diputus oleh Pengadilan¹⁶⁶. Selebihnya merupakan pidana dalam bentuk lain, yaitu pidana mati, kurungan, pidana bersyarat, denda dan lain-lain. Yang jelas tidak dijumpai satupun putusan yang mengisyaratkan adanya pembayaran ganti rugi melalui putusan pengadilan, kecuali terhadap gugatan praperadilan menurut KUHP serta Delik di luar KUHP yang jumlah kasusnya amat kecil (bahkan tidak ditemukan dalam penelitian ini).

¹⁶⁴ Dari penelitian yang dilakukan terhadap 36 kasus perkara pidana, tidak satupun ada tuntutan ganti rugi yang diajukan pihak korban berdasarkan Pasal 98 KUHP ini, padahal semua korban yang mengalami kerugian selalu dijadikan saksi dalam perkara yang bersangkutan.

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Op-cit*, halaman 155

¹⁶⁶ *Ibid*, halaman 228, disimpulkan dari Tabel 4 hasil penelitian Barda Nawawi Arief.

Karena itu patut dipertimbangkan adanya gagasan Barda Nawawi Arief, agar kepada hakim tersebut diberikan pedoman atau kriteria penjatuhan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Pedoman pemidanaan ini oleh Barda Nawawi Arief dipandang sangat penting, jika penggunaan pidana penjara yang menduduki rangking tertinggi itu perlu dibatasi atau hanya diterapkan terhadap orang-orang tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu saja¹⁶⁷.

Mengenai pedoman pemidanaan ini, Rancangan KUHP baru memang telah mengakomodasikan walaupun tidak ada penegasan langsung tentang pedoman yang dimaksud. Hal ini bisa dilihat dalam Bab IV tentang Pemidanaan, pidana dan Tindakan. Misalnya bunyi Pasal 58 sebagai berikut:

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 69, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

¹⁶⁷ *Ibid*, halaman 142-143.

(3) Maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah denda menurut kategori V dengan minimum denda menurut kategori III

Dengan ketentuan di atas berarti ada kelonggaran bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain penjara, jika berdasarkan keyakinannya pidana penjara itu tidak tepat menurut pertimbangannya.

Sebenarnya ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh I. J Cy Shain yang dikutip Barda Nawawi Arief untuk tidak menjatuhkan pidana penjara¹⁶⁸, yaitu :

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat "profesional" juga tidak banyak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringankan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman ataupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korbannya) ;
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena ada provokasi dari korban ;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban;
6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa akan muncul lagi.

Bertitik tolak dari pendapat Shain di atas, masalah ganti rugi bagi pihak korban tampaknya sudah menjadi salah satu bagian penting yang harus

¹⁶⁸ *Ibid*, halaman 149

dipertimbangkan hakim untuk mengambil keputusan hukum. Jadi dengan kata lain Shain telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peran korban yang dalam masalah pidana ikut dilibatkan. Karena itu wajar bila masalah pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya ini kemudian menjadi salah satu hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam konteks pidana menurut rancangan KUHP baru mendatang¹⁶⁹.

Berkaitan dengan soal ganti rugi terhadap korban, ternyata Rancangan KUHP telah memasukkan hal ini sebagai jenis pidana tambahan. Ini menggambarkan bahwa masalah ganti rugi oleh pembuat Undang-Undang telah diakomodasikan sebagai bagian dari penjatuhan pidana kepada pelaku. Kebijakan demikian dapat dipandang sebagai langkah maju dibanding kebijakan pidana yang berlaku sekarang. Tetapi patut dipertanyakan, apakah di dalam prakteknya nanti tidak akan mengalami banyak kendala, sebab menurut Pasal 67 Rancangan KUHP baru, ketentuan pidana tambahan tersebut harus tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana¹⁷⁰.

Di dalam konsep KUHP 1999/2000, lebih lanjut ditegaskan bahwa tatacara pelaksanaan pidana ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri. Kemudian di dalam Pasal 66 huruf c dan d konsep KUHP 1999/2000 juga dinyatakan bahwa sejauh mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan. Apabila kerugian korban tidak terlalu besar atau jika terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban.

¹⁶⁹ Periksa Pasal 55 ayat (1) huruf I Rancangan KUHP, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun 1997/1998. Konsep KUHP 1999/2000 diubah menjadi Pasal 62 ayat (1) huruf d, Pasal 67 di atas dalam Konsep KUHP 1999/2000 diubah menjadi Pasal 62 ayat (2).

¹⁷⁰ Dengan penafsiran *Contradiction in terminis* (logika terbalik) mengandung makna bahwa jika masalah ganti rugi ini tidak dirumuskan, artinya tidak bisa dijatuhkan sebagai putusan pidana tambahan oleh hakim

Di dalam Pasal 92 konsep KUHP 1999/2000 juga dinyatakan bahwa pihak pembayar ganti rugi ini pada dasarnya tidak hanya dikenakan terhadap pelakunya saja, tetapi juga terhadap ahli warisnya. Sedangkan bila pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk denda, yaitu :

1. Diganti dengan kekayaan/pendapatan terpidana (Pasal 76 ayat 2)
2. Diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pidana pengawasan atau pidana penjara maksimum satu tahun (Pasal 76 ayat 4).

Pasal 124 d konsep KUHP 1999/2000 juga menegaskan bahwa pemberian ganti rugi yang layak atau perbaikan kerusakan secara suka rela akibat tindak pidana dapat menjadikan faktor-faktor yang memperingan pidana yang hendak dijatuhkan hakim.

Selanjutnya jika ditelaah kembali hasil penelitian terhadap 112 Undang-Undang sebagai tampak hasilnya dalam tabel 22 dan 23 di muka, terlihat bahwa telah ada kecenderungan dari pembuat Undang-Undang yang bersangkutan untuk memperhatikan masalah ganti rugi bagi korban di dalam menyusun Undang-Undang. Tetapi ketentuan ganti rugi tersebut tidak tercantum langsung sebagai bagian dari rumusan delik, melainkan hanya diatur dalam Pasal-Pasal tersendiri di luar ketentuan pidana. Dengan demikian jika Pasal 67 Rancangan ini nantinya diberlakukan sebagai pedoman pemidanaan secara umum (sebagai Ketentuan Umum) hal ini jelas akan menyulitkan penegak hukum dalam kemungkinannya menetapkan pidana tambahan ganti rugi. Karena itu harus dipikirkan sungguh-sungguh

agar ketentuan Pasal 67 Rancangan KUHP ini jangan sampai menghambat proses penjatuhan pidana tambahan bagi hakim, yang pada muaranya justru menambah sulitnya pihak korban untuk memperoleh ganti rugi yang dimaksud. Padahal hak untuk mendapatkan ganti rugi, tampaknya sudah merupakan *keinginan* kuat yang didambakan korban, yaitu sesuai hasil survey yang dilakukan terhadap 80 korban, sebagaimana tampak dalam tabel berikut

Tabel 35

Jawaban korban tindak pidana jika diberi ganti rugi

(n = 80)

No	Variasi jawaban	Jumlah	%
1.	Setuju	59	73,75
2.	Tidak setuju	20	25,00
3.	Tidak tahu	1	1,25
	Jumlah	80	100

Mengenai mengapa para korban sebagian setuju jika kepadanya diberikan ganti rugi, dapat dilihat dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya, yaitu : Apakah Anda (responden) pernah memperoleh imbalan sesuatu dari pelaku yang pada intinya bertujuan untuk meringankan penderitaan yang Anda alami pada waktu itu ? Ternyata hanya ada 11 (13,75%) responden yang menjawab pernah, sedangkan 69 (86,25) selebihnya mengatakan belum atau tidak pernah menerima imbalan (ganti rugi) yang dimaksud. Jadi karena pihak pelaku yang telah melakukan tindak pidana itu sebagian besar tidak memberikan/ mempedulikan korbannya, maka wajar bila sebagian korban itu menginginkan adanya ganti rugi tersebut.

Terhadap responden yang tidak setuju diberikan ganti rugi, alasan mereka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 36

Alasan Tidak Setuju Diberi Ganti Rugi (n = 20)

No	Variasi jawaban	Jumlah	%
1.	Tidak mengurangi penderitaan korban	2	10,00
2.	Putusan Pengadilan sudah adil	2	15,00
3.	Penderitaan korban tidak bisa diganti	2	10,00
4.	Membuat pelaku tidak jera	2	10,00
5.	Pelaku biasanya tidak mampu	2	10,00
6.	Yang tepat hanya penjara	2	10,00
7.	Korban sudah ikhlas	3	15,00
8.	Barang bukti sudah kembali	3	15,00
9.	Jika tidak melalui putusan pengadilan	2	10,00

Catatan : satu responden dapat memberikan lebih dari satu jawaban.

Melihat frekuensi jawaban demikian, berarti tidak ada kecenderungan mendasar yang menjadi alasan kuat (modus) yang perlu diperhatikan, apalagi jawaban responden tersebut relatif heterogin¹⁷¹.

Selanjutnya mengenai siapa yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana, maka berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan, terdapat dua pihak yang dipandang patut untuk membayar ganti rugi atau apapun namanya. Keduanya yaitu negara dan pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai peran negara sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, kelihatannya memang cukup beralasan, karena di samping negara dipandang tidak mampu melindungi korban sebagai bagian dari warga negara (gagal), negaralah yang memang memiliki fasilitas-

¹⁷¹ Supranto J, *Statistik Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, 1988) halaman 96.

fasilitas pelayanan umum. Fasilitas dimaksud tentunya termasuk pendanaan, yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya hasil dari pemasukan pembayaran denda dari para terpidana yang seharusnya pantas dipergunakan untuk memberikan santunan kepada korban.

Indonesia memang sudah termasuk negara yang mengakomodir santunan ganti rugi untuk korban. Tetapi aturan tentang hal ini (KUHP dan aturan pelaksanaannya) terlihat belum memenuhi harapan berbagai pihak yang menghendaki pembayaran ganti rugi oleh negara. Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 7 ditegaskan.

- (1) Tuntutan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Dalam hal tuntutan ganti rugi tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (bulan) dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah di atas, dapat diketahui bahwa negara (Indonesia) ternyata hanya melayani dua kelompok korban saja yaitu :

1. Kelompok korban yang merasa dirugikan akibat tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan.

Kemungkinan kelompok ini adalah: Pihak Penuntut umum; pihak Tersangka; atau pihak korban. Tetapi sebenarnya juga bisa

pihak lain yang merasa kecewa atas penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 77 KUHAP tersebut.

2. Kelompok korban yang dirugikan akibat ditangkap, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya.

Tetapi apabila melihat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tatacara Pembayaran Ganti Kerugian, tampak bahwa proses pembayaran ganti rugi yang dimaksud terkesan sangat menyulitkan para korban yang nota bene telah dinenangkan perkaranya. Birokrasi yang berbelit-belit sangat tampak dalam Surat Keputusan menteri negara tersebut, karena banyaknya instansi yang harus dilibatkan dalam pencairan dana yang dimohonkan seperti: Ketua Pengadilan Negeri; Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman; Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan; di samping Kantor Perbendaharaan negara setempat¹⁷².

Birokrasi yang berbelit-belit itu tentunya membuat penderitaan tersendiri bagi korban yang bersangkutan. Padahal untuk ukuran sekarang, maksimum besarnya ganti rugi yang hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika tidak mengakibatkan cacat dan hanya maksimum sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika tindakan itu mengakibatkan cacat atau mati dapat dikatakan tidak lagi sebanding dengan tenaga dan pikiran yang mereka curahkan untuk mendapatkan ganti rugi tersebut.

¹⁷² Periksa Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi.

Jika untuk mendapatkan ganti rugi pada negara yang telah nyata-nyata menjadi haknya saja sudah sedemikian sulitnya, bagaimana korban dapat menuntut ganti rugi di luar itu, yaitu ganti rugi (kompensasi) yang dilihat dari aspek pertanggungjawaban negara sebagai pengayom masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Mainers¹⁷³.

Karena itu tanggung jawab pemberian ganti rugi oleh negara mendatang seharusnya dipermudah/disederhanakan, bahkan jika perlu diperluas, tidak hanya terhadap ganti rugi praperadilan saja tetapi terhadap ganti rugi atas penderitaan korban akibat kejahatan yang menimpa secara luas.

Mengenai pembayaran kompensasi oleh negara-seperti telah disinggung di muka- telah banyak dilakukan oleh berbagai negara. Kecuali Selandia Baru, Inggris, Swiss dan Amerika, tercatat pula negara lain seperti Australia, Belanda, Jepang, Norwegia, Jerman, Kanada, Perancis dan Pakistan. Bahkan di Perancis dan Dominika ada ketentuan yang memaksa terhadap terpidana untuk memberikan ganti rugi kepada korban mereka¹⁷⁴.

Terhadap kemungkinan pemberian ganti rugi oleh negara, maka perlu diperhatikan pula sebuah draft mengenai Declaration On Justice And Assistance for Victim yang telah menjadi Resolusi PBB Nomor 40/34 sebagai berikut¹⁷⁵ :

¹⁷³ Mainers mengatakan : "The duty of state to protect citizenz, the inadequacy of civil remedies for crime victimes, the inequities of the income distribution, and the sociological view that crime is the fault of society in general.

Lihat Andi Mattalatta, *Op-cit*, halaman 38.

¹⁷⁴ Arief Gosita, KUHP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban, Dalam *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, *Op-Cit*, halaman 76.

¹⁷⁵ *Ibid*, halaman 77

1. In State where general social insurance programmes are insufficient, the state should establish compensation programmes to assist victims who because of offenders lack of means or for other reason are unable to receive reparation from them.
2. State compensation should include financial awards for physical and mental injury, loss of income, rehabilitation and funeral expenses.
3. State compensation should be provided promptly and in an amount comparable to social assistance available to those suffering similar misfortunes. In appropriate cases, state compensation may be provided to victims on an interim basis before finalisation of criminal proceedings.
4. International funds, such as the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, should be strengthened and their dependents.
5. Certain states have assumed responsibility for collective victimization and have consequently established compensation programmes, where appropriate, other states should draw of their experience.

Dengan diterimanya draft tersebut, yang penting adalah komitmen dari negara masing-masing untuk memperhatikan ketentuan tersebut dan untuk kemudian melaksanakannya sebagai ketentuan hukum di negaranya. Tetapi bila kemampuan negara memang terbatas, paling tidak ada kebijakan mendasar dalam bentuk kebijakan legislatif yang menekankan pihak pelaku tindak pidana untuk membayar/ memberikan ganti rugi kepada korbannya, tidak secara pasif seperti yang telah diatur dalam pasal 98 KUHP di atas, tetapi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku seiring dengan proses peradilan yang sedang berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jika ganti rugi itu harus dibayar, maka pelakulah yang paling bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi tersebut. Data tentang hal ini bisa dilihat hasil survey dalam tabel 36 sebagai berikut :

Tabel 37

Pihak Yang Bertanggung jawab Membayar Ganti Rugi Korban (n = 80)

No	Yang bertanggung jawab	Jumlah	%
1	Pelaku tindak pidana	64	80,00
2	Negara	2	2,50
3	Tidak tahu/tidak setuju	14	17,50

Alasan responden membebankan ganti rugi kepada pelaku dapat dilihat dalam tabel 37 berikut ini:

Tabel 38

Alasan Setuju Yang Membayar Ganti Rugi Adalah Pelaku (n = 64)

No	Variabel alasan	Jumlah	%
1	Pelaku berbuat, pelaku yang bertanggung jawab	41	64,06
2	Pelaku yang merugikan korban	6	9,37
3	Pelaku yang menikmati hasil	3	4,68
4	Pelaku biar jera	2	3,12
5	Negara tidak perlu terlibat	2	3,12
6	Pelakunya dari keluarga mampu	1	1,56
7	Tidak tahu/tidak menjawab	9	14,06

Persepsi korban yang demikian menggambarkan bahwa pengaruh model pertanggung jawaban terbatas ternyata masih sangat besar di dalam aspek pembedaan, dan ini merupakan salah satu ciri dari pemikiran klasik yang masih banyak dipakai hingga saat ini.

Menurut sebagian besar para korban, jika ganti rugi dibayar pelaku, maka sebaiknya hal itu dilakukan melalui proses peradilan. Hal ini tampak dalam tabel berikut :

Tabel 39
Pendapat Korban Terhadap Cara Pembayaran Ganti Rugi (n = 64)

No	Jawaban Responden	Jumlah	%
1	Bisa dilakukan di luar pengadilan	17	26,56
2	Harus melalui putusan pengadilan	38	59,37
3	Tidal: tahu/terserah	9	14,06

Data ini menggambarkan bahwa sebenarnya pihak korban masih menaruh harapan besar kepada institusi hukum sebagai lembaga yang bisa memberikan pengayoman dan rasa keadilan bagi mereka. Tetapi hal ini juga mengandung isyarat agar pihak penegak hukum memperhatikan sungguh-sungguh komitmennya untuk membantu korban untuk memperoleh ganti rugi tersebut, sesuai prosedur hukum yang ada. Karena itu sikap profesionalisme penegak hukum serta kepekaannya terhadap penderitaan korban sangat diharapkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Mengenai bagaimanakah persepsi korban bila seandainya pelaku telah memenuhi pembayaran ganti rugi kepadanya?

Tabel 39 memberikan data sebagai berikut:

Tabel 40
Persepsi Korban Terhadap Ganti Rugi Yang Diberikan Pelaku (n = 80)

No	Persepsi Korban	Jumlah	%
1	Bisa menyelesaikan urusan pidananya dan pelaku tidak perlu dihukum	28	35,00
2	Urusan tetap dilanjutkan dan pelaku juga dipidana	20	25,00
3	Ganti rugi hanya sebagai faktor meringankan hukuman	29	36,25
4	Tidak tahu	3	3,75

Dari data di atas, ternyata 35% korban berpandangan bahwa seakan-akan masalah pidana itu sebagaimana halnya dengan masalah perdata, yaitu sebagai hubungan interpersonal antara pelaku-korban. Urusan di antara keduanya bisa dianggap selesai jika kedua belah pihak telah menyelesaikan sendiri konflik itu, yaitu dengan telah diberikannya ganti rugi kepada korban atas kejahatan yang menimpanya. Tetapi lebih lanjut data menunjukkan bahwa yang menjawab atau berpandangan demikian ternyata sebagian besar adalah korban yang terkena tindak pidana harta benda, yang meliputi 85,71% dari mereka yang setuju demikian. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk kejahatan terhadap harta benda, para korban sangat mengharapkan adanya ganti rugi dari pelaku. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden nomor 3 yang meliputi 36,25% dari korban, yang menghendaki bahwa ganti rugi hanyalah sebagai hal yang meringankan hukuman terhadap pelaku. Mereka yang mengatakan demikian 24 responden (82,75%) di antaranya juga merupakan korban yang kehilangan harta benda.

Dalam penelitian ini ada 18 responden (22,5%) yang terkena kejahatan terhadap selain harta benda¹⁷⁶. Jawaban mereka bila pelaku memenuhi ganti rugi kepadanya adalah sebagai berikut :

¹⁷⁶ Tindak pidana ini meliputi :

- Penganiayaan = 6
- Pembunuhan = 3
- Lalulintas = 3
- Narkoba = 2
- Senjata tajam = 1
- Kesusilaan = 1

Tabel 41
Persepsi Korban Bukan Kejahatan Harta Benda Terhadap Ganti Rugi
Yang Diberikan Pelaku (n = 18)

No	Persepsi Korban	Jumlah	%
1	Bisa menyelesaikan urusan pidananya dan pelaku tidak perlu dihukum	4	22,22
2	Urusan tetap dilanjutkan dan pelaku tetap dipidana	6	33,33
3	Ganti rugi hanya sebagai faktor meringankan	8	44,44
4	Tidak tahu	-	-

Jawaban di atas (tabel 40) masih tetap menggambarkan bahwa para korban kejahatan bukan harta bendapun juga mengharap agar pelaku dapat memberikan ganti rugi kepada korbannya, meskipun mereka yang menghendaki hal ini jumlahnya relatif lebih kecil dibanding para korban yang mengalami kejahatan terhadap harta benda.

Atas dasar temuan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat korban kejahatan sangat mengharapkan perhatian pelaku tindak pidana agar terhadap kejahatan yang dialaminya itu diberikan kompensasi atau ganti rugi. Pengaturan hal ini hendaknya jelas dasar hukumnya sehingga mempermudah cara memperolehnya. Selanjutnya untuk menjamin kepastian tentang ganti rugi ini, para korban menghendaki agar keputusan tentang hal itu terintegrasi langsung dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang bersangkutan, dan bukan melalui upaya hukum lainnya.

Inilah temuan penting yang patut mendapat perhatian di dalam menentukan kebijakan legislatif hukum pidana untuk masa yang akan

datang, sehingga dengan demikian tidak dijumpai suatu “kekosongan hukum” sebagaimana yang digambarkan oleh Paul Scholten, sebagai akibat dari dijalankannya hukum dengan “sistem tertutup” yang ingin menjaga “kemurnian” suatu hukum. Menurut Paul Scholten, sistem tertutup dari hukum ini harus ditinggalkan, dalam arti hukum harus menganut sistem terbuka. Hukum harus melihat pada sistem perundang-undangan yang ada, tetapi juga harus memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya¹⁷⁷. Jika sistem terbuka ini dipakai, maka wewenang hakim untuk melakukan interpretasi akan menjadi tidak masalah, karena kekosongan hukum yang digambarkan itu tidak akan terjadi. Dalam hal ini Satjipto Raharjo menggambarkan adanya sebuah lembaga yang lebih dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System yaitu yang disebut lembaga “Preseden”. Salah satu esensi dari doktrin preseden adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu dikembangkan dalam proses penerapannya melalui karya-karya dari keputusan para hakim, dan bukan dari para ahli hukum lain¹⁷⁸. Jika lembaga preseden ini bisa diterapkan di Indonesia, maka hal ini bisa menghilangkan sifat kekakuan hukum yang ada, dan bahkan dapat memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan terobosan baru melalui pengembangan interpretasi terhadap aturan hukum yang ada. Lembaga preseden paling tidak juga bisa menjadi “katub pengaman” dalam mengantisipasi bentuk bentuk kejahatan baru yang dewasa ini terus berkembang dan memerlukan perhatian serius cara penanggulangannya.

¹⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang, 1982), halaman 136-137.

¹⁷⁸ *Ibid*, halaman 144.

Namun demikian bila sistem terbuka seperti adanya lembaga preseden yang dipakai negara-negara Anglo Saxon tidak bisa diterapkan, yang penting adalah mencoba mengurangi sifat kekakuan hukum yang ada selama ini. Jika hal ini tidak dilakukan, tidak mustahil masalah perlindungan korban ini hanya akan menjadi pembicaraan di seminar-seminar saja, tetapi tidak pernah tampak di dalam aplikasi hukumnya, berhubung persoalan tersebut dipandang belum diatur oleh Undang-Undang.

Jika belenggu sistem tertutup ini masih dipertahankan, maka yang paling mendesak adalah perlu segera dibahasnya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang kini sudah di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang penting dalam pembahasan tersebut ada penyempurnaan kosep tentang pedoman pidana yang memberikan kelonggaran bagi hakim untuk menjatuhkan pidana ganti rugi, walaupun hal itu tidak dirumuskan dalam delik. Hal ini perlu dibuat untuk mengantisipasi berbagai perundang-undangan yang memuat aturan pidana, tetapi di dalamnya belum ditentukan klausul tentang kewajiban memberikan ganti rugi atau rehabilitasi kepada para korban, khususnya korban yang bersifat individual. Jika hal inipun tidak memungkinkan maka patut dipikirkan kemungkinan adanya Undang-Undang Perlindungan Korban Kejahatan, yang di dalamnya mengatur hak-hak korban kejahatan beserta cara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya itu. Inilah yang mendesak untuk dipikirkan untuk menjamin perlindungan korban tindak pidana saat ini maupun yang akan datang.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kristalisasi Hasil Penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai tiga hal, pertama adalah mencakup tinjauan terhadap aspek perlindungan korban tindak pidana di dalam kebijakan formulasi (legislatif) hukum pidana, kedua mencakup tinjauan terhadap kebijakan aplikatif di bidang perlindungan korban, dan yang ketiga berupa kajian terhadap kebijakan yang bersifat prospektif, yaitu dalam rangka memproyeksikan kebijakan hukum pidana di bidang perlindungan korban di masa mendatang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Telah ada kecenderungan yang signifikan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir ini aspek perlindungan korban tindak pidana mendapat perhatian dari pihak pembuat Undang-Undang. Masalahnya perlindungan tersebut adalah masih bersifat abstrak atau tidak langsung, beberapa (sebagian kecil) Undang-Undang telah memberikan perlindungan yang bersifat langsung, tidak didukung dengan instrumen pelaksanaan yang memadai, sehingga hal ini belum dirasakan masyarakat korban sebagai “bentuk” perlindungan dalam arti yang sesungguhnya. Asumsi ini diperkuat dengan temuan-temuan sebagai berikut:

- a. sebagian besar Undang-Undang yang dibuat badan legislatif telah merumuskan berbagai ketentuan pidana untuk perbuatan-perbuatan tertentu dengan ancaman pidananya, bahkan beberapa Undang-Undang diantaranya telah merumuskan mengenai kewajiban membayar kerugian akibat kejahatan yang dilakukannya. Tetapi mengenai siapa dan bagaimana untuk mendapatkan ganti rugi tersebut Undang-Undang tidak mengaturnya secara tegas.
- b. Belum adanya kebijakan pembuat Undang-Undang yang memuat ketentuan tentang pedoman pemidanaan, yang bisa digunakan dalam kebijakan aplikatif oleh hakim untuk menentukan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana, termasuk kemungkinan menjatuhkan pidana ganti rugi yang saat ini belum begitu banyak dikenal.
- c. Walaupun ada kemungkinan melakukan tuntutan ganti rugi bagi korban dalam bentuk penggabungan dengan perkara pidana yang dibenarkan Undang-Undang, tetapi hal ini jarang terjadi dilakukan, bahkan dalam penelitian yang dilakukan tidak ditemui kasusnya. Hal ini terjadi karena sosialisasi adanya peluang untuk ini tidak ada, di samping masih adanya fakta bahwa hal itu memang di pandang tidak lazim dilakukan.

2. Ternyata hanya sedikit jumlah perkara pidana yang di dalam pelaksanaannya telah memperhatikan aspek perlindungan korban. Asumsi ini didukung dengan temuan-temuan yang antara lain berupa :
 - a. Tindak pidana yang paling banyak diperiksa pengadilan adalah pelanggaran terhadap kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), padahal KUHP ini tidak mengenal pemberian pidana ganti rugi yang pada hakikatnya merupakan esensi dari asas perlindungan korban ini.
 - b. Berbagai langkah yang dilakukan penegak hukum yang bertujuan melindungi korban pada umumnya bukan karena konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang, tetapi lebih banyak didasarkan pada aspek pertimbangan moral semata.
 - c. Para penegak hukum sebagian besar berpendapat bahwa upaya perlindungan korban bukan menjadi bagian penting dari tujuan pemidanaan, melainkan hanya dipandang sebagai salah satu tugas tambahan dari tugas utama mereka yaitu menegakkan hukum.
3. Bahwa kebijakan hukum pidana mendatang ternyata banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial dari pandangan yang bersifat publik kepada pandangan yang bersifat privat (pandangan yang menitikberatkan urusan kemasyarakatan ke arah individual). Urusan

publik ternyata belakangan ini makin bergeser ke arah urusan yang mengarah pada hubungan orang per orang (interpersonal). Jadi dalam dua dasawarsa terakhir perhatian terhadap peran korban secara individual mulai mendapat perhatian.

Banyak negara telah melaksanakan kebijakan perlindungan korban sebagai aktualisasi pengakuan hak individu, dengan menyediakan anggaran untuk ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya. Masyarakat korbanpun ternyata sangat mendambakan ganti rugi atas penderitaan tersebut. Ganti rugi ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik antara pelaku/ korban serta bisa dijadikan dasar untuk memperingan hukuman.

Konsep KUHP baru juga telah mengakomodir masalah ganti rugi ini sebagai pidana tambahan. Masalahnya konsep belum merumuskan ganti rugi ini di dalam rumusan delik sehingga hal ini dipandang masih bermasalah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan berbagai hasil temuan penelitian sebagaimana diuraikan menurut kesimpulan di atas, serta setelah mengkaji pokok permasalahan ketiga tentang proyeksi kebijakan hukum pidana di masa mendatang, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Yang berkaitan dengan penentuan kebijakan legislatif hukum pidana.
 - a. Setiap pembuatan produk perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana mencantumkan secara tegas asas perlindungan korban ini sebagai salah satu alasan penting disusunnya Undang-Undang tersebut

Asas perlindungan korban ini untuk kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal yang tercantum di dalamnya secara jelas dan tuntas. Selanjutnya di dalam merumuskan ketentuan pidana, maka di sana secara tegas dicantumkan pidana ganti rugi, di samping pidana pokok lainnya.
 - b. Dalam menyusun kebijakan hukum pidana melalui undang-undang sangat perlu dirumuskan semacam pedoman pemidanaan yang secara lengkap mengatur dipenuhinya hak-hak korban oleh pelaku melalui putusan pengadilan yang hendak dijatuhkan.
 - c. Kebijakan legislatif hukum pidana hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga para korban betul-betul dijamin haknya dan tidak mengalami kesulitan ketika menuntut hak-haknya. Salah satu jalan keluarnya adalah memperbesar pemberian akses ganti rugi oleh negara dengan prosedur cepat dan mudah.
2. Yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana dalam rangka perlindungan korban oleh penegak hukum.
 - a. Perlu ada usaha untuk meningkatkan kepekaan aparat penegak hukum terhadap pentingnya aspek perlindungan korban kejahatan, termasuk pemahaman mereka terhadap berbagai Undang-Undang yang sebenarnya telah mengatur masalah perlindungan korban ini.

- b. Penegak hukum hendaknya melibatkan secara aktif peran korban tindak pidana sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan, termasuk hak mereka untuk menuntut ganti rugi atas kejahatan yang dialaminya melalui penggabungan perkara menurut KUHAP. Meskipun hal ini dimungkinkan tetapi dalam praktek hampir tidak pernah dilaksanakan.
 - c. Perlu terus dikembangkan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban oleh penegak hukum, meskipun bukan sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai hal ini dapat dipandang sebagai terobosan dalam membantu meringankan penderitaan korban.
3. Yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan korban di masa yang akan datang
- a. Kebijakan hukum pidana mendatang hendaknya lebih berorientasi pada pemberian perlindungan maksimal terhadap korban kejahatan khususnya dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru.
 - b. Kebijakan hukum pidana mendatang di samping harus menjamin adanya pemberian ganti rugi, perlu juga memperhatikan pemberian kompensasi dalam bentuk lain yaitu rehabilitasi atau jaminan-jaminan yang bersifat material lainnya. Ganti rugi tersebut (di sini termasuk rehabilitasi dan sejenisnya) hendaknya ditentukan secara tegas dalam bentuk pidana pokok, bukan sebagai Sanksi pidana tambahan.

Pembentukan *Undang-undang perlindungan korban* tampaknya mendesak untuk dibuat guna menjawab segala permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana di bidang perlindungan korban ini.

- c. Kebijakan hukum pidana mendatang hendaknya tidak terlalu kaku (absolut). Tetapi perlu dicari terobosan baru yang memungkinkan hakim bisa lebih leluasa di dalam menentukan keputusan, sesuai dengan keadilan berdasarkan realitas yang ditemukan selama persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1996
- Arthur J. Lurigio, Robert C. Davis, Wesley G. Skogen, *Victim of Crime*, London, Sage Publication, 1997.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989
- Departemen Kehakiman RI, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Konsep, 1997-1998
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Konsep, 1999-2000
- Dirdjo Sisworo, Soedjono, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (terjemahan dari karya Hulsman), Jakarta, Rajawali, 1984
- Drapkin, Israel & Emilo C. Viano, *Victimology*, Lexington: Lexington Book, De Health Company, 1974.
- _____, *Victimology a New Focus*, Lexington Book, De Health Company, 1984
- Gosita, Arief, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademika Presindo, 1987.
- _____, *Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Gullota, Guggleilmo, *The Offender – Victim System dalam Victims and Society*, Emilio Viano, Washington DC, Visage Press Inc, 1976.
- Hanitijo Sumitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Hardja Soemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada, University Press, 1994.

Hermidi, Budi, *Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Tesis S-2, Semarang, Universitas Diponegoro, 1996.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1992, Jakarta, CV. Eka Jaya, 1993.

_____, Tahun 1994, Jakarta, CV. Eka Jaya, 1995.

_____, Tahun 1995, Jakarta, CV. Eka Jaya, 1996.

_____, Tahun 1996, Jilid I, Jakarta, CV. Eka Jaya, 1997.

_____, Tahun 1996, Jilid II, Jakarta, CV. Eka Jaya, 1997.

_____, Tahun 1997, Jakarta, CV. Eka Jaya, 1998.

_____, Tahun 1998, Jilid I, Jakarta, CV. Eka Jaya, 1999.

_____, Tahun 1998, Jilid II, Jakarta, CV. Eka Jaya, 1999.

_____, Tahun 1999, Jilid I, Jakarta, CV. Eka Jaya, 2000.

_____, Tahun 1999, Jilid II, Jakarta, CV. Eka Jaya, 2000.

_____, Tahun 1999, Jilid III, Jakarta, CV. Eka Jaya, 2000.

Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991

Harian Umum Kedaulatan Rakyat, *Mahuku Masih Bergolak*, edisi 27 Januari 2000

Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta, 1971.

Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lahu Lintas Jalan*, Yogyakarta, UGM tidak dipublikasikan, 1995

_____, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana*, Purwokerto, UNSOED, Pidato Guru Besar, 2000

Kurt Weis, David Lewis Smith, *Toward an Open System Approach to Studies in the Field of Criminology, dalam Victim and Society*, Washington DC, Visage Press Inc, 1976.

Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1980, Jakarta, Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1981.

_____, Tahun 1981, Jakarta, Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1982.

_____, Tahun 1982, Jakarta, Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1983.

_____, Tahun 1983, Jakarta, Sekretariat Negara, 1984.

_____, Tahun 1984, Jakarta, Sekretariat Negara, 1985.

_____, Tahun 1985, Jakarta, Sekretariat Negara, 1986.

_____, Tahun 1986, Jakarta, Sekretariat Negara, 1987.

_____, Tahun 1987, Jakarta, Sekretariat Negara, 1988.

_____, Tahun 1988, Jakarta, Sekretariat Negara, 1989.

_____, Tahun 1989, Jakarta, Sekretariat Negara, 1990.

_____, Tahun 1990, Jakarta, Sekretariat Negara, 1991.

_____, Tahun 1991, Jakarta, Sekretariat Negara, 1992.

_____, Tahun 1993, Jakarta, Sekretariat Negara, 1994.

Mac Namara, Dona and John, J. Sullivan, *Composition, Restitution, Compensation Making The Victim Whole dalam Criminology*, by Emilio Viano-Israel Drapkin, Lexington Book, London DC, Health and Company, 1975

Mertokusumo, Sutikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1991

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia di Masa Mendatang*, Semarang, Pidato Guru Besar UNDIP, 1990

- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994
- _____, *Pengaruh Gerakan Abolisionisme Terhadap Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994
- _____, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994
- Morazawa Hiedemichi, *Peninjauan Kembali Terhadap Kejahatan dan Korporasi*, Jakarta, Pusataka Sinar Harapan, 1987
- Naisbith, John, Patria Aburdene, *Megatrend 2000, the New Direction For The 1990s*, New York, 1990
- _____, *Global Paradox*, Alih Bahasa Budianto, Jakarta, Bina Aksara, 1994
- Nasroen, *Asal Mula Negara*, Jakarta, Akasara Baru, 1986
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Semarang, UNDIP, 1990
- _____, *Kebijakan Kriminal*, Semarang, UNDIP, 1990
- _____, Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, UNDIP, 1992
- _____, Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994
- _____, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana*, Semarang, Pidato Guru Besar UNDIP, 1994
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998

- _____, *Masalah Penegakkan Hukum dan Penaggulangan Kejahatan*, Semarang, UNDIP, 2000
- Ngani Nico, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995
- N. Engker, Arnold, *A Comparative, Review of Compensation for Victims of Crime*, dalam Emilio Viano *Criminology*, Lexington, London, 1974
- Ninth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*, Draft Resolution No. A/Conf. 169/L.10, Cairo, 1995.
- Prins, Darwan, *Praperadilan dan Perkembangannya Dalam Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Pramono, Widyono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Rais, Amin, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Surabaya, Usaha Nasional, 1989
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982
- Reksodiputro, Marjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, 1994
- Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Saleh, Ruslan, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, non penerbit, Jakarta, 1994
- Salim, Agus, *Bangunan Teori Penelitian Kualitatif*, Semarang, bahan penataran Kopertis Wilayah VI, 1992
- Schafer, Stephen, *The Victim and His Criminal*, New York, Random House, 1968
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990
- Soekanto, Soeryono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983
- _____, Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1985
- Suriasumantri, S. Jujun, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994

- Susanto, IS, *Kriminologi*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995
- _____, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995
- Sukmajaya, Rozi Yusuf, *Indeks Al Qur'an*, Bandung, Pustaka, 1984
- Sugandi, *KUHP Dengan Penjelasan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980
- Sularto, RB, *Persepsi Masyarakat Tentang Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan*, Semarang, UNDIP, 1997
- Sutami, Sili, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Eresco, 1992
- Tofler, Alfin, *Pergeseran Kekuasaan*, Alih Bahasa Hermawan Sulistiyo, Jakarta, Panca Simpati, 1997
- Tabloid Nova, *Keluarga Yustiana Mencari Keadilan*, edisi 18 Maret 2001
- UNICRI *Fact Sheet*. Dalam Seminar Kriminologi ke IV, Semarang, UNDIP, 1995
- Von Hentig Hans, *Remark on the Interaction of Perpetrator and Victim*, dalam *Victimology*, by Emilio Viano, Lexington Book, Health DC and Company, 1975.
- Gosita, Arief, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta, Akademika Presindo, 1987.
- Tempo, *Investigasi Skandal BRI*, Jakarta, 1999
- Tenth United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*, Draft Resolution No. A/Conf.187/6, Viena, 2000
- Tenth United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*, Draft Resolution No. A/Conf.187/9, Viena, 2000
- Tenth United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*, Draft Resolution No. A/Conf.187/10, Viena, 2000
- Tim Penyusun Fakultas Sastra UNDIP, *Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa*, Semarang, 1994
- Tim Relawan untuk Kemanusiaan, *Sujud di hadapan Korban*, Jakarta, 1998

